

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

2016

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN



STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2016

**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jakarta, Agustus 2017

STATISTIK

BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

TAHUN 2016

Penyusun & Penyunting:
Subbagian Data dan Informasi
Bagian Program dan Evaluasi
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Desain sampul & layout:
Tenang Carles Rinaldi Silitonga, S.Komp.

Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lantai 7, Cq. Bagian Program dan Evaluasi
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp/Fax: (021) 5730289/ (021) 5734632
Email: datainformasi.planologi@gmail.com



Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Statistik Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016 ini merupakan penerbitan lanjutan dari Buku Statistik Planologi Kehutanan tahun sebelumnya yang disusun berdasarkan hasil kompilasi data dari Unit Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sampai dengan 31 Desember 2016. Adapun acuan dalam penyusunan buku Statistik ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk Buku Statistik Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2016.

Kami menyadari bahwa dalam Buku Statistik ini masih banyak kekurangan, namun harapan kami semoga Buku Statistik ini dapat memberikan manfaat terutama bagi yang berkepentingan.

Jakarta, Agustus 2017

PLT. DIREKTUR JENDERAL



**Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc.
NIP.19581030 198203 1 004**

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN	
TABEL I.1 REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2015 (Ribu Ha)	1
TABEL I.2 REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2016 (Ribu Ha)	10
TABEL I.3 ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2014 - 2015 (Ha/Th)	20
TABEL I.4 ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2015 - 2016 (Ha/Th)	32
TABEL I.5 POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA	44
II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	
TABEL II.1 PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN HUTAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016.....	47
TABEL II.2 PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP PER DESEMBER 2016.....	50
TABEL II.3 PROGRES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN DALAM USULAN REVISI RTRWP (Per Desember 2016)	55
III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN	
TABEL III.1 LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	61
TABEL III.2 PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S/D DESEMBER 2016	62
TABEL III.3 PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS S/D DESEMBER 2016	63
TABEL III.4 PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN PER PROVINSI	64
TABEL III.5 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA.....	65
TABEL III.6 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HT	66
IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN	
TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI.....	67
TABEL IV.2 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)	88
TABEL IV.3 PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN/PERTANIAN (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)	89
TABEL IV.4 PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN	90
V. PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)	
TABEL V.1 PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)	92
TABEL V.2 PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL SAMPAI DENGAN TAHUN 2016	95
TABEL V.3 PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2016....	99
TABEL V.4 PENETAPAN KELEMBAGAAN KPH FASILITASI TAHUN 2016	102
TABEL V.5 PENETAPAN KPH FASILITASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2016	106
TABEL V.6 PENGESAHAN RPHJP KPH SAMPAI DENGAN TAHUN 2016	112

VI. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

TABEL VI.1	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2016.....	115
TABEL VI.2	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG) S/D DESEMBER 2016	116
TABEL VI.3	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2016.....	117
TABEL VI.4	IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S/D DESEMBER 2016.....	118
TABEL VI.5	PERKEMBANGAN SERAH TERIMA LAHAN KOMPENSASI (S/D Tahap Berita Acara Serah Terima)	119
TABEL VI.6	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)	120

VII. AMDAL, UKL-UPL

TABEL VII.1	DAFTAR KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL TAHUN 2016.....	121
TABEL VII.2	DAFTAR PROSES UKL-UPL TAHUN 2016	134
TABEL VII.3	DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI DARI KEGIATAN AMDAL DAN UKL- UPL PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN (BULAN JANUARI-DESEMBER 2016).....	136

VIII. KLHS DAN EKOREGION

TABEL VIII.1	JUMLAH SATUAN DAN LUAS EKOREGION PULAU.....	150
TABEL VIII.2	TELAAHAN DOKUMEN KLHS	153
TABEL VIII.3	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	156
TABEL VIII.4	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	158
TABEL VIII.5	PROPORSI INDIKASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM TAHUN 2016	159
TABEL VIII.6	LUAS WILAYAH EKOREGION LAUT.....	160
TABEL VIII.7	PERENCANAAN EKONOMI LINGKUNGAN TAHUN S/D DESEMBER 2016	161

IX. KEGIATAN PENDUKUNG

TABEL IX.1	REKAPITULASI SEBARAN PNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH.....	175
TABEL IX.2	SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH.....	177
TABEL IX.3	PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH.....	180
TABEL IX.4	PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	182
TABEL IX.5	REKAPITULASI PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.....	184
TABEL IX.6	REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.....	191
TABEL IX.7	PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN.....	194

PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN



**DIREKTORAT INVENTARISASI
DAN PEMANTAUAN SUMBER
DAYA HUTAN**

TABEL I.1. REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2015 (Ribu Ha)

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ACEH											
	A. Hutan	771,0	1.652,7	103,9	380,1	2.907,7	2,1	2.909,8	252,1	3.161,9	56,0	
	- Hutan Primer	545,4	680,9	2,2	4,3	1.232,7	-	1.232,7	1,3	1.234,0	21,9	
	- Hutan Sekunder	220,1	970,0	101,7	350,2	1.642,0	2,0	1.643,9	236,6	1.880,5	33,3	
	- Hutan Tanaman *	5,6	1,9	-	25,6	33,0	0,2	33,2	14,3	47,5	0,8	
	B. Non Hutan	76,1	135,6	37,9	174,3	423,8	13,3	437,1	2.048,3	2.485,4	44,0	
	Total	847,1	1.788,3	141,8	554,3	3.331,5	15,4	3.346,9	2.300,4	5.647,3	100,0	
2	SUMATERA UTARA											
	A. Hutan	376,6	634,4	317,1	271,6	1.599,7	6,6	1.606,3	153,6	1.759,9	24,8	
	- Hutan Primer	294,3	229,0	31,9	14,5	569,6	0,9	570,6	3,1	573,6	8,1	
	- Hutan Sekunder	82,1	368,7	277,6	190,5	918,9	5,6	924,6	127,8	1.052,4	14,8	
	- Hutan Tanaman *	0,2	36,7	7,7	66,6	111,2	-	111,2	22,7	133,9	1,9	
	B. Non Hutan	50,4	572,4	324,7	432,8	1.380,4	69,1	1.449,5	3.892,6	5.342,1	75,2	
	Total	427,0	1.206,9	641,8	704,5	2.980,1	75,7	3.055,8	4.046,2	7.102,0	100,0	
3	SUMATERA BARAT											
	A. Hutan	686,4	583,0	153,6	257,0	1.680,0	87,2	1.767,2	167,5	1.934,7	46,2	
	- Hutan Primer	389,7	168,3	5,1	7,0	570,0	5,8	575,8	15,8	591,7	14,1	
	- Hutan Sekunder	296,7	414,3	147,4	240,2	1.098,7	80,6	1.179,3	147,2	1.326,5	31,7	
	- Hutan Tanaman *	-	0,4	1,2	9,8	11,3	0,7	12,1	4,5	16,6	0,4	
	B. Non Hutan	83,4	208,7	79,6	103,6	475,2	100,5	575,7	1.673,5	2.249,2	53,8	
	Total	769,8	791,7	233,2	360,6	2.155,3	187,6	2.342,9	1.841,0	4.183,9	100,0	
4	RIAU											
	A. Hutan	485,9	93,6	318,8	1.272,8	2.171,1	64,9	2.236,0	114,0	2.350,0	26,5	
	- Hutan Primer	147,0	23,3	32,5	24,6	227,5	2,7	230,1	1,3	231,5	2,6	
	- Hutan Sekunder	333,8	69,3	262,0	641,4	1.306,4	55,0	1.361,4	64,9	1.426,2	16,1	
	- Hutan Tanaman *	5,1	1,0	24,3	606,7	637,2	7,3	644,5	47,8	692,3	7,8	
	B. Non Hutan	147,5	140,4	712,8	1.059,1	2.059,8	1.203,9	3.263,7	3.269,1	6.532,9	73,5	
	Total	633,4	234,0	1.031,6	2.331,9	4.230,9	1.268,8	5.499,7	3.383,1	8.882,8	100,0	
5	JAMBI											
	A. Hutan	577,3	142,8	156,0	391,9	1.268,0	0,0	1.268,0	73,3	1.341,3	27,8	
	- Hutan Primer	488,9	109,1	83,8	73,7	755,5	0,0	755,5	34,2	789,7	16,3	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		11	12	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Hutan Sekunder	88,3	33,7	70,2	121,6	313,8	0,0	313,8	30,3	344,1	7,1	
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,1	2,0	196,7	198,8	0,0	198,8	8,7	207,5	4,3	
	B. Non Hutan	108,2	36,8	102,3	571,9	819,1	11,4	830,5	2.660,5	3.491,1	72,2	
	Total	685,5	179,6	258,3	963,8	2.087,1	11,4	2.098,5	2.733,8	4.832,3	100,0	
6	SUMATERA SELATAN											
	A. Hutan	406,3	265,5	85,9	335,9	1.093,5	0,1	1.093,6	107,1	1.200,6	13,9	
	- Hutan Primer	279,4	69,6	10,8	4,8	364,6	0,0	364,6	1,4	366,0	4,2	
	- Hutan Sekunder	122,1	189,8	54,7	59,6	426,3	0,0	426,3	54,2	480,6	5,6	
	- Hutan Tanaman *	4,8	6,1	20,4	271,4	302,6	0,0	302,7	51,4	354,1	4,1	
	B. Non Hutan	335,6	311,8	122,9	1.377,7	2.148,0	176,6	2.324,6	5.101,6	7.426,3	86,1	
	Total	741,9	577,3	208,7	1.713,5	3.241,5	176,7	3.418,2	5.208,7	8.626,9	100,0	
7	KEP. BANGKA BELITUNG											
	A. Hutan	10,6	79,4	0,0	99,3	189,3	0,0	189,4	43,9	233,3	14,1	
	- Hutan Primer	1,6	23,5	0,0	8,3	33,4	0,0	33,4	4,9	38,3	2,3	
	- Hutan Sekunder	9,0	56,0	0,0	91,0	156,0	0,0	156,0	39,0	195,0	11,7	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0	
	B. Non Hutan	24,8	106,1	-	333,6	464,5	0,7	465,2	961,3	1.426,5	85,9	
	Total	35,5	185,5	-	432,9	653,9	0,7	654,6	1.005,2	1.659,7	100,0	
8	BENGKULU											
	A. Hutan	399,1	174,8	68,0	15,2	657,0	0,1	657,1	31,8	688,9	34,4	
	- Hutan Primer	319,3	100,6	16,8	2,9	439,6	-	439,6	0,7	440,3	22,0	
	- Hutan Sekunder	79,4	74,2	51,2	12,3	217,1	0,1	217,2	26,2	243,3	12,1	
	- Hutan Tanaman *	0,4	-	-	-	0,4	0,1	0,4	5,0	5,4	0,3	
	B. Non Hutan	63,8	76,0	105,3	10,7	255,9	11,6	267,5	1.046,5	1.314,0	65,6	
	Total	463,0	250,8	173,3	25,9	912,9	11,8	924,6	1.078,3	2.002,9	100,0	
9	LAMPUNG											
	A. Hutan	252,3	52,3	3,5	13,1	321,2	0,0	321,2	17,8	339,1	9,9	
	- Hutan Primer	116,9	3,2	2,4	0,0	122,5	0,0	122,5	0,1	122,6	3,6	
	- Hutan Sekunder	135,4	49,0	1,2	0,1	185,7	0,0	185,7	13,5	199,2	5,8	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	13,0	13,0	-	13,0	4,2	17,3	0,5	
	B. Non Hutan	209,7	265,4	29,8	178,6	683,5	-	683,5	2.412,8	3.096,3	90,1	
	Total	462,0	317,6	33,4	191,7	1.004,7	-	1.004,7	2.430,6	3.435,4	100,0	
10	KEPULAUAN RIAU											
	A. Hutan	3,2	46,3	57,6	54,3	161,3	21,4	182,8	62,3	245,0	30,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		11	12	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Hutan Primer	0,3	0,7	3,2	3,1	7,3	2,6	9,9	1,2	11,1	1,4	
	- Hutan Sekunder	2,9	45,6	54,4	50,5	153,4	18,9	172,3	59,2	231,4	28,3	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0,6	0,6	0,0	0,6	1,9	2,6	0,3	
	B. Non Hutan	9,1	51,4	61,3	24,6	146,3	53,1	199,4	372,6	572,0	70,0	
	Total	12,3	97,7	118,8	78,8	307,6	74,5	382,1	434,9	817,0	100,0	
	SUMATERA											
	A. Hutan	3.968,8	3.724,8	1.264,4	3.091,0	12.048,9	182,4	17.495,3	1.023,4	18.518,7	35,3	
	- Hutan Primer	2.582,8	1.408,2	188,6	143,1	4.322,6	12,0	4.334,6	64,0	4.398,6	8,4	
	- Hutan Sekunder	1.369,9	2.270,5	1.020,2	1.757,6	6.418,2	162,2	6.580,4	798,8	7.379,2	14,1	
	- Hutan Tanaman *	16,0	46,2	55,5	1.190,3	1.308,1	8,3	6.580,4	160,5	6.740,9	12,9	
	B. Non Hutan	1.108,7	1.904,5	1.576,5	4.266,9	8.856,6	1.640,1	10.496,8	23.438,8	33.935,5	64,7	
	Total	5.077,5	5.629,3	2.840,8	7.357,9	20.905,5	1.822,5	27.992,1	24.462,1	52.454,2	100,0	
11	BANTEN											
	A. Hutan	85,6	6,3	23,0	10,0	124,8	0,0	124,8	26,6	151,4	16,1	
	- Hutan Primer	7,3	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	0,8	
	- Hutan Sekunder	54,0	3,7	3,3	0,5	61,5	0,0	61,5	3,6	65,1	6,9	
	- Hutan Tanaman *	24,3	2,5	19,7	9,5	56,0	-	56,0	23,0	79,0	8,4	
	B. Non Hutan	27,4	6,1	26,4	17,0	77,0	-	77,0	710,8	787,8	83,9	
	Total	113,0	12,4	49,4	27,0	201,8	-	201,8	737,4	939,2	100,0	
12	DKI JAKARTA											
	A. Hutan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	
	- Hutan Primer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Hutan Sekunder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	B. Non Hutan	0,2	0,0	-	0,2	0,3	-	0,3	64,7	65,0	99,5	
	Total	0,3	0,0	-	0,2	0,5	-	0,5	64,9	65,3	100,0	
13	JAWA BARAT											
	A. Hutan	109,4	189,5	99,9	97,7	496,5	0,0	496,5	138,3	634,7	17,2	
	- Hutan Primer	8,3	3,6	0,1	1,0	13,0	0,0	13,0	0,1	13,2	0,4	
	- Hutan Sekunder	64,1	66,2	9,7	13,6	153,6	0,0	153,6	11,4	165,0	4,5	
	- Hutan Tanaman *	37,0	119,7	90,2	83,0	329,8	-	329,8	126,7	456,5	12,3	
	B. Non Hutan	22,8	101,8	90,2	105,3	320,1	-	320,1	2.743,7	3.063,9	82,8	
	Total	132,2	291,3	190,2	203,0	816,6	-	816,6	2.882,0	3.698,6	100,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	JAWA TENGAH											
	A. Hutan	10,5	66,3	140,1	251,7	468,6	0,0	468,6	550,9	1.019,5	29,5	
	- Hutan Primer	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	
	- Hutan Sekunder	3,8	20,9	14,6	14,9	54,3	0,0	54,3	14,1	68,4	2,0	
	- Hutan Tanaman *	6,7	45,3	125,5	236,7	414,2	-	414,2	536,7	950,9	27,5	
	B. Non Hutan	5,9	18,1	43,8	110,7	178,5	-	178,5	2.258,6	2.437,1	70,5	
	Total	16,4	84,4	183,9	362,4	647,1	-	647,1	2.809,4	3.456,6	100,0	
15	DI YOGYAKARTA											
	A. Hutan	0,6	0,9	0,0	9,9	11,4	0,0	11,4	22,9	34,3	10,7	
	- Hutan Primer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Hutan Sekunder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	
	- Hutan Tanaman *	0,5	0,9	-	9,9	11,2	-	11,2	22,8	34,1	10,7	
	B. Non Hutan	0,3	1,2	-	4,0	5,4	-	5,4	279,7	285,2	89,3	
	Total	0,9	2,1	-	13,9	16,8	-	16,8	302,6	319,4	100,0	
16	JAWA TIMUR											
	A. Hutan	180,0	266,6	0,0	624,5	1.071,1	0,0	1.071,1	294,6	1.365,8	28,2	
	- Hutan Primer	0,8	9,8	0,0	0,5	11,1	0,0	11,1	1,3	12,4	0,3	
	- Hutan Sekunder	167,6	175,9	0,0	73,4	416,9	0,0	416,9	41,6	458,6	9,5	
	- Hutan Tanaman *	11,6	80,8	-	550,6	643,1	-	643,1	251,7	894,8	18,5	
	B. Non Hutan	50,1	78,2	-	158,3	286,5	-	286,5	3.185,4	3.471,9	71,8	
	Total	230,1	344,7	-	782,8	1.357,6	-	1.357,6	3.480,0	4.837,7	100,0	
	JAWA											
	A. Hutan	386,3	529,6	263,1	993,7	2.172,6	-	2.172,6	1.033,4	3.206,0	24,1	
	- Hutan Primer	16,4	13,5	0,1	1,5	31,6	-	31,6	1,4	33,0	0,2	
	- Hutan Sekunder	289,8	266,9	27,6	102,4	686,7	-	686,7	70,9	757,6	5,7	
	- Hutan Tanaman *	80,1	249,1	235,4	889,7	1.454,3	-	1.454,3	961,0	2.415,3	18,1	
	B. Non Hutan	106,6	205,4	160,5	395,4	867,9	-	867,9	9.242,9	10.110,8	75,9	
	Total	492,9	734,9	423,5	1.389,1	3.040,5	-	3.040,5	10.276,3	13.316,8	100,0	
17	KALIMANTAN BARAT											
	A. Hutan	1.153,6	1.805,6	1.386,9	782,5	5.128,5	62,8	5.191,3	563,7	5.754,9	39,5	
	- Hutan Primer	966,9	947,1	300,6	29,0	2.243,6	1,3	2.244,9	7,2	2.252,0	15,5	
	- Hutan Sekunder	186,6	858,5	1.086,2	702,1	2.833,4	61,5	2.894,9	551,1	3.446,0	23,6	
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,1	51,4	51,5	-	51,5	5,4	56,9	0,4	
	B. Non Hutan	276,5	505,3	745,5	1.344,8	2.872,2	135,2	3.007,4	5.810,5	8.817,8	60,5	
	Total	1.430,1	2.310,9	2.132,4	2.127,4	8.000,7	197,9	8.198,7	6.374,1	14.572,8	100,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		11	12	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	B. Non Hutan	33,3	50,8	63,7	33,3	181,1	2,5	183,6	695,8	879,4	61,1	
	Total	245,2	161,8	208,9	64,4	680,2	14,7	694,9	744,6	1.439,5	100,0	
23	GORONTALO											
	A. Hutan	185,5	180,6	193,7	63,3	623,0	30,6	653,6	53,9	707,5	59,0	
	- Hutan Primer	130,0	77,4	61,3	6,1	274,8	1,6	276,4	2,2	278,6	23,2	
	- Hutan Sekunder	55,5	103,2	132,4	57,1	348,3	28,9	377,2	51,8	429,0	35,8	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	n	-	-	-	-	-	0,0	
	B. Non Hutan	11,2	24,0	57,4	26,6	119,2	51,9	171,1	319,9	491,0	41,0	
	Total	196,7	204,6	251,1	89,9	742,2	82,4	824,7	373,8	1.198,5	100,0	
24	SULAWESI TENGAH											
	A. Hutan	564,9	1.170,5	1.183,3	296,3	3.214,9	164,2	3.379,1	528,7	3.907,9	64,8	
	- Hutan Primer	435,1	733,4	622,2	133,9	1.924,6	64,7	1.989,3	143,9	2.133,2	35,3	
	- Hutan Sekunder	129,8	437,1	560,9	162,3	1.290,1	98,1	1.388,2	384,1	1.772,3	29,4	
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,1	0,0	0,2	1,5	1,6	0,7	2,3	0,0	
	B. Non Hutan	83,5	105,6	207,7	105,6	502,4	53,1	555,4	1.571,4	2.126,8	35,2	
	Total	648,4	1.276,1	1.391,0	401,8	3.717,2	217,3	3.934,6	2.100,1	6.034,7	100,0	
25	SULAWESI TENGGARA											
	A. Hutan	199,7	957,0	386,4	211,8	1.754,9	35,4	1.790,3	124,1	1.914,4	53,0	
	- Hutan Primer	8,4	147,7	63,2	25,6	244,8	5,0	249,9	5,9	255,8	7,1	
	- Hutan Sekunder	191,3	809,3	323,2	184,9	1.508,7	30,3	1.539,0	117,7	1.656,8	45,9	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	1,4	1,4	0,1	1,5	0,4	1,8	0,1	
	B. Non Hutan	83,2	124,5	80,5	189,8	477,9	58,1	536,1	1.161,2	1.697,2	47,0	
	Total	282,9	1.081,5	466,9	401,6	2.232,8	93,6	2.326,4	1.285,2	3.611,6	100,0	
26	SULAWESI BARAT											
	A. Hutan	202,4	303,6	234,2	45,5	785,7	5,8	791,5	30,6	822,1	48,9	
	- Hutan Primer	119,0	119,5	73,6	10,6	322,6	0,1	322,7	0,1	322,9	19,2	
	- Hutan Sekunder	83,5	184,1	160,7	34,9	463,1	5,6	468,8	30,5	499,2	29,7	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	B. Non Hutan	12,7	148,4	96,5	26,4	284,1	16,8	300,9	557,3	858,1	51,1	
	Total	215,2	452,0	330,7	71,9	1.069,8	22,6	1.092,4	587,9	1.680,2	100,0	
27	SULAWESI SELATAN											
	A. Hutan	184,8	833,2	287,1	40,6	1.345,8	10,9	1.356,7	76,9	1.433,6	31,9	
	- Hutan Primer	105,4	373,8	94,5	1,5	575,2	5,1	580,3	10,6	590,9	13,1	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		11	12	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Hutan Sekunder	78,8	457,1	186,2	37,4	759,6	5,8	765,3	63,5	828,8	18,4	
	- Hutan Tanaman *	0,6	2,3	6,4	1,7	11,0	-	11,0	2,8	13,9	0,3	
	B. Non Hutan	59,6	399,5	207,7	83,4	750,2	12,1	762,3	2.302,5	3.064,8	68,1	
	Total	244,5	1.232,7	494,8	124,0	2.096,0	23,0	2.119,0	2.379,4	4.498,4	100,0	
	SULAWESI											
	A. Hutan	1.549,2	3.555,8	2.430,0	688,5	8.223,5	259,1	8.482,6	863,1	9.345,6	50,6	
	- Hutan Primer	927,3	1.513,9	950,4	188,4	3.579,9	76,6	3.656,5	170,4	3.826,9	20,7	
	- Hutan Sekunder	621,4	2.039,7	1.473,0	497,0	4.631,0	180,9	4.812,0	688,7	5.500,7	29,8	
	- Hutan Tanaman *	0,6	2,3	6,6	3,1	12,5	1,5	14,1	3,9	18,0	0,1	
	B. Non Hutan	283,5	852,8	713,4	465,1	2.314,9	194,5	2.509,4	6.608,0	9.117,4	49,4	
	Total	1.832,8	4.408,7	3.143,4	1.153,5	8.223,5	453,6	10.992,0	7.471,1	18.463,1	100,0	
28	BALI											
	A. Hutan	12,8	72,3	1,0	0,3	86,3	0,0	86,3	15,8	102,1	18,0	
	- Hutan Primer	3,2	36,5	0,0	0,0	39,7	0,0	39,7	0,3	40,1	7,1	
	- Hutan Sekunder	9,0	35,3	0,6	0,0	44,9	0,0	44,9	15,4	60,3	10,6	
	- Hutan Tanaman *	0,6	0,5	0,4	0,2	1,7	-	1,7	0,1	1,8	0,3	
	B. Non Hutan	10,1	23,5	5,8	1,6	40,9	-	40,9	423,8	464,7	82,0	
	Total	22,9	95,8	6,7	1,9	127,3	-	127,3	439,6	566,9	100,0	
29	NUSA TENGGARA BARAT											
	A. Hutan	73,7	363,9	204,6	73,6	715,7	0,0	715,7	75,5	791,2	40,0	
	- Hutan Primer	38,7	246,7	92,7	19,1	397,1	0,0	397,1	10,7	407,9	20,6	
	- Hutan Sekunder	34,5	116,6	111,8	53,8	316,8	0,0	316,8	63,8	380,5	19,2	
	- Hutan Tanaman *	0,5	0,6	0,0	0,7	1,8	-	1,8	1,0	2,8	0,1	
	B. Non Hutan	94,4	66,6	82,1	77,0	320,1	-	320,1	868,8	1.188,9	60,0	
	Total	168,0	430,5	286,7	150,6	1.035,8	-	1.035,8	944,3	1.980,2	100,0	
30	NUSA TENGGARA TIMUR											
	A. Hutan	157,0	412,1	117,6	193,6	880,2	18,6	898,8	1.068,2	1.967,0	41,7	
	- Hutan Primer	70,3	44,5	5,0	20,1	139,9	1,6	141,5	35,8	177,4	3,8	
	- Hutan Sekunder	86,4	367,6	112,6	173,0	739,5	17,0	756,6	1.029,8	1.786,4	37,8	
	- Hutan Tanaman *	0,3	0,0	-	0,4	0,7	-	0,7	2,5	3,3	0,1	
	B. Non Hutan	103,2	272,3	56,4	102,5	534,5	95,0	629,4	2.126,1	2.755,5	58,3	
	Total	260,2	684,4	174,0	296,1	1.414,7	113,6	1.528,3	3.194,3	4.722,5	100,0	
	BALI NUSA TENGGARA											
	A. Hutan	243,4	848,3	323,1	267,5	1.682,3	18,6	1.700,9	1.159,5	2.860,4	39,3	
	- Hutan Primer	112,2	327,7	97,7	39,2	576,8	1,6	578,3	46,9	625,3	8,6	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		11	12	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Hutan Sekunder	129,9	519,5	225,0	226,9	1.101,2	17,0	1.118,3	1.108,9	2.227,2	30,6	
	- Hutan Tanaman *	1,4	1,2	0,4	1,3	4,3	-	4,3	3,6	7,9	0,1	
	B. Non Hutan	207,7	362,3	144,3	181,1	895,5	95,0	990,5	3.418,7	4.409,2	60,7	
	Total	451,1	1.210,7	467,4	448,6	2.577,8	113,6	2.691,4	4.578,2	7.269,6	100,0	
31	MALUKU UTARA											
	A. Hutan	204,9	501,3	564,3	370,7	1.641,2	313,0	1.954,3	116,7	2.070,9	66,1	
	- Hutan Primer	62,8	137,5	111,8	29,9	342,1	14,9	356,9	9,1	366,1	11,7	
	- Hutan Sekunder	142,1	363,2	448,8	310,3	1.264,5	296,5	1.561,0	107,4	1.668,4	53,3	
	- Hutan Tanaman *	-	0,6	3,6	30,4	34,7	1,7	36,4	0,1	36,5	1,2	
	B. Non Hutan	13,6	82,7	102,6	111,0	309,9	251,1	561,0	498,8	1.059,7	33,9	
	Total	218,5	584,1	666,9	481,7	1.951,1	564,1	2.515,2	615,4	3.130,6	100,0	
32	MALUKU											
	A. Hutan	368,9	508,3	754,5	425,1	2.056,8	806,7	2.863,5	153,3	3.016,8	65,3	
	- Hutan Primer	132,7	117,0	39,3	71,1	360,1	172,0	532,1	14,1	546,2	11,8	
	- Hutan Sekunder	236,2	391,3	715,2	354,0	1.696,7	634,7	2.331,4	139,2	2.470,6	53,5	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	B. Non Hutan	51,4	118,9	139,8	218,6	528,7	518,2	1.046,9	558,4	1.605,3	34,7	
	Total	420,3	627,3	894,3	643,7	2.585,5	1.324,9	3.910,4	711,7	4.622,1	100,0	
	MALUKU											
	A. Hutan	573,8	1.009,6	1.318,8	795,8	3.698,1	1.119,7	4.817,8	269,9	5.087,7	65,6	
	- Hutan Primer	195,5	254,5	151,1	101,0	702,2	186,9	889,1	23,2	912,3	11,8	
	- Hutan Sekunder	378,3	754,5	1.164,0	664,4	2.961,2	931,1	3.892,4	246,6	4.139,0	53,4	
	- Hutan Tanaman *	-	0,6	3,6	30,4	34,7	1,7	36,4	0,1	36,5	0,5	
	B. Non Hutan	65,0	201,7	242,4	329,6	838,6	769,2	1.607,8	1.057,2	2.665,0	34,4	
	Total	638,8	1.211,3	1.561,1	1.125,4	4.536,7	1.888,9	6.425,6	1.327,1	7.752,8	100,0	
33	PAPUA											
	A. Hutan	5.225,8	6.994,7	5.225,3	3.942,8	21.388,6	2.651,7	24.040,3	1.048,1	25.088,4	80,7	
	- Hutan Primer	4.562,4	6.233,2	4.243,4	2.641,8	17.680,8	1.547,4	19.228,1	608,4	19.836,6	63,8	
	- Hutan Sekunder	663,4	761,5	981,8	1.300,5	3.707,2	1.103,1	4.810,4	439,6	5.249,9	16,9	
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	0,0	0,5	0,6	1,3	1,9	0,1	1,9	0,0	
	B. Non Hutan	1.510,5	820,6	736,0	796,5	3.863,5	1.464,6	5.328,2	660,3	5.988,5	19,3	
	Total	6.736,3	7.815,3	5.961,2	4.739,3	25.252,1	4.116,4	29.368,5	1.708,4	31.076,9	100,0	
34	PAPUA BARAT											
	A. Hutan	1.638,5	1.469,9	1.705,9	2.067,3	6.881,5	1.346,6	8.228,1	562,0	8.790,0	91,3	
	- Hutan Primer	1.516,6	1.227,3	1.228,6	1.031,2	5.003,6	692,0	5.695,6	195,0	5.890,6	61,2	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		11	12	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Hutan Sekunder	122,0	242,5	477,3	1.036,1	1.877,9	654,6	2.532,4	367,0	2.899,4	30,1	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
B.	Non Hutan	73,4	161,7	72,6	120,9	428,6	128,1	556,7	278,1	834,9	8,7	
	Total	1.711,9	1.631,6	1.778,5	2.188,2	7.310,1	1.474,7	8.784,8	840,1	9.624,9	100,0	
	PAPUA											
A.	Hutan	6.864,3	8.464,6	6.931,1	6.010,1	28.270,1	3.998,3	32.268,4	1.610,0	33.878,4	83,2	
	- Hutan Primer	6.078,9	7.460,5	5.472,0	3.673,0	22.684,4	2.239,4	24.923,7	803,4	25.727,2	63,2	
	- Hutan Sekunder	785,4	1.004,0	1.459,1	2.336,6	5.585,1	1.757,7	7.342,8	806,5	8.149,3	20,0	
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	0,0	0,5	0,6	1,3	1,9	0,1	1,9	0,0	
B.	Non Hutan	1.583,8	982,3	808,6	917,4	4.292,2	1.592,7	5.884,9	938,5	6.823,3	16,8	
	Total	8.448,2	9.446,9	7.739,7	6.927,5	32.562,3	5.591,0	38.153,3	2.548,5	40.701,8	100,0	
	INDONESIA											
A.	Hutan	17.421,7	24.020,7	21.455,0	17.301,9	80.199,2	6.426,4	86.625,6	8.402,4	95.028,0	50,6	
	- Hutan Primer	12.401,2	14.530,1	9.747,3	4.572,8	41.251,4	2.525,6	43.777,0	1.391,4	45.168,4	24,1	
	- Hutan Sekunder	4.887,5	9.188,9	11.393,3	10.106,7	35.576,3	3.861,8	39.438,1	5.753,0	45.191,1	24,1	
	- Hutan Tanaman *	133,0	301,7	314,4	2.622,4	3.371,5	39,1	3.410,6	1.257,9	4.668,4	2,5	
B.	Non Hutan	4.476,0	5.652,7	5.343,4	11.948,9	27.421,0	6.515,8	33.936,8	58.787,1	92.723,9	49,4	
	Total	21.897,6	29.673,4	26.798,4	29.250,8	107.620,1	12.942,3	120.562,4	67.189,5	187.751,9	100,0	

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

* : Hutan tanaman berdasarkan penafsiran penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman

baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Luas penutupan lahan ini berdasarkan data digital hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2015

Sumber: - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2015, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - Data digital kawasan hutan dan perairan berdasarkan SK Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan per April 2015,
 Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL I.2. REKAPITULASI LUAS PENUTUPAN LAHAN INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2016 (Ribu Ha)

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ACEH											
	A. Hutan	781,8	1.670,9	118,6	399,9	2.971,2	2,4	2.973,7	297,2	3.270,9	57,9	
	- Hutan Primer	504,7	1.193,7	56,2	139,3	1.893,9	0,0	1.894,0	52,0	1.946,0	34,5	
	- Hutan Sekunder	265,1	470,3	54,7	207,7	997,7	2,0	999,7	198,1	1.197,9	21,2	
	- Hutan Tanaman *	12,0	7,0	7,7	52,9	79,6	0,4	79,9	47,1	127,0	2,2	
	B. Non Hutan	64,8	123,4	26,8	151,2	366,2	12,9	379,2	1.997,3	2.376,4	42,1	
	Total	846,6	1.794,4	145,4	551,1	3.337,4	15,4	3.352,8	2.294,5	5.647,3	100,0	
2	SUMATERA UTARA											
	A. Hutan	379,4	673,2	327,0	276,9	1.656,6	6,1	1.662,7	150,4	1.813,1	25,5	
	- Hutan Primer	292,9	249,5	33,6	2,7	578,7	0,9	579,6	3,1	582,7	8,2	
	- Hutan Sekunder	86,3	394,5	287,3	187,4	955,5	5,2	960,8	124,7	1.085,5	15,3	
	- Hutan Tanaman *	0,2	29,2	6,1	86,9	122,3	-	122,3	22,6	145,0	2,0	
	B. Non Hutan	47,6	533,7	314,7	427,5	1.323,5	69,6	1.393,1	3.895,8	5.288,9	74,5	
	Total	427,0	1.206,9	641,8	704,5	2.980,1	75,7	3.055,8	4.046,2	7.102,0	100,0	
3	SUMATERA BARAT											
	A. Hutan	684,9	584,2	150,3	256,0	1.675,4	85,1	1.760,5	163,5	1.924,1	46,0	
	- Hutan Primer	387,2	168,2	5,1	7,0	567,6	4,3	571,9	14,3	586,2	14,0	
	- Hutan Sekunder	297,7	415,6	143,9	237,4	1.094,6	80,6	1.175,2	144,8	1.320,0	31,6	
	- Hutan Tanaman *	-	0,4	1,3	11,6	13,3	0,1	13,4	4,5	17,9	0,4	
	B. Non Hutan	84,8	207,5	82,9	104,6	479,8	102,6	582,4	1.677,4	2.259,8	54,0	
	Total	769,8	791,7	233,2	360,6	2.155,3	187,6	2.342,9	1.841,0	4.183,9	100,0	
4	RIAU											
	A. Hutan	481,2	90,9	339,7	1.554,5	2.466,3	59,5	2.525,8	91,8	2.617,6	29,5	
	- Hutan Primer	135,9	21,9	26,7	22,9	207,5	2,7	210,2	1,0	211,1	2,4	
	- Hutan Sekunder	341,6	69,0	268,8	656,7	1.336,2	51,0	1.387,2	65,3	1.452,5	16,4	
	- Hutan Tanaman *	3,6	-	44,1	874,9	922,6	5,8	928,4	25,6	954,0	10,7	
	B. Non Hutan	149,6	143,0	677,7	785,1	1.755,3	1.125,9	2.881,2	3.384,0	6.265,2	70,5	
	Total	630,8	233,9	1.017,3	2.339,6	4.221,6	1.185,4	5.407,0	3.475,8	8.882,8	100,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	JAMBI											
	A. Hutan	558,6	142,0	140,9	462,0	1.303,5	0,1	1.303,6	82,0	1.385,6	28,7	
	- Hutan Primer	458,8	99,1	52,4	70,5	680,7	0,0	680,7	29,3	710,0	14,7	
	- Hutan Sekunder	99,7	42,8	76,5	105,4	324,4	0,0	324,5	35,9	360,3	7,5	
	- Hutan Tanaman *	0,1	0,1	12,0	286,2	298,4	0,1	298,4	16,8	315,2	6,5	
	B. Non Hutan	126,9	37,6	117,4	501,8	783,6	11,3	795,0	2.651,8	3.446,8	71,3	
	Total	685,5	179,6	258,3	963,8	2.087,1	11,4	2.098,5	2.733,8	4.832,3	100,0	
6	SUMATERA SELATAN											
	A. Hutan	410,8	269,8	86,8	657,3	1.424,7	0,1	1.424,8	111,6	1.536,4	17,8	
	- Hutan Primer	288,1	73,4	10,8	6,8	379,1	0,0	379,1	1,0	380,1	4,4	
	- Hutan Sekunder	120,1	192,3	55,5	55,4	423,4	0,1	423,4	56,7	480,1	5,6	
	- Hutan Tanaman *	2,7	4,0	20,5	595,1	622,3	0,1	622,3	53,9	676,2	7,8	
	B. Non Hutan	330,9	308,5	127,1	1.056,6	1.823,0	160,9	1.983,9	5.106,5	7.090,5	82,2	
	Total	741,7	578,3	213,9	1.713,9	3.247,8	161,0	3.408,8	5.218,1	8.626,9	100,0	
7	KEP. BANGKA BELITUNG											
	A. Hutan	10,6	79,7	0,0	98,0	188,3	0,0	188,3	41,3	229,7	13,8	
	- Hutan Primer	1,6	22,1	0,0	7,1	30,7	0,0	30,8	3,8	34,5	2,1	
	- Hutan Sekunder	9,0	57,6	0,0	91,0	157,6	0,0	157,6	37,6	195,2	11,8	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0	
	B. Non Hutan	24,8	105,9	-	334,9	465,5	0,7	466,2	963,8	1.430,0	86,2	
	Total	35,5	185,5	-	432,9	653,9	0,7	654,6	1.005,2	1.659,7	100,0	
8	BENGKULU											
	A. Hutan	400,5	174,4	64,9	14,7	654,5	0,1	654,6	26,9	681,5	34,0	
	- Hutan Primer	346,7	98,6	17,2	2,9	465,4	-	465,4	0,9	466,3	23,3	
	- Hutan Sekunder	53,8	75,8	47,7	11,8	189,1	0,1	189,2	26,0	215,1	10,7	
	- Hutan Tanaman *	0,1	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,0	
	B. Non Hutan	62,5	76,3	108,4	11,1	258,3	11,7	270,0	1.051,4	1.321,4	66,0	
	Total	463,0	250,8	173,3	25,9	912,9	11,8	924,6	1.078,3	2.002,9	100,0	
9	LAMPUNG											
	A. Hutan	261,3	57,6	3,0	13,4	335,2	0,0	335,2	19,6	354,9	10,3	
	- Hutan Primer	151,7	2,9	1,9	0,0	156,5	0,0	156,5	0,8	157,3	4,6	
	- Hutan Sekunder	109,7	54,6	1,1	0,1	165,5	0,0	165,5	18,1	183,6	5,3	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	13,3	13,3	-	13,3	0,8	14,1	0,4	
	B. Non Hutan	200,7	260,1	30,4	178,4	669,5	-	669,5	2.411,0	3.080,5	89,7	
	Total	462,0	317,6	33,4	191,7	1.004,7	-	1.004,7	2.430,6	3.435,4	100,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	KEPULAUAN RIAU											
	A. Hutan	2,0	50,5	65,9	51,4	169,8	43,2	213,0	55,7	268,7	32,9	
	- Hutan Primer	0,0	0,9	4,3	4,8	10,0	2,8	12,8	1,9	14,7	1,8	
	- Hutan Sekunder	2,0	49,7	61,6	46,3	159,5	40,4	199,9	52,7	252,7	30,9	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0,3	0,3	-	0,3	1,1	1,4	0,2	
	B. Non Hutan	10,3	47,1	52,9	27,5	137,8	31,3	169,1	379,1	548,3	67,1	
	Total	12,3	97,7	118,8	78,8	307,6	74,5	382,1	434,9	817,0	100,0	
	SUMATERA											
	A. Hutan	3.971,2	3.793,2	1.297,2	3.784,0	12.845,6	196,6	13.042,2	1.040,2	14.082,4	29,8	
	- Hutan Primer	2.567,6	1.930,2	208,4	263,9	4.970,1	10,7	4.980,8	108,0	5.088,8	10,8	
	- Hutan Sekunder	1.385,0	1.822,2	997,2	1.599,2	5.803,6	179,4	5.983,0	759,8	6.742,8	14,3	
	- Hutan Tanaman *	18,7	40,8	91,6	1.920,9	2.072,0	6,4	2.078,5	172,3	2.250,8	4,8	
	B. Non Hutan	1.102,8	1.843,0	1.538,2	3.578,7	8.062,7	1.526,9	9.589,6	23.518,2	33.107,8	70,2	
	Total	5.074,1	5.636,2	2.835,4	7.362,7	20.908,4	1.723,5	22.631,8	24.558,4	47.190,2	100,0	
11	BANTEN											
	A. Hutan	86,5	6,3	24,1	11,8	128,8	0,0	128,8	38,4	167,1	17,8	
	- Hutan Primer	7,3	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	7,3	0,8	
	- Hutan Sekunder	54,1	4,2	3,3	0,7	62,3	0,0	62,3	3,6	65,9	7,0	
	- Hutan Tanaman *	25,2	2,1	20,9	11,1	59,1	-	59,1	34,7	93,9	10,0	
	B. Non Hutan	26,4	6,1	25,3	15,2	73,0	-	73,0	699,0	772,1	82,2	
	Total	113,0	12,4	49,4	27,0	201,8	-	201,8	737,4	939,2	100,0	
12	DKI JAKARTA											
	A. Hutan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	
	- Hutan Primer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Hutan Sekunder	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,5	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	B. Non Hutan	0,2	0,0	-	0,2	0,3	-	0,3	64,7	65,1	99,5	
	Total	0,3	0,0	-	0,2	0,5	-	0,5	64,9	65,3	100,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	JAWA BARAT											
	A. Hutan	110,0	191,7	107,1	106,1	514,9	0,0	514,9	135,1	650,0	17,6	
	- Hutan Primer	8,5	3,6	1,4	0,0	13,5	0,0	13,5	0,2	13,7	0,4	
	- Hutan Sekunder	66,3	69,8	12,7	15,4	164,1	0,0	164,1	12,7	176,8	4,8	
	- Hutan Tanaman *	35,3	118,3	93,0	90,8	337,3	-	337,3	122,2	459,6	12,4	
	B. Non Hutan	22,2	99,6	83,0	96,8	301,7	-	301,7	2.746,9	3.048,6	82,4	
	Total	132,2	291,3	190,2	203,0	816,6	-	816,6	2.882,0	3.698,6	100,0	
14	JAWA TENGAH											
	A. Hutan	10,8	75,3	158,8	310,6	555,6	0,0	555,6	231,8	787,3	22,8	
	- Hutan Primer	0,0	7,6	0,8	0,0	8,4	0,0	8,4	0,0	8,4	0,2	
	- Hutan Sekunder	5,2	30,4	32,3	6,8	74,7	0,0	74,7	18,2	93,0	2,7	
	- Hutan Tanaman *	5,6	37,4	125,7	303,8	472,4	-	472,4	213,5	686,0	19,8	
	B. Non Hutan	5,6	9,1	25,1	51,7	91,5	-	91,5	2.577,7	2.669,2	77,2	
	Total	16,4	84,4	183,9	362,4	647,1	-	647,1	2.809,4	3.456,6	100,0	
15	DI YOGYAKARTA											
	A. Hutan	0,8	1,4	0,0	11,2	13,4	0,0	13,4	32,5	45,9	14,4	
	- Hutan Primer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Hutan Sekunder	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	18,1	18,5	5,8	
	- Hutan Tanaman *	0,6	1,2	-	11,2	13,0	-	13,0	14,4	27,4	8,6	
	B. Non Hutan	0,2	0,6	-	2,6	3,4	-	3,4	270,1	273,5	85,6	
	Total	0,9	2,1	-	13,9	16,8	-	16,8	302,6	319,4	100,0	
16	JAWA TIMUR											
	A. Hutan	186,9	284,3	0,0	669,5	1.140,7	0,0	1.140,7	294,9	1.435,6	29,7	
	- Hutan Primer	26,4	11,8	0,0	4,3	42,5	0,0	42,5	2,2	44,7	0,9	
	- Hutan Sekunder	147,3	178,3	0,0	64,3	389,9	0,0	389,9	43,8	433,7	9,0	
	- Hutan Tanaman *	13,1	94,2	-	601,0	708,3	-	708,3	248,9	957,2	19,8	
	B. Non Hutan	43,2	60,5	-	113,2	216,9	-	216,9	3.185,1	3.402,0	70,3	
	Total	230,1	344,7	-	782,8	1.357,6	-	1.357,6	3.480,0	4.837,7	100,0	
	JAWA											
	A. Hutan	395,1	559,1	290,1	1.109,3	2.353,5	-	2.353,5	732,8	3.086,3	23,2	
	- Hutan Primer	42,2	23,0	2,2	4,3	71,7	-	71,7	2,4	74,1	0,6	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Hutan Sekunder	273,2	283,0	48,3	87,2	691,7	-	691,7	96,6	788,2	5,9	
	- Hutan Tanaman *	79,7	253,1	239,6	1.017,8	1.590,2	-	1.590,2	633,8	2.224,0	16,7	
	B. Non Hutan	97,8	175,9	133,4	279,8	687,0	-	687,0	9.543,5	10.230,5	76,8	
	Total	492,9	734,9	423,5	1.389,1	3.040,5	-	3.040,5	10.276,3	13.316,8	100,0	
17	KALIMANTAN BARAT											
	A. Hutan	1.148,5	1.786,0	1.360,1	752,3	5.046,9	59,3	5.106,2	476,9	5.583,1	38,3	
	- Hutan Primer	966,6	937,0	293,9	28,3	2.225,8	2,0	2.227,8	4,3	2.232,1	15,3	
	- Hutan Sekunder	182,0	848,9	1.066,1	665,8	2.762,8	57,3	2.820,1	468,5	3.288,6	22,6	
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,1	58,2	58,3	-	58,3	4,0	62,4	0,4	
	B. Non Hutan	281,6	524,9	772,3	1.375,1	2.953,8	138,6	3.092,5	5.897,3	8.989,7	61,7	
	Total	1.430,1	2.310,9	2.132,4	2.127,4	8.000,7	197,9	8.198,7	6.374,1	14.572,8	100,0	
18	KALIMANTAN SELATAN											
	A. Hutan	134,1	360,2	78,3	245,9	818,5	4,3	822,8	74,2	897,0	24,2	
	- Hutan Primer	17,9	37,9	1,8	0,4	58,0	0,0	58,0	2,2	60,2	1,6	
	- Hutan Sekunder	80,8	321,8	74,7	181,7	659,0	3,2	662,1	33,2	695,3	18,7	
	- Hutan Tanaman *	35,4	0,5	1,8	63,8	101,5	1,1	102,6	38,8	141,4	3,8	
	B. Non Hutan	79,2	166,2	48,4	516,3	810,1	147,1	957,2	1.859,8	2.817,0	75,8	
	Total	213,3	526,4	126,7	762,2	1.628,6	151,4	1.780,0	1.934,0	3.713,9	100,0	
19	KALIMANTAN TENGAH											
	A. Hutan	1.079,0	943,2	2.854,3	1.981,4	6.857,9	601,6	7.459,5	149,6	7.609,1	49,8	
	- Hutan Primer	300,0	449,4	374,7	32,6	1.156,8	2,7	1.159,5	0,6	1.160,1	7,6	
	- Hutan Sekunder	779,0	493,8	2.474,6	1.803,4	5.550,8	579,6	6.130,4	127,1	6.257,5	41,0	
	- Hutan Tanaman *	-	0,0	5,0	145,3	150,3	19,3	169,6	21,9	191,5	1,3	
	B. Non Hutan	529,2	402,8	463,2	1.900,4	3.295,7	1.941,9	5.237,7	2.419,4	7.657,0	50,2	
	Total	1.608,3	1.346,1	3.317,5	3.881,8	10.153,6	2.543,5	12.697,2	2.569,0	15.266,2	100,0	
20&21	KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA											
	A. Hutan	1.411,6	2.769,6	4.681,7	2.596,2	11.459,1	102,0	11.561,1	1.561,8	13.122,9	67,3	
	- Hutan Primer	1.198,4	2.143,7	2.157,3	364,5	5.863,9	5,2	5.869,1	273,1	6.142,2	31,5	
	- Hutan Sekunder	211,8	625,5	2.521,0	1.811,6	5.169,9	94,2	5.264,1	1.225,4	6.489,5	33,3	
	- Hutan Tanaman *	1,4	0,4	3,3	420,1	425,3	2,5	427,9	63,3	491,2	2,5	
	B. Non Hutan	293,1	78,7	364,2	1.481,1	2.217,1	77,7	2.294,7	4.087,2	6.381,9	32,7	
	Total	1.704,7	2.848,2	5.045,9	4.077,3	13.676,1	179,7	13.855,8	5.649,0	19.504,8	100,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	KALIMANTAN											
	A. Hutan	3.773,2	5.859,0	8.974,4	5.575,8	24.182,3	767,2	24.949,6	2.262,5	27.212,0	51,3	
	- Hutan Primer	2.482,9	3.568,1	2.827,7	425,8	9.304,4	9,9	9.314,3	280,3	9.594,6	18,1	
	- Hutan Sekunder	1.253,5	2.290,0	6.136,5	4.462,5	14.142,5	734,3	14.876,8	1.854,1	16.730,9	31,5	
	- Hutan Tanaman *	36,8	0,9	10,2	687,4	735,4	23,0	758,4	128,0	886,4	1,7	
	B. Non Hutan	1.183,1	1.172,6	1.648,0	5.272,9	9.276,7	2.305,4	11.582,1	14.263,6	25.845,7	48,7	
	Total	4.956,3	7.031,6	10.622,4	10.848,7	33.459,1	3.072,6	36.531,6	16.526,1	53.057,7	100,0	
22	SULAWESI UTARA											
	A. Hutan	210,5	110,9	143,6	30,5	495,6	12,2	507,8	47,5	555,3	38,6	
	- Hutan Primer	128,8	62,0	34,9	10,3	236,1	0,0	236,1	6,9	243,0	16,9	
	- Hutan Sekunder	81,7	48,9	108,7	20,2	259,5	12,2	271,7	40,6	312,3	21,7	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	B. Non Hutan	34,6	50,9	65,3	33,8	184,6	2,5	187,1	697,1	884,3	61,4	
	Total	245,2	161,8	208,9	64,4	680,2	14,7	694,9	744,6	1.439,5	100,0	
23	GORONTALO											
	A. Hutan	184,6	179,5	193,3	63,1	620,5	58,8	679,3	13,4	692,7	57,8	
	- Hutan Primer	129,8	77,2	60,8	6,2	273,9	1,2	275,1	1,8	276,9	23,1	
	- Hutan Sekunder	54,9	102,3	132,3	56,9	346,4	57,7	404,0	11,6	415,6	34,7	
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,2	-	0,2	-	0,2	0,0	0,2	0,0	
	B. Non Hutan	12,0	25,1	57,8	26,8	121,8	23,6	145,4	360,4	505,8	42,2	
	Total	196,7	204,6	251,1	89,9	742,2	82,4	824,7	373,8	1.198,5	100,0	
24	SULAWESI TENGAH											
	A. Hutan	563,8	1.165,7	1.175,3	295,7	3.200,5	161,9	3.362,4	492,0	3.854,3	63,9	
	- Hutan Primer	456,9	790,0	616,2	125,8	1.989,0	64,3	2.053,3	147,0	2.200,3	36,5	
	- Hutan Sekunder	106,9	375,7	559,0	169,9	1.211,4	97,6	1.309,0	344,3	1.653,2	27,4	
	- Hutan Tanaman *	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,7	0,8	0,0	
	B. Non Hutan	84,6	110,4	215,6	106,2	516,8	55,4	572,2	1.608,2	2.180,4	36,1	
	Total	648,4	1.276,1	1.391,0	401,8	3.717,2	217,3	3.934,6	2.100,1	6.034,7	100,0	
25	SULAWESI TENGGARA											
	A. Hutan	198,9	952,3	383,5	204,5	1.739,2	34,5	1.773,7	123,2	1.896,8	52,5	
	- Hutan Primer	8,4	143,2	65,4	26,8	243,8	4,9	248,7	6,0	254,7	7,1	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Hutan Sekunder	190,5	809,0	318,1	176,3	1.494,0	29,5	1.523,5	116,8	1.640,3	45,4	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	1,4	1,4	0,1	1,5	0,4	1,9	0,1	
	B. Non Hutan	84,0	129,2	83,3	197,1	493,6	59,1	552,7	1.162,1	1.714,8	47,5	
	Total	282,9	1.081,5	466,9	401,6	2.232,8	93,6	2.326,4	1.285,2	3.611,6	100,0	
26	SULAWESI BARAT											
	A. Hutan	202,1	304,9	231,9	44,2	783,1	5,9	788,9	34,3	823,2	49,0	
	- Hutan Primer	118,8	119,7	73,7	10,6	322,8	0,1	323,0	0,1	323,1	19,2	
	- Hutan Sekunder	83,3	185,2	158,1	33,6	460,2	5,8	466,0	34,2	500,2	29,8	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	B. Non Hutan	13,1	147,1	98,8	27,7	286,7	16,7	303,4	553,6	857,0	51,0	
	Total	215,2	452,0	330,7	71,9	1.069,8	22,6	1.092,4	587,9	1.680,2	100,0	
27	SULAWESI SELATAN											
	A. Hutan	183,4	814,2	285,8	40,6	1.324,1	10,8	1.334,9	80,5	1.415,4	31,5	
	- Hutan Primer	106,4	374,3	97,0	2,0	579,7	5,0	584,7	10,3	595,0	13,2	
	- Hutan Sekunder	76,4	437,6	182,5	37,0	733,5	5,8	739,2	67,4	806,6	17,9	
	- Hutan Tanaman *	0,6	2,3	6,4	1,7	11,0	-	11,0	2,8	13,8	0,3	
	B. Non Hutan	61,0	418,5	209,0	83,4	771,9	12,2	784,1	2.298,9	3.083,0	68,5	
	Total	244,5	1.232,7	494,8	124,0	2.096,0	23,0	2.119,0	2.379,4	4.498,4	100,0	
	SULAWESI											
	A. Hutan	1.543,4	3.527,5	2.413,4	678,6	8.163,0	284,1	8.447,0	790,8	9.237,8	50,0	
	- Hutan Primer	949,2	1.566,5	948,0	181,6	3.645,3	75,5	3.720,8	172,2	3.892,9	21,1	
	- Hutan Sekunder	593,6	1.958,7	1.458,7	493,9	4.505,0	208,5	4.713,5	614,8	5.328,2	28,9	
	- Hutan Tanaman *	0,6	2,3	6,7	3,1	12,7	0,1	12,8	3,9	16,6	0,1	
	B. Non Hutan	289,4	881,1	730,0	474,9	2.375,4	169,5	2.545,0	6.680,3	9.225,2	50,0	
	Total	1.832,8	4.408,7	3.143,4	1.153,5	8.163,0	453,6	10.992,0	7.471,1	18.463,1	100,0	
28	BALI											
	A. Hutan	13,2	73,5	0,8	0,2	87,8	0,0	87,8	3,8	91,6	16,2	
	- Hutan Primer	3,5	43,2	0,0	0,0	46,7	0,0	46,7	0,2	46,8	8,3	
	- Hutan Sekunder	9,5	30,0	0,7	0,1	40,4	0,0	40,4	3,5	43,9	7,7	
	- Hutan Tanaman *	0,2	0,4	0,1	0,1	0,8	-	0,8	0,0	0,9	0,2	
	B. Non Hutan	9,7	22,2	5,9	1,7	39,4	-	39,4	435,8	475,3	83,8	
	Total	22,9	95,8	6,7	1,9	127,3	-	127,3	439,6	566,9	100,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	NUSA TENGGARA BARAT											
	A. Hutan	85,2	387,8	230,0	90,7	793,7	0,0	793,7	126,3	920,0	46,5	
	- Hutan Primer	45,6	245,2	98,4	18,0	407,3	0,0	407,3	9,8	417,0	21,1	
	- Hutan Sekunder	39,5	142,2	131,5	72,0	385,2	0,0	385,2	115,9	501,1	25,3	
	- Hutan Tanaman *	0,1	0,4	0,1	0,7	1,2	-	1,2	0,6	1,8	0,1	
	B. Non Hutan	82,8	42,7	56,7	59,9	242,1	-	242,1	818,1	1.060,2	53,5	
	Total	168,0	430,5	286,7	150,6	1.035,8	-	1.035,8	944,3	1.980,2	100,0	
30	NUSA TENGGARA TIMUR											
	A. Hutan	176,4	441,7	107,1	185,9	911,2	17,7	928,9	831,9	1.760,8	37,3	
	- Hutan Primer	114,1	127,9	26,1	44,1	312,2	1,6	313,8	154,6	468,4	9,9	
	- Hutan Sekunder	61,5	312,9	81,0	141,2	596,5	16,1	612,6	675,1	1.287,7	27,3	
	- Hutan Tanaman *	0,9	0,9	0,0	0,6	2,5	-	2,5	2,1	4,6	0,1	
	B. Non Hutan	88,5	242,9	62,6	102,3	496,3	60,8	557,0	2.404,7	2.961,8	62,7	
	Total	264,9	684,6	169,7	288,2	1.407,4	78,5	1.485,9	3.236,6	4.722,5	100,0	
	BALI NUSA TENGGARA											
	A. Hutan	274,9	903,1	337,9	276,8	1.792,7	17,7	1.810,4	961,9	2.772,3	38,1	
	- Hutan Primer	163,2	416,3	124,5	62,1	766,1	1,6	767,7	164,6	932,3	12,8	
	- Hutan Sekunder	110,5	485,1	213,2	213,2	1.022,1	16,1	1.038,2	794,5	1.832,7	25,2	
	- Hutan Tanaman *	1,2	1,7	0,2	1,5	4,5	-	4,5	2,8	7,3	0,1	
	B. Non Hutan	180,9	307,8	125,2	163,9	777,8	60,8	838,6	3.658,7	4.497,3	61,9	
	Total	455,9	1.210,8	463,1	440,7	2.570,5	78,5	2.649,0	4.620,5	7.269,6	100,0	
31	MALUKU UTARA											
	A. Hutan	204,8	479,6	534,5	359,5	1.578,3	273,4	1.851,7	95,1	1.946,8	62,2	
	- Hutan Primer	62,8	144,3	95,1	29,0	331,3	14,5	345,7	8,6	354,3	11,3	
	- Hutan Sekunder	141,9	335,0	435,2	300,1	1.212,1	257,3	1.469,4	86,4	1.555,8	49,7	
	- Hutan Tanaman *	-	0,2	4,2	30,5	34,9	1,7	36,6	0,1	36,7	1,2	
	B. Non Hutan	13,7	104,5	132,4	122,2	372,8	290,6	663,5	520,4	1.183,8	37,8	
	Total	218,5	584,1	666,9	481,7	1.951,1	564,1	2.515,2	615,4	3.130,6	100,0	
32	MALUKU											
	A. Hutan	368,8	513,6	753,1	428,4	2.063,9	808,5	2.872,4	157,6	3.030,0	65,6	
	- Hutan Primer	133,2	86,0	49,7	70,8	339,6	171,0	510,7	14,0	524,7	11,4	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- Hutan Sekunder	235,6	427,6	703,4	357,6	1.724,2	637,5	2.361,7	143,6	2.505,3	54,2	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	
	B. Non Hutan	51,6	113,6	141,2	215,3	521,7	516,4	1.038,0	554,1	1.592,1	34,4	
	Total	420,3	627,3	894,3	643,7	2.585,5	1.324,9	3.910,4	711,7	4.622,1	100,0	
	MALUKU											
	A. Hutan	573,5	993,2	1.287,5	787,9	3.642,2	1.082,0	4.724,1	252,7	4.976,9	64,2	
	- Hutan Primer	196,0	230,4	144,8	99,8	670,9	185,5	856,4	22,6	879,0	11,3	
	- Hutan Sekunder	377,5	762,6	1.138,6	657,7	2.936,3	894,8	3.831,1	230,0	4.061,2	52,4	
	- Hutan Tanaman *	-	0,2	4,2	30,5	34,9	1,7	36,6	0,1	36,7	0,5	
	B. Non Hutan	65,3	218,1	273,6	337,5	894,5	807,0	1.701,5	1.074,4	2.775,9	35,8	
	Total	638,8	1.211,3	1.561,1	1.125,4	4.536,7	1.888,9	6.425,6	1.327,1	7.752,8	100,0	
33	PAPUA											
	A. Hutan	5.224,9	6.989,2	5.228,0	3.929,1	21.371,2	2.759,0	24.130,2	952,4	25.082,6	80,7	
	- Hutan Primer	4.549,4	6.208,9	4.198,1	2.610,3	17.566,8	1.632,6	19.199,4	552,8	19.752,2	63,6	
	- Hutan Sekunder	675,6	780,3	1.029,8	1.318,2	3.803,8	1.125,2	4.929,1	399,4	5.328,5	17,1	
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	0,0	0,5	0,6	1,2	1,8	0,1	1,9	0,0	
	B. Non Hutan	1.511,3	826,0	733,3	810,3	3.880,9	1.357,4	5.238,3	756,1	5.994,3	19,3	
	Total	6.736,3	7.815,3	5.961,2	4.739,3	25.252,1	4.116,4	29.368,5	1.708,4	31.076,9	100,0	
34	PAPUA BARAT											
	A. Hutan	1.668,9	1.469,7	1.708,3	2.076,0	6.922,9	1.348,2	8.271,2	550,4	8.821,6	91,7	
	- Hutan Primer	1.514,7	1.203,5	1.213,0	1.020,2	4.951,4	667,1	5.618,5	188,0	5.806,5	60,3	
	- Hutan Sekunder	154,2	266,3	495,3	1.055,7	1.971,5	681,1	2.652,7	362,4	3.015,1	31,3	
	- Hutan Tanaman *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	B. Non Hutan	43,0	161,9	70,1	112,2	387,2	126,4	513,6	289,7	803,3	8,3	
	Total	1.711,9	1.631,6	1.778,5	2.188,2	7.310,1	1.474,7	8.784,8	840,1	9.624,9	100,0	
	PAPUA											
	A. Hutan	6.893,8	8.459,0	6.936,3	6.005,0	28.294,2	4.107,2	32.401,4	1.502,8	33.904,1	83,3	
	- Hutan Primer	6.064,1	7.412,4	5.411,1	3.630,6	22.518,2	2.299,7	24.817,9	740,8	25.558,7	62,8	
	- Hutan Sekunder	829,8	1.046,5	1.525,1	2.373,9	5.775,3	1.806,4	7.581,7	761,9	8.343,6	20,5	
	- Hutan Tanaman *	-	0,1	0,0	0,5	0,6	1,2	1,8	0,1	1,9	0,0	
	B. Non Hutan	1.554,3	987,9	803,4	922,5	4.268,1	1.483,8	5.751,9	1.045,8	6.797,6	16,7	
	Total	8.448,2	9.446,9	7.739,7	6.927,5	32.562,3	5.591,0	38.153,3	2.548,5	40.701,8	100,0	

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		JUMLAH	%	
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	INDONESIA											
A.	Hutan	17.425,2	24.094,0	21.536,8	18.217,5	81.273,5	6.454,8	87.728,3	7.543,6	95.271,9	50,7	
-	Hutan Primer	12.465,2	15.146,8	9.666,7	4.668,0	41.946,7	2.583,0	44.529,7	1.490,9	46.020,5	24,5	
-	Hutan Sekunder	4.823,0	8.648,1	11.517,6	9.887,7	34.876,4	3.839,5	38.715,9	5.111,7	43.827,6	23,3	
-	Hutan Tanaman *	137,0	299,1	352,6	3.661,7	4.450,4	32,3	4.482,7	941,0	5.423,7	2,9	
B.	Non Hutan	4.473,8	5.586,4	5.251,8	11.030,2	26.342,2	6.353,3	32.695,6	59.784,4	92.480,0	49,3	
	Total	21.898,9	29.680,5	26.788,6	29.247,7	107.615,7	12.808,1	120.423,8	67.328,0	187.751,9	100,0	

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

* : Hutan tanaman berdasarkan penafsiran penafsiran citra adalah kelas penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan tanaman

baik Hutan Tanaman Industri/UPT HK-HT maupun Hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan;

terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

Luas penutupan lahan ini berdasarkan data digital hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2016

Sumber: - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2015, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
 - Data digital kawasan hutan dan perairan berdasarkan SK Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan per Januari 2017,
 Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan
 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL I.3. ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2014 - 2015 (Ha/Th)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ACEH											
	A. Hutan Primer	139,5	18,4	-	-	157,9	-	157,9	13,4	171,3		
	- Hutan lahan kering primer	87,5	18,4	-	-	105,9	-	105,9	-	105,9		
	- Hutan rawa primer	52,1	-	-	-	52,1	-	52,1	13,4	65,4		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	862,3	245,6	-177,2	421,5	1.352,2	19,2	1.371,4	3.504,4	4.875,8		
	- Hutan lahan kering sekunder	-	244,3	-177,2	167,4	234,6	19,2	253,8	1.160,0	1.413,7		
	- Hutan rawa sekunder	590,5	-	-	-	590,5	-	590,5	2.073,9	2.664,4		
	- Hutan mangrove sekunder	271,8	1,3	-	254,0	527,1	-	527,1	270,6	797,6		
	C. Hutan Tanaman*	-	2,3	-	-1.603,7	-1.601,4	-	-1601,4	-214,3	-1.815,6		
	TOTAL	1.001,8	266,2	-177,2	-1.182,2	-91,3	19,2	-72	3.303,5	3.231,5		
2	SUMATERA UTARA											
	A. Hutan Primer	386,8	535,2	31,8	-	953,7	-	953,7	105,7	1.059,4		
	- Hutan lahan kering primer	386,8	535,2	31,8	-	953,7	-	953,7	5,9	959,6		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	99,8	99,8		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	-116,6	1.671,8	8.392,2	2.798,4	12.745,8	466,0	13.211,9	4.883,1	18.094,9		
	- Hutan lahan kering sekunder	139,2	1.646,0	8.231,1	3.184,8	13.201,1	466,0	13.667,1	2.363,5	16.030,6		
	- Hutan rawa sekunder	-	347,5	161,1	-	508,7	-	508,7	2.535,4	3.044,0		
	- Hutan mangrove sekunder	-255,8	-321,7	-	-386,4	-964,0	-	-964,0	-15,8	-979,7		
	C. Hutan Tanaman*	-	407,2	-	877,6	1.284,7	-	1.284,7	226,6	1.511,3		
	TOTAL	270,2	2.614,2	8.424,0	3.675,9	14.984,3	466,0	15.450,3	5.215,4	20.665,7		
3	RIAU											
	A. Hutan Primer	2,3	108,5	84,7	268,6	464,1	18,0	482,1	348,3	830,5		
	- Hutan lahan kering primer	2,3	108,5	84,7	-	195,5	0,0	195,5	187,2	382,7		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	268,6	268,6	16,8	285,5	93,1	378,5		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	1,2	1,2	68,0	69,2		
	B. Hutan Sekunder	9.163,7	4.504,3	9.599,5	5.522,2	28.789,6	3.518,3	32.307,9	7.800,7	40.108,7		
	- Hutan lahan kering sekunder	8.747,6	4.374,1	6.142,8	715,4	19.980,0	763,9	20.743,9	558,3	21.302,2		

NO.	PROVINSI/	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
		DEFORESTASI PADA		HUTAN TETAP			HPK	Jumlah			
	TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- Hutan rawa sekunder	416,1	39,7	3.220,7	4.806,8	8.483,3	2.736,4	11.219,7	7.109,0	18.328,7	
	- Hutan mangrove sekunder	-	90,4	235,9	-	326,3	17,9	344,3	133,4	477,7	
	C. Hutan Tanaman*	309,7	-	5.352,4	84.750,9	90.413,0	1.111,5	91.524,5	3.067,1	94.591,5	
	TOTAL	9.475,7	4.612,8	15.036,6	90.541,7	119.666,7	4.647,8	124.314,6	11.216,1	135.530,7	
4	SUMATERA BARAT										
	A. Hutan Primer	148,6	175,8	-	210,3	534,7	-	534,7	77,7	612,5	
	- Hutan lahan kering primer	148,6	175,8	-	-	324,5	-	324,5	23,1	347,5	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	210,3	210,3	-	210,3	54,6	264,9	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	802,8	2.060,8	1.682,3	2.628,0	7.174,0	2.267,4	9.441,4	1.622,6	11.064,0	
	- Hutan lahan kering sekunder	802,8	2.018,6	1.682,3	2.506,7	7.010,5	1.408,9	8.419,4	1.362,5	9.781,9	
	- Hutan rawa sekunder	-	42,2	-	79,9	122,1	858,5	980,6	260,1	1.240,7	
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	41,4	41,4	-	41,4	-	41,4	
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-162,1	-1.000,2	-1.162,3	-	-1.162,3	-15,3	-1.177,6	
	TOTAL	951,5	2.236,6	1.520,2	1.838,1	6.546,5	2.267,4	8.813,9	1.685,1	10.498,9	
5	JAMBI										
	A. Hutan Primer	4.102,5	16,0	5.860,8	241,0	10.220,3	-	10.220,3	719,4	10.939,7	
	- Hutan lahan kering primer	196,4	16,0	29,2	241,0	482,6	-	482,6	17,7	500,3	
	- Hutan rawa primer	3.904,6	-	5.831,6	-	9.736,2	-	9.736,2	701,7	10.437,9	
	- Hutan mangrove primer	1,5	-	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	
	B. Hutan Sekunder	189,3	1.377,0	1.863,8	4.359,5	7.789,6	-	7.789,6	1.226,5	9.016,1	
	- Hutan lahan kering sekunder	202,3	150,0	1.716,6	3.640,8	5.709,8	-	5.709,8	477,7	6.187,5	
	- Hutan rawa sekunder	3,3	1.227,0	147,2	758,0	2.135,5	-	2.135,5	748,8	2.884,3	
	- Hutan mangrove sekunder	-16,4	-	-	-39,3	-55,7	-	-55,7	-	-55,7	
	C. Hutan Tanaman*	-21,0	160,1	-141,9	-2.584,6	-2.587,5	-	-2.587,5	-475,3	-3.062,8	
	TOTAL	4.270,8	1.553,2	7.582,7	2.015,8	15.422,4	-	15.422,4	1.470,7	16.893,1	
6	SUMATERA SELATAN										
	A. Hutan Primer	1,3	907,3	-	7,2	915,8	-	915,8	31,3	947,1	
	- Hutan lahan kering primer	1,3	5,4	-	-	6,7	-	6,7	-	6,7	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	901,9	-	7,2	909,1	-	909,1	31,3	940,5	
	B. Hutan Sekunder	11.715,6	6.603,1	2.575,6	65.877,0	86.771,3	30,4	86.801,7	6.775,6	93.577,3	
	- Hutan lahan kering sekunder	9.128,6	4.438,0	2.575,6	604,1	16.746,2	-	16.746,2	3.926,1	20.672,3	
	- Hutan rawa sekunder	2.552,7	131,8	-	64.852,6	67.537,1	-	67.537,1	2.382,3	69.919,4	

NO.	PROVINSI/	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
	DEFORESTASI PADA	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
	TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- Hutan mangrove sekunder	34,4	2.033,3	-	420,3	2.488,0	30,4	2.518,4	467,2	2.985,6		
C.	Hutan Tanaman*	115,5	7.242,9	-3.865,1	179.738,8	183.232,2	83,2	183.315,3	12.937,2	196.252,5		
	TOTAL	11.832,4	14.753,3	-1.289,5	245.623,1	270.919,3	113,6	271.032,8	19.744,2	290.777,0		
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
A.	Hutan Primer	-	194,4	-	28,4	222,8	-	222,8	150,2	373,0		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7		
	- Hutan mangrove primer	-	194,4	-	28,4	222,8	-	222,8	146,6	369,3		
B.	Hutan Sekunder	247,0	2.159,1	-	10.965,9	13.371,9	-	13.371,9	5.547,5	18.919,4		
	- Hutan lahan kering sekunder	178,2	878,7	-	7.063,5	8.120,3	-	8.120,3	2.779,8	10.900,1		
	- Hutan rawa sekunder	68,8	1.157,9	-	3.869,8	5.096,5	-	5.096,5	2.383,6	7.480,1		
	- Hutan mangrove sekunder	-	122,5	-	32,6	155,0	-	155,0	384,1	539,1		
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	247,0	2.353,5	-	10.994,2	13.594,7	-	13.594,7	5.697,7	19.292,3		
8	BENGKULU											
A.	Hutan Primer	-	-	4,4	-	4,4	-	4,4	-	4,4		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	4,4	-	4,4	-	4,4	-	4,4		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	Hutan Sekunder	1.291,5	60,6	637,9	59,7	2.049,7	85,5	2.135,2	1.993,5	4.128,7		
	- Hutan lahan kering sekunder	1.291,5	60,6	637,9	59,7	2.049,7	85,5	2.135,2	1.993,5	4.128,7		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	1.291,5	60,6	642,3	59,7	2.054,1	85,5	2.139,6	1.993,5	4.133,1		
9	LAMPUNG											
A.	Hutan Primer	7,4	62,1	38,3	-	107,7	-	107,7	0,4	108,1		
	- Hutan lahan kering primer	7,4	62,1	38,3	-	107,7	-	107,7	0,4	108,1		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	Hutan Sekunder	1.165,4	171,9	23,5	-	1.360,9	-	1.360,9	0,01	1.360,9		
	- Hutan lahan kering sekunder	652,7	171,9	23,5	-	848,2	-	848,2	0,01	848,2		
	- Hutan rawa sekunder	512,7	-	-	-	512,7	-	512,7	-	512,7		

NO.	PROVINSI/	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah			
	DEFORESTASI PADA	TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	C. Hutan Tanaman*	29,6	-	-	22,2	51,8	-	51,8	-	51,8	
	TOTAL	29,6	-	-	22,2	51,8	-	51,8	-	51,8	
16	JAWA TIMUR										
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	840,3	303,2	-	61,5	1.205,0	-	1.205,0	126,5	1.331,5	
	- Hutan lahan kering sekunder	840,3	303,2	-	61,5	1.205,0	-	1.205,0	126,5	1.331,5	
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C. Hutan Tanaman*	351,6	728,6	-	1.335,9	2.416,1	-	2.416,1	4.001,6	6.417,7	
	TOTAL	1.191,9	1.031,8	-	1.397,4	3.621,0	-	3.621,0	4.128,1	7.749,2	
17	KALIMANTAN BARAT										
	A. Hutan Primer	168,0	138,1	48,9	3,8	358,7	0,2	358,9	2.009,5	2.368,4	
	- Hutan lahan kering primer	168,0	138,1	48,9	0,1	355,1	0,0	355,1	70,9	426,0	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	3,7	3,7	0,1	3,8	1.938,6	1.942,3	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	107,0	751,7	1.700,2	5.069,5	7.628,5	1.118,9	8.747,4	32.985,5	41.732,9	
	- Hutan lahan kering sekunder	23,3	337,8	1.314,5	411,7	2.087,2	13,9	2.101,1	6.811,7	8.912,8	
	- Hutan rawa sekunder	82,7	370,6	183,2	4.657,8	5.294,3	1.105,1	6.399,3	26.146,2	32.545,5	
	- Hutan mangrove sekunder	1,0	43,3	202,6	-	247,0	-	247,0	27,7	274,7	
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-3.352,3	-3.352,3	-	-3.352,3	-271,8	-3.624,1	
	TOTAL	275,0	889,8	1.749,1	1.721,0	4.634,9	1.119,1	5.754,0	34.723,2	40.477,2	
18	KALIMANTAN SELATAN										
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B. Hutan Sekunder	246,0	517,8	-601,4	8.580,0	8.742,4	24,0	8.766,4	5.388,4	14.154,8	
	- Hutan lahan kering sekunder	12,4	517,8	-601,4	8.575,1	8.503,9	-	8.503,9	3.762,5	12.266,4	
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	24,0	24,0	1.384,8	1.408,8	
	- Hutan mangrove sekunder	233,5	-	-	5,0	238,5	-	238,5	241,1	479,6	

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	C. Hutan Tanaman*	2.213,2	230,8	409,8	22.103,2	24.957,0	908,1	25.865,1	6.683,9	32.549,0		
	TOTAL	2.459,1	748,6	-191,6	30.683,3	33.699,4	932,1	34.631,5	12.072,3	46.703,8		
19	KALIMANTAN TENGAH											
	A. Hutan Primer	6,3	-	-	-	6,3	9,8	16,1	-	16,1		
	- Hutan lahan kering primer	6,3	-	-	-	6,3	-	6,3	-	6,3		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	9,8	9,8	-	9,8		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	46.112,1	50.156,5	3.512,0	33.126,8	132.907,4	30.456,4	163.363,8	23.578,9	186.942,7		
	- Hutan lahan kering sekunder	27,5	162,9	3.079,9	9.796,0	13.066,2	4.345,1	17.411,3	5.218,8	22.630,1		
	- Hutan rawa sekunder	46.048,9	49.944,0	432,1	23.238,3	119.663,3	26.082,2	145.745,5	18.357,0	164.102,6		
	- Hutan mangrove sekunder	35,7	49,7	-	92,5	177,9	29,0	206,9	3,1	210,0		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	16,9	-157	-140	0,2	-140	-177	-317		
	TOTAL	46.118,3	50.156,5	3.528,9	32.969,8	132.773,6	30.466,4	163.240,0	23.402,0	186.642,0		
20 & 21	KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA											
	A. Hutan Primer	-	-	144,2	1.631,7	1.775,8	-	1.775,8	1.780,2	3.556,0		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	144,2	425,4	569,6	-	569,6	865,5	1.435,1		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	1.204,2	1.204,2	-	1.204,2	800,7	2.005,0		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	2,0	2,0	-	2,0	114,0	116,0		
	B. Hutan Sekunder	1.855,1	93,8	4.998,5	23.929,4	30.876,8	370,8	31.247,6	62.089,8	93.337,3		
	- Hutan lahan kering sekunder	375,7	93,8	4.998,5	16.399,2	21.867,3	367,2	22.234,5	42.025,6	64.260,1		
	- Hutan rawa sekunder	786,3	-	-	7.345,7	8.131,9	3,5	8.135,5	16.111,6	24.247,1		
	- Hutan mangrove sekunder	693,1	-	-	184,5	877,6	-	877,6	3.952,5	4.830,1		
	C. Hutan Tanaman*	-98	-	-	3.478,9	3.380,5	-	3.380,5	657,0	4.037,5		
	TOTAL	1.756,7	93,8	5.142,7	29.040,0	36.033,1	370,8	36.403,9	64.526,9	100.930,8		
22	SULAWESI UTARA											
	A. Hutan Primer	-	-	89,0	19,5	108,5	-	108,5	64,9	173,4		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	89,0	19,5	108,5	-	108,5	64,5	172,9		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4		
	B. Hutan Sekunder	28,7	309,0	304,0	29,8	671,6	15,0	686,6	447,6	1.134,2		
	- Hutan lahan kering sekunder	28,7	306,7	304,0	29,8	669,3	15,0	684,3	441,7	1.126,0		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	2,3	-	-	2,3	-	2,3	5,8	8,1		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	28,7	309,0	393,0	49,3	780,1	15,0	795,1	512,5	1.307,5		
23	GORONTALO											
	A. Hutan Primer	12,3	50,1	288,8	-	351,2	-	351,2	28,0	379,2		
	- Hutan lahan kering primer	12,3	24,7	288,8	-	325,8	-	325,8	28,0	353,8		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	25,4	-	-	25,4	-	25,4	-	25,4		
	B. Hutan Sekunder	476,8	834,6	6.359,5	4.424,1	12.095,1	700,3	12.795,4	1.676,8	14.472,2		
	- Hutan lahan kering sekunder	476,8	666,2	6.359,5	4.424,1	11.926,7	700,3	12.626,9	1.625,5	14.252,5		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	168,4	-	-	168,4	-	168,4	51,3	219,7		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	489,2	884,7	6.648,4	4.424,1	12.446,3	700,3	13.146,6	1.704,8	14.851,4		
24	SULAWESI TENGAH											
	A. Hutan Primer	190,0	456,3	1.134,7	271,3	2.052,4	271,7	2.324,1	1.809,1	4.133,2		
	- Hutan lahan kering primer	190,0	365,4	1.132,4	271,3	1.959,2	271,7	2.230,9	1.802,6	4.033,5		
	- Hutan rawa primer	-	90,9	-	-	90,9	-	90,9	-	90,9		
	- Hutan mangrove primer	-	-	2,3	-	2,3	-	2,3	6,5	8,7		
	B. Hutan Sekunder	315,6	1.139,8	4.402,0	992,8	6.850,2	1.372,0	8.222,2	9.020,9	17.243,1		
	- Hutan lahan kering sekunder	315,6	1.118,9	4.402,0	992,8	6.829,3	1.372,0	8.201,3	8.938,7	17.139,9		
	- Hutan rawa sekunder	-	20,9	-	-	20,9	-	20,9	82,0	102,9		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	505,6	1.596,2	5.536,7	1.264,1	8.902,6	1.643,7	10.546,3	10.829,9	21.376,3		
25	SULAWESI TENGGARA											
	A. Hutan Primer	-	51,5	417,8	-	469,4	-	469,4	151,5	620,9		
	- Hutan lahan kering primer	-	51,5	417,8	-	469,4	-	469,4	151,5	620,9		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	343,1	631,6	1.118,0	1.221,6	3.314,3	1.330,0	4.644,3	1.455,6	6.099,9		
	- Hutan lahan kering sekunder	343,1	515,0	1.118,0	1.221,6	3.197,7	1.330,0	4.527,7	1.414,8	5.942,5		
	- Hutan rawa sekunder	-	69,0	-	-	69,0	-	69,0	18,4	87,4		
	- Hutan mangrove sekunder	-	47,6	-	-	47,6	-	47,6	22,4	70,0		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	22,9	22,9	-	22,9	-	22,9		
	TOTAL	-	51,5	3,1	22,9	77,5	-	77,5	0,0	77,5		
29	NUSA TENGGARA BARAT											
	A. Hutan Primer	13,6	94,7	48,0	67,0	223,4	-	223,4	48,1	271,5		
	- Hutan lahan kering primer	13,6	94,7	48,0	67,0	223,4	-	223,4	48,1	271,5		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	482,7	1.757,8	3.027,8	3.386,9	8.655,1	-	8.655,1	138,6	8.793,8		
	- Hutan lahan kering sekunder	482,7	1.757,8	3.027,8	3.386,9	8.655,1	-	8.655,1	137,1	8.792,2		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6		
	C. Hutan Tanaman*	17,8	-	-	-	17,8	-	17,8	0,0	17,9		
	TOTAL	514,1	1.852,6	3.075,8	3.453,9	8.896,4	-	8.896,4	186,8	9.083,2		
30	NUSA TENGGARA TIMUR											
	A. Hutan Primer	129,2	16,1	-	0,6	145,9	-	145,9	443,6	589,5		
	- Hutan lahan kering primer	129,2	-	-	0,6	129,8	-	129,8	196,9	326,6		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	16,1	-	-	16,1	-	16,1	246,7	262,9		
	B. Hutan Sekunder	-10,8	1.305,7	410,0	1.085,0	2.790,0	26,7	2.816,8	10.525,7	13.342,5		
	- Hutan lahan kering sekunder	88,5	1.305,7	410,0	1.085,0	2.889,2	26,7	2.916,0	10.775,8	13.691,8		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-99,2	0,0	-	-	-99,2	-	-99,2	-250,1	-349,3		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	118,4	1.321,8	410,0	1.085,6	2.935,9	26,7	2.962,7	10.969,3	13.932,0		
31	MALUKU UTARA											
	A. Hutan Primer	-	5,9	472,7	32,6	511,3	0,0	511,3	0,2	511,5		
	- Hutan lahan kering primer	-	5,9	472,4	32,6	510,9	-	510,9	-	510,9		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	0,4	-	0,4	0,0	0,4	0,2	0,6		
	B. Hutan Sekunder	3,3	145,3	2.970,6	3.698,4	6.817,6	2.992,8	9.810,3	1.629,7	11.440,1		
	- Hutan lahan kering sekunder	3,3	145,3	2.965,5	3.698,4	6.812,5	2.988,4	9.800,9	1.629,7	11.430,6		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	5,0	-	5,0	4,4	9,5	-	9,5		

NO.	PROVINSI/	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
	DEFORESTASI PADA	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
	TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	3,3	151,3	3.443,3	3.731,0	7.328,8	2.992,8	10.321,6	1.629,9	11.951,5		
32	MALUKU											
	A. Hutan Primer	35,4	-	4,9	0,7	41,1	29,8	70,9	68,6	139,5		
	- Hutan lahan kering primer	35,4	-	4,9	0,7	41,1	27,9	69,0	18,5	87,5		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	0,2	0,2	40,9	41,2		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	1,7	1,7	9,1	10,8		
	B. Hutan Sekunder	49,2	211,6	355,4	396,0	1.012,2	1.787,2	2.799,4	1.994,6	4.794,0		
	- Hutan lahan kering sekunder	48,8	211,6	355,4	385,6	1.001,4	1.673,2	2.674,6	1.839,4	4.514,1		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	0,4	-	-	10,4	10,8	114,0	124,8	155,2	279,9		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	84,6	211,6	360,3	396,7	1.053,3	1.817,0	2.870,2	2.063,2	4.933,5		
33	PAPUA											
	A. Hutan Primer	2.004,1	649,0	1.462,9	905,8	5.021,7	1.632,6	6.654,3	12.528,6	19.182,9		
	- Hutan lahan kering primer	466,2	227,9	35,4	571,1	1.300,6	569,5	1.870,1	10.367,1	12.237,2		
	- Hutan rawa primer	837,5	79,9	1.316,3	259,9	2.493,5	1.063,1	3.556,6	2.124,6	5.681,2		
	- Hutan mangrove primer	700,4	341,2	111,2	74,8	1.227,6	0,0	1.227,7	36,9	1.264,5		
	B. Hutan Sekunder	10.386,2	6.182,3	4.403,4	2.123,9	23.095,8	4.409,6	27.505,4	21.169,6	48.675,0		
	- Hutan lahan kering sekunder	463,6	4.989,4	3.629,8	1.361,4	10.444,2	1.012,5	11.456,7	18.725,2	30.181,9		
	- Hutan rawa sekunder	9.798,6	1.191,5	745,5	762,4	12.498,1	3.397,1	15.895,2	2.444,4	18.339,6		
	- Hutan mangrove sekunder	124,0	1,4	28,1	-	153,5	-	153,5	-	153,5		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	12.390,3	6.831,3	5.866,3	3.029,7	28.117,6	6.042,2	34.159,7	33.698,2	67.857,9		
34	PAPUA BARAT											
	A. Hutan Primer	286,5	574,1	341,8	63,9	1.266,3	242,0	1.508,2	5.371,0	6.879,2		
	- Hutan lahan kering primer	282,4	563,8	183,1	-	1.029,2	70,2	1.099,4	5.266,5	6.365,9		
	- Hutan rawa primer	4,1	-	158,6	63,9	226,7	151,5	378,2	103,5	481,6		
	- Hutan mangrove primer	-	10,3	-	-	10,3	20,3	30,6	1,0	31,6		
	B. Hutan Sekunder	198,3	125,9	76,2	49,9	450,2	737,6	1.187,8	4.240,8	5.428,5		
	- Hutan lahan kering sekunder	198,3	125,4	76,2	49,9	449,7	680,1	1.129,8	4.230,8	5.360,6		
	- Hutan rawa sekunder	-	0,5	-	-	0,5	35,8	36,4	9,9	46,3		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	21,6	21,6	-	21,6		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		TIPE HUTAN	HK	HL	HPT	HP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	484,8	700,0	417,9	113,8	1.716,5	979,6	2.696,0	9.611,7	12.307,7		
	INDONESIA											
	A. Hutan Primer	7.702,5	5.468,8	10.598,2	3.756,7	27.526,2	2.241,9	29.768,1	25.844,0	55.612,1		
	- Hutan lahan kering primer	2.202,2	3.808,7	3.177,8	1.633,7	10.822,5	939,4	11.761,8	19.183,3	30.945,2		
	- Hutan rawa primer	4.798,3	170,8	7.306,5	2.010,6	14.286,2	1.241,5	15.527,7	5.974,6	21.502,4		
	- Hutan mangrove primer	701,9	1.489,4	113,9	112,4	2.417,6	61,0	2.478,6	686,0	3.164,6		
	B. Hutan Sekunder	87.328,9	89.957,7	59.853,3	181.423,2	418.563,1	52.576,2	471.139,3	214.415,6	685.554,9		
	- Hutan lahan kering sekunder	25.445,9	32.273,2	54.189,2	70.283,7	182.191,9	17.842,8	200.034,7	126.060,7	326.095,4		
	- Hutan rawa sekunder	60.860,5	54.542,8	4.889,8	110.508,3	230.801,4	34.273,3	265.074,7	82.129,0	347.203,7		
	- Hutan mangrove sekunder	1.022,5	3.141,7	774,3	631,3	5.569,7	460,2	6.029,9	6.225,9	12.255,8		
	C. Hutan Tanaman*	4.659,8	9.075,2	1.835,8	297.026,3	312.597,1	2.102,9	314.700,1	36.314,4	351.014,4		
	TOTAL	99.691,1	104.501,8	72.287,3	482.206,2	758.686,4	56.921,1	815.607,5	276.574,0	1.092.181,5		

Ket. * : Hutan Lainnya berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya.

Deforestasi pada Hutan Lainnya di dalam kawasan hutan HK dan/atau HL , tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT

Sumber: Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2014 dan 2015, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL I.4. ANGKA DEFORESTASI INDONESIA DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN PER PROVINSI TAHUN 2015 - 2016 (Ha/Th)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ACEH											
	A. Hutan Primer	985,0	645,7	-	-	1.630,7	-	1.630,7	2,5	1.633,2		
	- Hutan lahan kering primer	905,5	645,7	-	-	1.551,2	-	1.551,2	2,5	1.553,7		
	- Hutan rawa primer	79,5	-	-	-	79,5	-	79,5	-	79,5		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	1.026,9	3.833,6	854,5	4.883,0	10.598,0	54,7	10.652,7	10.474,2	21.126,8		
	- Hutan lahan kering sekunder	322,4	3.559,8	854,5	4.833,2	9.569,9	54,7	9.624,6	8.017,6	17.642,2		
	- Hutan rawa sekunder	704,4	49,1	-	8,8	762,3	-	762,3	1.990,2	2.752,5		
	- Hutan mangrove sekunder	-	224,7	-	41,0	265,7	-	265,7	466,4	732,1		
	C. Hutan Tanaman*	110,7	90,3	-36,9	49,2	213,2	26,4	239,6	72,0	311,6		
	TOTAL	2.122,6	4.569,6	817,6	4.932,2	12.441,9	81,1	12.523,0	10.548,6	23.071,6		
2	SUMATERA UTARA											
	A. Hutan Primer	434,9	361,7	62,2	9,8	868,5	-	868,5	56,7	925,2		
	- Hutan lahan kering primer	434,9	361,7	62,2	9,8	868,5	-	868,5	49,7	918,2		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	-4,9	1.237,4	2.736,0	1.023,1	4.991,5	256,9	5.248,4	1.418,0	6.666,4		
	- Hutan lahan kering sekunder	-47,7	1.303,1	2.547,1	894,2	4.696,7	256,9	4.953,6	1.023,1	5.976,7		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	188,9	49,4	238,3	-	238,3	404,6	642,9		
	- Hutan mangrove sekunder	42,8	-65,8	-	79,5	56,5	-	56,5	-9,7	46,7		
	C. Hutan Tanaman*	-	822,9	277,7	689,8	1.790,3	-	1.790,3	332,3	2.122,7		
	TOTAL	429,9	2.421,9	3.075,8	1.722,6	7.650,3	256,9	7.907,3	1.807,0	9.714,3		
3	RIAU											
	A. Hutan Primer	172,4	343,3	273,4	119,0	908,1	144,8	1.053,0	113,0	1.166,0		
	- Hutan lahan kering primer	143,1	343,3	254,1	-	740,4	90,3	830,8	31,0	861,8		
	- Hutan rawa primer	29,3	-	-	119,0	148,3	54,5	202,8	76,0	278,8		
	- Hutan mangrove primer	-	-	19,4	-	19,4	-	19,4	6,0	25,4		
	B. Hutan Sekunder	1.940,6	2.327,2	4.692,6	4.019,2	12.979,7	2.655,2	15.634,9	3.862,6	19.497,5		
	- Hutan lahan kering sekunder	1.503,0	2.215,7	3.226,1	252,8	7.197,6	815,0	8.012,6	991,2	9.003,8		
	- Hutan rawa sekunder	437,6	-32,1	1.490,2	3.788,9	5.684,6	1.407,8	7.092,3	2.436,5	9.528,8		
	- Hutan mangrove sekunder	-	143,7	-23,7	-22,4	97,5	432,4	529,9	434,9	964,9		
	C. Hutan Tanaman*	53,3	9,7	876,6	128,4	1.068,0	609,6	1.677,6	1.849,8	3.527,4		
	TOTAL	2.166,3	2.680,2	5.842,7	4.266,7	14.955,9	3.409,6	18.365,4	5.825,4	24.190,9		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	SUMATERA BARAT											
	A. Hutan Primer	1.632,1	1.055,3	165,0	9,1	2.861,4	429,7	3.291,1	485,7	3.776,8		
	- Hutan lahan kering primer	1.632,1	1.055,3	165,0	9,1	2.861,4	429,7	3.291,1	447,6	3.738,7		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	38,1	38,1		
	B. Hutan Sekunder	91,2	-1.989,1	3.750,8	1.745,7	3.598,6	2.540,1	6.138,8	-878,1	5.260,6		
	- Hutan lahan kering sekunder	91,2	-2.183,8	3.750,8	1.546,9	3.205,1	2.243,2	5.448,3	-1.053,2	4.395,1		
	- Hutan rawa sekunder	-	194,7	-	174,8	369,5	296,9	666,5	160,2	826,7		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	24,0	24,0	-	24,0	14,8	38,8		
	C. Hutan Tanaman*	-	4,8	-135,5	-1.601,0	-1.731,7	500,9	-1.230,7	11,1	-1.219,6		
	TOTAL	1.723,3	-929,0	3.780,2	153,8	4.728,4	3.470,8	8.199,1	-381,4	7.817,8		
5	JAMBI											
	A. Hutan Primer	16.756,0	766,8	3.783,4	2.266,0	23.572,2	-	23.572,2	2.439,8	26.012,0		
	- Hutan lahan kering primer	5.513,7	766,8	1.132,6	2.266,0	9.679,1	-	9.679,1	2.086,4	11.765,5		
	- Hutan rawa primer	11.242,3	-	2.650,8	-	13.893,1	-	13.893,1	353,4	14.246,5		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	847,7	478,4	7.557,5	8.925,9	17.809,6	22,4	17.832,0	-610,2	17.221,8		
	- Hutan lahan kering sekunder	815,9	-685,8	7.659,1	8.182,9	15.972,0	6,2	15.978,2	-1.149,9	14.828,3		
	- Hutan rawa sekunder	2,7	1.164,2	-139,3	732,8	1.760,4	-	1.760,4	742,1	2.502,4		
	- Hutan mangrove sekunder	29,1	0,0	37,8	10,3	77,2	16,2	93,4	-202,3	-108,9		
	C. Hutan Tanaman*	-	-25,8	-1.188,7	-15.926,3	-17.140,8	-0,4	-17.141,2	-1.271,3	-18.412,5		
	TOTAL	17.603,7	1.219,4	10.152,3	-4.734,3	24.241,0	22,0	24.263,0	558,4	24.821,4		
6	SUMATERA SELATAN											
	A. Hutan Primer	424,3	419,8	-	-	844,2	-	844,2	80,2	924,4		
	- Hutan lahan kering primer	396,4	403,8	-	-	800,3	-	800,3	-	800,3		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	27,9	16,0	-	-	43,9	-	43,9	80,2	124,2		
	B. Hutan Sekunder	1.292,3	3.365,8	6.342,1	2.081,8	13.082,0	-	13.082,0	1.694,6	14.776,6		
	- Hutan lahan kering sekunder	1.361,4	2.425,9	6.342,1	1.014,0	11.143,4	-	11.143,4	690,9	11.834,3		
	- Hutan rawa sekunder	550,2	217,3	-	1.066,1	1.833,6	-	1.833,6	537,1	2.370,7		
	- Hutan mangrove sekunder	-619,2	722,6	-	1,7	105,0	-	105,0	466,5	571,6		
	C. Hutan Tanaman*	198,4	-	442,4	-11.460,4	-10.819,6	-17,3	-10.836,9	-569,9	-11.406,8		
	TOTAL	1.915,1	3.785,6	6.784,4	-9.378,6	3.106,6	-17,3	3.089,3	1.204,8	4.294,2		
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG											
	A. Hutan Primer	5,1	250,2	-	163,1	418,4	-	418,4	505,6	924,0		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	178,0	178,0		
	- Hutan mangrove primer	5,1	250,2	-	163,1	418,4	-	418,4	327,5	745,9		
B.	Hutan Sekunder	76,0	-669,5	-	519,9	-73,6	-	-73,6	842,0	768,4		
	- Hutan lahan kering sekunder	3,5	-85,9	-	110,8	28,4	-	28,4	331,4	359,9		
	- Hutan rawa sekunder	129,0	110,7	-	245,9	485,6	-	485,6	537,3	1.023,0		
	- Hutan mangrove sekunder	-56,6	-694,3	-	163,2	-587,6	-	-587,6	-26,8	-614,5		
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	81,2	-419,4	-	683,0	344,8	-	344,8	1.347,5	1.692,3		
8	BENGKULU											
	A. Hutan Primer	263,6	856,7	192,1	-	1.312,4	-	1.312,4	31,6	1.344,0		
	- Hutan lahan kering primer	263,6	856,7	192,1	-	1.312,4	-	1.312,4	31,6	1.344,0		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	Hutan Sekunder	-1.995,5	-673,8	2.539,6	201,5	71,8	-22,1	49,7	85,2	134,9		
	- Hutan lahan kering sekunder	-1.995,5	-673,8	2.539,6	201,5	71,8	-22,1	49,7	85,2	134,9		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C.	Hutan Tanaman*	131,4	-	-	-	131,4	-	131,4	188,4	319,9		
	TOTAL	-1.600,5	182,9	2.731,7	201,5	1.515,6	-22,1	1.493,5	305,2	1.798,8		
9	LAMPUNG											
	A. Hutan Primer	0,1	309,6	515,4	-	825,1	-	825,1	-	825,1		
	- Hutan lahan kering primer	0,1	309,6	515,4	-	825,1	-	825,1	-	825,1		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	Hutan Sekunder	361,2	-11,6	201,3	-18,6	532,4	-	532,4	-510,8	21,6		
	- Hutan lahan kering sekunder	-130,5	-11,6	201,3	-	59,2	-	59,2	52,9	112,1		
	- Hutan rawa sekunder	552,2	-	-	-	552,2	-	552,2	-124,9	427,2		
	- Hutan mangrove sekunder	-60,4	-	-	-18,6	-79,0	-	-79,0	-438,8	-517,8		
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	26,7	26,7	-	26,7	340,3	366,9		
	TOTAL	361,3	297,9	716,8	8,1	1.384,1	-	1.384,1	-170,5	1.213,6		
10	KEPULAUAN RIAU											
	A. Hutan Primer	4,3	77,7	206,3	37,7	326,1	259,8	585,8	435,6	1.021,4		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	90,6	-	90,6	-	90,6	285,8	376,3		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	KALIMANTAN BARAT											
	A. Hutan Primer	102,7	1.237,7	684,6	350,3	2.375,3	-	2.375,3	323,2	2.698,4		
	- Hutan lahan kering primer	102,7	1.237,7	682,9	283,8	2.307,1	-	2.307,1	177,3	2.484,4		
	- Hutan rawa primer	-	-	1,7	66,5	68,2	-	68,2	145,8	214,0		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	2.691,6	11.096,7	15.665,0	24.105,1	53.558,3	4.254,6	57.812,9	64.145,3	121.958,3		
	- Hutan lahan kering sekunder	609,1	5.403,1	14.568,1	7.780,6	28.360,8	69,4	28.430,2	17.064,6	45.494,7		
	- Hutan rawa sekunder	2.069,6	5.455,6	889,0	16.303,9	24.718,1	4.185,2	28.903,3	45.728,4	74.631,7		
	- Hutan mangrove sekunder	12,9	238,0	208,0	20,6	479,4	-	479,4	1.352,4	1.831,8		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-41,9	-41,9	-	-41,9	341,2	299,3		
	TOTAL	2.794,2	12.334,3	16.349,6	24.413,5	55.891,7	4.254,6	60.146,3	64.809,7	124.956,0		
18	KALIMANTAN SELATAN											
	A. Hutan Primer	361,6	131,7	-	-	493,4	-	493,4	82,5	575,9		
	- Hutan lahan kering primer	285,9	131,7	-	-	417,6	-	417,6	-	417,6		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	75,7	-	-	-	75,7	-	75,7	82,5	158,3		
	B. Hutan Sekunder	1.923,7	9.235,4	1.091,6	8.108,4	20.359,0	2.543,0	22.902,0	4.500,9	27.402,9		
	- Hutan lahan kering sekunder	767,6	9.235,4	1.091,6	7.636,5	18.731,1	-	18.731,1	2.054,5	20.785,6		
	- Hutan rawa sekunder	64,8	-	-	271,5	336,3	2.520,5	2.856,8	785,3	3.642,0		
	- Hutan mangrove sekunder	1.091,2	-	-	200,4	1.291,6	22,5	1.314,2	1.661,1	2.975,3		
	C. Hutan Tanaman*	-636,3	306,2	-	2.037,1	1.707,1	1.078,1	2.785,2	2.361,1	5.146,4		
	TOTAL	1.649,0	9.673,3	1.091,6	10.145,5	22.559,5	3.621,1	26.180,6	6.944,6	33.125,1		
19	KALIMANTAN TENGAH											
	A. Hutan Primer	-	-	20,2	35,5	55,8	94,7	150,5	-	150,5		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	20,2	-	20,2	-	20,2	-	20,2		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	35,5	35,5	2,7	38,2	-	38,2		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	92,1	92,1	-	92,1		
	B. Hutan Sekunder	17.604,8	4.483,7	5.237,1	32.011,6	59.337,3	29.039,1	88.376,3	8.613,7	96.990,0		
	- Hutan lahan kering sekunder	-226,0	193,0	4.247,2	12.250,6	16.464,8	7.891,9	24.356,7	2.326,8	26.683,5		
	- Hutan rawa sekunder	17.784,5	4.290,4	989,9	20.670,0	43.734,9	21.278,3	65.013,2	6.507,2	71.520,4		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- Hutan mangrove sekunder	264,3	442,5	-	-	706,8	-	706,8	185,0	891,7		
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-29,3	-	-29,3	-	-29,3	-	-29,3		
	TOTAL	758,1	550,1	764,0	232,2	2.304,4	-229,6	2.074,8	167,7	2.242,5		
23	SULAWESI TENGAH											
A.	Hutan Primer	424,3	1.680,3	6.277,6	1.086,1	9.468,3	281,3	9.749,6	1.055,2	10.804,7		
	- Hutan lahan kering primer	400,9	1.680,3	6.277,6	1.086,1	9.444,8	281,3	9.726,1	817,2	10.543,3		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	23,5	-	-	-	23,5	-	23,5	237,9	261,4		
B.	Hutan Sekunder	280,4	1.585,5	2.677,6	1.109,0	5.652,6	634,2	6.286,8	8.916,9	15.203,7		
	- Hutan lahan kering sekunder	280,4	1.623,4	2.677,6	1.109,0	5.690,5	634,2	6.324,7	7.821,0	14.145,7		
	- Hutan rawa sekunder	-	-14,8	-	-	-14,8	-	-14,8	635,2	620,4		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-23,1	-	-	-23,1	-	-23,1	460,7	437,6		
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	9,1	9,1	71,1	80,2		
	TOTAL	704,7	3.265,8	8.955,2	2.195,1	15.120,9	924,6	16.045,5	10.043,2	26.088,6		
24	SULAWESI TENGGARA											
A.	Hutan Primer	-	858,8	604,0	20,9	1.483,8	-	1.483,8	-	1.483,8		
	- Hutan lahan kering primer	-	858,8	604,0	20,9	1.483,8	-	1.483,8	-	1.483,8		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	Hutan Sekunder	362,8	-48,6	5.150,4	4.356,8	9.821,3	1.093,9	10.915,3	2.966,1	13.881,4		
	- Hutan lahan kering sekunder	362,8	-155,8	5.150,4	4.356,8	9.714,1	1.093,9	10.808,1	2.924,5	13.732,6		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	107,2	-	-	107,2	-	107,2	41,6	148,8		
C.	Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	362,8	810,2	5.754,4	4.377,7	11.305,1	1.093,9	12.399,0	2.966,1	15.365,2		
25	SULAWESI BARAT											
A.	Hutan Primer	74,3	68,1	72,1	6,9	221,5	-	221,5	-	221,5		
	- Hutan lahan kering primer	74,3	68,1	72,1	6,9	221,5	-	221,5	-	221,5		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B.	Hutan Sekunder	73,6	2.192,8	2.910,1	1.404,6	6.581,1	486,9	7.068,0	2.235,2	9.303,2		
	- Hutan lahan kering sekunder	73,6	2.269,0	2.904,4	1.404,6	6.651,6	387,4	7.039,0	1.846,4	8.885,4		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	128,8	128,8		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-76,3	5,7	-	-70,5	99,5	29,0	260,0	289,0		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	147,9	2.260,9	2.982,3	1.411,5	6.802,5	486,9	7.289,5	2.235,2	9.524,7		
26	SULAWESI SELATAN											
	A. Hutan Primer	-	2.627,4	694,7	-	3.322,1	-	3.322,1	478,7	3.800,8		
	- Hutan lahan kering primer	-	2.627,4	694,7	-	3.322,1	-	3.322,1	291,1	3.613,2		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	187,6	187,6		
	B. Hutan Sekunder	1.345,1	15.014,5	3.887,5	1.150,1	21.397,1	19,6	21.416,7	4.674,4	26.091,1		
	- Hutan lahan kering sekunder	1.334,6	14.214,0	3.423,7	1.150,1	20.122,4	19,6	20.142,0	3.309,4	23.451,4		
	- Hutan rawa sekunder	10,4	-	-	-	10,4	-	10,4	0,2	10,6		
	- Hutan mangrove sekunder	-	800,5	463,8	-	1.264,3	-	1.264,3	1.364,8	2.629,1		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	45,4	45,4		
	TOTAL	1.345,1	17.641,8	4.582,2	1.150,1	24.719,2	19,6	24.738,8	5.198,5	29.937,2		
27	BALI											
	A. Hutan Primer	49,2	166,2	0,002	0,1	215,5	-	215,5	251,8	467,3		
	- Hutan lahan kering primer	30,4	166,2	0,002	0,1	196,7	-	196,7	251,8	448,5		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	18,8	-	-	-	18,8	-	18,8	-	18,8		
	B. Hutan Sekunder	324,4	2.713,0	267,4	42,8	3.347,6	-	3.347,6	3.044,2	6.391,8		
	- Hutan lahan kering sekunder	228,8	2.713,0	265,9	42,8	3.250,5	-	3.250,5	3.004,5	6.255,0		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	95,6	-	1,5	-	97,1	-	97,1	39,7	136,8		
	C. Hutan Tanaman*	10,4	84,6	350,6	87,4	532,9	-	532,9	63,5	596,4		
	TOTAL	384,0	2.963,8	617,9	130,3	4.096,0	-	4.096,0	3.359,5	7.455,5		
28	NUSA TENGGARA BARAT											
	A. Hutan Primer	318,7	1.506,2	420,6	376,0	2.621,4	-	2.621,4	1.062,0	3.683,4		
	- Hutan lahan kering primer	269,4	1.333,3	333,2	376,0	2.311,9	-	2.311,9	657,7	2.969,7		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	49,3	172,9	87,3	-	309,5	-	309,5	404,2	713,7		
	B. Hutan Sekunder	1.290,3	3.118,3	2.774,7	2.653,7	9.837,1	-	9.837,1	8.585,1	18.422,2		
	- Hutan lahan kering sekunder	1.193,9	3.076,8	2.640,0	2.647,7	9.558,5	-	9.558,5	7.496,6	17.055,1		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	96,4	41,4	134,7	6,0	278,6	-	278,6	1.088,4	1.367,0		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	C. Hutan Tanaman*	35,3	7,1	-	61,0	103,4	-	103,4	153,5	256,8		
	TOTAL	1.644,4	4.631,5	3.195,3	3.090,7	12.561,9	-	12.561,9	9.800,5	22.362,4		
29	NUSA TENGGARA TIMUR											
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	MALUKU UTARA											
	A. Hutan Primer	-	187,1	914,6	17,5	1.119,1	39,0	1.158,1	379,4	1.537,5		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	914,6	17,5	932,0	-	932,0	-	932,0		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	38,1	38,1	-	38,1		
	- Hutan mangrove primer	-	187,1	-	-	187,1	0,9	187,9	379,4	567,3		
	B. Hutan Sekunder	254,2	4.692,9	5.801,8	4.113,5	14.862,3	6.710,0	21.572,4	2.682,3	24.254,7		
	- Hutan lahan kering sekunder	254,2	4.493,5	5.801,8	4.113,5	14.663,0	6.706,4	21.369,4	2.622,9	23.992,3		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	199,4	-	-	199,4	3,6	203,0	59,4	262,4		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	254,2	4.879,9	6.716,3	4.131,0	15.981,4	6.749,1	22.730,5	3.061,7	25.792,2		
31	MALUKU											
	A. Hutan Primer	-	21,1	1.998,2	398,2	2.417,4	1.257,8	3.675,2	42,0	3.717,3		
	- Hutan lahan kering primer	-	21,1	1.998,2	398,2	2.417,4	1.060,5	3.477,9	3,9	3.481,8		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	5,0	5,0	21,4	26,4		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	192,3	192,3	16,8	209,1		
	B. Hutan Sekunder	51,8	-1.402,6	2.061,7	3.054,6	3.765,6	-621,9	3.143,6	54,5	3.198,1		
	- Hutan lahan kering sekunder	51,8	-1.249,7	2.061,7	1.416,6	2.280,4	2.018,6	4.299,0	-210,3	4.088,7		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	56,6	56,6		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-152,9	-	1.638,0	1.485,1	-2.640,5	-1.155,4	208,2	-947,2		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-14,9	-14,9	-	-14,9	-	-14,9		
	TOTAL	51,8	-1.381,5	4.059,9	3.437,9	6.168,0	635,9	6.803,9	96,5	6.900,5		
32	PAPUA											
	A. Hutan Primer	64,2	522,1	650,0	33,7	1.270,0	-	1.270,0	2.716,7	3.986,7		
	- Hutan lahan kering primer	-	522,1	198,7	33,7	754,4	-	754,4	1.913,9	2.668,3		
	- Hutan rawa primer	64,2	-	451,4	-	515,6	-	515,6	802,8	1.318,4		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	-	186,7	399,2	143,1	729,1	118,1	847,2	1.895,7	2.742,9		
	- Hutan lahan kering sekunder	-	186,7	82,1	143,1	412,0	85,4	497,5	1.740,6	2.238,0		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	317,1	-	317,1	32,6	349,7	155,2	504,9		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	64,2	708,8	1.049,3	176,8	1.999,1	118,1	2.117,2	4.612,4	6.729,6		
33	PAPUA BARAT											
	A. Hutan Primer	128,1	158,7	127,6	35,9	450,3	1.764,3	2.214,5	247,5	2.462,1		
	- Hutan lahan kering primer	-	158,7	93,9	19,0	271,6	1.671,4	1.943,0	146,9	2.089,9		
	- Hutan rawa primer	128,1	-	33,7	16,9	178,6	92,9	271,5	100,6	372,1		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	-	7,9	108,4	1.941,8	2.058,1	1.829,0	3.887,1	3.872,0	7.759,0		
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	108,4	1.941,8	2.050,2	1.829,0	3.879,2	3.872,0	7.751,2		
	- Hutan rawa sekunder	-	7,9	-	-	7,9	-	7,9	-	7,9		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	128,1	166,5	236,0	1.977,7	2.508,3	3.593,3	6.101,6	4.119,5	10.221,1		
	INDONESIA											
	A. Hutan Primer	22.852,4	14.352,7	19.006,4	5.131,8	61.343,3	4.271,4	65.614,7	12.543,9	78.158,5		
	- Hutan lahan kering primer	11.104,4	13.576,2	15.646,4	4.644,9	44.971,9	3.533,2	48.505,1	8.360,2	56.865,3		
	- Hutan rawa primer	11.543,3	-	3.137,8	258,2	14.939,3	421,6	15.360,9	2.053,8	17.414,7		
	- Hutan mangrove primer	204,7	776,5	222,2	228,7	1.432,1	316,6	1.748,6	2.129,8	3.878,5		
	B. Hutan Sekunder	34.072,0	63.393,4	87.532,2	152.967,1	337.964,7	52.191,8	390.156,5	180.781,4	570.937,9		
	- Hutan lahan kering sekunder	10.141,5	50.377,2	83.574,9	102.041,1	246.134,7	24.447,3	270.582,0	107.249,0	377.831,0		

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	- Hutan rawa sekunder	22.305,5	11.443,0	3.655,2	45.825,0	83.228,7	30.006,9	113.235,6	63.846,8	177.082,4		
	- Hutan mangrove sekunder	1.625,0	1.573,2	302,1	5.101,0	8.601,3	-2.262	6.338,9	9.685,5	16.024,4		
C.	Hutan Tanaman*	-96,8	1.299,8	1.725,8	-29.852,1	-26.923,3	2.418,4	-24.504,9	4.585,4	-19.919,5		
	TOTAL	56.827,6	79.045,9	108.264,4	128.246,8	372.384,7	58.881,5	431.266,3	197.910,6	629.176,9		

Ket. * : Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh Hutan Tanaman baik Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT maupun Hutan Tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dgn lingkungan sekitarnya.

Deforestasi pada Hutan Tanaman di dalam kawasan hutan KSA-KPA dan/atau HL , tidak diklasifikasikan sebagai Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HT

Sumber: Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2015 dan 2016, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL I.5 POTENSI TEGAKAN HUTAN DI INDONESIA

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Hutan lahan kering primer	14	198.27	123.75
		Hutan lahan kering sekunder	8	215.58	128.31
		Hutan rawa sekunder	1	147.39	69.61
2	BALI	Hutan lahan kering primer	8	126.47	80.65
		Hutan lahan kering sekunder	4	44.63	22.73
3	BANTEN	Hutan lahan kering sekunder	5	164.00	119.35
4	BENGKULU	Hutan lahan kering primer	15	174.65	104.60
		Hutan lahan kering sekunder	7	146.43	71.89
5	GORONTALO	Hutan lahan kering primer	5	206.96	139.35
		Hutan lahan kering sekunder	9	170.68	107.99
6	JAMBI	Hutan lahan kering primer	10	180.68	109.96
		Hutan lahan kering sekunder	2	66.50	20.65
		Hutan rawa sekunder	2	118.79	61.42
7	JAWA BARAT	Hutan lahan kering primer	7	130.23	76.76
		Hutan lahan kering sekunder	8	73.90	38.56
8	JAWA TIMUR	Hutan lahan kering sekunder	12	119.36	94.73
9	KALIMANTAN BARAT	Hutan lahan kering primer	65	184.22	112.40
		Hutan lahan kering sekunder	81	164.26	98.34
		Hutan rawa primer	2	182.91	94.29
		Hutan rawa sekunder	45	94.87	28.19
10	KALIMANTAN SELATAN	Hutan lahan kering primer	3	116.64	62.01
		Hutan lahan kering sekunder	5	88.44	53.11
11	KALIMANTAN TENGAH	Hutan lahan kering sekunder	5	165.70	87.93
		Hutan rawa sekunder	10	83.13	13.03
12	KALIMANTAN TIMUR	Hutan lahan kering primer	18	129.04	74.21
		Hutan lahan kering sekunder	101	105.30	53.30
13	KALIMANTAN UTARA	Hutan lahan kering primer	17	149.94	97.72
		Hutan lahan kering sekunder	30	140.62	80.69
		Hutan rawa sekunder	2	12.61	-
14	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Hutan lahan kering primer	1	37.87	1.86
		Hutan lahan kering sekunder	1	18.79	-

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
1	2	3	4	5	6
		Hutan rawa sekunder	5	25.18	7.87
15	KEPULAUAN RIAU	Hutan lahan kering sekunder	8	99.15	27.07
16	LAMPUNG	Hutan lahan kering primer	12	229.76	152.01
		Hutan lahan kering sekunder	10	102.39	60.91
17	MALUKU	Hutan lahan kering primer	4	138.17	75.84
		Hutan lahan kering sekunder	29	115.60	60.25
18	MALUKU UTARA	Hutan lahan kering primer	7	147.42	87.92
		Hutan lahan kering sekunder	31	131.32	82.11
19	NUSA TENGGARA BARAT	Hutan lahan kering primer	34	145.19	91.63
		Hutan lahan kering sekunder	16	61.62	26.60
20	NUSA TENGGARA TIMUR	Hutan lahan kering primer	4	85.87	36.94
		Hutan lahan kering sekunder	31	68.09	38.06
21	PAPUA	Hutan lahan kering primer	26	132.72	74.14
		Hutan lahan kering sekunder	17	124.43	68.09
		Hutan rawa primer	5	82.18	41.96
		Hutan rawa sekunder	4	28.78	5.51
22	PAPUA BARAT	Hutan lahan kering primer	9	163.32	92.19
		Hutan lahan kering sekunder	20	151.01	87.92
		Hutan rawa primer	1	102.34	51.58
23	RIAU	Hutan lahan kering primer	7	149.68	64.19
		Hutan lahan kering sekunder	14	166.24	80.19
		Hutan rawa primer	3	137.08	60.07
		Hutan rawa sekunder	31	105.63	31.63
24	SULAWESI BARAT	Hutan lahan kering primer	6	183.02	93.58
		Hutan lahan kering sekunder	13	97.68	50.41
25	SULAWESI SELATAN	Hutan lahan kering primer	9	101.31	41.60
		Hutan lahan kering sekunder	20	98.56	42.57
26	SULAWESI TENGAH	Hutan lahan kering primer	7	91.61	42.56
		Hutan lahan kering sekunder	39	88.04	41.05
27	SULAWESI TENGGARA	Hutan lahan kering primer	6	100.08	52.55
		Hutan lahan kering sekunder	20	99.77	57.70

No	Provinsi	Penutupan Lahan	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon (m ³ /ha)	
				Diameter 20 cm ke atas	Diameter 50 cm ke atas
1	2	3	4	5	6
28	SULAWESI UTARA	Hutan lahan kering primer	10	216.02	147.03
		Hutan lahan kering sekunder	14	202.56	136.11
29	SUMATERA BARAT	Hutan lahan kering primer	8	190.09	101.77
		Hutan lahan kering sekunder	22	147.98	77.71
		Hutan rawa sekunder	1	76.92	5.72
30	SUMATERA SELATAN	Hutan lahan kering primer	10	162.87	94.31
		Hutan lahan kering sekunder	10	115.52	65.24
		Hutan rawa sekunder	6	37.94	13.12
31	SUMATERA UTARA	Hutan lahan kering primer	14	179.20	97.04
		Hutan lahan kering sekunder	23	145.51	73.56
	INDONESIA	Hutan lahan kering primer	336	160.88	95.59
		Hutan lahan kering sekunder	615	123.50	68.51
		Hutan rawa primer	11	117.30	57.29
		Hutan rawa sekunder	107	87.20	25.40

Keterangan:

1. Data yang digunakan adalah data plot PSP kegiatan inventarisasi hutan nasional tahun 2010-2014
2. Nilai potensi tegakan adalah nilai potensi untuk seluruh jenis pohon

Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

PERENCANAAN KAWASAN HUTAN



**DIREKTORAT RENCANA,
PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

TABEL II.1. PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN HUTAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

No.	Jenis Rencana		Progres
1	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011, tanggal 28 Juni 2011
2	Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1 Rencana Makro Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Draft
		2 Rencana Makro Pemanfaatan Hutan	Proses Penyempurnaan
		3 Rencana Makro Pemantapan Hutan	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2013, tanggal 25 Juni 2013
		4 Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Proses Penetapan
		5 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Sumatera	Proses Penetapan
		6 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Proses Penetapan
		7 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Kalimantan	Proses Penetapan
		8 Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan Regional Sulawesi, Maluku, Papua	Proses Penetapan
3	Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP)	1 Aceh	Proses Penyusunan
		2 Sumatera Utara	Proses Pengesahan
		3 Sumatera Barat	Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012
		4 Jambi	Proses Penyempurnaan
		5 Riau	Proses Penyempurnaan
		6 Kepulauan Riau	Belum Menyusun
		7 Bengkulu	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013
		8 Kepulauan Bangka Belitung	Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014, tanggal 23 Juli 2014
		9 Sumatera Selatan	Proses Penyusunan
		10 Lampung	Proses Penyempurnaan
		11 Banten	Proses Pengesahan
		12 DKI Jakarta	Proses Penyusunan
		13 Jawa Barat	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014
		14 Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012, 28 September 2012
		15 D.I. Yogyakarta	Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, tanggal 9 Januari 2012
		16 Jawa Timur	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013
		17 Bali	Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014

No.	Jenis Rencana		Progres
	18	Nusa Tenggara Barat	Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, tanggal 2 November 2013
	19	Nusa Tenggara Timur	Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013
	20	Kalimantan Barat	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016
	21	Kalimantan Selatan	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015
	22	Kalimantan Tengah	Proses Penyempurnaan
	23	Kalimantan Timur	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012
	24	Kalimantan Utara	Proses Penyusunan
	25	Sulawesi Utara	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015
	26	Gorontalo	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014
	27	Sulawesi Tengah	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013, tanggal 8 November 2013
	28	Sulawesi Selatan	Proses Pengesahan
	29	Sulawesi Barat	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
	30	Sulawesi Tenggara	Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015
	31	Maluku Utara	Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016
	32	Maluku	Belum Menyusun
	33	Papua	Proses Penyusunan
	34	Papua Barat	Proses Penyempurnaan
4	Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKTK)	1	Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
		2	Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
		3	Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
		4	Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
		5	Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
		6	Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
		7	Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
		8	Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
		9	Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah
		10	Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
		11	Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
		12	Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
		13	Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
		14	Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah

No.	Jenis Rencana		Progres
		15	Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
		16	Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
		17	Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
5	Peraturan Perencanaan Kehutanan	1	Sistem Perencanaan Kehutanan
		2	Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi
		3	Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota

Catatan: Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota (RKT) terhenti dikarenakan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

TABEL II.2. PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP PER DESEMBER 2016

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN	
			KAWASAN HUTAN (Ha)			KAWASAN HUTAN (Ha)				
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ACEH	KSA/KPA	18.462	3.331	3.568	2.613	2.630	3.028	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.941/Menhet-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	64.654	67.488	18.224	60.590	35.010	7.864		
		HPT	4.517	5.496	5.743	654	960	10.113		
		HP	91.903	55.402	1.137	66.685	41.656	5.456		
		HPK	-	-	2.603	-	-	-		
		JUMLAH	179.536	131.717	31.275	130.542	80.256	26.461		
2	SUMATERA UTARA	KSA/KPA	-	4.850	-	-	-	1.140	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan mengenai kawasan hutan provinsi Sumatera Utara Nomor SK.579/Menhet-II/2014, tanggal 24 Juni 2014, menindaklanjuti keputusan MA no 47P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013	
		HL	50.783	461.527	10.857	104.444	208.305	8.598		
		HPT	104.210	319.449	2.291	3.467	176.722	2.326		
		HP	141.270	447.156	21.577	28.504	222.009	5.830		
		HPK	-	36.302	704	70.947	35.680	-		
		JUMLAH	296.263	1.269.284	35.429	207.362	642.716	17.894		
3	SUMATERA BARAT	KSA/KPA	4.852	7.560	882	-	1.070	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.304/Menhet-II/2011, tanggal 9-6-2011 dan SK.141/Menhet-II/2012, tanggal 15/03/2011	
		HL	86.339	97.563	3.650	87.456	50.887	3.412		
		HPT	23.606	25.709	6.098	21.541	21.293	6.098		
		HP	97.062	50.204	1.045	33.621	36.230	253		
		HPK	4.330	30.350	1.869	4.595	16.806	143		
		JUMLAH	216.189	211.386	13.544	147.213	126.286	9.906		
4	RIAU	KSA/KPA	4.577	25.469	5.521	2.186	-	5.796	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhet-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 4. Persub S.438/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016 5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016. 6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/PIK	
		HL	16.864	32.256	12.331	17.636	-	5		
		HPT	597.466	546.252	8.875	481.978	173.039	4.846		
		HP	296.400	327.677	19.491	11.493	84.446	905		
		HPK	172.400	2.599.042	696	204.250	1.445.889	-		
		JUMLAH	1.087.707	3.530.696	46.914	717.543	1.703.374	11.552		
5	JAMBI	KSA/KPA	-	1.582	-	-	336	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhet-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	-	303	-	271	-	-		
		HPT	63.411	5.010	-	1.323	167	-		
		HP	8.834	100.152	10.908	18.935	13.545	-		
		HPK	-	-	-	-	-	-		
		JUMLAH	72.245	107.047	10.908	20.529	14.048	-		

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN	
			KAWASAN HUTAN (Ha)			KAWASAN HUTAN (Ha)				
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	SUMATERA SELATAN	KSA/KPA	607	22.145	6.207	607	12.574	7.624	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhet-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	55.562	25.653	2.224	8.436	7.071	1.891		
		HPT	23.838	9.432	1.493	24.099	1.912	1.493		
		HP	-	88.932	36.054	6.970	31.106	30.183		
		HPK	2.818	264.388	1.485	4.187	177.541	-		
		JUMLAH	82.825	410.550	47.463	44.299	230.204	41.191		
7	BENGKULU	KSA/KPA	3.683	13.217	101	3.610	-	101	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.643/Menhet-II/2011, tanggal 10-11-2012	
		HL	18.082	13.112	-	5.358	399	-		
		HPT	1.897	58.376	-	4.226	1.453	-		
		HP	5.796	18.130	-	17.819	340	-		
		HPK	-	-	-	-	-	-		
		JUMLAH	29.458	102.835	101	31.013	2.192	101		
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
9	KEP. BANGKA BELITUNG	KSA/KPA	772	420	-	190	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.798/Menhet-II/2012, tanggal 27-12-2012	
		HL	-	33.012	1.993	2.529	-	1.993		
		HPT	-	-	-	-	-	-		
		HP	8.589	100.158	1.225	8.159	19.131	1.225		
		HPK	-	-	-	-	-	-		
		JUMLAH	9.361	133.590	3.218	10.878	19.131	3.218		
10	KEP.RIAU	KSA/KPA	3.120	12.943	3	4014	1.571	-	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhet-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS. Merindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI No. 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014, telah diterbitkan Keutusan Menteri LHK No SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri	
		HL	13.197	36.317	2.085	11.733	5.163	2.108		
		HPT	11.374	114.252	282	25.807	67.243	-		
		HP	163	6.461	-	720	8949	262		
		HPK	30.869	362.981	-	104.688	256.152	-		
		JUMLAH	58.723	532.954	2.370	146.962	339.078	2.370		
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
12	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
13	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
14	DI. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
15	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan	

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN	
			KAWASAN HUTAN (Ha)			KAWASAN HUTAN (Ha)				
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	KSA/KPA Darat	3.613	7.352	5.328	617		5.328	Terdapat Usulan sesuai Surat Gubernur NTT, Nomor :	
		KSA/KPA Air		1.963					1. Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013, tgl 11-10-2013	
		HL	-	74.606	5.064		12.492	551	2. Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013, tgl 20-11-2013	
		HPT		23.800	34		4.307	35	3. Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tgl 5-6-2014	
		HP	6.263	59.939	14.092	3.499	10.307	5.897	4. Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015, tgl 15-4-2015	
		HPK	11.472	45.535	-	8.052	27.057		Update per 31 Des 2015 adalah Review RTRW NTT dalam tahap finalisasi	
		JUMLAH	21.348	213.195	24.518	12.168	54.163	11.811	Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016; 11 Mei 2016	
20	KALIMANTAN BARAT	HL	198.125	220.648	77.186	66.048	-	29.156	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.	
		HPT	235.863	637.048	51.984	149.567	189.460	2.977	SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013	
		HP	126.769	1.064.863	87.434	41.681	294.912	20.253		
		HPK	111.339	211.200	5.768	77.007	69.765	-		
		JUMLAH	714.792	2.560.149	271.408	358.639	554.137	76.008		
21	KALIMANTAN TENGAH	KSA/KPA	148.512	38.856	15.169	48.412	-	13.601	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.	
		HL	180.947	5.426	50.472	33.116	-	9.968	SK.292/Menhut-II/2011, tanggal 31-5-2011 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.529/Menhut-I/2012 tanggal 25 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalteng	
		HPT	636.399	124.183	17.933	86.977	101.157	3.179		
		HP	2.401.681	840.773	40.234	402.043	333.261	2.720		
		HPK	533.117	1.913.076	820.907	119.118	734.238	204		
		JUMLAH	3.900.656	2.922.312	944.715	689.666	1.168.656	29.672		
22	KALIMANTAN SELATAN	KSA/KPA	29.092	1.372	6.556	1.240	8.749	6.556	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan	
		HL	17.249	52.711	18.247	6.795	563	15.733	sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.	
		HPT	8.170	51.308	1.312	28.168	31	4.355	SK.435/Menhut-II/2009, tanggal 23-7-2009	
		HP	133.764	174.716	14.644	63.391	14.227	13.103		
		HPK	82.018	212	7.092	-	35.933	-		
		JUMLAH	270.293	280.319	47.851	99.594	59.503	39.747		
23	KALIMANTAN TIMUR	KSA/KPA	-	176.708	14.006	-	48.732	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.	
		HL	14.796	85.973	21.705	7.677	24.999	11.732	SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW.05433/DPR	
		HPT	482.778	582.195	15.760	53.799	108.063	-	RI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang	
		HP	127.752	1.689.617	121.359	214.764	287.533	-	DPCLS	
		HPK	-	25	-	-	25	-		
		JUMLAH	625.326	2.534.518	172.830	276.240	469.352	11.732		
24	SULAWESI UTARA	KSA/KPA	793	12.421		465	182		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.	
		HL	6.457	15.278	1.423	296	521	290	SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW.05433/DPR	
		HPT		16.545	1.166		5.264		RI/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang	
		HP		3.821			904		DPCLS	

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN	
			KAWASAN HUTAN (Ha)			KAWASAN HUTAN (Ha)				
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		HPK		526			166			
		JUMLAH	7.250	48.591	2.589	761	7.037	290		
25	SULAWESI TENGAH	KSA/KPA	59.489	73.687	-	-	5.510	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.635/Menhet-II/2013 tanggal 23 September 2013, sebagaimana telah diperbarui dengan SK.708/Menhet-II/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	142.445	200.128	-	34.379	9.802	-		
		HPT	59.184	302.334	1.004	8.005	28.686	-		
		HP	50.765	197.972	120	404	28.788	0		
		HPK	9.563	208.702	80	-	37.285	91		
		JUMLAH	321.446	982.823	1.204	42.788	110.071	91		
26	SULAWESI SELATAN		-	-	-	-	-	-	Proses Pembentukan Tim Terpadu	
27	SULAWESI TENGGARA	KSA/KPA	28.823	8.334	-	8.061	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.465/Menhet-II/2011, tanggal 9-8-2011	
		HL	187.128	30.236	-	52.660	-	-		
		HPI	23.706	29.427	-	15.773	13.059	-		
		HP	61.714	154.376	-	34.078	52.287	-		
		HPK	3.553	87.792	-	4.539	44.759	-		
		JUMLAH	304.924	310.165	-	115.111	110.105	-		
28	GORONTALO	KSA/KPA	17.031	-	-	15.024	167	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.324/ Menhet-II/2010, tanggal 25-5-2010	
		HL	8.353	5.550	37	28.603	5.095	-		
		HPT	55.850	22.428	1.550	8.265	13.779	1.055		
		HP	14.161	4.535	2.316	3.661	2.055	1.194		
		HPK	-	3.319	2.048	-	1.509	1.538		
		JUMLAH	95.395	35.832	5.951	55.553	22.605	3.787		
29	SULAWESI BARAT	KSA/KPA	-	825	-	-	825	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.726/Menhet-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	214.184	44.126	-	214.184	8.470	-		
		HPT	80.446	44.566	-	37.416	11.671	-		
		HP	-	48.258	-	-	28.618	-		
		HPK	-	31.085	-	-	23.972	-		
		JUMLAH	294.630	168.860	-	251.600	73.556	-		
30	MALUKU	KSA/KPA	3.484	17.256	-	-	2	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.871/Menhet-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS	
		HL	30.670	75.645	6.125	-	3.955	2.326		
		HPT	204.600	117.452	987	4.785	11.482	987		
		HP	41.439	84.196	-	12.264	26.863	-		
		HPK	16.352	1.230.827	578	3.619	321.813	-		
		JUMLAH	296.545	1.525.376	-	20.668	364.115	3.313		
31	MALUT	KSA/KPA	28.650	1.656	444	-	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.490/Menhet-II/2012 tanggal 5-9-2012	
		HL	180.735	56.260	6.017	29.001	1.662	2.892		
		HPT	92.591	77.108	10.065	22.994	8.599	710		
		HP	40.641	136.148	1.122	9.585	15.648	1.479		

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN			PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN	
			KAWASAN HUTAN (Ha)			KAWASAN HUTAN (Ha)				
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		HPK	42.156	679.564	7.071	30.642	247.452	-		
		JUMLAH	384.773	950.736	24.719	92.222	273.361	5.081		
32	PAPUA	KSA/KPA	8.108	133.814	521	763	9.662	521	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15-8-2012	
		HL	405.429	269.758	10.661	395.176	44.532	7.742		
		HPT	156.662	80.581	18.189	133.115	39.468	18.282		
		HP	3.570.941	126.766	14.307	3.404.532	50.426	14.307		
		HPK	2.058.356	667.704	4.482	1.803.244	232.297	4.406		
		JUMLAH	6.199.496	1.278.623	48.160	5.736.830	376.385	45.258		
33	PAPUA BARAT	KSA/KPA	238.324	35.714	4	5.835	-	4	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.710/Menhut-II/2014 tanggal 27-8-2014	
		HL	97.990	145.399	1.687	8.388	-	59		
		HPT	92.203	102.674	2.150	23.532	44.817	2.633		
		HP	136.735	132.632	3.080	-	61.594	-		
		HPK	467.507	563.033	16.949	400.465	136.634	1.238		
		JUMLAH	1.032.759	979.452	23.870	438.220	243.045	3.934		

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan: pm = pro memory

TABEL II.3 PROGRES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN DALAM USULAN REVISI RTRWP (Per Desember 2016)

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1	Aceh	Peruntukan : 131.717 Ha Fungsi : 179.536 Ha Penunjukan : 31.275 Ha	Peruntukan : 80.256 Ha Fungsi : 130.542 Ha Penunjukan : 26.461 Ha SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Persub : S.33/Menhut-VII/2014, 16 Januari 2014. Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tgl 25 September 2014 (DPCLS sudah di include-kan seluas 37.640 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Aceh. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
2	Sumatera Utara	Peruntukan : 1.269.284 Ha Fungsi : 296.263 Ha Penunjukan : 35.429 Ha	Peruntukan : 642.716 Ha Fungsi : 207.362 Ha Penunjukan : 17.894 Ha Persub : S.407/Menhut-VII/2014, 18 September 2014	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti keputusan MA no 47p/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
3	Sumatera Barat	Peruntukan : 211.386 Ha Fungsi : 216.189 Ha Penunjukan : 13.544 Ha	Peruntukan : 126.286 Ha Fungsi : 147.213 Ha Penunjukan : 9.906 Ha SK.304/Menhut-II/2011; 9 Juni 2011 dan SK. 141/Menhut-II/2012; 15 Maret 2012 (DPR setuju untuk areal DPCLS) Persub : S.628/Menhut-VII/2009; 12 Agustus 2009	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Keputusan Menhutbun No. 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
4	Riau	Peruntukan : 3.530.696 Ha Fungsi : 1.087.707 Ha Penunjukan : 46.914 Ha	Peruntukan : 1.703.374 Ha Fungsi : 717.543 Ha Penunjukan : 1.152 Ha SK.673/Menhut-II/2014, 8 Agustus 2014, menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI terdapat tambahan perubahan peruntukan seluas 65.125 ha → SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 jo SK.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/2016	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau. 2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 4. Persub S.438/Menlhk-PKTL/Ren/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016 5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
				6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
5	Kepulauan Riau	Peruntukan : 532.954 Ha Fungsi : 58.723 Ha Penunjukan : 2.370 Ha	Peruntukan : 399.078 Ha Fungsi : 146.962 Ha Penunjukan : 2.370 Ha SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri. 2. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI No. 0014/REK/0906.2013/PBP.41/XII/2014, telah diterbitkan Keutusan Menteri LHK No SK.76/Menlhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.91/Menlhk-II/2015 tanggal 6 Maret 2015. 4. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
6	Jambi	Peruntukan : 107.047 Ha Fungsi : 72.245 Ha Penunjukan : 10.908 Ha	Peruntukan : 14.048 Ha Fungsi : 20.529 Ha SK.727/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub : S.11/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013 Persetujuan DPR RI terkait DPCLS sesuai Surat Wakil Ketua DPR Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tgl 24 September 2014 (DPCLS sudah di Include-kan seluas 336 ha)	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Jambi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
7	Bengkulu	Peruntukan : 102.835 Ha Fungsi : 29.458 Ha Penunjukan : 101 Ha	Peruntukan : 2.192 Ha Fungsi : 31.013 Ha Penunjukan : 101 Ha SK.643/Menhut-II/2011; 10 November 2011 Persub : S.58/Menhut-VII/2012; 30 Januari 2012	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Keputusan Menhutbun No.421/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
8	Kepulauan Bangka Belitung	Peruntukan : 133.590 Ha Fungsi : 9.361Ha Penunjukan : 3.218Ha	Peruntukan : 19.131 Ha Fungsi : 10.878 Ha Penunjukan : 3.210 Ha SK. 798/Menhut-II/2012; 27 Desember 2012 Persub : S.110/Menhut-VII/2013; 8 Januari 2013	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan No. SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
9	Sumatera Selatan	Peruntukan : 410.550 Ha Fungsi : 82.825Ha Penunjukan : 47.463Ha	Peruntukan : 230.204 Ha Fungsi : 44.299 Ha Penunjukan : 41.191 Ha SK.822/Menhut-II/2013; 19 November 2013	1. Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK nomor

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
			Persub : S.32/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 mengenai Kawasan Hutan Prov. Sumsel. 3. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.	
10	Lampung	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.519/Menlhk/VII/2009; 6 Juli 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
11	DKI Jakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.97/Menlhk/VII/2011; 3 Maret 2011	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
12	Jawa Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.276/Menlhk/VII/2010; 10 Juni 2010	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
13	Banten	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.277/Menlhk/VII/2010; 10 Juni 2010	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
14	Jawa Tengah	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.933/Menlhk/VII/2009; 11 Desember 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
15	DI. Yogyakarta	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.932/Menlhk/VII/2009; 11 Desember 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
16	Jawa Timur	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.581/Menlhk/VII/2010; 11 November 2010	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 395/Menlhk-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Keputusan Menhutbun No. 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
17	Bali	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.728/Menlhk/VII/2009; 14 September 2009	1. Menerbitkan SK Penunjukan kawasan hutan provinsi. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
18	Nusa Tenggara Barat	Tidak ada usulan perubahan	Persub : S.727/Menhet-VII/2009; 14 September 2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK. 598/Menhet-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
19	Nusa Tenggara Timur	Peruntukan : 213.195 Ha Fungsi : 21.461 Ha Penunjukan : 24.518 Ha	Peruntukan : 54.163 Ha Fungsi : 12.168 Ha Penunjukan : 11.811 Ha SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016; 11 Mei 2016 Persub : S.582/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/6/2016 tgl 13 Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah NTT telah mengajukan usulan perubahan Kawasan hutan sesuai Surat Gubernur NTT : <ul style="list-style-type: none"> • Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013 tanggal 11 Oktober 2013. • Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013 tanggal 20 November 2013 • Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tanggal 5 Juni 2014 • Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015 tanggal 15 April 2015. 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016; 11 Mei 2016 3. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.237/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016.
20	Kalimantan Barat	Peruntukan : 2.355.730 Ha Fungsi : 727.727Ha Penunjukan : 236.133Ha	Peruntukan : 554.137 Ha Fungsi : 352.772 Ha Penunjukan : 52.386 Ha SK.936/Menhet-II/2013, 20 Desember 2013. Persub No : S.26/Menhet-VII/2014; 10 Januari 2014.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.733/Menhet-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 69.294 Ha.
21	Kalimantan Tengah	Peruntukan : 2.922.312 Ha Fungsi : 3.900.656Ha Penunjukan : 944.715Ha	Peruntukan : 1.168.656 Ha Fungsi : 689.666 Ha Penunjukan : 29.672 Ha SK.292/Menhet-II/2011; 31 Mei 2011. Persub No : S.431/Menhet-VII/2012; 28 September 2012.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.529/Menhet-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Keputusan Mentan No. 759/KPTS/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
22	Kalimantan Timur	Peruntukan : 2.534.518 Ha Fungsi : 625.326 Ha Penunjukan : 172.830 Ha	Peruntukan : 469.352 Ha Fungsi : 276.240 Ha Penunjukan : 11.732 Ha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.718/Menhet-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
			SK.554/Menhut-II/2013; 2 Agustus 2013. Persub No : S.519/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
23	Kalimantan Selatan	Peruntukan : 270.293 Ha Fungsi : 47.851 Ha Penunjukan : 280.319 Ha	Peruntukan : 59.503 Ha Fungsi : 99.594 Ha Penunjukan : 39.747 Ha SK.432/Menhut-II/2009; 22 Juli 2009. Persub No : S.518/Menhut-VII/2009, 6 Juli 2009.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
24	Gorontalo	Peruntukan : 35.832 Ha Fungsi : 95.395 Ha Penunjukan : 5.951 Ha	Peruntukan : 23.604 Ha Fungsi : 55.553 Ha Penunjukan : 3.787 Ha SK.324/Menhut-II/2010; 25 Mei 2010. Persub No : S.238/Menhut-VII/2010; 14 Mei 2010.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
25	Sulawesi Utara	Peruntukan : 48.591 Ha Fungsi : 7.250 Ha Penunjukan : 2.589 Ha	Peruntukan : 7.037 Ha Fungsi : 761 Ha Penunjukan : 290 Ha SK.434/Menhut-II/2013; 17 Juni 2013. Persub No : S.521/Menhut-VII/2013; 5 September 2013.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
26	Sulawesi Tengah	Peruntukan : 982.823 Ha Fungsi : 321.446 Ha Penunjukan : 1.204 Ha	Peruntukan : 101.071 Ha Fungsi : 42.788 Ha Penunjukan : 91 Ha SK.635/Menhut-II/2013; 24 September 2013 Sebagaimana telah diperbarui melalui SK.708/Menhut-II/2014; 22 Agustus 2014. Persub No. S.884/Menhut-VII/2014; 1 September 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.869/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Telah dilakukan pendampingan /fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
27	Sulawesi Selatan	Peruntukan : 255.289 Ha Fungsi : 101.563 Ha Penunjukan : 42.378 Ha		1. Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP melalui surat Gubernur Nomor 522/2064/DISHUT tanggal 31 Maret 2015. 2. Telah dibentuk SK Tim Terpadu
28	Sulawesi Tenggara	Peruntukan : 310.165 Ha Fungsi : 304.924 Ha	Peruntukan : 110.105 Ha Fungsi : 115.111 Ha SK.465/Menhut-II/2011; 9 Agustus 2011. Persub No : S. 61/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013.	1. Akan diterbitkan Keputusan Menhut mengenai Perubahan atas Keputusan Menhutbun No. 454/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.

No	Provinsi	Usulan Perubahan	Keputusan Perubahan/ Persetujuan Substansi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
				3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 49.195 Ha.
29	Sulawesi Barat	Peruntukan : 168.860 Ha Fungsi : 294.630 Ha	Peruntukan : 73.556 Ha Fungsi : 251.600 Ha SK.726/Menhut-II/2012; 10 Desember 2012 Persub No : S. 62/Menhut-VII/2013; 30 Januari 2013	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
30	Maluku	Peruntukan : 1.525.376 Ha Fungsi : 296.545 Ha Penunjukan : 7.691 Ha	Peruntukan : 364.115 Ha Fungsi : 20.668 Ha Penunjukan : 3.313 Ha SK. 871/Menhut-II/2013; 6 Desember 2013. Persub No. S.27/Menhut-VII/2014; 10 Januari 2014.	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
31	Maluku Utara	Peruntukan : 950.736 Ha Fungsi : 384.773 Ha Penunjukan : 24.719 Ha	Peruntukan : 273.361 Ha Fungsi : 92.222 Ha Penunjukan : 5.081 Ha SK.490/Menhut-II/2012; 5 September 2012 Persub No : S.427/Menhut-VII/2012; 26 September 2012	1. Telah diterbitkan Keputusan Menhut No. SK.302/Menhut-II/2014 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
32	Papua	Peruntukan : 1.278.623 Ha Fungsi : 6.199.496 Ha Penunjukan : 48.160 Ha	Peruntukan : 376.385 Ha Fungsi : 5.736.830 Ha Penunjukan : 45.258 Ha SK.458/Menhut-II/2012; 15 Agustus 2012 Persub No : S. 409/Menhut-VII/2012; 11 September 2011	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menhut No. 891/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah TK I Irian Jaya. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K.
33	Papua Barat	Peruntukan : 979.452 Ha Fungsi : 1.032.759 Ha Penunjukan : 23.870 Ha	Peruntukan : 243.045 Ha Fungsi : 438.220 Ha Penunjukan : 23.934 Ha SK.710/Menhut-II/2014; 27 Agustus 2014 Persub No. S.406/Menhut-VII/2014; 18 September 2014	1. Telah dikeluarkan Keputusan Menhut No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat. 2. Telah dilakukan pendampingan/fasilitasi integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWP/K. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk mendapatkan keputusan areal yang DPCLS seluas 50.356 Ha.

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d Deembers 2016

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN



**DIREKTORAT PENGUKUHAN
DAN PENATAGUNAAN KAWASAN
HUTAN**

TABEL III.1 LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI			HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan
				Perairan	Daratan	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	D. I. Aceh	859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016	11 Nopember 2016	0,00	1.057.628,00	1.057.628,00	1.794.350,00	145.384,00	551.073,00	15.378,00	3.563.813,00	3.563.813,00
2	Sumatera Utara	579/Menhet-II/2014	24 Juni 2014	0,00	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.684,00	3.055.794,00	3.055.794,00
3	Sumatera Barat	35/Menhet-II/2013	15 Januari 2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.380.058,00
4	Riau	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07 Desember 2016	0,00	630.753,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	5.406.992,00
5	Jambi	863/Menhet-II/2014	29 September 2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00
6	Sumatera Selatan	454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016	17 Juni 2016	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.713.880,00	160.996,00	3.408.754,00	3.457.858,00
7	Bengkulu	784/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	0,00	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00	924.631,00
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23 Agustus 2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00	1.004.735,00
9	Kep. Bangka Belitung	798/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	0,00	35.454,00	35.454,00	185.531,00	0,00	432.884,00	693,00	654.562,00	654.562,00
10	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015	06 Maret 2015	0,00	12.294,72	12.294,72	97.662,65	118.833,75	78.830,37	74.510,24	382.131,73	382.131,73
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02 Agustus 2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	0,00	158,35	0,00	475,45	108.475,45
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	0,00	816.603,00	816.603,00
13	Jawa Tengah	359/Menhet-II/2004	01 Oktober 2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	0,00	647.133,00	757.250,00
14	D.I Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29 Juni 2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52	16.819,52
15	Jawa Timur	395/Menhet-II/2011	21 Juli 2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00	1.361.146,00
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00	253.254,00
17	B a l i	433/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0,00	127.271,01	130.686,01
18	N T B	598/Menhet-II/2009	02 Oktober 2009	11.121,00	168.044,00	179.165,00	430.485,00	286.700,00	150.609,00	0,00	1.035.838,00	1.046.959,00
19	N T T	357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016	11 Mei 2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00
20	Kalimantan Barat	733/Menhet-II/2014	02 September 2014	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.127.365,00	197.918,00	8.198.656,00	8.389.601,00
21	Kalimantan Tengah	529/Menhet-II/2012	25 September 2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00
22	Kalimantan Selatan	435/Menhet-II/2009	23 Juli 2009	0,00	213.285,00	213.285,00	526.425,00	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.779.982,00	1.779.982,00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhet-II/2014	29 Agustus 2014	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.879,00	4.077.346,00	179.699,00	13.855.833,00	13.855.833,00
24	Sulawesi Utara	734/Menhet-II/2014	02 September 2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00	764.739,00
25	Sulawesi Tengah	869/Menhet-II/2014	29 September 2014	340.119,00	648.374,00	988.493,00	1.276.087,00	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	3.934.568,00	4.274.687,00
26	Sulawesi Selatan	434/Menhet-II/2009	23 Juli 2009	606.804,00	244.463,00	851.267,00	1.232.683,00	494.846,00	124.024,00	22.976,00	2.118.992,00	2.725.796,00
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhet-II/2011	09 Agustus 2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00
28	Gorontalo	325/Menhet-II/2010	25 Mei 2010	0,00	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00
29	Sulawesi Barat	862/Menhet-II/2014	29 September 2014	0,00	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00
30	Maluku	854/Menhet-II/2014	29 September 2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00
31	Maluku Utara	302/Menhet-II/2013	01 Mei 2013	0,00	218.499,00	218.499,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00
32	Papua Barat	783/Menhet-II/2014	22 September 2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00
33	Papua	782/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.499,00
				5.321.321,00	22.109.915,99	27.431.236,99	29.680.475,37	26.788.626,01	29.247.693,10	12.808.111,24	120.634.821,71	125.956.142,71

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data S/D Desember 2016

catatan :

Luas kawasan hutan perfungsi didasarkan/mencuplik pada lembar SK kawasan hutan yang di terbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TABEL III.2 PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN S/D DESEMBER 2016

No.	Provinsi	Realisasi s/d Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Realisasi s/d Tahun 2016	
		Batas Luar (Km)	Batas Fungsi (Km)	Batas Luar (Km)	Batas Fungsi (Km)	Batas Luar (Km)	Batas Fungsi (Km)	Batas Luar (Km)	Batas Fungsi (Km)	Batas Luar (Km)	Batas Fungsi (Km)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	4.430,93	1.097,67	-	-	152,70	135,76	165,55	-	4.749,18	1.233,43
2	Sumatera Utara	7.840,46	1.662,00	634	230,39	204,45	118,57	556,35	-	9.235,67	2.010,96
3	Sumatera Barat	3.914,23	1.578,70	88,18	-	-	-	-	-	4.002,41	1.578,70
4	Riau	8.760,42	1.407,16	-	-	-	316,93	213,14	-	8.973,56	1.724,09
5	Jambi	3.625,07	764,51	777,47	618,25	-	-	3,44	-	4.405,98	1.382,76
6	Sumatera Selatan	4.513,52	1.044,58	550	7,00	98,24	-	202,00	-	5.363,76	1.051,58
7	Bengkulu	1.524,49	489,85	-	-	-	-	5,00	-	1.529,49	489,85
8	Lampung	3.176,39	25,01	62,27	-	34,36	-	-	-	3.273,02	25,01
9	Kep. Bangka Belitung	496,49	66,00	3.842,83	600,14	43,99	-	100,31	11,42	4.483,62	677,56
10	Kepulauan Riau	18,04	805,17	-	-	654,27	56,74	527,92	-	1.200,23	861,91
11	DKI Jakarta	44,00	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-
12	Jawa Barat	19.847,56	2,84	175,37	-	167,53	14,43	23,54	-	20.213,99	17,27
13	Jawa Tengah	19.064,65	-	-	-	-	-	-	-	19.064,65	-
14	D.I. Yogyakarta	203,51	-	72,77	-	-	-	-	-	276,28	-
15	Jawa Timur	19.382,27	43,56	12,53	-	-	-	-	-	19.394,80	43,56
16	Banten	46,91	-	-	-	-	-	-	-	46,91	-
17	Bali	1.610,00	208,97	229	-	-	-	-	-	1.839,13	208,97
18	Nusa Tenggara Barat	4.806,47	856,16	-	-	-	-	-	-	4.806,47	856,16
19	Nusa Tenggara Timur	4.860,94	13,30	247,73	-	167,67	-	138,00	-	5.414,35	13,30
20	Kalimantan Barat	9.517,04	7.794,98	201,30	599,55	110,52	265,77	633,65	37,57	10.462,51	8.697,87
21	Kalimantan Tengah	3.424,91	3.054,12	210,82	250,07	334,17	364,03	288,58	87,45	4.258,48	3.755,67
22	Kalimantan Selatan	10.861,09	3.115,13	216,59	226,45	431,14	-	207,55	93,90	11.716,38	3.435,48
23	Kalimantan Timur	5.412,90	10.864,61	2.935,84	380,82	1.046,42	30,48	287,77	7,03	9.682,92	11.282,95
24	Sulawesi Utara	2.614,97	7.423,72	59,59	25,38	101,00	324,00	62,50	-	2.838,06	7.773,10
25	Sulawesi Tengah	10.589,49	6.345,69	545,32	190,99	288,86	77,94	238,00	-	11.661,67	6.614,62
26	Sulawesi Selatan	710,63	1.653,77	-	-	-	-	-	-	710,63	1.653,77
27	Sulawesi Tenggara	5.789,45	4.228,80	-	-	-	-	-	-	5.789,45	4.228,80
28	Gorontalo	5.634,05	993,73	120,19	13,87	134,58	5,93	132,22	4,87	6.021,04	1.018,40
29	Sulawesi Barat	739,07	127,55	55,87	1.096,85	-	105,12	118,91	-	913,85	1.329,52
30	Maluku	7.616,84	3.954,72	146,80	82,04	198,74	33,49	97,70	12,20	8.060,08	4.082,45
31	Maluku Utara	221,05	938,00	96,65	673,67	55,67	324,24	121,29	202,04	494,66	2.137,95
32	Papua Barat	1.043,53	1.626,62	123,75	536,81	199,73	341,75	167,85	-	1.534,86	2.505,18
33	Papua	11.705,70	11.153,54	300,43	1.233,23	87,06	200,45	90,88	-	12.184,07	12.587,22
JUMLAH		184.047,07	73.340,46	11.705,84	6.765,51	4.511,10	2.715,64	4.382,15	456,49	204.646,16	83.278,10

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data S/D Desember 2016

Cat: (-) tidak ada data

TABEL III.3 PERKEMBANGAN PENGESAHAN BERITA ACARA TATA BATAS S/D DESEMBER 2016

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016	
		BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM	BA	KM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aceh	71	5.807,32	-	-	-	-	18	248,73	89	6.056,05
2	Sumatera Utara	83	13.038,73	5	180,03	-	-	12	112,37	100	13.331,13
3	Sumatera Barat	129	4.912,77	43	1.437,85	-	-	5	98,00	177	6.448,62
4	Riau	119	11.315,24	3	274,10	-	-	5	411,05	127	12.000,39
5	Jambi	87	5.405,58	3	129,75	59	123.863,50	3	13,77	152	129.412,60
6	Sumatera Selatan	191	7.408,27	2	137,00	-	-	4	201,78	197	7.747,05
7	Bengkulu	119	2.457,14	1	9,90	-	-	-	-	120	2.467,04
8	Lampung	54	4.164,59	26	2,00	-	-	-	-	80	4.166,59
9	Kep. Bangka Belitung	38	475,11	2	72,90	24	50.833,24	11	94,00	75	51.475,25
10	Kepulauan Riau	7	90,78	1	25,01	-	-	-	-	8	115,79
11	DKI Jakarta	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
12	Jawa Barat	121	449,78	3	63,38	3	7,28	8	56,01	135	576,45
13	Jawa Tengah	54	78,04	3	7,54	-	-	1	15,01	58	100,59
14	D.I. Yogyakarta	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
15	Jawa Timur	31	508,28	1	1,95	3	24,43	1	3,41	36	538,06
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	39	1.616,40	1	9,40	-	-	-	-	40	1.625,80
18	Nusa Tenggara Barat	97	5.337,11	3	28,69	-	-	-	-	100	5.365,80
19	Nusa Tenggara Timur	101	7.219,37	-	-	2	28,45	15	185,68	118	7.433,50
20	Kalimantan Barat	233	13.588,74	35	794,76	268	28.767,00	5	296,87	541	43.447,37
21	Kalimantan Tengah	54	4.126,67	4	180,27	58	8.613,88	21	1.063,00	137	13.983,82
22	Kalimantan Selatan	57	3.578,46	9	283,31	66	7.723,00	8	371,70	140	11.956,47
23	Kalimantan Timur	256	16.767,16	32	1.311,38	288	36.157,08	-	-	576	54.235,62
24	Sulawesi Utara	67	6.851,59	6	101,44	-	-	8	179,89	81	7.132,92
25	Sulawesi Tengah	200	13.698,99	63	1.667,61	9	219,73	-	-	272	15.586,33
26	Sulawesi Selatan	140	10.457,65	-	-	-	-	2	32,66	142	10.490,31
27	Sulawesi Tenggara	124	11.240,36	2	103,52	4	299,85	-	-	130	11.643,73
28	Gorontalo	4	210,40	39	1.234,87	13	134,39	3	140,52	59	1.720,18
29	Sulawesi Barat	-	-	6	255,75	5	1.059,57	1	91,32	12	1.406,64
30	Maluku	164	9.278,69	26	411,18	-	-	-	-	190	9.689,87
31	Maluku Utara	7	252,62	36	1.253,28	-	-	-	-	43	1.505,90
32	Papua Barat	174	15.120,95	17	1.126,40	-	-	1	14,89	192	16.262,25
33	Papua	20	3.037,12	90	7.795,19	-	-	21	1.200,75	131	12.033,06
JUMLAH		2.853	178.493,91	462	18.898,47	802	257.731,40	153	4.831,38	4.270	459.955,17

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data S/D Desember 2016

Cat:

(-) tidak ada data

TABEL III.4 PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN PER PROVINSI

NO	PROVINSI	UNIT S/D 2013	LUAS S/D 2013	UNIT 2014	LUAS 2014	UNIT 2015	LUAS 2015	UNIT 2016	LUAS 2016	UNIT S/D 2016	LUAS S/D 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nangroe Aceh Darussalam	9	36.628,55	5	877.678,37	1	5.326,23	-	-	19	919.633,15
2	Sumatera Utara	13	56.651,50	28	1.668.614,93	-	-	-	-	43	1.725.266,43
3	Sumatera Barat	20	478.042,20	31	926.278,76	-	-	-	-	51	1.404.320,96
4	Riau	28	507.775,14	15	690.069,88	4	855.740,95	-	-	55	2.053.585,97
5	Jambi	12	714.011,38	15	274.056,89	5	192.026,59	14	553.278,31	44	1.733.373,16
6	Sumatera Selatan	22	699.177,88	32	2.314.165,74	-	-	-	-	53	3.013.343,62
7	Bengkulu	35	616.410,97	17	68.688,60	-	-	-	-	54	685.099,56
8	Lampung	21	296.998,18	2	2.424,58	3	250.438,98	2	25.031,79	29	574.893,53
9	Kepulauan Bangka Belitung	40	316.241,68	36	210.919,03	-	-	4	3.035,84	80	530.196,55
10	Kepulauan Riau	16	66.680,84	11	37.424,93	-	-	-	-	28	104.105,77
11	DKI Jakarta	4	107.856,20	-	-	-	-	-	-	4	107.856,20
12	Jawa Barat	38	38.005,63	62	525.118,52	4	300,84	8	321.664,06	128	885.089,05
13	Jawa Tengah	26	141.544,33	71	328.097,46	-	-	32	289.467,61	135	759.109,40
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	283,33	8	8.577,61	-	-	-	-	11	8.860,94
15	Jawa Timur	48	121.706,60	22	153.351,66	4	616,95	44	471.277,10	114	746.952,30
16	Banten	6	5.824,11	5	112.385,41	-	-	9	81.494,91	19	199.704,43
17	Bali	11	10.216,35	14	128.545,84	-	-	-	-	37	138.762,19
18	Nusa Tenggara Barat	33	415.716,46	26	740.860,78	-	-	4	8.584,31	64	1.165.161,55
19	Nusa Tenggara Timur	55	359.037,94	25	150.193,26	5	145.846,63	44	171.207,19	136	826.285,02
20	Kalimantan Barat	62	1.094.350,70	71	4.806.971,79	17	119.015,98	4	74.549,16	155	6.094.887,62
21	Kalimantan Tengah	9	325.103,00	11	3.079.176,70	1	3.970,20	4	334.471,35	26	3.742.721,25
22	Kalimantan Selatan	18	351.161,08	22	1.127.249,07	-	-	1	57.541,50	44	1.535.951,65
23	Kalimantan Timur	49	844.486,17	24	2.176.348,01	7	118.733,10	2	130.089,68	101	3.269.656,96
24	Kalimantan Utara	-	-	12	7.030.817,72	4	182.752,03	3	793.467,70	8	8.007.037,45
25	Sulawesi Utara	16	43.538,69	41	243.541,31	1	208,81	-	-	59	287.288,81
26	Sulawesi Tengah	19	623.906,91	31	1.669.118,99	13	480.071,45	5	118.948,44	71	2.892.045,79
27	Sulawesi Selatan	48	656.055,88	17	1.308.052,01	-	-	3	71.190,61	69	2.035.298,50
28	Sulawesi Tenggara	20	1.777.994,47	19	950.772,36	8	535.336,16	-	-	47	3.264.102,99
29	Gorontalo	6	28.645,80	15	699.183,29	8	16.771,84	2	29.515,63	38	774.116,56
30	Sulawesi Barat	2	765,20	8	325.912,29	5	359.889,95	3	312.616,07	19	999.183,51
31	Maluku	74	515.922,35	38	2.144.573,64	-	-	-	-	127	2.660.495,99
32	Maluku Utara	23	819.077,16	31	424.194,21	1	103.253,90	-	-	59	1.346.525,27
33	Papua Barat	17	259.431,41	18	5.313.837,47	1	244.980,05	2	842.556,11	45	6.660.805,04
34	Papua	29	1.644.607,35	58	21.181.295,05	-	-	6	1.860.981,60	99	24.686.884,00
	JUMLAH	830	13.973.855,43	841	61.698.496,14	92	3.615.280,63	196	6.550.968,96	2.071	85.838.601,16

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data S/D Desember 2016

Cat:

(-) tidak ada data

TABEL III.5 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HA

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	Tahun 2016	Realisasi s/d Tahun 2016
		KM	KM	KM	KM	KM
1	2	3	4	5	6	7
1	Aceh	2.366,97	-	-	107,15	2.474,12
2	Sumatera Utara	1.973,28	-	-	53,50	2.026,78
3	Sumatera Barat	1.698,74	-	-	-	1.698,74
4	Riau	7.648,64	-	-	-	7.648,64
5	Jambi	3.161,87	-	-	-	3.161,87
6	Sumatera Selatan	2.554,95	-	-	-	2.554,95
7	Bengkulu	356,98	-	-	-	356,98
8	Lampung	52,35	-	-	-	52,35
9	Kep. Bangka Belitung	0,00	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	0,00	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	0,00	-	-	-	-
12	Jawa Barat	0,00	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	0,00	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	0,00	-	-	-	-
15	Jawa Timur	0,00	-	-	-	-
16	Banten	0,00	-	-	-	-
17	Bali	0,00	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	457,78	-	-	-	457,78
19	Nusa Tenggara Timur	0,00	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	9.487,95	141,92	-	148,05	9.777,92
21	Kalimantan Timur	13.578,12	254,98	-	410,49	14.484,00
22	Kalimantan Selatan	1.559,10	-	-	-	1.559,10
23	Kalimantan Tengah	14.202,92	314,22	-	285,69	14.901,83
24	Kalimantan Utara	-	-	-	90,12	90,12
25	Sulawesi Utara	1.531,72	-	-	-	1.613,78
26	Sulawesi Tengah	3.852,04	-	-	-	3.852,04
27	Sulawesi Selatan	1.188,61	-	-	-	1.188,61
28	Sulawesi Tenggara	920,05	-	-	-	920,05
29	Gorontalo	0,00	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	0,00	-	-	-	-
31	Maluku	7.275,38	-	-	-	7.275,38
32	Maluku Utara	246,47	-	-	-	246,47
33	Papua Barat	11.456,82	-	-	161,28	11.618,10
34	Papua	114,49	-	-	134,12	248,61
Jumlah		85.685,23	711,12	-	1.390,40	88.208,22

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data S/D Desember 2016

Cat:

(-) tidak ada data

TABEL III.6 PERKEMBANGAN TATA BATAS IUPHHK-HT

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	Tahun 2016	Realisasi s/d Tahun 2016
		KM	KM	KM	KM	KM
1	2	3	4		6	7
1	Aceh	1.066,00	-	-	-	1.066,00
2	Sumatera Utara	1.733,00	99,728	-	203,19	2.035,92
3	Sumatera Barat	2.189,16	-	-	-	2.189,16
4	Riau	1.672,71	457,37	-	1.145,03	3.360,04
5	Jambi	1.299,58	-	-	-	1.369,04
6	Sumatera Selatan	1.425,97	510,31	-	113,383	2.190,60
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	231,47	-	-	-	231,47
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	260,97	-	479,38	871,19
21	Kalimantan Timur	2.493,54	81,80	-	316,37	2.891,71
22	Kalimantan Selatan	466,55	115,13	-	-	581,68
23	Kalimantan Tengah	417,36	-	-	154,66	581,81
24	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
28	Gorontalo	-	-	-	-	101,32
29	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30	Maluku	162,00	-	-	-	162,00
31	Maluku Utara	-	-	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-
Jumlah		13.157,34	1.525,31	-	2.412,02	17.631,95

Sumber: Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data S/D Desember 2016

Cat:

(-) tidak ada data

PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN



**DIREKTORAT PENGUKUHAN
DAN PENATAGUNAAN KAWASAN
HUTAN**

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

1). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	70.755,00	-	-	-	-	-	70.755,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	40.390,00	-	-	-	-	-	40.390,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	32.685,70	-	-	-	-	-	32.685,70
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	11.075,56	-	-	-	-	-	11.075,56
15	D.I. Yogyakarta	1.000,66	-	-	-	-	-	1.000,66
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.155,00	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	10.659,00	-	-	-	-	-	10.659,00
28	Sulawesi Selatan	22.063,10	-	-	-	-	-	22.063,10
29	Sulawesi Tenggara	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	153.575,00	-	-	-	-	-	153.575,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		349.359,02	-	-	-	-	-	349.359,02

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

2). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	2.725,00	-	-	-	-	-	2.725,00
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	6.351,22	-	-	-	-	-	6.351,22
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	583,00	-	-	-	-	-	583,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	5.170,00	-	-	-	-	-	5.170,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	1.942,00	-	17,30	1.959,30
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.990,00	-	-	-	-	165,00	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	8.750,00	-	-	-	-	-	8.750,00
22	Kalimantan Timur	2.460,00	-	-	-	-	-	2.460,00
23	Kalimantan Selatan	11.245,00	-	681,54	-	-	-	11.926,54
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	295,40	-	-	295,40
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		40.274,22	-	681,54	2.237,40	-	182,30	43.375,46

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

3). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	20.290,00	-	-	-	-	-	20.290,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	55,00	-	-	55,00
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	2.958,00	2.958,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	48.021,12	-	-	-	-	-	48.021,12
21	Kalimantan Tengah	53.125,00	-	-	-	-	-	53.125,00
22	Kalimantan Timur	59.285,00	-	-	-	-	-	59.285,00
23	Kalimantan Selatan	55.950,00	-	57,21	-	-	-	56.007,21
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	1962,75	-	-	-	1.962,75
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	6549,76	-	-	-	6.549,76
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		236.671,12	-	8569,72	55,00	-	2.958,00	248.253,84

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

4). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.163,75	-	-	-	-	-	6.163,75
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	137.376,00	-	-	-	-	-	137.376,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	20.700,00	-	-	-	-	-	20.700,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	40.192,56	833,00	-	-	-	-	41.025,56
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	649,00	649,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	193,00	-	-	-	-	-	193,00
28	Sulawesi Selatan	145,00	-	-	-	-	-	145,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	7.650,00	-	-	-	-	-	7.650,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		212.420,31	833,00	-	-	-	649,00	213.902,31

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

5). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	14.747,00	-	-	-	-	-	14.747,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	13.388,00	-	-	-	-	-	13.388,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	1.218,43	-	1.218,43
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	234,50	-	-	-	-	-	234,50
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	1.030,00	-	-	-	-	-	1.030,00
JUMLAH		32.599,50	-	-	-	1.218,43	-	33.817,93

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

6). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2012	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	213.221,00	-	-	-	-	-	213.221,00
3	Sumatera Barat	11.148,00	-	-	-	-	-	11.148,00
4	Riau	194.440,00	-	-	-	-	-	194.440,00
5	Kepulauan Riau	342,82	-	-	-	-	-	342,82
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.710,00	-	-	-	-	-	2.710,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	20.160,00	-	-	-	-	-	20.160,00
22	Kalimantan Timur	77.010,00	-	-	-	-	-	77.010,00
23	Kalimantan Selatan	31.790,00	-	-	-	-	-	31.790,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		550.821,82	-	-	-	-	-	550.821,82

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

7). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	14.780,00	-	-	-	-	-	14.780,00
5	Kepulauan Riau	12.950,00	-	-	-	-	-	12.950,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133.075,00	-	-	-	-	-	133.075,00
22	Kalimantan Timur	31.685,00	-	-	-	-	-	31.685,00
23	Kalimantan Selatan	5.900,00	-	-	-	-	-	5.900,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		198.390,00	-	-	-	-	-	198.390,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

8). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	43.100,00	-	-	-	-	-	43.100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	3.242,00	3.242,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	25.560,00	-	-	-	-	-	25.560,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24.142,80	662,00	-	-	-	-	24.804,80
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	617,00	-	-	-	-	-	617,00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	352,62	-	-	-	-	-	352,62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	600.250,00	-	-	-	-	-	600.250,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	11.759,00	-	-	-	-	-	11.759,00
28	Sulawesi Selatan	10.355,00	-	-	-	-	-	10.355,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.075,00	-	-	-	-	-	6.075,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		722.211,42	662,00	-	-	-	3.242,00	726.115,42

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

9). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	11.595,00	-	-	-	-	-	11.595,00
23	Kalimantan Selatan	66.000,00	-	-	-	-	-	66.000,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		77.595,00	-	-	-	-	-	77.595,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

10). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	59.120,00	-	-	-	-	-	59.120,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		60.320,00	-	-	-	-	-	60.320,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

11). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	800,00	-	-	-	-	-	800,00
3	Sumatera Barat	9.840,00	-	-	-	-	-	9.840,00
4	Riau	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	29.924,85	-	-	-	-	-	29.924,85
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	261,00	-	-	-	-	76.532,00	76.793,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	6.303,00	-	-	-	7.730,57	-	14.033,57
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	64,00	-	-	-	-	-	64,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.915,00	-	-	-	-	-	3.915,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.436,00	-	-	-	-	-	2.436,00
JUMLAH		59.543,85	-	-	-	7.730,57	76.532,00	143.806,42

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

12). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	5.920,00	-	-	-	-	-	5.920,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	58.450,00	-	-	-	-	3.297,00	61.747,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	3.221,00	-	-	-	-	-	3.221,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		67.591,00	-	-	-	-	3.297,00	70.888,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

13). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	12.150,00	-	-	-	-	-	12.150,00
4	Riau	49.700,00	-	-	-	-	-	49.700,00
5	Kepulauan Riau	3.902,00	-	-	-	-	-	3.902,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	1.820,00	-	-	-	-	-	1.820,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	18.445,00	-	-	-	-	-	18.445,00
30	Sulawesi Barat	9.125,00	-	-	-	-	-	9.125,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.856,00	-	-	-	-	-	2.856,00
JUMLAH		97.998,00	-	-	-	-	-	97.998,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

14). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	180,00	-	-	-	-	-	180,00
3	Sumatera Barat	25.381,00	-	-	4.105,00	-	-	29.486,00
4	Riau	133.238,00	-	-	-	-	-	133.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	15.269,75	-	-	-	-	-	15.269,75
21	Kalimantan Tengah	84.948,00	-	-	-	-	-	84.948,00
22	Kalimantan Timur	53.760,00	-	-	-	-	-	53.760,00
23	Kalimantan Selatan	38.630,00	-	-	-	-	-	38.630,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	17.555,00	-	-	-	-	-	17.555,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	2.860,00	-	-	-	-	-	2.860,00
33	Papua	234.730,00	-	-	-	89.951,00	-	324.681,00
34	Papua Barat	4.076,00	-	-	-	-	-	4.076,00
JUMLAH		610.627,75	-	-	4.105,00	89.951,00	-	704.683,75

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

15). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	21.750,00	-	-	-	-	-	21.750,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	79,75	-	-	-	-	-	79,75
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	49.400,00	-	-	-	-	-	49.400,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	6.572,00	-	6.572,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		71.229,75	-	-	-	6.572,00	-	77.801,75

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

16. PERKEMBANGAN MUTASI ANTAR KAWASAN KONSERVASI (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.688,65	-	-	-	-	-	5.688,65
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	28.238	28.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	27.200,00	-	-	-	-	-	27.200,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	14.200,75	95,00	-	-	-	-	14.295,75
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	6,50	-	-	-	-	-	6,50
15	D.I. Yogyakarta	283,58	-	-	-	-	-	283,58
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	71.645,64	-	71.645,64
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300.040,00	-	-	-	-	-	300.040,00
22	Kalimantan Timur	61.850,00	-	-	-	-	-	61.850,00
23	Kalimantan Selatan	7.563,60	-	-	-	-	-	7.563,60
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	24.669,00	-	-	-	-	-	24.669,00
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	15.381,90	-	-	-	-	-	15.381,90
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	15,00	15,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		456.883,98	95,00			71.645,64	28.253,00	556.877,62

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

17). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	490,00	-	-	-	-	-	490,00
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	4.158,00	4.158,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	27.500,00	-	94,89	-	745,00	-	28.339,89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		27.990,00	-	94,89	-	745,00	4.158,00	32.987,89

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

18). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONSERVASI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	169,95	-	169,95
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	25,00	-	-	-	-	-	25,00
23	Kalimantan Selatan	465,00	-	-	-	-	-	465,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		490,00	-	-	-	169,95	-	659,95

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

19). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN LINDUNG (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	3.738,00	3.738,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	3.738,00	3.738,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

20). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN KONSERVASI (KK) MENJADI HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	9.477,00	9.477,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	9.477,00	9.477,00

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1 PERUBAHAN FUNGSI

21). PERKEMBANGAN MUTASI KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) MENJADI HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	S/D TAHUN 2016
		(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.2. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016		
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Aceh	12	39.376,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39.376,65	
2	Sumatera Utara	12	28.054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.054,00	
3	Sumatera Barat	10	17.433,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	900,75	11	18.334,60
4	Riau	11	66.499,68	-	-	1	2.313,30	-	-	-	-	-	-	12	68.812,98	
5	Jambi	14	78.412,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	78.412,53	
6	Sumatera Selatan	30	121.222,46	-	-	3	918,34	-	-	-	-	-	-	33	122.140,80	
7	Bengkulu	5	14.327,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.327,45	
8	Lampung	16	134.147,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	134.147,20	
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Kepulauan Riau	2	7.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.530,00	
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Nusa Tenggara Barat	2	2.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.950,00	
19	Nusa Tenggara Timur	2	1.137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.137,00	
20	Kalimantan Barat	17	28.804,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28.804,72	
21	Kalimantan Tengah	28	67.253,60	2	1.257,92	3	2.266,65	1	609,70	-	-	-	-	34	71.387,87	
22	Kalimantan Selatan	9	31.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31.916,00	
23	Kalimantan Timur	7	36.600,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36.600,08	
24	Kalimantan Utara	2	3.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.291,00	
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Sulawesi Tengah	16	20.016,73	1	324,56	1	1.216,86	-	-	-	-	-	-	18	21.558,15	
27	Sulawesi Selatan	6	4.015,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.015,35	
28	Sulawesi Tenggara	21	37.035,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	37.035,71	
29	Gorontalo	3	5.089,56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	571,74	4	5.661,30	
30	Sulawesi Barat	2	2.486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1244,78	3	3.730,78	
31	Maluku	3	5.664,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.664,58	
32	Maluku Utara	9	18.434,08	1	664,97	1	555,09	-	-	-	-	1	1057,16	12	20.711,30	
33	Papua	15	92.303,95	-	-	-	-	1	32,75	-	-	-	-	16	92.336,70	
34	Papua Barat	7	15.319,38	-	-	1	1.078,36	-	-	-	-	-	-	8	16.397,74	
JUMLAH		261	879.321,56	4	2.247,45	10	8.348,60	2	642,45	-	-	4	3.774,43	281	894.334,49	

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data S/D 31 Desember 2016

Keterangan

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.3. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN/PERTANIAN (TAHAP SK PELEPASAN KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Aceh	58	265.743,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	265.743,70
2	Sumatera Utara	27	142.762,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	142.762,33
3	Sumatera Barat	26	157.956,37	-	-	-	-	1	6.429,52	-	-	1	5.370,25	28	169.756,14
4	Riau	134	1.523.126,36	2	18.410,34	1	5.543,00	2	8.061,60	1	3.393,00	-	-	140	1.558.534,30
5	Jambi	44	366.925,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	366.925,98
6	Sumatera Selatan	30	243.428,86	4	84.759,42	6	14.628,36	3	15.503,63	-	-	2	5.259,85	45	363.580,12
7	Bengkulu	11	57.581,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	57.581,25
8	Lampung	8	83.964,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	83.964,15
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	8	55.333,03	-	-	-	-	1	9.694,84	-	-	-	-	9	65.027,87
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3	846,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	846,86
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	18	224.040,93	2	17.499,21	1	16.999,20	3	14.732,43	2	5.427,30	-	-	26	278.699,07
21	Kalimantan Tengah	59	653.422,23	5	50.224,95	11	81.093,79	14	111.622,20	4	26.421,68	7	26.772,94	100	949.557,79
22	Kalimantan Selatan	17	209.130,53	-	-	1	5.074,30	-	-	-	-	-	-	18	214.204,83
23	Kalimantan Timur	51	437.115,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	437.115,36
24	Kalimantan Utara	6	57.359,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57.359,43
25	Sulawesi Utara	1	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.000,00
26	Sulawesi Tengah	8	72.805,00	1	5.727,90	-	-	-	-	-	-	-	-	9	78.532,90
27	Sulawesi Selatan	3	4.584,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.584,50
28	Sulawesi Tenggara	3	20.784,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.003,45	4	24.787,65
29	Gorontalo	4	47.032,20	1	6934,48	-	-	1	8.863,00	-	-	-	-	6	62.829,68
30	Sulawesi Barat	10	103.776,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	103.776,71
31	Maluku	12	12.657,74	-	-	-	-	1	386,33	-	-	-	-	13	13.044,07
32	Maluku Utara	9	47.112,72	1	1432,22	-	-	1	11.404,20	-	-	-	-	11	59.949,14
33	Papua	15	377.311,64	10	287.430,30	1	37.467,00	9	192.850,49	-	-	1	12.245,80	36	907.305,23
34	Papua Barat	7	117.347,40	4	64.248,41	2	55.696,20	6	115.460,33	2	31.917,40	-	-	21	384.669,74
JUMLAH		572	5.284.149,48	30	536.667,23	23	216.501,85	42	495.008,57	9	67.159,38	12	53.652,29	688	6.653.138,80

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.4. PERKEMBANGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2011				TAHUN 2012				TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				S/D TAHUN 2016			
		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar		Tanah Masuk		Tanah Keluar	
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		53	22.908,68	50	16.603,18	1	40,44	1	40,20	5	149,23	5	79,43	3	1.612,29	2	167,64	3	1.467,81	3	1.380,42	6	13.828,32	6	13.006,17	71	40.006,77	67	31.277,04

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

Ket:

TM : Tanah Masuk / Compensated area for forest

TK : Tanah Keluar / Converted forest area for non forest

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)



**DIREKTORAT RENCANA,
PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN
WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

TABEL V.1 PERKEMBANGAN PENETAPAN WILAYAH KPH (KPHP DAN KPHL)

NO	PROVINSI	TAHAPAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	TAHUN															
					2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
					Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
28	Papua Barat	1. Rancang Bangun*) 2. Arahan Pencadangan 3. Usulan Penetapan 4. Penetapan	SK. 744/Men hut-II/2009	19 Oktober 2009		0	0	21	5.388.407		21	5.404.745								

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2016

Ket:

0 : Belum ada Proses

*) :Rancang bangun dilaksanakan sebelum tahun 2007

*)) : Ada koreksi data

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki wilayah KPH

TABEL V.2 PENETAPAN WILAYAH KPH MODEL SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
1	Aceh	Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Kota Langsa	KPHL Unit III Aceh	SK.992/Menhet-II/2013	27/12/2013	406.273	276.118	-	-	-	682.391
2	Sumatera Utara	Mandailing Natal	KPHP Mandailing Natal	SK. 332/MenhetII/2010	25/05/2010	12.681	14.704	131.781	-	-	159.166
3	Sumatera Utara	Toba Samosir dan Labuhan Batu Utara	KPHL Unit XXII	SK.993/Menhet-II/2013	27/12/2013	65.038	-	51.189	-	-	116.227
4	Sumatera Utara	Toba Samosir	KPHL Tobasamosir	SK.866/Menhet-II/2013	05/12/2013	75.762	5.191	6.294	-	-	87.247
5	Sumatera Barat	Dharmasraya	KPHP Dharmasraya	SK.695/Menhet-II/2013	21/11/2013	-	17.721	15.829	-	-	33.550
6	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	KPHP Pesisir Selatan	SK.696/Menhet-II/2013	21/11/2013	9.091	4.563	46.274	-	-	59.928
7	Sumatera Barat	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Solok dan Tanah Datar	KPHL Bukit Barisan	SK.867/Menhet-II/2013	05/12/2013	69.504	16.759	245	-	-	86.508
8	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)	SK.44/MenhetII/2012	02/02/2012	94.883	5.286	17.383	-	-	117.552
9	Sumatera Barat	Sijunjung	KPHL Sijunjung	SK. 331/MenhetII/2010	25/05/2010	83.952	40.785	25.755	-	-	150.492
10	Sumatera Barat	Solok	KPHL Solok (unit VI)	SK.42/MenhetII/2012	02/02/2012	114.061	3.481	12.804	-	-	130.346
11	Sumatera Selatan	Banyuasin	KPHL Banyuasin	SK.961/Menhet-II/2013	27/12/2013	69.147	5.660	-	-	-	74.807
12	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHP Meranti	SK.689/Menhet-VII/2012	29/11/2012	20.082	134.597	97.588	-	-	252.267
13	Sumatera Selatan	Musi Rawas	KPHP Rawas	SK.688/Menhet-VII/2012	29/11/2012	-	89.511	32.074	-	-	121.585
14	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu, Muara Enim dan Lahat	KPHP Unit XIV Benakat Revisi	SK.827/Menhet-II/2013	19/11/2013	-	256.594	-	-	-	256.594
15	Sumatera Selatan	Mus Rawas	KPHP Lakitan Unit VI	SK. 790/MenhetII/2009	07/12/2009	-	76.776	-	-	-	76.776
16	Sumatera Selatan	Musi Banyuasin	KPHP Lalan	SK. 789/MenhetII/2009	07/12/2009	-	265.953	-	-	-	265.953
17	Kepulauan Riau	Karimun	KPHL Karimun	SK.442/MenhetII/2012	09/08/2012	9.605	-	8.002	-	-	17.607
18	Riau	Siak, Kampar dan Kota Pekanbaru	KPHP Minas Tahura	SK.765/Menhet-II/2012	26/12/2012	-	-	140.562	-	6.172	146.734
19	Riau	Kampar	KPHP Kampar Kiri (Unit XVIII)	SK. 640/MenhetII/2011	07/11/2011	24.028	-	119.755	-	-	143.783
20	Riau	Kepulauan Meranti	KPHP Tebing Tinggi (Unit XXIV)	SK.343/MenhetII/2011	28/06/2011	412	-	69.335	-	-	69.747
21	Riau	Pelalawan, Siak	KPHP Tasik Besar Serkap	SK. 509/MenhetII/2010	21/09/2010	-	491.768	2.660	18.848	-	513.276
22	Kep. Bangka Belitung	Bangka	KPHP Sigambir-Kotawaringin	SK.962/Menhet-II/2013	27/12/2013	4.769	30.169	-	-	-	34.938
23	Kep. Bangka Belitung	Bangka Tengah	KPHP Sungai Sembulan	SK. 329/MenhetII/2010	25/05/2010	5.185	34.228	-	-	-	39.413
24	Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	KPHP Rambat Menduyung	SK.763/Menhet-II/2012	26/12/2012	8.803	50.819	-	-	-	59.622
25	Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur	KPHP Gunung Duren	SK.764/Menhet-II/2012	26/12/2012	12.615	45.620	-	-	-	58.235
26	Bengkulu	Bengkulu Utara	KPHP Bengkulu Utara	SK.995/Menhet-II/2013	27/12/2013	165	9.546	42.640	-	-	52.351
27	Bengkulu	Muko-Muko	KPHP Muko-Muko	SK. 330/MenhetII/2010	25/05/2010	-	11.937	66.337	-	-	78.274
28	Bengkulu	Rejang Lebong	KPHL Bukit Balai Rejang	SK.994/Menhet-II/2013	27/12/2013	16.059	-	-	-	-	16.059
29	Jambi	Kerinci	KPHP Kerinci	SK.960/Menhet-II/2013	27/12/2013	-	34.250	-	-	-	34.250
30	Jambi	Merangin	KPHP Bukit Lubuk Pekak-Hulu Landai	SK.43/MenhetII/2012	02/02/2012	36.088	9.944	30.105	-	-	76.137
31	Jambi	Sarolangun	KPHP Limau unit VII	SK. 714/MenhetII/2011	19/12/2011	54.793	43.807	22.502	-	-	121.102
32	Jambi	Tanjung Jabung Barat	KPHL Sungai Beram Hitam	SK. 787/MenhetII/2009	07/12/2009	15.965	-	-	-	-	15.965
33	Lampung	Pesawaran	KPHP Pesawaran	SK.438/Menhet-II/2012	09/08/2012	9.944	1.260	-	-	-	11.204
34	Lampung	Way Kanan	KPHP Bukit Punggur	SK.439/Menhet-II/2012	09/08/2012	19.131	21.995	-	-	-	41.126
35	Lampung	Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus	KPHP Batu Tegi	SK. 650/MenhetII/2010	22/11/2010	58.162	-	-	-	-	58.162

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
						Luas (ha)					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
36	Lampung	Lampung Selatan	KPHL Rajabasa (Unit XIV)	SK.367/Men hut II/2011	07/07/2011	5.160	-	-	-	-	5.160
37	Lampung	Lampung Selatan, Lampung Timur	KPHP Gedong Wani (Unit XVI)	SK.427/Men hut II/2011	27/07/2011	-	30.243	-	-	-	30.243
38	Lampung	Lampung Tengah	KPHP Register 47 Way Terusan	SK. 794/Men hut II/2009	07/12/2009	-	12.500	-	-	-	12.500
39	Lampung	Mesuji	KPHP Sungai Buaya	SK.996/Men hut II/2013	27/12/2013	-	44.249	-	-	-	44.249
40	Lampung	Tanggamus	KPHL Kotaagung Utara (Unit X)	SK.379/Men hut II/2011	18/07/2011	56.020	-	-	-	-	56.020
41	Lampung	Tulang Bawang, Way Kanan	KPHP Muara Dua	SK.236/Men hut II/2011	10/05/2012	-	49.134	-	-	-	49.134
42	DI Yogyakarta	Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo	KPHP Yogyakarta	SK. 721/Men hut II/2011	20/12/2011	2.313	13.412	-	-	-	15.725
43	Bali	Buleleng, Bangli, Tabanan, Badung	KPHL Bali Tengah (Unit II)	SK. 620/Men hut II/2011	01/11/2011	14.651	-	-	-	-	14.651
44	Bali	Buleleng, Karangasem, Bangli, Klungkung	KPHL Bali Timur (Unit III)	SK. 621/Men hut II/2011	01/11/2011	21.891	1.087	-	-	-	22.978
45	Bali	Jembrana, Buleleng, Tabanan	KPHL Bali Barat	SK. 784/Men hut II/2009	07/12/2009	59.848	1.892	1.610	-	-	63.350
46	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu	KPHP Tambora Utara	SK.970/Men hut II/2013	27/12/2013	-	14.769	12.151	-	-	26.920
47	Nusa Tenggara Barat	Bima dan Kota Bima	KPHP Maria Unit XXXIII	SK.752/Men hut II/2012	26/12/2012	8.515	4.554	14.563	-	-	27.632
48	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHL Ampang	SK.751/Men hut II/2012	26/12/2012	24.168	8.261	6.252	-	-	38.681
49	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat, Lombok Utara	KPHL Rinjani Barat	SK. 785/Men hut II/2009	07/12/2009	28.911	5.075	6.977	-	-	40.963
50	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	KPHL Tastura	SK.963/Men hut II/2013	27/12/2013	11.153	5.000	-	-	-	16.153
51	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	KPHL Rinjani Timur	SK.225/Men hut II/2012	04/05/2012	31.987	5.602	-	-	-	37.589
52	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	KPHL Batulan teh (Unit IX)	SK.342/Men hut II/2011	28/06/2011	14.303	14.842	3.631	-	-	32.776
53	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	KPHP Sejorong	SK.971/Men hut II/2013	27/12/2013	15.762	5.274	19.952	-	-	40.988
54	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	KPHP Rote Ndao	SK. 333/Men hut II/2010	25/05/2010	15.509	25.221	-	-	-	40.730
55	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	KPHL Flores Timur	SK.972/Men hut II/2013	27/12/2013	39.856	1.793	13.759	-	-	55.408
56	Nusa Tenggara Timur	Alor	KPHL Alor Pantar	SK.767/Men hut II/2012	26/12/2012	59.419	22.938	21.977	-	-	104.334
57	Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan	KPHL Mutis Timau (Unit XIX)	SK.41/Men hut II/2012	02/02/2012	97.005	-	18.375	-	-	115.380
58	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	KPHP Manggarai Barat	SK.973/Men hut II/2013	27/12/2013	27.113	18.613	14.571	-	-	60.297
59	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	KPHP Kapuas Hulu (Unit XVIII dan Unit XIX)	SK.380/Men hut II/2011	18/07/2011	224.522	83.241	150.262	-	-	458.025
60	Kalimantan Barat	Ketapang	KPHP Kendawangan	SK.680/Men hut II/2012	23/11/2012	16.268	162.583	-	-	-	178.851
61	Kalimantan Barat	Sintang	KPHP Sungai Merakai	SK. 791/Men hut II/2009	07/12/2009	10.420	46.473	-	-	-	56.893
62	Kalimantan Timur	Berau	KPHP Berau Barat	SK. 649/Men hut II/2010	22/11/2010	247.025	118.261	410.253	-	-	775.539
63	Kalimantan Timur	Bulungan	KPHP Kayan	SK.223/Men hut II/2012	04/05/2012	168.198	9.776	309.868	-	-	487.842
64	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan	KPHP Meratus	SK.768/Men hut II/2012	26/12/2012	-	274.159	113.329	-	-	387.488
65	Kalimantan Timur	Kota Tarakan	KPHL Tarakan	SK. 783/Men hut II/2009	07/12/2009	2.400	-	2.223	-	-	4.623
66	Kalimantan Timur	Malinau	KPHP Malinau	SK.224/Men hut II/2012	04/05/2012	220.723	110.518	384.271	-	-	715.512
67	Kalimantan Timur	Paser	KPHP Kendilo	SK.966/Men hut II/2013	27/12/2013	44.152	61.051	34.032	-	-	139.235
68	Kalimantan Selatan	Banjar	KPHP Banjar	SK. 793/Men hut II/2009	07/12/2009	42.090	72.513	25.354	-	-	139.957
69	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	KPHP Hulu Sungai Selatan	SK.750/Men hut II/2012	26/12/2012	21.221	11.530	52	-	-	32.803
70	Kalimantan Selatan	Kota baru	KPHP Pulau Laut dan Sebuku (UNIT III)	SK.226/Men hut II/2012	04/05/2012	12.863	99.395	-	-	-	112.258
71	Kalimantan Selatan	Tabalong	KPHP Tabalong	SK.997/Men hut II/2013	27/12/2013	48.776	44.759	23.822	-	-	117.357
72	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	KPHP Tanah Laut	SK.440/Men hut II/2012	09/08/2012	15.862	71.490	5.289	-	-	92.641
73	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	KPHL Gerbang Barito	SK.964/Men hut II/2013	27/12/2013	90.361	43.345	20.961	-	-	154.667

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
						Luas (ha)				Hutan Lindung	Hutan Produksi
				NO SK	TANGGAL						
74	Kalimantan Tengah	Gunung Mas	KPHP Gunung Mas	SK.974/Menhet-II/2013	27/12/2013	57.337	50.107	187.291	-	-	294.735
75	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	KPHP Kota Waringin Barat	SK.749/Menhet-II/2012	19/12/2011	9.672	257.160	49.303	-	-	316.135
76	Kalimantan Tengah	Lamandau	KPHP Lamandau	SK.717/Menhet-II/2012	26/12/2012	25.432	19.906	180.951	-	-	226.289
77	Kalimantan Tengah	Kapuas	KPHL Kapuas	SK. 247/MenhetII/2011	02/05/2011	105.372	-	-	-	-	105.372
78	Kalimantan Tengah	Murung Raya	KPHP Murung Raya	SK.965/Menhet-II/2013	27/12/2013	103.578	205.729	598.948	-	-	908.255
79	Kalimantan Tengah	Seruyan	KPHP Seruyan (Unit XXI)	SK. 716/MenhetII/2011	19/12/2011	38.970	6.112	328.827	-	-	373.909
80	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan	KPHP Poigar	SK. 788/MenhetII/2009	07/12/2009	5.265	19.739	16.594	-	-	41.598
81	Gorontalo	Boalemo	KPHP Bolaemo (Unit V)	SK.402/MenhetII/2011	21/07/2011	29.383	12.403	55.140	-	-	96.926
82	Gorontalo	Gorontalo	KPHP Gorontalo	SK.976/Menhet-II/2013	27/12/2013	13.126	17.781	40.775	-	-	71.682
83	Gorontalo	Gorontalo Utara	KPHP Gorontalo Utara	SK.766/Menhet-II/2012	26/12/2012	18.632	15.759	71.417	-	-	105.808
84	Gorontalo	Pohuwato	KPHL Unit III Pohuwato	SK. 334/MenhetII/2010	25/05/2010	59.301	13.605	43.369	-	-	116.275
85	Sulawesi Tengah	Banggai, Tojo Una-Una Morowali	KPHP Toili Baturube	SK.967/Menhet-II/2013	27/12/2013	126.447	55.389	94.800	-	-	276.636
86	Sulawesi Tengah	Donggala, Parigi, Moutong	KPHP Dampelas Tinombo	SK. 792/MenhetII/2009	07/12/2009	21.017	10.244	69.651	-	-	100.912
87	Sulawesi Tengah	Banggai	KPHP Balantak	SK.754/Menhet-II/2012	26/12/2012	30.418	28.049	58.936	-	-	117.403
88	Sulawesi Tengah	Buol	KPHP Pogogul	SK.756/Menhet-II/2012	26/12/2012	44.257	54.008	101.268	-	-	199.533
89	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Sigi,Donggala dan Kota Palu	KPHP Dolago Tanggunung	SK.755/Menhet-II/2012	26/12/2012	67.794	19.008	57.548	-	-	144.350
90	Sulawesi Tengah	Poso	KPHP Sintuwu Maroso/Rano Patanu	SK. 639/MenhetII/2011	07/11/2011	46.341	28.740	62.349	-	-	137.430
91	Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	KPHP Unit XVII Tojo Una-Una	SK.968/Menhet-II/2013	27/12/2013	39.921	10.827	61.744	-	-	112.492
92	Sulawesi Barat	Mamuju, Mamasa	KPHL Ganda Dewata	SK.441/Menhet-II/2012	09/08/2012	157.598	-	-	-	-	157.598
93	Sulawesi Barat	Majene	KPHL Malunda	SK.753/Menhet-II/2012	26/12/2012	45.109	-	6.962	-	-	52.071
94	Sulawesi Barat	Mamasa	KPHL Mamasa Tengah (Unit VIII)	SK.340/MenhetII/2011	27/06/2011	33.218	-	4.744	-	-	37.962
95	Sulawesi Barat	Mamasa	KPHP Mamasa Barat (Unit VII)	SK.341/MenhetII/2011	27/06/2011	17.352	-	36.203	-	-	53.555
96	Sulawesi Barat	Mamuju Utara	KPHL Unit II Lariang	SK. 60/MenhetII/2011	28/02/2011	34.512	2.394	21.010	-	-	57.916
97	Sulawesi Barat	Mamuju, Mamuju Tengah	KPHP Budong-Buddong	SK.998/Menhet-II/2013	27/12/2013	5.463	36.461	86.172	-	-	128.096
98	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	KPHL Mapili	SK. 651/MenhetII/2010	22/11/2010	53.485	-	23.711	-	-	77.196
99	Sulawesi Tenggara	Bombana	KPHP Tina Orima bombana	SK.426/Menhet-II/2011	27/07/2011	23.659	74.514	17.953	-	-	116.126
100	Sulawesi Tenggara	Buton	KPHP Unit III Lakompa	SK. 795/MenhetII/2009	07/12/2009	12.432	11.880	6.288	-	-	30.600
101	Sulawesi Tenggara	Buton Utara	KPHL Peropa'Ea Gantara	SK.975/Menhet-II/2013	27/12/2013	15.157	-	2.571	-	-	17.728
102	Sulawesi Tenggara	Konawe	KPHL Konawe	SK.762/Menhet-II/2012	26/12/2012	96.941	8.018	35.668	-	-	140.627
103	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan, Kota Kendari	KPHP Unit XXIV Gularaya	SK. 61/MenhetII/2011	28/02/2011	41.405	89.343	3.671	-	-	134.419
104	Sulawesi Selatan	Bone, Sirjai, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Takalar, Jeneponto	KPHP Jeneberang (Unit IX)	SK. 715/MenhetII/2011	19/12/2011	60.451	45.471	54.932	-	-	160.854
105	Sulawesi Selatan	Luwu Timur	KPHL Larona Malili (Unit I)	SK. 722/MenhetII/2011	20/12/2011	156.593	6.391	79.008	-	-	241.992
106	Sulawesi Selatan	Wajo	KPHP Awota	SK.979/Menhet-II/2013	27/12/2013	5.539	13.532	-	-	-	19.071
107	Maluku Utara	Halmahera Selatan	KPHP Bacan	SK.969/Menhet-II/2013	27/12/2013	62.836	7.760	70.212	-	-	140.808
108	Maluku Utara	Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan	KPHP Gunung Sinopa	SK. 337/MenhetII/2010	25/05/2010	21.056	9.604	13.917	-	-	44.577
109	Maluku	Buru	KPHP Wae Apu	SK.770/Menhet-II/2012	26/12/2012	73.478	62.921	96.033	-	-	232.432
110	Maluku	Maluku Tengah	KPHP Wae Sapalewa	SK. 336/MenhetII/2010	25/05/2010	4.545	34.609	27.903	-	-	67.057
111	Maluku	Buru, Buru Selatan	KPHP Wae Tina	SK.977/Menhet-II/2013	27/12/2013	51.599	86.938	65.847	-	-	204.384
112	Maluku	Seram Bagian Timur	KPHP Wae Bubi	SK.978/Menhet-II/2013	27/12/2013	12.666	11.059	42.739	-	-	66.464

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KPH MODEL	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN					
						Luas (ha)					
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dikonversi	Tahura	Luas Total (ha)
113	Papua Barat	Sorong Selatan	KPHP Sorong Selatan	SK.771/Menhet-II/2012	26/12/2012	121.361	73.189	88.710	-	-	283.260
114	Papua Barat	Kota Sorong	KPHL Kota Sorong (remu)	SK.999/Menhet-II/2013	27/12/2013	6.602	-	6.173	-	-	12.775
115	Papua Barat	Sorong	KPHP Sorong	SK. 701/MenhetII/2010	20/12/2010	11.789	111.444	100.136	-	-	223.369
116	Papua	Biak Numfor	KPHL Biak Numfor	SK. 648/MenhetII/2010	22/11/2010	120.340	30.527	55.149	-	-	206.016
117	Papua	Keerom	KPHP Keerom Revisi	SK.828/Menhet-II/2013	19/11/2013	49.196	30.330	93.930	-	-	173.456
118	Papua	Sarmi dan Jayapura	KPHP Mamberamo Revisi	SK.829/Menhet-II/2013	19/11/2013	50.492	46.105	159.217	-	-	255.814
119	Papua	Waropen	KPHP Waropen	SK.760/Menhet-II/2012	26/12/2012	83.372	97.691	5.899	-	-	186.962
120	Papua	Kepulauan Yapen	KPHP Yapen	SK. 786/MenhetII/2009	07/12/2009	15.100	90.767	-	-	-	105.867

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2016

TABEL V.3 PENETAPAN WILAYAH KPH KONSERVASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Taman Nasional Batang Gadis	Sumatera Utara	SK.786/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	72.150,00
2	Taman Nasional Siberut	Sumatera Barat	SK.787/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	190.500,00
3	Taman Nasional Sembilang	Sumatera Selatan	SK. 748/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	202.896,31
4	Taman Nasional Tesso Nilo	Riau	SK.788/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	38.576,00
5	Taman Nasional Bukit Tigapuluh	Riau	SK.789/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	144.223,00
6	Taman Nasional Berbak	Jambi	SK. 774/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	62.700,00
7	Taman Nasional Bukit Duabelas	Jambi	SK. 720/Menhet -II/2010	29 Desember 2010	60.500,00
8	Taman Nasional Way Kambas	Lampung	SK. 712/Menhet-II/2010	29 Desember 2010	130.000,00
9	Taman Nasional Ujung Kulon	Banten	SK. 775/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	122.956,00
10	Taman Nasional Gunung Halimun Salak	Banten dan Jawa Barat	SK. 776/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	113.357,00
11	Taman Nasional Gunung Ciremai	Jawa Barat	SK.790/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	15.500,00
12	Taman Nasional Gunung Merapi	DIY dan Jawa Tengah	SK. 713/Menhet-II/2010	29 Desember 2010	6.410,00
13	Taman Nasional Karimun Jawa	Jawa Tengah	SK. 749/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	111.625,00
14	Taman Nasional Gunung Merbabu	Jawa Tengah	SK. 751/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	5.725,00
15	Taman Nasional Meru Betiri	Jawa Timur	SK. 779/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	58.000,00
16	Taman Nasional Alas Purwo	Jawa Timur	SK. 801/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	43.420,00
17	Taman Nasional Baluran	Jawa Timur	SK. 718/Menhet-II/2010	29 Desember 2010	25.000,00
18	Taman Nasional Bali Barat	Bali	SK. 780/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	19.002,89
19	Taman Nasional Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	SK. 781/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	41.330,00
20	Taman Nasional Laiwangi Wanggameti	Nusa Tenggara Timur	SK. 714/Menhet II/2010	29 Desember 2010	47.014,00
21	Taman Nasional Manupeu Tanah Daru	Nusa Tenggara Timur	SK. 719/Menhet-II/2010	29 Desember 2010	87.984,00
22	Taman Nasional Komodo	Nusa Tenggara Timur	SK. 753/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	173.000,00
23	Taman Nasional Danau Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	SK. 754/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	5.356,50
24	Taman Nasional Danau Sentarum	Kalimantan Barat	SK. 715/Menhet-II/2010	29 Desember 2010	132.000,00
25	Taman Nasional Gunung Palung	Kalimantan Barat	SK. 721/Menhet-II/2010	29 Desember 2010	90.000,00
26	Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah	SK. 750/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	181.090,00
27	Taman Nasional Kutai	Kalimantan Timur	SK. 778/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	198.629,00
28	Taman Nasional Kayan Mentarang	Kalimantan Timur	SK. 752./Menhet-II/2011	30 Desember 2011	1.360.500,00
29	Taman Nasional Tanjung Putting	Kalimantan Tengah	SK. 777/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	415.040,00
30	Taman Nasional Sebangau	Kalimantan Tengah	SK.791/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	568.700,00
31	Taman Nasional Bunaken	Sulawesi Utara	SK. 782/Menhet-II/2009	7 Desember 2009	89.065,00
32	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara dan Gorontalo	SK. 716/Menhet-II/2010	29 Desember 2010	287.115,00
33	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	SK. 755/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	105.194,00
34	Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	SK. 717/Menhet-II/2010	29 Desember 2010	43.750,00
35	Taman Nasional Manusela	Maluku	SK. 756/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	189.000,00
36	Taman Nasional Aketajawe Lolobata	Maluku Utara	SK.757/Menhet-II/2011	30 Desember 2011	167.300,00
37	Taman Nasional Lorentz	Papua	SK.792/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	2.354.644,00
38	Taman Nasional Wasur	Papua	SK.793/Menhet-II/2012	27 Desember 2012	413.810,00
39	Rawa Singkil	Aceh	SK.980/Menhet-II/2013	27 Desember 2013	102.500
40	Kerumutan	Riau	SK.981/Menhet-II/2013	27 Desember 2013	120.000

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
41	Arau Hilir	Padang	SK.982/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	105.375
42	Danku Bentayan	Sumatera Selatan	SK.983/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	89.574
43	Guntur-Papandayan	Jawa Barat	SK.984/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	15.318
44	Tambora	Nusa Tenggara Barat	SK.985/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	78.116
45	Ruteng	Nusa Tenggara Timur	SK.986/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	32.248
46	Gunung Melintang	Kalimantan Barat	SK.987/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	25.125
47	Morowali	Sulawesi Tengah	SK.988/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	209.400
48	Towuti	Sulawesi Tengah	SK.989/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	209.400
49	Nantu	Gorontalo	SK.990/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	31.215
50	Jayawijaya	Papua	SK.991/Menlhk-II/2013	27 Desember 2013	800.000
51	BOLMALIT MAGHLIT	Papua Barat	SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9.194
52	SORONG KLAMONO	Papua Barat	SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.990
53	GUNUNG MEJA SIDEI KAIRONI	Papua Barat	SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	968
54	ARFAK	Papua Barat	SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	68.325
55	WAIGEO	Papua Barat	SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	264.073
56	MOROWALI	Sulawesi Tengah	SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	216.908
57	BAKIRIANG	Sulawesi Tengah	SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	17.479
58	PAMONA	Sulawesi Tengah	SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	35.125
59	PANGI BINANGGA	Sulawesi Tengah	SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	70.997
60	GUNUNG TINOMBALA	Sulawesi Tengah	SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	38.608
61	KPHK GUNUNG DAKO	Sulawesi Tengah	SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	21.659
62	KUALA LUPAK	Kalimantan Selatan	SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	4.008
63	GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU	Riau	SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	99.858
64	BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	Riau	SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	142.156
65	BUKIT KABA	Bengkulu	SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	15.133
66	ENGGANO	Bengkulu	SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	9.374
67	PATI BARAT	Jawa Tengah	SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	1.426
68	CILACAP	Jawa Tengah	SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	982
69	PARAWEN	Kalimantan Tengah	SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	5.855
70	KPHK LAMANDAU	Kalimantan Tengah	SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	61.425
71	BEDUGUL SANGEH	Bali	SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	3.635
72	KINTAMANI	Bali	SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016	17 Juni 2016	2.649
73	BARUMUN	Sumatera Utara	SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	02 September 2016	36.261
74	SICIKE CIKE	Sumatera Utara	SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.144
75	KAWAH IJEN	Jawa Timur	SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.575
76	DATARAN TINGGI YANG	Jawa Timur	SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	12.865
77	CYCLOOPS YOUTEFA	Papua	SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	33.289
78	MUARA KAMAN SEDULANG	Kalimantan Timur	SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	65.445
79	TALIABU	Maluku	SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13.114
80	JAKARTA	Jakarta	SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	242
81	KEPULAUAN KRAKATAU	Lampung	SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	13.365
82	LAMBUSANGO	Sulawesi Tenggara	SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	28.595
83	PEROPA	Sulawesi Tenggara	SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	44.012
84	DURIAN LUNCUK	Jambi	SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	111

NO	KPHK	PROVINSI	PENETAPAN KPHK		
			Surat Keputusan	Tanggal	Luas (ha)
85	MUARA KENDAWANGAN	Kalimantan Barat	SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	147.614
86	GUNUNG NYIUT	Kalimantan Barat	SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	91.759
87	SIMPANG TILU	Jawa Barat	SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	23.356
88	BURANGRANG TANGKUBAN PERAHU	Jawa Barat	SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4.772
89	MOYO	Nusa Tenggara Barat	SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	30.945
90	PADANG SUGIHAN	Sumatera Selatan	SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	88.148
91	HARLU	Kalimantan Timur	SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	3.681
92	GUNUNG MUTIS	Nusa Tenggara Timur	SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	12.315
93	PULAU WEH	Aceh	SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	6.481
94	LINGGA ISAQ	Aceh	SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	86.634
95	TANGKOKO	Sulawesi Utara	SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	8.545
96	YOGYAKARTA	Yogyakarta	SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	632
97	GUNUNG SAHUWAI	Maluku	SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	32.476
98	HUTAN BAKAU PANTAI TIMUR	Jambi	SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	4.872
99	GUNUNG TUNAK	Nusa Tenggara Barat	SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016	20 September 2016	2.225
TOTAL					12.084.633,70

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2016

TABEL V.4 PENETAPAN KELEMBAGAAN KPH FASILITASI TAHUN 2016

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama KPH	Unit	KPHL/P	Nomor SK	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	Lalan Sembilang	UNIT II	KPHP	Perbup Banyuasin No. 420 Tahun 2013	
2	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	Kota Pagar Alam	UNIT XII	KPHL	Perwako No.41 Tahun 2014	16 Oktober 2014
3	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	Ogan Ulu	UNIT XIII	KPHL	Perbup No.27 Tahun 2013	29 Agustus 2013
4	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim, Kab. OKU	Suban Jeriji	UNIT XIV	KPHP	Perda No.16/2013 dan Pergub No.36/2014	
5	Sumatera Selatan	Kab. OKU	Bukit Nanti	UNIT XV	KPHL	Perbup No.31/2014	09 September 2014
6	Sumatera Selatan	Kab. OKUS	Peraduan Gistang	UNIT XVI	KPHL	Perbup No.4 Tahun 2015	16 Februari 2015
7	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli	UNIT XVI	UNIT XVI	KPHL	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
8	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Barat	UNIT XVII	UNIT XVII	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
9	Sumatera Utara	Kab. Samosir, Kab. Tobasa	UNIT XVIII	UNIT XVIII	KPHL	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
10	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan	UNIT XX	UNIT XX	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
11	Sumatera Utara	Kab. Tapsel, Kab. Padang Lawas Utara	UNIT XXIII	UNIT XXIII	KPHL	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
12	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	UNIT XXIV	UNIT XXIV	KPHL	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
13	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	UNIT XXV	UNIT XXV	KPHL	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
14	Sumatera Utara	Kab. Tapsel, Kab. Padang Lawas Utara	UNIT XXVI	UNIT XXVI	KPHL	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
15	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	Tapanuli Selatan	UNIT XXVII	KPHP	0	
16	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	UNIT XXVIII	UNIT XXVIII	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
17	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas, Kab. Labusel	UNIT XXXI	UNIT XXXI	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 38 Tahun 2016	08 Desember 2016
18	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	Menukung	UNIT XXIII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 140 Tahun 2016	30 Desember 2016
19	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	Sokan	UNIT XXIV	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 142 Tahun 2016	30 Desember 2016
20	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara	Belimbing	UNIT XXV	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 138 Tahun 2016	30 Desember 2016
21	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Barat	Delta Mahakam	UNIT XXIX	KPHP	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
22	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	DAS Belayan	UNIT XXVI	KPHP	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
23	Kalimantan Timur	Kab. Kukar, Kab. Bontang	Santan	UNIT XXVII	KPHP	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
24	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat	Bongan	UNIT XXXII	KPHP	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
25	Kalimantan Timur	Kab. Paser	Telakai	UNIT XXXIII	KPHP	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016	22 November 2016
26	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Sungai Wain-Sungai Manggar	UNIT XXX	KPHL	Peraturan Walikota BPN	
27	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	Tana Tidung	UNIT VII	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 28 Tahun 2016	28 November 2016
28	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Palangkaraya	UNIT III	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015
29	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	Barito Utara	UNIT V	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015
30	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	Barito Timur	UNIT XIV	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama KPH	Unit	KPHL/P	Nomor SK	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	Kotawaringin Timur	UNIT XXIX	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015
32	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	Pulang Pisau	UNIT XXXI	KPHP	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 37 Tahun 2015	03 Agustus 2015
33	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Hulu Sungai Tengah	UNIT IX	KPHL	Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No. 46 Tahun 2014	6 Oktober 2014
34	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	Tanah Bumbu	UNIT VI	KPHP	Perup Tanah Bumbu No.49 Tahun 2014	24 November 2014
35	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung	Tomohon	UNIT VI	KPHL	Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 98 Tahun 2016	14 Nopember 2016
36	Maluku	Kab. Buru Selatan	Wae Mala-Wae Mikona	UNIT I	KPHP	*	
37	Maluku	Kota Ambon	Kota Ambon	UNIT XIV	KPHL	*	
38	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	Maluku Tenggara	UNIT XVI	KPHL	*	
39	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	Bungal	UNIT XVIII	KPHP	*	
40	Maluku	Kab. Kep. Aru	P. Molkar - P. Trangan	UNIT XXI	KPHP	*	
41	Maluku	Kab. Kep. Aru	Unit XXII	UNIT XXII	KPHP	*	
42	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	Halmahera Timur	UNIT IV	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016	28 Desember 2016
43	Maluku Utara	Kab. Taliabu	Kepulauan Sula	UNIT XVI	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016	28 Desember 2016
44	Maluku Utara	Kab. Tidore Kepulauan	Oba	UNIT IX	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara No. 69 Tahun 2016	28 Desember 2016
45	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	Karossa	UNIT IV	KPHP	Perup Mamuju Tengah No. 061 Tahun 2014	20 Januari 2014
46	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	Karama	UNIT VI	KPHP	Perup Mamuju No. 8 Tahun 2014	7 September 2014
47	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	kep. Selayar	UNIT X	KPHP	Perup Kepulauan Selayar No. 1 Tahun 2014	27 Januari 2014
48	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	Toffo Pajo	UNIT XVI	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016	27 Desember 2016
49	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	Madapangga Rompu	UNIT XX	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 53 Tahun 2016	27 Desember 2016
50	Papua	Kab. Nabire, Kab. Dogiai	Nabire	UNIT II	KPHL	*	
51	Papua	Kab. Boven Digoel	Boven Digoel	UNIT LI	KPHP	*	
52	Papua	Kab. Sarmi	Sarmi	UNIT XXII	KPHP	*	
53	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	Pegunungan Bintang	UNIT XXXV	KPHL	*	
54	Papua	Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Waropen	Intan Jaya	UNIT X	KPHL	*	
55	Papua	Kota Jayapura	Kota Jayapura	UNIT XXVIII	KPHP	*	
56	Papua	Kab. Mimika, Kab. Dogiai	Mimika	UNIT VI	KPHL	Peraturan Daerah Mimika No. 8 Tahun 2014	
57	Papua	Kab. Lani Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara	Jayawijaya	UNIT XLII	KPHL	Peraturan Bupati Jayawijaya No.10 Tahun 2014	
58	Papua	Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, Kab. Asmat	Nduga	UNIT XLIII	KPHP	Perup Nduga No. 04 Tahun 2015	
59	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	Jebu Bembang Antan	UNIT II	KPHP	Perup No.19 Th 2012	05 Juli 2012
60	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	Bubus Panca	UNIT III	KPHP	*	
61	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	Bangka Selatan	UNIT VIII	KPHP	Peraturan Bupati Bangka No. 19 Tahun 2012	20 Nopember 2012

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama KPH	Unit	KPHL/P	Nomor SK	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	Belitung	UNIT X	KPHL	*	
63	Jambi	Kab. Tebo	Tebo Barat	UNIT IX	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 37 Tahun 2016	
64	Jambi	Kab. Tebo	Tebo Timur	UNIT X	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No. 37 Tahun 2016	
65	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	Manggarai	UNIT II	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
66	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	Ngada	UNIT IV	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
67	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	Unit IX Lembata	UNIT IX	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
68	Nusa Tenggara Timur	Kab. TTU	Timor Tengah Utara	UNIT XXI	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
69	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	Manggarai Timur	UNIT III	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
70	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	Sumba Barat Daya	UNIT XI	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
71	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	Nagekeo	UNIT V	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
72	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	Ende	UNIT VI	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
73	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	Sikka	UNIT VII	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
74	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	Timor Tengah Selatan	UNIT XX	KPHP	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
75	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	Belu	UNIT XXII	KPHL	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 80 Tahun 2016	
76	Riau	Kab. Bengkalis	Bengkalis	UNIT V	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
77	Riau	Kab. Siak	Siak	UNIT VII	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
78	Riau	Kab. Rokan Hulu	Rokan Hulu	UNIT XIV	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
79	Riau	Kab. Pelalawan	Pelalawan XX	UNIT XX	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
80	Riau	Kab. Pelalawan	Pelalawan XXI	UNIT XXI	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
81	Riau	Kab. Indragiri Hulu	Indragiri Hulu	UNIT XXX	KPHP	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
82	Riau	Kab. Kuantan Singingi	Kuantan Singingi	UNIT XXXI	KPHL	Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016	04 Nopember 2016
83	Kep. Riau	Kab. Lingga	Lingga	UNIT III	KPHP	*	
84	Kep. Riau	Kab. Bintan, Kota Tanjung Pinang	Bintan Tanjung Pinang	UNIT IV	KPHP	*	
85	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	Bone Bolango	UNIT VII	KPHP	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 85 Tahun 2016	23 Desember 2016
86	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	Gunung Dako	UNIT II	KPHP	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 November 2016
87	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	Banawa Lalundu	UNIT VII	KPHP	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 November 2016
88	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	Morowali	UNIT XIV	KPHP	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 November 2016
89	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai Laut	Peling	UNIT XXI	KPHP	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016	17 November 2016
90	Papua Barat	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong	Raja Ampat	UNIT I	KPHL	Peraturan Bupati Raja Ampat No.4 Tahun 2014	
91	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	Bakau	UNIT XV	KPHP	Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2015	22 September 2015
92	Papua Barat	Kab. Fakfak	Fakfak	UNIT XVI	KPHP	Perup Fakfak Nomor 36 Tahun 2015	11 November 2015
93	Papua Barat	Kab. Tambrauw	Tambrauw	UNIT IV	KPHP	*	
94	Aceh	Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie	KPH lintas Kabupaten	UNIT I	KPHL	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2013
95	Aceh	Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah	KPH lintas Kabupaten	UNIT II	KPHL	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2013

No	Provinsi	Kab/Kota	Nama KPH	Unit	KPHL/P	Nomor SK	Tanggal
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Aceh	Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh	KPH lintas Kabupaten	UNIT IV	KPHL	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2013
97	Aceh	Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Barat Daya	KPH lintas Kabupaten	UNIT V	KPHL	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2013
98	Aceh	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kota Sulubusalam, Kab. Aceh Singkil	KPH lintas Kabupaten	UNIT VI	KPHL	Peraturan Gubernur Aceh No.20 Tahun 2013	12 April 2013
99	Bengkulu	Kab. Seluma	Seluma	UNIT IV	KPHL	Peraturan Bupati Seluma No. 22 Tahun 2014	7 April 2014
100	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah	Lintas Kabupaten	UNIT III	KPHL	*	
101	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Bengkulu Selatan	UNIT V	KPHL	*	
102	Bengkulu	Kab. Kaur	Kaur	UNIT VI	KPHL	*	
103	Lampung	Kab. Lampung Barat	Liwa	UNIT II	KPHL	Peraturan Bupati Lampung Barat No. 29 Tahun 2014	
104	Lampung	Kab. Lampung Tengah	Sendang Agung	UNIT VII	KPHL	Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 6 tahun 2016	29 Februari 2016
105	Lampung	Kab. Lampung Utara	Tangkit Tebak	UNIT VIII	KPHL	*	
106	Lampung	Kab. Lampung Timur	Gunung Balak	UNIT XV	KPHL	Peraturan Bupati Lampung Timur No. 11 Tahun 2013	1 Mei 2013
107	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Mekongga Selatan	UNIT XI	KPHP	*	
108	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	Kota Baubau	UNIT V	KPHP	*	
109	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	Muna	UNIT VI	KPHP	*	
110	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	Mekongga Selatan	UNIT XIII	KPHL	*	
111	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	Ueesi	UNIT XIV	KPHL	*	
112	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	Wakatobi	UNIT XXV	KPHL	*	
113	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka	Ladongi	UNIT XII	KPHP	Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor : 11 Tahun 2013	
114	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara, Kab. Morowali	Bina Mahawana Sejuk	UNIT XIX	KPHP	Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 410 Tahun 2014	22 September 2014

Keterangan : *) 60 KPH dalam proses pembentukan kelembagaan

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2016

TABEL V.5 PENETAPAN KPH FASILITASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas Total (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aceh	Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie	UNIT I KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	377.404	118.614	72.232	568.250
2	Aceh	Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bener Meriah	UNIT II KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	149.613	90.377	13.959	253.948
3	Aceh	Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Tengah	UNIT IV KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	357.841	45.146	-	402.986
4	Aceh	Kab. Gayo Lues, Kab. Aceh Barat Daya	UNIT V KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	243.230	4.950	41.982	290.162
5	Aceh	Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Tenggara, Kota Sulubusalam, Kab. Aceh Singkil	UNIT VI KPHL	SK.627/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	261.301	41.312	7.940	310.552
6	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah	UNIT XVI KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	46.882	48	25.236	72.166
7	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Barat	UNIT XVII KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	7.401	76.105	3.049	86.555
8	Sumatera Utara	Kab. Samosir, Kab. Tobasa	UNIT XVIII KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	47.635	1.779	-	49.415
9	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan	UNIT XX KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	20.127	38.213	30.591	88.931
10	Sumatera Utara	Kab. Tapsel, Kab. Padang Lawas Utara	UNIT XXIII KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	42.693	-	22.244	64.937
11	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	UNIT XXIV KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	97.332	-	27.015	124.347
12	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	UNIT XXV KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	44.011	2.631	13.755	60.396
13	Sumatera Utara	Kab. Tapsel, Kab. Padang Lawas Utara	UNIT XXVI KPHL	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	110.776	18.658	44.962	174.395
14	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	UNIT XXVII KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	17.655	20.416	-	38.071
15	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	UNIT XXVIII KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	53.199	24.139	50.419	127.758
16	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas, Kab. Labusel	UNIT XXXI KPHP	SK.637/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	42.614	188.448	39.397	270.460
17	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	UNIT II KPHP	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	62.486	-	62.486
18	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	UNIT XII KPHL	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	26.052	-	-	26.052
19	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	UNIT XIII KPHL	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	69.431	-	-	69.431
20	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim, Kab. OKU	UNIT XIV KPHP	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	3.190	133.076	42.778	179.044
21	Sumatera Selatan	Kab. OKU	UNIT XV KPHL	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	67.969	24.441	2.436	94.847
22	Sumatera Selatan	Kab. OKUS	UNIT XVI KPHL	SK.621/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	29.706	-	-	29.706
23	Kep. Riau	Kab. Lingga	UNIT III KPHP	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	31.937	17.047	49.768	98.752
24	Kep. Riau	Kab. Bintan, Kota Tanjung Pinang	UNIT IV KPHP	SK.634/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	20.338	18.688	7.730	46.756
25	Riau	Kab. Bengkalis	UNIT V KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	11.437	12.001	23.438
26	Riau	Kab. Siak	UNIT VII KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	100.504	2.454	102.958
27	Riau	Kab. Rokan Hulu	UNIT XIV KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	61	10.724	56.332	67.118
28	Riau	Kab. Pelalawan	UNIT XX KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	106.288	62.170	168.458
29	Riau	Kab. Pelalawan	UNIT XXI KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	4.451	119.628	30	124.109
30	Riau	Kab. Indragiri Hulu	UNIT XXX KPHP	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	21.682	61.988	67.048	150.718
31	Riau	Kab. Kuantan Singingi	UNIT XXXI KPHL	SK.615/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	45.615	38.579	4.677	88.870

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas Total (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	UNIT II KPHP	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	16.553	35.216	51.769	103.539
33	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	UNIT III KPHP	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	10.687	33.968	44.655	89.310
34	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	UNIT VIII KPHP	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	18.016	67.578	85.595	171.189
35	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	UNIT X KPHL	SK.626/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	26.772	21.983	48.754	97.508
36	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah	UNIT III KPHL	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	89.664	1.018	5.443	96.125
37	Bengkulu	Kab. Seluma	UNIT IV KPHL	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	66.534	-	15.707	82.242
38	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	UNIT V KPHL	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	32.742	1.704	14.241	48.686
39	Bengkulu	Kab. Kaur	UNIT VI KPHL	SK.628/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	44.592	2.069	31.571	78.232
40	Jambi	Kab. Tebo	UNIT IX KPHP	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	4.966	132.927	5.075	142.967
41	Jambi	Kab. Tebo	UNIT X KPHP	SK.632/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	90.640	13.010	103.650
42	Lampung	Kab. Lampung Barat	UNIT II KPHL	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	42.074	-	-	42.074
43	Lampung	Kab. Lampung Tengah	UNIT VII KPHL	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	24.337	-	-	24.337
44	Lampung	Kab. Lampung Utara	UNIT VIII KPHL	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	21.117	-	-	21.117
45	Lampung	Kab. Lampung Timur	UNIT XV KPHL	SK.617/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	24.285	-	-	24.285
46	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	UNIT XVI KPHL	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	12.937	2.865	9.620	25.422
47	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	UNIT XX KPHP	SK.631/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	17.689	13.259	14.715	45.663
48	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	UNIT II KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	17.736	-	-	17.736
49	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	UNIT III KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	34.719	16.233	-	50.952
50	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	UNIT IV KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	30.330	5.404	-	35.734
51	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	UNIT IX KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	48.577	605	-	49.182
52	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	UNIT V KPHP	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	11.091	10.891	10.809	32.791
53	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	UNIT VI KPHP	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	21.113	36.005	622	57.740
54	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	UNIT VII KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	35.259	1.018	722	36.999
55	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	UNIT XI KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	12.028	8.618	-	20.647
56	Nusa Tenggara Timur	Kab. TTS	UNIT XX KPHP	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	22.018	44.143	3.300	69.461
57	Nusa Tenggara Timur	Kab. TTU	UNIT XXI KPHP	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	36.605	13.779	55.249	105.632
58	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	UNIT XXXII KPHL	SK.633/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	39.305	3.524	3.708	46.537
59	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	UNIT XXIII KPHP	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	80.157	14.488	94.954	189.599
60	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	UNIT XXIV KPHP	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	70.683	42.806	65.972	179.461
61	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang, Kab. Kayong Utara	UNIT XXV KPHP	SK.620/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	75.107	243.610	-	318.717
62	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	UNIT VII KPHP	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	120.789	-	120.789
63	Kalimantan Timur	Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Barat	UNIT XXIX KPHP	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	109.314	-	109.314
64	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	UNIT XXVI KPHP	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	207.736	264.457	507.739	979.933
65	Kalimantan Timur	Kab. Kukar, Kab. Bontang	UNIT XXVII KPHP	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	20.609	242.858	-	263.467
66	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	UNIT XXX KPHL	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	14.873	257	-	15.130
67	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat	UNIT XXXII KPHP	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	31.960	165.973	135.232	333.166
68	Kalimantan Timur	Kab. Paser	UNIT XXXIX KPHP	SK.623/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	76.414	102.069	76.762	255.245
69	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	UNIT IX KPHL	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	32.488	15.841	13.858	62.186
70	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	UNIT VI KPHP	SK.624/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	83.325	154.074	25.520	262.919
71	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	UNIT III KPHP	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	59.185	-	59.185
72	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	UNIT V KPHP	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	14.279	125.265	194.525	334.069

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas Total (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	UNIT XIV KPHP	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	-	34.317	14.083	48.400
74	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	UNIT XXIX KPHP	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	1.589	198.929	-	200.518
75	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	UNIT XXXI KPHP	SK.629/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	153.084	215.424	10.311	378.819
76	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung	UNIT VI KPHL	SK.625/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	17.628	-	9.472	27.101
77	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	UNIT VII KPHP	SK.639/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	16.144	836	18.804	35.784
78	Sulawesi Tengah	Kab. Toli-Toli	UNIT II KPHP	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	45.364	34.602	82.818	162.785
79	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	UNIT VII KPHP	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	40.090	6.813	63.020	109.923
80	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	UNIT XIV KPHP	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	71.486	14.251	105.092	190.830
81	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Banggai Laut	UNIT XXI KPHP	SK.618/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	36.446	33.650	46.984	117.079
82	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	UNIT IV KPHP	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	15.111	-	47.999	63.110
83	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	UNIT VI KPHP	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	55.795	36.368	64.755	156.917
84	Sulawesi Tenggara	Kota Baubau	UNIT V KPHP	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	4.555	2.618	5.006	12.179
85	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	UNIT VI KPHP	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	30.779	42.947	0	73.726
86	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	UNIT XI KPHP	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	2.675	23.161	20.744	46.580
87	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka	UNIT XII KPHP	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	18.752	1.075	27.261	47.088
88	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	UNIT XIII KPHL	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	101.966	18.246	5.505	125.717
89	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	UNIT XIV KPHL	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	126.747	48	36.949	163.744
90	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara, Kab. Morowali	UNIT XIX KPHP	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	24.360	65.498	23.722	113.580
91	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	UNIT XXV KPHL	SK.635/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	10.022	-	-	10.022
92	Sulawesi Selatan	Kab. Selayar	UNIT X KPHP	SK.616/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	9.812	4.030	7.060	20.901
93	Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur	UNIT IV KPHP	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	36.863	51.918	110.546	199.327
94	Maluku Utara	Kab. Tidore Kepulauan	UNIT IX KPHP	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	540	-	17.458	17.998
95	Maluku Utara	Kab. Taliabu	UNIT XVI KPHP	SK.619/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	22.010	136.203	10.512	168.726
96	Maluku	Kab. Buru Selatan	UNIT I KPHP	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	50.196	45.759	48.583	144.539
97	Maluku	Kota Ambon	UNIT XIV KPHL	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	10.288	-	-	10.288
98	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	UNIT XVI KPHL	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	6.454	2.975	2.407	11.836
99	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	UNIT XVIII KPHP	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	11.040	68.955	52.343	132.339
100	Maluku	Kab. Kep. Aru	UNIT XXI KPHP	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	3.617	66.541	-	70.159
101	Maluku	Kab. Kep. Aru	UNIT XXII KPHP	SK.638/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15				-
102	Papua Barat	Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong	UNIT I KPHL	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	137.657	49.932	4.553	192.142
103	Papua Barat	Kab. Tambraw	UNIT IV KPHP	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	30.913		108.825	139.738
104	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	UNIT XV KPHP	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	10.186	543.458	86.863	640.508
105	Papua Barat	Kab. Fakfak	UNIT XVI KPHP	SK.630/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	31.419	9.792	168.344	209.554
106	Papua	Kab. Nabire, Kab. Dogiai	UNIT II KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	224.870	33.872	100.392	359.135
107	Papua	Kab. Boven Digoel	UNIT LI KPHP	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	12.690	312.097	341.310	666.097
108	Papua	Kab. Mimika, Kab. Dogiai	UNIT VI KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	139.368	37.671	96.185	273.223
109	Papua	Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Waropen	UNIT X KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	407.554	76.860	143.526	627.940
110	Papua	Kab. Lani Jaya, Kab. Jayawijaya, Kab. Yalimo, Kab. Memberamo Tengah, Kab. Tolikara	UNIT XLII KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	107.991	-	31.938	139.928
111	Papua	Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, Kab. Asmat	UNIT XLIII KPHP	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	556	171.515	85.460	257.531
112	Papua	Kab. Sarmi	UNIT XXII KPHP	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	39.435	49.747	96.078	185.260

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas Total (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	Papua	Kota Jayapura	UNIT XXVIII KPHP	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	6.655	24.683	16.388	47.726
114	Papua	Kab. Pegunungan Bintang	UNIT XXXV KPHL	SK.622/Menlhk-Setjen/2015	14-Des-15	270.939	13.045	15.145	299.129
115	SUMATERA BARAT		UNIT I	SK.832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				323.501
116	SUMATERA BARAT		UNIT III	SK.832/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				62.368
117	SUMATERA UTARA	Langkat	UNIT I	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				69.878
118	SUMATERA UTARA		UNIT II	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				80.002
119	SUMATERA UTARA	Simalungun	UNIT XII	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				56.223
120	SUMATERA UTARA	Pak-Pak Bharat, Humbang Hasundutan	UNIT XV	SK.831/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				89.851
121	SUMATERA SELATAN		UNIT XIX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				32.419
122	SUMATERA SELATAN		UNIT XX	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				27.076
123	SUMATERA SELATAN		UNIT XXI	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				44.592
124	SUMATERA SELATAN		UNIT XXII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				91.392
125	SUMATERA SELATAN	Ogan Komering Ilir	UNIT XXIII	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				206.254
126	SUMATERA SELATAN	Ogan Komering Ilir	UNIT XXIV	SK.833/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				407.604
127	KALIMANTAN BARAT	Sambas	UNIT I	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				127.794
128	KALIMANTAN BARAT	Kapuas Hulu	UNIT VIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				94.544
129	KALIMANTAN BARAT		UNIT XIII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				56.013
130	KALIMANTAN BARAT		UNIT XV	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				207.079
131	KALIMANTAN BARAT		UNIT XVI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				324.662
132	KALIMANTAN BARAT		UNIT XXX	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				70.458
133	KALIMANTAN BARAT		UNIT XXXI	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				261.701
134	KALIMANTAN BARAT		UNIT XXXII	SK.834/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				318.804
135	KALIMANTAN TIMUR		UNIT XXII	SK.835/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				658.129
136	KALIMANTAN SELATAN	Balangan	UNIT VIII	SK.836/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				141.349
137	MALUKU UTARA	Halmahera Selatan	UNIT XII	SK.838/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				170.442
138	SULAWESI UTARA		UNIT V	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				13.356
139	SULAWESI UTARA		UNIT VIII	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				27.101
140	SULAWESI UTARA		UNIT IX	SK.837/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				13.272
141	SULAWESI BARAT		UNIT IX	SK.840/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				51.086
142	SULAWESI SELATAN		UNIT V	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				143.751
143	SULAWESI SELATAN	Sidrap, Enrekang, Soppeng	UNIT VI	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				59.954
144	SULAWESI SELATAN		UNIT VII	SK.839/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				130.508
145	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa Barat	UNIT VI	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				32.340
146	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa Barat	UNIT VII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				40.645
147	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	UNIT VIII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				44.461
148	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	UNIT X	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				55.226
149	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	UNIT XI	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				64.134
150	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	UNIT XII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				74.733
151	NUSA TENGGARA BARAT	Sumbawa	UNIT XIII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				33.610
152	NUSA TENGGARA BARAT	Dompu	UNIT XV	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				42.630
153	NUSA TENGGARA BARAT		UNIT XIX	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				44.082

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas Total (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	NUSA TENGGARA BARAT	Bima	UNIT XXII	SK.841/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				43.399
155	MALUKU		UNIT V	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				92.002
156	MALUKU	Seram Bagian Timur	UNIT XII	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				193.041
157	MALUKU	Kota Tual	UNIT XV	SK.842/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				10.067
158	PAPUA		UNIT III	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				194.846
159	PAPUA		UNIT XXIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				122.820
160	PAPUA		UNIT XXV	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				354.901
161	PAPUA		UNIT XLVII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				461.382
162	PAPUA		UNIT XLVIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				573.543
163	PAPUA		UNIT XLIX	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				539.996
164	PAPUA		UNIT LIII	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				649.375
165	PAPUA	Merauke	UNIT LVI	SK.843/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				363.877
166	KEPULAUAN RIAU		UNIT II	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				32.472
167	KEPULAUAN RIAU	Kab. Natuna	UNIT V	SK.844/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				61.403
168	JAMBI	Sarolangun	UNIT VIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				110.327
169	JAMBI		UNIT XII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				79.305
170	JAMBI		UNIT XIII	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				103.528
171	JAMBI		UNIT XIV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				80.852
172	JAMBI		UNIT XV	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				91.626
173	JAMBI		UNIT XVI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				122.504
174	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Bangka Tengah	UNIT VI	SK.845/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				27.199
175	NUSA TENGGARA TIMUR	Sumba Timur	UNIT XIV	SK.847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				116.160
176	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Kupang	UNIT XVII	SK.847/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				113.398
177	GORONTALO		UNIT II	SK.848/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				90.644
178	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong	UNIT III	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				134.726
179	SULAWESI TENGAH	Donggala, Parigi Moutong	UNIT V	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				111.273
180	SULAWESI TENGAH		UNIT VIII	SK.849/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				220.766
181	PAPUA BARAT	Sorong Selatan	UNIT VI	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				225.183
182	PAPUA BARAT	Pegunungan Arfak, Tambräu, Manokwari	UNIT XII	SK.850/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				256.207
183	RIAU	Rokan Hilir	UNIT I	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				110.513
184	RIAU	Rokan Hilir	UNIT II	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				141.080
185	RIAU	Dumai	UNIT III	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				1.313.825
186	RIAU	Bengkalis	UNIT IV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				80.347
187	RIAU	Bengkalis	UNIT VI	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				224.663
188	RIAU	Rokan Hilir	UNIT XII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				149.905
189	RIAU	Kampar	UNIT XV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				87.370
190	RIAU	Kampar	UNIT XIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				35.000
191	RIAU	Kepulauan Meranti	UNIT XXIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				69.397
192	RIAU	Kepulauan Meranti	UNIT XXV	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				67.827
193	RIAU	Indragiri Hilir	UNIT XXVII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				42.898
194	RIAU	Indragiri Hulu	UNIT XXVIII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				231.490

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	UNIT KPH	SURAT KEPUTUSAN		PENETAPAN			
				NO SK	TANGGAL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Luas Total (ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	RIAU	Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir	UNIT XXIX	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				61.182
196	RIAU	Kuantan Singgingi	UNIT XXXII	SK.851/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				96.697
197	LAMPUNG	Tanggamus	UNIT XI	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				47.746
198	LAMPUNG		UNIT XIII	SK.852/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				8.025
199	KALIMANTAN TENGAH		UNIT IV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				7.804
200	KALIMANTAN TENGAH		UNIT VII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				158.785
201	KALIMANTAN TENGAH		UNIT X	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				244.231
202	KALIMANTAN TENGAH		UNIT XI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				274.875
203	KALIMANTAN TENGAH	Katingan, Seruyan	UNIT XVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				681.864
204	KALIMANTAN TENGAH		UNIT XVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				140.418
205	KALIMANTAN TENGAH		UNIT XIX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				366.726
206	KALIMANTAN TENGAH	Kotawaringin Barat	UNIT XXIV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				92.242
207	KALIMANTAN TENGAH		UNIT XXV	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				157.199
208	KALIMANTAN TENGAH		UNIT XXVII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				302.601
209	KALIMANTAN TENGAH		UNIT XXVIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				144.535
210	KALIMANTAN TENGAH		UNIT XXX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				217.832
211	SULAWESI TENGGARA	Muna, Buton	UNIT VIII	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				18.588
212	SULAWESI TENGGARA		UNIT XVI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				126.917
213	SULAWESI TENGGARA		UNIT XX	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				230.547
214	SULAWESI TENGGARA		UNIT XXI	SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2016	09-Nop-16				65.901

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2016

TABEL V.6 PENGESAHAN RPHJP KPH SAMPAI DENGAN TAHUN 2016

No.	Penetapan	Nama KPH	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6
1	MODEL	TABALONG	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 10/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
2	MODEL	BOALEMO	KPHP	Gorontalo	SK. 108/Menhet-II/Reg.4-2/2014
3	MODEL	BANJAR	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 15/Menhet-II/REG.III/2014
4	MODEL	KAPUAS HULU	KPHP	Kalimantan Barat	SK. 16/Menhet-II/REG.III/2014
5	MODEL	KAPUAS	KPHL	Kalimantan Tengah	SK. 17/Menhet-II/REG.III/2014
6	MODEL	TARAKAN	KPHL	Kalimantan Utara	SK. 18/Menhet-II/REG.III/2014
7	MODEL	BERAU BARAT	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 19/Menhet-II/REG.III/2014
8	MODEL	MUTIS TIMAU	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK. 1931/Menhet-II/Reg.2-1/2015
9	MODEL	SUNGAI SEMBULAN	KPHP	Kepulauan Bangka Belitung	SK. 194/Menhet-II/REG.I/2014
10	MODEL	LIMA PULUH KOTA	KPHL	Sumatera Barat	SK. 195/Menhet-II/REG.I/2014
11	MODEL	SIJUNJUNG	KPHL	Sumatera Barat	SK. 196/Menhet-II/REG.I/2014
12	MODEL	SOLOK	KPHL	Sumatera Barat	SK. 197/Menhet-II/REG.I/2014
13	MODEL	LIMAU	KPHP	Jambi	SK. 198/Menhet-II/REG.I/2014
14	MODEL	MANDAILING NATAL	KPHP	Sumatera Utara	SK. 199/Menhet-II/REG.I/2014
15	MODEL	MERATUS	KPHP	Kalimantan Timur	SK. 20/Menhet-II/REG.III/2014
16	MODEL	TANAH LAUT	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 21/Menhet-II/REG.III/2014
17	MODEL	PULAU LAUT DAN SEBUKU	KPHP	Kalimantan Selatan	SK. 22/Menhet-II/Reg.III/2014
18	MODEL	LAKITAN	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 255/Menhet-II/REG.I/2014
19	MODEL	POIGAR	KPHP	Sulawesi Utara	SK. 265/Menhet-II/Reg.4-2/2014
20	MODEL	JENEBERANG	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 266/Menhet-II/Reg.4-2/2014
21	MODEL	RAJABASA	KPHL	Lampung	SK. 268/Menhet-II/REG.I/2014
22	MODEL	BOMBANA	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 2684/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2016
23	MODEL	GEDONG WANI	KPHP	Lampung	SK. 293/Menhet-II/REG.I/2014
24	MODEL	MUARA DUA	KPHP	Lampung	SK. 294/Menhet-II/REG.I/2014
25	FASILITASI 2015	KARAMA	KPHP	Sulawesi Barat	SK. 3/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
26	MODEL	MUKO-MUKO	KPHP	Bengkulu	SK. 3038/Menhet-II/REG.I-1/2014
27	MODEL	REGISTER 47 WAY TERUSAN	KPHP	Lampung	SK. 3039/MENHUT-II/REG.I-1/2014
28	MODEL	BATU TEGI	KPHL	Lampung	SK. 342/Menhet-II/REG.I-1/2014
29	MODEL	KOTAAGUNG UTARA	KPHL	Lampung	SK. 343/Menhet-II/REG.I-1/2014
30	MODEL	LALAN MANGSANG MENDIS	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 3646/Menhet-II/REG.I-1/2014
31	MODEL	GULARAYA	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 3694/Menhet-II/Reg.4-1/2014
32	MODEL	RANO PATANU	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 3934/Menhet-II/Reg.4-1/2014
33	MODEL	DOLAGO TANGGUNUNG	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 3935/Menhet-II/Reg.4-1/2014
34	FASILITASI 2015	KEPULAUAN SELAYAR	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 4/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016

No.	Penetapan	Nama KPH	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6
35	MODEL	YOGYAKARTA	KPHP	Yogyakarta	SK. 4051/Menhet-II/Reg.2-1/2014
36	MODEL	BATULANTEH	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK. 4052/Menhet-II/Reg.2-1/2014
37	MODEL	MANGGARAI BARAT	KPHP	Nusa Tenggara Timur	SK. 426/Menhet-II/Reg.2-1/2015
38	MODEL	REMU	KPHL	Papua Barat	SK. 470/Menhet-II/Reg.4-1/2015
39	MODEL	KOTAWARINGIN BARAT	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 5/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
40	MODEL	RINJANI BARAT	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK. 5044/Menhet-II/Reg.2-1/2014
41	MODEL	BALI BARAT	KPHL	Bali	SK. 5045/Menhet-II/Reg.2-1/2014
42	MODEL	BALI TENGAH	KPHL	Bali	SK. 5046/Menhet-II/Reg.2-1/2014
43	MODEL	BALI TIMUR	KPHL	Bali	SK. 5273/Menhet-II/Reg.2-1/2014
44	MODEL	RINJANI TIMUR	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK. 5299/Menhet-II/Reg.2-1/2014
45	MODEL	BALANTAK	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 5579/Menhet-II/Reg.4-1/2014
46	MODEL	POGOGUL	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 5580/Menhet-II/Reg.4-1/2014
47	MODEL	MAMASA BARAT	KPHP	Sulawesi Barat	SK. 5581/Menhet-II/Reg.4-1/2014
48	MODEL	MEMBERAMO	KPHP	Papua	SK. 5880/Menhet-II/Reg.4-1/2014
49	MODEL	WAROPEN	KPHP	Papua	SK. 5881/Menhet-II/Reg.4-1/2014
50	MODEL	SERUYAN	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 6/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
51	MODEL	UNIT III ACEH	KPHL	Aceh	SK. 6062/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/10/2016
52	MODEL	SEJORONG	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK. 6102/Menhet-II/Reg.2-1/2014
53	FASILITASI 2015	BONE BOLANGO	KPHP	Gorontalo	SK. 6102/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2016
54	MODEL	AMPANG	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK. 630/Menhet-II/Reg.2-1/2015
55	MODEL	MARIA	KPHP	Nusa Tenggara Barat	SK. 634/Menhet-II/Reg.2-1/2015
56	FASILITASI 2015	KUANTAN SINGINGI	KPHL	Riau	SK. 6403/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
57	MODEL	MAPILI	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 6404/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
58	FASILITASI 2016	UNIT VII NTB	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK. 6479/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
59	FASILITASI 2015	SELUMA	KPHL	Bengkulu	SK. 6480/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
60	MODEL	BUKIT BALAI REJANG	KPHL	Bengkulu	SK. 6481/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
61	MODEL	KEEROM	KPHP	Papua	SK. 6520/Menhet-II/Reg.4-1/2014
62	MODEL	GORONTALO UTARA	KPHP	Gorontalo	SK. 6521/Menhet-II/Reg.4-1/2014
63	MODEL	TOILI BATURUBE	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 6522/Menhet-II/Reg.4-1/2014
64	MODEL	POHUWATO	KPHL	Gorontalo	SK. 6523/Menhet-II/Reg.4-1/2014
65	MODEL	BIAK NUMFOR	KPHL	Papua	SK. 6544/Menhet-II/Reg.4-1/2014
66	MODEL	DAMPELAS TINOMBLO	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 6942/Menhet-II/Reg.4/2/2013
67	MODEL	GUNUNG MAS	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 7/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
68	MODEL	ROTE NDAO	KPHP	Nusa Tenggara Timur	SK. 700/Menhet-II/Reg.2-1/2015
69	MODEL	KAMPAR KIRI	KPHP	Riau	SK. 7204/Menhet-II/REG.1/1/2014
70	MODEL	MERANTI	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 7216/Menhet-II/REG.1/1/2014

No.	Penetapan	Nama KPH	Jenis KPH	Provinsi	SK RPHJP
1	2	3	4	5	6
71	MODEL	GORONTALO	KPHP	Gorontalo	SK. 7315/Menhet-II/Reg.4-1/2014
72	MODEL	TOJO UNA-UNA	KPHP	Sulawesi Tengah	SK. 7316/Menhet-II/Reg.4-1/2014
73	MODEL	LARIANG	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 7317/Menhet-II/Reg.4-1/2014
74	MODEL	SORONG SELATAN	KPHP	Papua Barat	SK. 7318/Menhet-II/Reg.4-1/2014
75	MODEL	BENAKAT	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 7369/Menhet-II/REG.1-1/2014
76	MODEL	PESAWARAN	KPHL	Lampung	SK. 7370/Menhet-II/REG.1-1/2014
77	MODEL	TASIK BESAR SERKAP	KPHP	Riau	SK. 7565/Menhet-II/REG.1-1/2014
78	MODEL	GUNUNG SINOPA	KPHP	Maluku Utara	SK. 7578/Menhet-II/Reg.4-1/2014
79	MODEL	GANDA DEWATA	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 7579/Menhet-II/Reg.4-1/2014
80	MODEL	BACAN	KPHP	Maluku Utara	SK. 7580/Menhet-II/Reg.4-1/2014
81	MODEL	PEROPA EA GANTARA	KPHL	Sulawesi Tenggara	SK. 7581/Menhet-II/Reg.4-1/2014
82	MODEL	SORONG	KPHP	Papua Barat	SK. 7582/Menhet-II/Reg.4-1/2014
83	MODEL	LARONA MALILI	KPHL	Sulawesi Selatan	SK. 7583/Menhet-II/Reg.4-1/2014
84	MODEL	MAMASA TENGAH	KPHL	Sulawesi Barat	SK. 7584/Menhet-II/Reg.4-1/2014
85	MODEL	LAKOMPA	KPHP	Sulawesi Tenggara	SK. 764/Menhet-II/Reg.4-1/2015
86	MODEL	BUKIT BARISAN	KPHL	Sumatera Barat	SK. 7701/Menhet-II/REG.1-1/2014
87	MODEL	ALOR PANTAR	KPHL	Nusa Tenggara Timur	SK. 7734/Menhet-II/Reg.2-1/2014
88	MODEL	BUKIT PUNGGUR	KPHP	Lampung	SK. 7755/Menhet-II/REG.1-1/2014
89	MODEL	LAMANDAU	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 8/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
90	MODEL	AWOTA	KPHP	Sulawesi Selatan	SK. 806/Menhet-II/Reg.4-1/2015
91	MODEL	BUDONG-BUDONG	KPHP	Sulawesi Barat	SK. 817/Menhet-II/Reg.4-1/2015
92	MODEL	MURUNG RAYA	KPHP	Kalimantan Tengah	SK. 9/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016
93	MODEL	RAWAS	KPHP	Sumatera Selatan	SK. 940/Menhet-II/Reg.I-1/2015
94	MODEL	BANYUASIN	KPHL	Sumatera Selatan	SK.4411/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/9/2016
95	FASILITASI 2015	DEMPO	KPHL	Sumatera Selatan	SK.6482/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/11/2016
96	FASILITASI 2015	LINTAS SULUT	KPHL	Sulawesi Utara	SK.6676/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2016
97	FASILITASI 2015	TOFFO PAJO	KPHL	Nusa Tenggara Barat	SK.6677/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/12/2016

Sumber : Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Desember 2016

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN



**DIREKTORAT RENCANA,
 PENGGUNAAN DAN PEMBENTUKAN
 WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

TABEL VI.1. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2016

NO	PROVINSI	S/D 2011		2012		2013		2014		2015		2016		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	8	59.845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10,72	9	59.855,72
2	SUMATERA UTARA	5	35.717,17	2	2.031,71	2	18.191,00	1	22.988,27	6	45.599,78	2	26.592,11	18	151.120,04
3	SUMATERA BARAT	2	349,89	1	4.370,64	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.720,53
4	RIAU	2	166,42	1	365.021,00	5	48.779,95	-	-	-	-	-	-	8	413.967,37
5	JAMBI	23	78.358,76	6	11.808,59	10	95.615,70	3	1.565,02	7	43.394,02	2	4.826,26	51	235.568,35
6	SUMATERA SELATAN	20	55.340,28	5	18.112,00	8	57.882,95	4	5.666,73	3	9.799,45	3	61.671,26	43	208.472,66
7	BENGKULU	1	1.652,00	1	2.279,00	-	-	1	156,04	1	1.265,00	1	164,00	5	5.516,04
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.624,19	2	8.624,19
9	BANGKA BELITUNG	5	18.524,72	2	1.576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20.100,72
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	13	9.932,44	1	7,32	2	69,69	1	2,75	1	4,98	1	16,00	19	10.033,19
13	JAWA TENGAH	11	12.864,62	2	243,57	3	773,50	-	-	3	6.927,82	2	4.501,88	21	25.311,39
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	12	56.745,30	2	1.989,93	2	3.980,30	2	115,78	3	2.717,24	3	1.474,99	24	67.023,53
16	BANTEN	2	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.790,00	3	1.790,65
17	BALI	1	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,28
18	NUSA TENGGARA BARAT	7	81.594,77	3	24.357,00	2	13.364,22	1	4.320,00	3	15.914,00	-	-	16	139.549,99
19	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT	1	3.239,00	5	15.617,00	-	-	1	9.433,00	-	-	1	11.254,26	8	39.543,26
21	KALIMANTAN TENGAH	39	253.852,18	18	107.280,38	9	54.813,90	13	88.195,10	3	17.588,70	7	1.102.906,30	89	1.624.636,56
22	KALIMANTAN SELATAN	8	16.832,14	6	3.075,40	1	861,12	2	44.790,01	-	-	-	-	17	65.558,67
23	KALIMANTAN TIMUR	46	188.596,74	29	76.626,22	16	53.701,54	8	57.742,88	2	2.036,38	2	527,14	103	379.230,90
24	KALIMANTAN UTARA	11	69.867,14	5	7.759,14	4	10.681,15	1	9.767,87	3	18.303,93	-	-	24	116.379,23
25	SULAWESI UTARA	2	7.857,10	1	26.017,00	1	821,28	1	3.041,13	2	7.922,49	-	-	7	45.659,00
26	SULAWESI TENGAH	6	27.459,00	5	40.121,98	1	9.127,00	1	8.228,00	-	-	2	15.286,75	15	100.222,73
27	SULAWESI SELATAN	4	4.232,40	1	21.181,55	-	-	-	-	-	-	1	28.389,50	6	53.803,45
28	SULAWESI TENGGARA	18	58.615,93	-	-	-	-	2	13.442,53	1	19.686,00	-	-	21	91.744,46
29	GORONTALO	-	-	1	472,00	2	19.767,00	2	5.557,00	2	4.561,24	-	-	7	30.357,24
30	SULAWESI BARAT	1	33,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33,55
31	MALUKU	7	111,33	3	7.017,50	1	11,05	6	6.285,55	1	10,02	-	-	18	13.435,45
32	MALUKU UTARA	16	52.364,18	25	99.784,91	8	34.013,57	31	76.398,79	5	56.024,57	1	5.464,42	86	324.050,44
33	PAPUA BARAT	10	20.177,75	6	6.371,26	4	8.683,49	2	8.843,36	1	39,50	3	48.247,81	26	92.363,17
34	PAPUA	3	58.439,78	1	18,80	1	9.834,00	1	9.941,00	1	258,36	-	-	7	78.491,94
TOTAL		284	1.172.795,51	132	843.139,90	82	440.972,41	84	376.480,80	48	252.053,48	35	1.321.747,59	665	4.407.189,69

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

TABEL VI.2. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (NON TAMBANG) S/D DESEMBER 2016

NO	PROVINSI	S/D 2011		2012		2013		2014		2015		2016		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BANGKA BELITUNG	-	-	1	1.081,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.081,00
2	JAWA TIMUR	1	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,24
3	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.870,28	-	-	1	23.870,28
TOTAL		1	1,24	1	1.081,00	-	-	-	-	1	23.870,28	-	-	3	24.952,52

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

TABEL VI.3. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK OPERASI PRODUKSI (TAMBANG) S/D DESEMBER 2016

NO	PROVINSI	S/D 2011		2012		2013		2014		2015		2016		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	-	-	-	-	1	344,00	1	100,42	-	-	-	-	2	444,42
2	SUMATERA UTARA	1	2,32	2	66,69	-	-	-	-	-	-	1	485,00	4	554,01
3	SUMATERA BARAT	2	229,25	-	-	3	620,26	1	153,89	1	102,22	2	516,27	9	1.621,89
4	RIAU	6	3.249,26	1	999,84	1	538,04	2	1.125,59	1	108,22	5	1.726,06	16	7.747,01
5	JAMBI	30	1.681,97	5	1.244,85	1	2,29	8	2.124,05	2	597,89	2	603,40	48	6.254,46
6	SUMATERA SELATAN	7	2.353,74	3	792,49	8	2.958,50	8	2.604,74	2	43,88	10	5.274,39	38	14.027,75
7	BENGKULU	1	128,58	-	-	2	1.094,07	-	-	-	-	3	1.071,07	6	2.293,72
8	LAMPUNG	1	40,05	-	-	1	17,20	3	72,16	-	-	3	79,66	8	209,07
9	BANGKA BELITUNG	7	3.175,71	1	15,31	5	754,84	3	1.086,41	2	429,59	-	-	18	5.461,85
10	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	1	1.834,47	-	-	-	-	1	56,66	2	1.891,13
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	9	1.547,56	5	107,48	6	153,78	5	419,74	2	10,10	5	93,90	32	2.332,55
13	JAWA TENGAH	7	390,81	-	-	1	16,85	-	-	1	38,23	6	212,61	15	658,49
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	5	546,56	1	3,40	4	115,93	5	255,23	1	6,63	4	945,20	20	1.872,95
16	BANTEN	1	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16,00
17	BALI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	6.417,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	999,78	2	7.417,08
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3	117,42	-	-	-	-	1	688,19	-	-	-	-	4	805,61
20	KALIMANTAN BARAT	2	1.913,13	4	1.735,57	2	1.895,70	1	316,20	-	-	1	695,72	10	6.556,32
21	KALIMANTAN TENGAH	20	43.984,35	12	9.895,58	14	15.522,78	11	11.398,96	6	4.902,53	9	5.560,48	72	91.264,67
22	KALIMANTAN SELATAN	41	38.418,72	11	2.723,10	15	5.438,05	11	6.958,26	7	1.358,48	9	4.959,46	94	59.856,07
23	KALIMANTAN TIMUR	50	130.351,71	14	18.207,07	13	24.384,03	10	10.077,43	1	519,87	8	7.803,66	96	191.343,77
24	KALIMANTAN UTARA	3	1.612,75	-	-	2	4.063,27	2	1.404,95	-	-	2	3.171,17	9	10.252,14
25	SULAWESI UTARA	1	443,40	1	561,96	1	99,99	-	-	-	-	3	1.258,04	6	2.363,39
26	SULAWESI TENGAH	-	-	1	130,83	4	3.167,53	-	-	1	1.206,57	2	1.201,56	8	5.706,49
27	SULAWESI SELATAN	4	106,98	4	1.072,94	1	80,35	3	121,39	1	48,35	2	52,92	15	1.482,93
28	SULAWESI TENGGARA	7	8.457,07	5	3.383,32	11	6.547,77	5	2.470,84	1	965,31	5	2.706,04	34	24.530,35
29	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SULAWESI BARAT	-	-	1	603,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	603,50
31	MALUKU	1	562,42	-	-	1	134,63	1	4,94	-	-	1	6,42	4	708,41
32	MALUKU UTARA	9	5.719,87	7	4.580,21	7	2.678,68	8	4.809,48	-	-	3	2.491,58	34	20.279,82
33	PAPUA BARAT	4	95,49	-	-	-	-	-	-	1	603,25	1	116,86	6	815,60
34	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		224	251.562,39	78	46.124,14	105	72.463,01	89	46.192,86	30	10.941,13	89	42.087,91	615	469.371,44

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

TABEL VI.4. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK NON TAMBANG S/D DESEMBER 2016

NO	PROVINSI	S/D 2011		2012		2013		2014		2015		2016		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ACEH	3	18,06	-	-	-	-	-	-	-	-	4	962,00	7	980,06
2	SUMATERA UTARA	30	4.472,36	3	79,60	7	506,70	3	38,07	6	905,66	12	771,58	61	6.773,97
3	SUMATERA BARAT	9	361,82	2	139,06	1	8,37	-	-	1	14,48	8	112,44	21	636,17
4	RIAU	2	12.068,75	2	297,32	-	-	-	-	-	-	1	561,72	5	12.927,79
5	JAMBI	-	-	-	-	1	136,18	-	-	1	21,28	1	90,33	3	247,79
6	SUMATERA SELATAN	2	103,51	4	741,98	1	46,80	4	25,40	1	0,04	3	34,72	15	952,44
7	BENGKULU	4	144,50	1	11,76	-	-	1	38,83	2	31,65	-	-	8	226,74
8	LAMPUNG	1	49,35	-	-	-	-	2	97,38	-	-	3	218,15	6	364,88
9	BANGKA BELITUNG	3	67,01	-	-	1	14,90	1	4,47	1	1,49	-	-	6	87,87
10	KEPULAUAN RIAU	1	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	398,72	6	425,72
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	2	1,97	-	-	1	14,25	3	16,22
12	JAWA BARAT	8	299,50	1	3,85	2	29,72	2	51,35	1	4,56	5	585,91	19	974,88
13	JAWA TENGAH	27	347,17	-	-	1	1,57	1	0,52	-	-	3	81,26	32	430,52
14	DI YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	JAWA TIMUR	3	18,64	-	-	-	-	3	49,75	1	11,68	5	759,82	12	839,89
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	223,74	3	223,74
17	BALI	17	60,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	60,24
18	NUSA TENGGARA BARAT	4	487,20	3	3,54	1	0,08	2	10,30	1	149,42	3	281,11	14	931,65
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2	2,46	-	-	1	1,82	2	71,26	-	-	3	91,35	8	166,90
20	KALIMANTAN BARAT	3	3,30	-	-	1	11.881,50	-	-	-	-	-	-	4	11.884,80
21	KALIMANTAN TENGAH	1	710,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.211,62	2	1.922,22
22	KALIMANTAN SELATAN	2	27,32	-	-	-	-	-	-	1	228,13	-	-	3	255,45
23	KALIMANTAN TIMUR	5	58,94	1	754,50	1	57,40	2	61,71	1	77,81	1	146,33	11	1.156,69
24	KALIMANTAN UTARA	1	36,80	1	457,33	-	-	-	-	1	225,71	2	2.541,48	5	3.261,32
25	SULAWESI UTARA	2	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,89	3	13,41
26	SULAWESI TENGAH	5	488,88	5	153,26	1	340,13	1	88,41	1	19,86	2	91,25	15	1.181,79
27	SULAWESI SELATAN	2	24,46	-	-	1	194,36	4	49,09	-	-	2	121,73	9	389,64
28	SULAWESI TENGGARA	5	138,97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,29	6	139,25
29	GORONTALO	1	41,00	-	-	1	109,20	1	124,20	-	-	1	38,13	4	312,53
30	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	MALUKU	1	53,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	53,97
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PAPUA BARAT	-	-	-	-	1	5.702,99	-	-	-	-	1	669,64	2	6.372,63
34	PAPUA	4	1.464,21	-	-	1	45,67	1	716,77	1	348,03	1	3,80	8	2.578,48
TOTAL		148	21.576,53	23	2.642,19	23	19.077,39	32	1.429,47	20	2.039,80	73	10.024,25	319	56.789,63

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

TABEL VI.5. PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)

NO	PROVINSI	S/D 2011		2012		2013		2014		2015		2016		TOTAL	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	BALI	-	-	1	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,50
2	BANTEN	1	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,01
3	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	2	4,18	-	-	-	-	2	4,18
4	JAWA BARAT	51	4.498,35	2	95,18	2	64,04	6	789,12	3	184,91	2	38,43	66	5.670,02
5	JAWA TENGAH	26	939,39	-	-	-	-	3	281,99	-	-	2	26,50	31	1.247,88
6	JAWA TIMUR	27	704,79	1	58,88	2	855,58	3	480,86	2	259,81	3	258,37	38	2.618,28
7	LAMPUNG	5	234,73	1	7,50	1	33,27	1	182,70	-	-	2	80,46	10	538,66
8	SUMATERA UTARA	1	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104,00
Grand Total		111	6.493,27	5	169,06	5	952,88	15	1.738,84	5	444,71	9	403,76	150	10.202,53

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

TABEL VI.6. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH)

NO	PROVINSI	SD Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		TAMBANG	NON TAMBANG	TAMBANG	NON TAMBANG	TAMBANG	NON TAMBANG						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nangro Aceh D	0	0	0	0	18.765.768	107.647.318	0	254.584.811	0	271.317.900	83.837.666	
2	Sumatera Utara	0	411979437	126.657.500	229.080.139	134.121.120	395.824.316	126.382.500	1.052.418.018	0	1.120.194.829	0	1.773.347.470
3	Sumatera Barat	685248500	146598997	2.188.121.554	52.889.632	310.190.043	100.057.135	497.367.823	49.038.000	128.000.000	102.384.000	1.175.266.023	104.556.035
4	Riau	1805871988	0	3.042.769.963	0	2.863.196.894	648.048.000	3.945.943.975	648.048.000	2.091.077.847	150.000.000	5.057.055.602	350.000.000
5	Kepulauan Riau	0	0	0	0	458.910.361	0	537.804.254	0	1.000.000.000	0	0	0
6	Jambi	1.101.490.921	2.517.916.218	1.349.213.948	989.791.038	2.769.049.994	1.145.275.114	4.440.913.081	1.244.431.601	8.172.466.000	1.402.237.191	5.616.129.961	1.713.123.999
7	BENGKULU	1.024.489.063	52.529.514	282.696.256	53.959.371	923.448.207	23.638.500	1.098.523.433	309.171.600	2.860.541.810	196.170.214	1.500.030.000	253.203.492
8	Bangka Belitung	11.498.389.703	28.196.757	5.024.365.769	52.387.200	931.335.940	0	2.162.037.377	6.975.882	5.364.589.921	8.940.000	7.483.643.931	0
9	Sumatera Selatan	29.884.781.653	667.398.582	34.031.653.450	1.885.586.273	16.328.754.667	4.149.660.380	52.201.237.739	1.927.216.366	37.671.943.125	2.929.876.708	38.327.265.080	4.135.903.065
10	Nusa Tenggara Barat	38.941.043.864	53.809.142	11.359.677.360	9.804.400	12.206.962.551	6.804.000	30.753.222.219	20.120.497	29.510.104.000	14.641.642	29.841.429.874	7.049.835
11	Nusa Tenggara Timur	25.490.640	0	11.892.000	0	50.623.693	0	72.057.844	102.755.621	11.154.500	133.970.820	151.780.938	121.743.200
12	Kalimantan Barat	7.780.449.130	0	7.304.087.075	3.058.676	14.234.873.725	11.413.617	16.864.212.764	5.720.700	12.331.381.616	7.680.000	18.950.902.048	1.920.000
13	Kalimantan Tengah	38.719.002.034	0	38.397.491.481	51.160.000	54.317.563.694	49.160.000	92.010.733.381	120.848.000	152.098.031.956	120.848.000	144.091.887.796	120.848.000
14	Kalimantan Selatan	282.042.537.946	92.229.250	128.255.565.280	0	114.132.165.105	0	190.454.411.246	1.594.321	305.661.591.975	1.532.400	342.570.422.310	33.224.400
15	Kalimantan Timur	342.867.120.036	71.778.000	221.175.300.327	71.778.000	325.049.203.830	159.810.075	418.700.375.335	71.778.000	420.228.261.706	316.892.910	467.381.391.362	315.343.027
16	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	3.168.686.552	0	1.650.299.875	0	16.176.129.419	911.868.400
17	Sulawesi Utara	0	2.997.303	0	0	1.409.053.440	0	2.442.048.759	0	2.665.550.797	50.745	4.940.581.919	101.510
18	Gorontalo	0	25.410.000	0	12.705.000	0	338.193.557	0	395.464.800	0	373.264.000	0	373.264.000
19	Sulawesi Tengah	1.142.834.525	485.135.700	1.640.376.000	117.479.400	3.014.833.007	545.514.423	9.322.148.134	180.844.171	11.730.494.259	338.299.846	17.706.708.015	403.553.725
20	Sulawesi Barat	0	0	258.216.000	0	457.944.442	0	0	0	818.594.276	0	0	0
21	Sulawesi Selatan	14.834.880	1.089.208.662	361.387.050	282.542.850	450.426.302	294.782.983	967.433.382	306.056.400	196.215.460	503.814.606	2.379.201.584	475.844.382
22	Sulawesi Tenggara	2.998.796.661	189.564.509	4.602.984.910	18.191.700	9.280.257.783	44.021.034	16.430.949.784	28.882.383	13.484.336.996	188.261	19.444.762.309	489.750.913
23	Maluku	0	0	0	0	517.728.000	0	528.082.560	8.063.661	583.365.858	7.904.000	570.762.500	18.176.000
24	Maluku Utara	11.229.110.355	0	9.285.149.353	0	19.898.040.669	0	27.558.871.094	0	52.133.890.458	0	44.167.023.051	0
25	Papua Barat	0	163.641.000	0	114.585.000	0	114.585.000	0	121.289.000	0	152.780.000	1.665.853.139	339.760.000
26	Papua	0	447.321.000	0	314.372.891	0	176.473.009	0	1.606.577.575	0	1.559.022.411	0	1.588.506.000
TOTAL		771.761.491.899	6.445.714.071	468.697.605.276	4.259.371.570	579.738.683.467	8.222.026.911	874.391.090.554	8.207.294.596	1.060.646.477.246	9.440.692.583	1.169.469.544.761	13.614.925.119

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s/d 31 Desember 2016

AMDAL, UKL-UPL



**DIREKTORAT PENCEGAHAN
DAMPAK LINGKUNGAN USAHA
DAN KEGIATAN**

TABEL VII.1 DAFTAR KEGIATAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL TAHUN 2016

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
1.	Rencana Pembangunan Jalan Kereta Api antara Sigli – Bireun dan Lhokseumawe – Langsa – Besitang sepanjang 400 km oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.	KA-ANDAL	Proses dihentikan karena ada perubahan rencana kegiatan.
2.	Rencana Kegiatan pabrik pengolah limbah B3 secara insinerasi di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta oleh PT. Liebe Green Standart Technology	KA-ANDAL ANDAL	<p>KA-ANDAL: Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.37/PKTL/PDLUK/Pla.4/8/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pabrik Pengolahan Limbah B3 Secara Insinerasi di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh PT. Liebe Green Standard Technology.</p> <p>ANDAL: Proses Penilaian ANDAL, RKL-RPL</p>
3.	Rencana Pembangunan Jalan Kereta Api Cepat sepanjang 140,8 km melintasi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat oleh PT. Kereta Api Cepat Indonesia China	KA-ANDAL ANDAL	<p>KA-ANDAL: Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1/PKTL-PDLUK/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Pembangunan Jalan Kereta Api Cepat sepanjang 140,8 km melintasi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat oleh PT. Kereta Api Cepat Indonesia China</p> <p>ANDAL: SKKL: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.35/Menlhk-Setjen/PKTL.4/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-bandung sepanjang ± 142,3 Km melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi,</p>

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
			<p>Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China</p> <p>SKIL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.36/Menlhk/Setjen/PKTL.4/1/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-bandung sepanjang ± 142,3 Km melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China</p>
4.	Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Seng Segat Tahap 3 di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau oleh EMP Bentu Ltd dan EMP Kerinci Baru Ltd.	Adendum ANDAL	Dokumen dikembalikan
5.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port) Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	KA-ANDAL ANDAL	<p>KA-ANDAL:</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.35/PKTL/PDLUK/Pla.4/8/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port) di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)</p> <p>ANDAL:</p> <p>Proses Penilaian ANDAL, RKL-RPL</p>
6.	Rencana Kegiatan revitalisasi Teluk Benoa di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Provinsi Bali dan Kegiatan Tambang (dalam menunjang kegiatan reklamasi Teluk Benoa) di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional dan PT. Dinamika Atria Raya	ANDAL RKL-RPL	Proses Penilaian ANDAL, RKL-RPL
7.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	ANDAL RKL-RPL	Perbaikan di pemrakarsa
8.	Rencana kegiatan pengembangan Bandar Udara Supadio Pontianak di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)	ANDAL RKL-RPL	<p>SKKL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.717/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 tanggal</p>

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
			<p>15 September 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Supadio-Pontianak Di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)</p> <p>SKIL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Supadio-Pontianak Di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat Kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)</p>
9.	Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Badik dan West Badik di Blok Nunukan Kalimantan Utara oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) Nunukan Company	KA-ANDAL ANDAL	<p>KA-ANDAL:</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.24/PKTL/PDLUK/Pla.4/5/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Pengembangan Lapangan Migas Badik dan West Badik di Blok Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Kepada Pertamina Hulu Energi Nunukan Company</p> <p>ANDAL:</p> <p>Perbaikan di pemrakarsa</p>
10.	Rencana Pembangunan SUTT dan USC/Kabel Laut 150 kV Interkoneksi Sumatera Selatan, Bangka (GI Tanjung Apiapi – GI Muntok) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bangka Belitung (sebagian melintasi hutan lindung) oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	KA-ANDAL	<p>KA-ANDAL</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.27/PKTL/PDLUK/Pla.4/6/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan SUTT dan USC/Kabel Laut 150 kV Interkoneksi Sumatera Selatan-Bangka (GI Tanjung Api-Api-GI Muntok) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagian melintasi hutan lindung) oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan III</p>
11.	Rencana Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak dan gas di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pertamina	Adendum ANDAL	

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
	Asset 5 Sangasanga field		
12.	Rencana Penambangan Pasir Laut di Wilayah Perairan laut Jawa oleh An PT. Purnama Gemilang	KA-ANDAL	<p>KA-ANDAL:</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.34/PKTL/PDLUK/Pla.4/8/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut di Wilayah Perairan Laut Jawa di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten Kepada AN. Konsorsium PT. Purnama Gemilang</p> <p>ANDAL:</p> <p>Proses Penilaian ANDAL, RKL-RPL</p>
13.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung (Perpanjangan Dermaga dan Trestle) di Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Adendum ANDAL	<p>SKKL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.647/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 011.40.10 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)</p> <p>SKIL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.648/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.70.10 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)</p>
14.	Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Lintas Pelayanan Cawang – Cibubur, Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, Cawang – Bekasi Timur, Dukuh Atas – Palmerah – Senayan, Cibubur – Bogor dan Palmerah – Grogol oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.	KA-ANDAL ANDAL	<p>KA-ANDAL</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.19/PKTL/PDLUK/Pla.4/3/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi</p>

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
			<p>kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.</p> <p>ANDAL:</p> <p>SKKL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 855/ Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi, Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, Lintas Pelayanan Cawang – Bekasi, Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, Cawang – Bekasi Timur kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan</p> <p>SKIL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 718/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi, Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan</p>
15.	Rencana Kegiatan Pengembangan Peleburan Alumunium Terintegrasi dengan Kegiatan Stamping dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Mandiri Pratama Intilogam	ANDAL RKL-RPL	Proses Penilaian ANDAL, RKL-RPL
16.	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih-3, berlokasi di Kota Subulussalam Barat, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
17.	Rencana Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 di Desa Bojongmango, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Rizqi Bari Utama Internasional.	ANDAL RKL-RPL	Perbaikan di Pemrakarsa
18.	Rencana Kegiatan Perpanjangan Landas Pacu (runaway) dari 1130 meter menjadi 1300 meter Bandar Udara PT. Vale Indonesia Tbk di Soroako, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan (merupakan tambahan kegiatan terhadap Adendum ANDAL RKL-RPL kegiatan optimalisasi produksi penambangan dan pengolahan bijih nikel hinnga mencapai 225 juta pon nikel dalam matte per tahun oleh PT. Vale Indonesia Tbk)	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
19.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
20.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara oleh PT. Pelindo IV (Persero)	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
21.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku oleh PT. Pelindo IV (Persero)	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
22.	Rencana Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tahap Ultimate Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten, oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
23.	Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Sementara) Limbah B3 di Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, oleh PT. Horas Miduk	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
25.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh PT. Pelindo IV (Persero)	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
26.	Rencana Kegiatan Pengamatan Lapangan Gas MAC di Perairan Selat Madura, Provinsi Jawa Timur, oleh Husky CNOOC Madura Limited (HCML)	KA-ANDAL ANDAL	KA-ANDAL: Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.36/PKTL/PDLUK/Pla.4/8/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas MAC, di Perairan Selat Madura, Provinsi Jawa Timur Kepada Husky-CNOOC Madura Limited ANDAL: Perbaikan di pemrakarsa
27.	Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 di Kabupaten Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh PT. Balikpapan Enviromental Service.	ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
28.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, oleh PT. Pelindo IV (Persero)	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
19.	Recana Pengembangan Lapangan Penumpukan, Pelabuhan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh PT. Pelindo IV (Persero).	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
30.	Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP Rantau Dedap dengan Kapasitas 250 MW (Pergeseran Lokasi Power Plant dan Penambahan Tapak	KA-ANDAL ANDAL	KA-ANDAL: Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
	Pemboran) yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh PT. Supreme Energy Rantau Dedap (SERD)		Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.42/PKTL/PDLUK/Pla.4/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. Supreme Energy Rantau Dedap (SERD) ANDAL:
31.	Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) – Penyimpanan Gas Alam Cair Terapung (LNG) Floating Storage Unit dan Fasilitas Regasifikasi di Cilegon Provinsi Banten oleh PT. Nusantara Energy Plant Indonesia	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
32.	Rencana Pengembangan Dermaga Pelabuhan Manokwari, Kelurahan Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, oleh PT. Pelindo IV (Persero)	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
33.	Rencana Kegiatan Pembangunan Landfil fly ash dan bottom ash PLTU Asam-asam (eksitu) seluas 12,2 Ha di Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Asam-Asam	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
34.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, oleh PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Merauke	Adendum ANDAL	SKKL: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.914/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) SKIL: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.915/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.392/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Merauke, Provinsi Papua, oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
35.	Rencana Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Pengembangan Terminal 4 Tahap 1, Landas Pacu 3 dan Automatic People Mover System) di Cengkareng, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)	KA-ANDAL ANDAL	<p>KA-ANDAL:</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.46/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2016 tanggal 14 September 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Soekarno-Hatta (Pengembangan Terminal 4 Tahap 1, Landas Pacu 3 dan Automatic People Mover System) di Cengkareng, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)</p> <p>ANDAL:</p> <p>Perbaikan di Pemrakarsa</p>
36.	Rencana Reklamasi Kolam Hasanuddin Seluas 13.860 m ² dengan volume material reklamasi sebanyak 110.880 m ³ untuk jalan akses pangkalan Hatta (Terminal Petikemas Makassar) ke Pangkalan Soekarno (Pelabuhan Makassar), oleh PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
37.	Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, oleh SAKA Indonesia Pangkah Ltd.	Adendum ANDAL	<p>SKKL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.930/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Ujung Pangkah Blok Pangkah, di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur oleh Saka Indonesia Pangkah Limited</p> <p>SKIL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.931/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 02.9.03 tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak Dan gas Bumi Ujung Pangkah, Blok Pangkah di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur oleh Saka Indonesia Pangkah Limited</p>
38.	Rencana kegiatan pembangunan pangkalan logistik dan fasilitas pendukung kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (offshore supply base) serta pengelolaan Limbah B3 di Kelurahan Klabinair Distrik Aimas, Kabupaten Sorong,	KA-ANDAL ANDAL	<p>KA-ANDAL:</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian</p>

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
	Provinsi Papua Barat oleh PT. Petrosea TBK dan PT. Reksa Bumi Indonesia.	<p>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.39/PKTL/PDLUK/Pla.4/8/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pangkalan Logistik dan fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Offshore Supply Base) di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, oleh PT. Petrosea TBK dan PT. POSB Reksa Bumi Indonesia.</p> <p>ANDAL:</p> <p>SKKL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.938/menlhk/setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi (Offshore Supply Base) serta Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat oleh PT. Petrosea Tbk dan PT. PSOB Reksa Bumi Indonesia</p> <p>SKIL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.939/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi (Offshore Supply Base) di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat kepada PT. Petrosea Tbk</p> <p>SKIL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.940/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat kepada PT. PSOB Reksa Bumi Indonesia</p>	

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
39.	Rencana kegiatan pengelolaan Limbah B3 (Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3) dan Non Limbah B3 di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pengolah Limbah Industri Bekasi (PLIB)	KA-ANDAL	<p>KA-ANDAL:</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.51/PKTL/PLA.4/11/2016 tanggal 8 November 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3) di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, oleh PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi (PLIB)</p> <p>ANDAL:</p> <p>Perbaikan di Pemrakarsa</p>
40.	Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Kawasan Industri Candi, Kelurahan Ngaliyan, Keamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Wastec International.	ANDAL RKL-RPL	Perbaikan di Pemrakarsa
41.	Rencana kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas Akatara, Blok Lemang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi oleh PT. Hexindo Gemilang jaya.	KA-ANDAL ANDAL RKL-RPL	<p>KA-ANDAL:</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.28/PKTL/PDLUK/Pla.4/6/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang KA-ANDAL Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi oleh PT. Hexindo Gemilang Jaya</p> <p>SKKL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.750/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Kepada PT. Hexindo Gemilang Jaya.</p> <p>SKIL:</p> <p>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.751/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 tanggal 21</p>

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
			September 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Kepada PT. Hexindo Gemilang Jaya
42.	Rencana Normalisasi Kali Cisadane Sepajang 65 KM melintasi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten oleh Balai Besar SDA, Kementerian PU dan Pera.	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
43.	Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok A West Natuna PSC, Laut Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, oleh Premier Oil Natuna Sea B.V	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
44.	Rencana Pengembangan Dermaga VII Pelabuhan Penyebrangan Merak dan Bakauheni di Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
45.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap (Perpanjangan DAM Penahan Lumpur Eksisting Sepanjang 250 m dan Revitalisasi Dermaga IV eksisting seluas 33 m x 86,9 m) di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, oleh PT. Pelindo III (Persero)	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
46.	Rencana Pengembangan Lapangan Uap dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Bukit Daun (2x55 MW0 dan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap di Hululais, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, oleh PT. Pertamina Geothermal Energy,	ANDAL RKL-RPL	Perbaikan di Pemrakarsa
47.	Rencana Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tegal (Penambahan Break Water, Pembangunan Dermaga, Pengerukan Kolam dan Alur Pelabuhan, Penempatan Hasil Keruk) di Kelurahan tegalsari, Kecamatan Tegal Barat dan Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Mas Semarang	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
48.	Rencana Pembangunan Infrastruktur Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi Beserta Infrastruktur Pendukungnya Koridor Minas Siak-Duri, Bengkalis-Bata./Bangko dan Rokan Hilir-Duma di lokasi Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia	KA-NDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
49.	Rencana Kegiatan Industri Jasa Pengelolaan Limbah B3 (Pengangkutan, Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan dan Penimbunan Limbah B3) dan Limbah Non B3, Dusun XIX Sei Jernih, Desa Pucut, Kecamatan Percut Sei Tuan,	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
	Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, oleh PT. Sumatera Deli Lestari Indah		
50.	Rencana Elektrifikasi dari Solo-Yogyakarta sepanjang 60 km melintasi Provinsi Jawa Tengah (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten) dan Provinsi DIY Yogyakarta (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta) oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
51.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Bajo di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
52.	Rencana Pembangunan jalur Ganda Kereta Api (Sepanjang 232 km) antara Palembang-Betung-Jambi, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
53.	Rencana Pengembangan Pelabuhan Arar, oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
54.	Rencana Pembangunan Jalan Kereta Api antara Sigli-Bireun dan Lhokseumawe-Langsa-Besitang mmenjadi sepanjang 417,5 km (penambahan jalur reaktivitas kereta eksisting) melintasi Kota Langsa, Provinsi Aceh, oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	KA-ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
55.	Rencana Pengembangan Landas Pacu Bandar Udara Juwata Tarakan, oleh Kantor UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan	Adendum ANDAL	Perbaikan di Pemrakarsa
56.	Rencana Pengembangan Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, oleh PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Pekanbaru.	Adendum ANDAL	Perbaikan di pemrakarsa
57.	Rencana Pengembangan Bandar Udara Internasional Mopah Marauke, Provinsi Papua, oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Mopah Merauke.	KA-ANDAL	Perbaikan di pemrakarsa
58.	Rencana Kegiatan Pengembangan Kilang dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Operasional RU V Balikpapan di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur oleh Pertamina RU V Balikpapan	KA-ANDAL	Perbaikan di pemrakarsa

No	Nama Kegiatan	Dokumen	Status
1	2	3	4
59.	Rencana Pembangunan PLTU Jawa Energi Cilacap kapasitas 2 x 1000 MW di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah oleh PT. Jawa Energi Indonesia	KA-ANDAL	Perbaikan di pemrakarsa

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data S/D 31 Desember 2016

TABEL VII.2. DAFTAR PROSES UKL-UPL TAHUN 2016

No.	Kegiatan/ Perusahaan	Tgl Rapat	Status
1	2	3	4
1.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Kabel Laut 20 kV Sirkit-II, Kepulauan Seribu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh PT. PLN (Persero) UIP III	12 Februari 2016	Sudah diterbitkan Rekom dan IL Rekom: S.986/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/11/2016 tanggal 11 November 2016 IL: SK.908/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 7 Desember 2016
2.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Pipa Gas SPBG di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	24 Maret 2016	Sudah diterbitkan Rekom dan IL Rekom: S.662/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016 tanggal 26 Juli 2016 IL: SK.655/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016 tanggal 26 Agustus 2016
3.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut Serat Optik Asis-Africa-Europa (AAE-1) dari Percabangan (BU) Thailand yang melintasi Perairan ZEE Indonesia di Sebelah Utara Pulau WE Sabang, oleh PT. Bina Nusantara Perkasa		Dikembalikan ke pemrakarsa terkait izin prinsip dan status penanggungjawab kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan UKL-UPL PT. Bina Nusantara Perkasa tanggal 15 Maret 2016
4.	Kegiatan Pembangunan Jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Serat Optik Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) Phase-2 dari BMH Makassar – BU Makassar dengan Percabangan BMH Selayar, BMH Maumere, BMH Baubau dan BMH Wangiwangi, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh PT. Telekomunikasi Indonesia	8 April 2016	Menunggu status lokasi rencana kegiatan pada TN Wakatobi
5.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Mako South-1 Blok Duyung (Lepas Pantai) di Laut Cina Selatan, Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau oleh West Natuna Exploration Ltd	7 Juni 2016	Menunggu penerbitan IL
6.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Survei Seismik 2D di Wilayah Kerja Abar, Laut Jawa, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pertamina Hulu Energi Abar	15 Agustus 2016	Sudah diterbitkan Rekom dan IL Rekom: S.888/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/2016 tanggal 12 Oktober 2016 IL: SK.909/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016 tanggal 7 Desember 2016

No.	Kegiatan/ Perusahaan	Tgl Rapat	Status
1	2	3	4
7.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Survei Seismik 2D di Wilayah Kerja Anggursi, Laut Jawa, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pertamina Hulu Energi Anggursi	15 Agustus 2016	Sudah diterbitkan Rekom dan IL Rekom: S.888/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/2016 tanggal 5 Oktober 2016 IL: SK.5/Menlhk/Setjen/PLA.4/1/2017 tanggal 6 Januari 2017
8.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merakes-2 Blok East Sepinggan, Lepas Pantai Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur, oleh Eni East Sepinggan	26 Agustus 2016	SK.814/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016
9.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Survei Seismik 2D dan 3D di Blok Offshore Timor Sea-1 dan Blok West Timor Sea, di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh eni Indonesia OTS 1 Limited dan eni West Timor Limited	20 September 2016	Proses penerbitan Rekom dan IL
10.	UKL-UPL Rencana Kegiatan Survei Seismik 3D di Wilayah Kerja Andaman III, Laut Andaman, Provinsi Aceh oleh Talisman Andaman B.V.	14 Desember 2016	Perbaikan setelah rapat di pemrakarsa

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data S/D 31 Desember 2016

TABEL VII.3. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI DARI KEGIATAN AMDAL DAN UKL- UPL PADA DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN (BULAN JANUARI-DESEMBER 2016)

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
1.	Surat Rekomendasi Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merakes-2 di Blok East Sepinggan Lepas Pantai Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur, oleh eni East Sepinggan Limited	Rekomendasi	Rekomendasi Nomor: S.49/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	11 Januari 2016
2.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merakes-2 di Blok East Sepinggan Lepas Pantai Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur, oleh eni East Sepinggan Limited	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.94/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	5 Februari 2016
3.	Surat Rekomendasi Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merem-1, Meliwis-1, Enggano-1, Cangak-1, Berusaha-1 dan Molah-2 di Lepas Pantai Selat Madura Blok Madura <i>Offshore</i> , Provinsi Jawa Timur oleh Santos (Madura <i>Offshore</i>) Pty. Ltd	Rekomendasi	Rekomendasi Nomor S.50/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	11 Januari 2016
4.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merem-1, Meliwis-1, Enggano-1, Cangak-1, Berusaha-1 dan Molah-2 di Lepas Pantai Selat Madura Blok Madura <i>Offshore</i> , Provinsi Jawa Timur oleh Santos (Madura <i>Offshore</i>) Pty. Ltd	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.168/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	24 Februari 2016
5.	SK Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-bandung sepanjang ± 142,3 Km melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.35/Menlhk-Setjen/PKTL.4/1/2016	20 Januari 2016
6.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-bandung sepanjang ± 142,3 Km melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.36/Menlhk-Setjen/PKTL.4/1/2016	20 Januari 2016
7.	Surat Rekomendasi Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Mustika-1, Mustika-2, Mustika-3 dan Mustika-4 di Blok Sakti, Lepas Pantai Laut Jawa, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur oleh KrisEnergy (Sakti) B.V.	Rekomendasi	Rekomendasi Nomor: S.51/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	11 Januari 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
8.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Mustika-1, Mustika-2, Mustika-3 dan Mustika-4 di Blok Sakti, Lepas Pantai Laut Jawa, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur oleh KrisEnergy (Sakti) B.V.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.14/Menlhk/Setjen/PKTL.4/1/2016	16 Januari 2016
9.	SK Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok Offshore North West Java Tahun 2015-2019 oleh PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor : SK.42/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/1/2016	26 Januari 2016
10.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok Offshore North West Java Tahun 2015-2019 oleh PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.43/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/1/2016	26 Januari 2016
11.	SK Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan PUSPIPTEK-SERPONG dan BATAN secara khusus dalam Area Seluas 460 Hektar di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	SKKL dan	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.62/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/2/2016	1 Februari 2016
12.	Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Kawasan PUSPIPTEK-SERPONG dan BATAN secara khusus dalam Area Seluas 460 Hektar di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.65/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/2/2016	1 Februari 2016
13.	Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Kawasan Nuklir dan Irradiator serta Fasilitas Lainnya di Kawasan Nuklir Serpong (KNS) – Batan, Puspiptek – Serpong, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan BATAN Nomor: SK.63/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/2/2016	1 Februari 2016
14.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Bali Lombok <i>Cable System</i> (Balok CS) sepanjang ±47,594 Km dari Seraya Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali ke Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. XL Axiata Tbk	Rekomendasi	Rekomendasi Nomor: S.53/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	11 Januari 2016
15.	Izin Lingkungan Kegiatan Penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Bali Lombok <i>Cable System</i> (Balok CS) sepanjang ±47,594 Km dari Seraya Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali ke Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. XL Axiata Tbk	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.171/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	15 Maret 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
16.	Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Daerah Operasi Bagian Selatan, Blok East Kalimantan, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.166/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	23 Februari 2016
17.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Daerah Operasi Bagian Selatan, Blok East Kalimantan, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.167/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	23 Februari 2016
18.	Perubahan Izin Lingkungan atas Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Duri <i>Steamflood</i> di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia	Perubahan Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.93/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2/2016	5 Februari 2016
19.	Perubahan Izin Lingkungan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.71.10 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengolahan Limbah Medis Dengan Incinerator di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur oleh CV Rojo Koyo	Perubahan Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.190/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	3 Maret 2016
20.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.36/ Menlhk/Setjen/PKTL.0/1/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jalan Kereta Cepat Jakarta-bandung sepanjang ± 142,3 Km melewati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	Perubahan Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.192/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	4 Maret 2016
21.	SK Direktur Jendral tentang KA Andal Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan di Kampung KLayas Distrik Seget Kab. Sorong Prov. Papua Barat Oleh Pelindo II Persero	SK KA	SK.6/PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016	25 Februari 2016
22.	Surat Keputusan tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02.1.01 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Penerima untuk Pengolahan <i>Slop</i> dan <i>Sludge</i> menjadi Bahan Bakar Minyak dan Fasilitas Penunjangnya di Kawasan Sekupang <i>Logistic</i> , Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Batam <i>Slop</i> dan <i>Sludge Treatment Centre</i>	Perubahan Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.219/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	15 Maret 2016
23.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Bendungan Matenggeng di Wilayah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, oleh Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (BBWS Citanduy), Dirjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.189/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/3/2016	3 Maret 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
24.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Bendungan Matenggeng di Wilayah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, oleh Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy (BBWS Citanduy), Dirjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.191/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/3/2016	3 Maret 2016
25.	Surat Rekomendasi tentang Ukl-Upl Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi SSO-01 di lapangan South Saubi Blok Kangean Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Kepada Kangean Energy Indonesia Limited	Rekomendasi	S.190/Menlhk-PKTL/PDLUK/PKTL.4/2/2016	26 Februari 2016
26.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi SSO-01 di lapangan South Saubi Blok Kangean Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Kepada Kangean Energy Indonesia Limited	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor : SK.288/Menlhk/Setjen/PKTL.4/4/2016	11 April 2016
27.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan-Lapangan Minyak dan Gas Blok East Kalimantan pada Daerah Operasi Bagian Utara di Perairan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor : SK.233/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/3/2016	21 Maret 2016
28.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan-Lapangan Minyak dan Gas Blok East Kalimantan pada Daerah Operasi Bagian Utara di Perairan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur oleh Chevron Indonesia Company	Izin Lingkungan	SK Izin Lingkungan Nomor: SK.236/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/3/2016	21 Maret 2016
29.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut SEA-ME-WE 5 Rute Dumai-BU1B-1 Sepanjang 97,998 Km dan Medan-BU1B-2 Sepanjang 89,776 Km di Perairan Selat Malaka Kepada PT. Telekomunikasi Indonesia International (TELIN)	Rekomendasi	Rekom: S.207/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016	4 Maret 2016
30.	Izin Lingkungan Pemasangan Sistem Komunikasi Kabel Laut SEA-ME-WE 5 Rute Dumai_BU1B-1 Sepanjang 97,998 KM dan Medan-BU1B-2 Sepanjang 89,776 KM di Perairan Selat Malaka Kepada PT Telekomunikasi Indonesia International (TELIN)	Izin Lingkungan	SK.289/Menlhk/Setjen/PKTL.4/4/2016	11 April 2016
31.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemasangan Kabel Komunikasi Bawah Laut Proyek Sulawesi Maluku <i>Submarine Cable System (SMPCS)</i> Kepada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.	Rekomendasi	Rekom: S.206/Menlhk-PKTL/PDLUK/2016 tgl 4 Maret 2016	4 Maret 2016
32.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemasangan Kabel Komunikasi Bawah Laut Proyek Sulawesi Maluku <i>Submarine Cable System (SMPCS)</i> Segmen 21.7, Segmen 22 dan Segmen 22.6 Sepanjang 54,086 KM, 434,327 KM dan 833,675 KM di Wilayah Perairan Kabupaten Fakfak, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mimika dan Kabupaten	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.292/MENLHK/Setjen/PLA.4/4/2016	11 April 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
	Marauke, Provinsi Papua yang Terintegrasi Dengan Kegiatan Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut Proyek Sulawesi Maluku Papua <i>Submarine Cable System</i> , Sepanjang 1.398,55 KM di Wilayah Pearian Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Kegiatan Pemasangan Kabel Telekomunikasi Bawah Laut Proyek Sulawesi Maluku Papua <i>Submarine Cable System Link</i> , Sepanjang 881,309 KM di Wilayah Kabupaten Fakfak, Timika, Tual, Kaimana Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk			
33.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja Ketapang, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur kepada PC Ketapang II Ltd.	Rekomendasi	Rekom: S.208/Menlhk-PKTL/PDLUK/PKTL.4/3/2016	4 Maret 2016
34.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja Ketapang, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur kepada PC Ketapang II Ltd.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.293/Menlhk/Setjen/PKTL.4/2016	11 April 2016
35.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 175 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Seluruh Kegiatan Produksi hingga 80.000.000 (Delapan Puluh Juta) Ton Pertahun Tambang Batubara di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh PT. Adaro Indonesia	Perubahan Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.246/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	29 Maret 2016
36.	Perubahan Izin Lingkungan Kegiatan Lapangan Minyak dan Gas Tambun, di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pertamina EP Asset 3 Tambun Field	Perubahan Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.290/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2016	11 April 2016
37.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pelabuhan Lembar dan Terminal Gilimas di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	SKKL	SK.247/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	29 Maret 2016
38.	Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Lembar dan Terminal Gilimas di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.248/Menlhk/Setjen/PKTL.4/3/2016	29 Maret 2016
39.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja North Madura II, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur kepada PC North Madura II Ltd.	Rekomendasi	Rekom: S.209/Menlhk-PKTL/PDLUK/PKTL.4/3/2016	4 Maret 2016
40.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi di Wilayah Kerja North Madura II, Lepas Pantai Utara Madura, Provinsi Jawa Timur kepada PC North Madura II Ltd	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: 328/Menlhk/Setjen/PKTL.4/4/2016	27 April 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
41.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 301 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok <i>West Madura Offshore</i> di Lepas Pantai Utara Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur oleh PT. Pertamina Hulu Energi <i>West Madura Offshore</i> (PHE WMO)	Perubahan Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.309/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2016	20 April 2016
42.	SK Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660/K.827/2012 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi PT. Indika Logistic Support Services yang berlokasi di Kota Balikpapan	Perubahan Izin Lingkungan	SK. Izin Lingkungan Nomor: SK.318/Menlhk/Setjen/PLA.4/4/2016	20 April 2016
43.	SK Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan hidup Nomor 105 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup rencana kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak Ande-Ande Lumut blok West Natuna oleh Genting Oil Natuna Pte, Ltd.	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.294/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/4/2016	11 April 2016
44.	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 106 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak Ande Ande Lumur Blok <i>Northwest Natuna</i> oleh Genting Oil Natuna Pte, Ltd	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.295/MENLHK/SETJEN/PKTL.4/4/2016	11 April 2016
45.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, KemenHub	SK KA	SK.19/PKTL/PKTL.4/3/2016	29 April 2016
46.	SK Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kawasan Industri Candi, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, oleh PT. Wastec International	SK KA	SK.21/PKTL/PDLUK/PKTL.4/5/2016	17 April 2016
47.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan CPO Maloy di Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur	SK KA	SK.20/PKTL/PDLUK/PKTL.4/4/2016	25 April 2016
48.	Surat Rekomendasi tentang UKL-UPL Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Sorolangun-Muara Rupit dan Gardu Induk Terkait, di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Rekomendasi	S.52/Menlhk-PKTL/2016	11 Januari 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
49.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan SUTT 150 kV Sorolangun-Muara Rupit dan Gardu Induk Terkait, di Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III	Izin Lingkungan	SK.429/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	9 Juni 2016
50.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Pembangunan SUTT dan USC/Kabel Laut 150 kV Interkoneksi Sumatera Selatan-Bangka (GI Tanjung Api-API - GI Muntok) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sebagian melintasi Hutan Lindung), oleh PT. PLN (Persero) Unit Pembangunan III)	SK KA	S.27/PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2016	13 Juni 2016
51.	Perubahan IL Total E&P Indonesia Mentawai B.V Kegiatan Survei Seismik (Dua Dimensi) di Perairan Lepas Pantai Blok Bengkulu I-Mentawai, Provinsi Bengkulu	Perubahan Izin Lingkungan	SK.448/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	17 Juni 2016
52.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi oleh PT. Hexindo Gemilang Jaya	SK KA	SK.28/PKTL/PDLUK/PLA.4/6/2016	14 Juni 2016
53.	Kelayakan Lingkungan Rencana Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kepada PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.493/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
54.	Rencana Pengangkutan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pemanfaatan, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, kepada PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.503/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
55.	Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Karaha Bodas Unit 2 dan 3 (2 x 55 MW) di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pertamina Geothermal Energy	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.495/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
56.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Uap dan PLTP Karaha Bodas Unit 2 dan 3 (2 x 55 MW) di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Pertamina Geothermal Energy	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.505/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
57.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 189 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok B Natuna, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi	perubahan Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.497/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
	Kepulauan Riau oleh ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd			
58.	Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penempatan Coridore Storage Tanker (CST) di Perairan Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, kepulauan Bangka Belitung kepada ConocoPhillips (Grissik) Ltd	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.494/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
59.	Izin Lingkungan Kegiatan Penempatan Coridore Storage Tanker (CST) di Perairan Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, kepulauan Bangka Belitung kepada ConocoPhillips (Grissik) Ltd	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan Nomor: SK.504/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016	30 Juni 2016
60.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Kegiatan Pabrik Pengolahan Limbah B3 secara Insinerasi di Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh PT. Liebe Green Standard Technology	SK KA	SK.37/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	8 Agustus 2016
61.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Penambangan Pasir Laut di Wilayah Perairan Laut Jawa di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten kepada An. PT. Purnama Gemilang	SK KA	SK.34/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	3 Agustus 2016
62.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Bungkutoko (Kendari New Port) di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh PT. Pelindo IV (Persero)	SK KA	SK.35/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	4 Agustus 2016
63.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Pengembangan Lapangan Gas MAC, di Perairan Selat Madura, Provinsi Jawa Timur kepada Husky Cnooc Madura Limited	SK KA	SK.36/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	4 Agustus 2016
64.	Kelayakan Lingkungan Rencana Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.647/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016	16 Agustus 2016
65.	Izin Lingkungan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan: SK.648/Menlhk/Setjen/PLA.4/8/2016	16 Agustus 2016
66.	Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Pipa Gas SPBG di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rekomendasi	Rekom :S.662/Menlh-PKTL/PDLUK/PLA.4/7/2016	26 Juli 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
67.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Pipa Gas SPBG di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Izin Lingkungan	SK.655/Menlh/Setjen/PLA.4/8/2016	26 Agustus 2016
68.	Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 185 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Senoro dan Pemipaian Gas Senoro-Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah oleh JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	perubahan Izin Lingkungan	SK.657/Menlh/Setjen/PLA.4/8/2016	26 Agustus 2016
69.	Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/66/II/BAPEDALDA Tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Peningkatan dan Optimalisasi Produksi Penambangan dan Pengolahan Bijih Nikel PT. Inco hingga mencapai 225 Juta Pon Nikel dalam Matte Per Tahun di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan	Perubahan Izin Lingkungan	SK.533 /Menlh/Setjen/PLA.4/7/2016	13 Juli 2016
70.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Emas DMP dalam Wilayah Kontrak Karya KW 96PK105 di Blok Timburu, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh PT. Pelsart Tambang Kencana	SK KA	SK.38/PKTL/PLA.4/8/2016	8 Agustus 2016
71.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Lepas Pantai di Blok South Sesulu, Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. SAKA Indonesia Sesulu	Rekomendasi	Rekom: S.235/Menlhk-PKTL/PDLUK/PKTL.4/3/2016	24 Maret 2016
72.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Lepas Pantai di Blok South Sesulu, Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. SAKA Indonesia Sesulu	Izin Lingkungan	IL: SK.399/Menlhk/Setjen/PKTL.4/6/2016	2 Juni 2016
73.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Deliniasi di Blok Tuna, Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau oleh Premier Oil Tuna B.V.	Rekomendasi	Rekom: S.445/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2016	26 April 2016
74.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Deliniasi di Blok Tuna, Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau oleh Premier Oil Tuna B.V.	Izin Lingkungan	IL: SK.689/Menlhk/Setjen/PKTL.4/9/2016	2 September 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
75.	Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Survei Seismik 2D Blok Offshore North X-Ray di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat kepada Conrad Petroleum (V) Limited	Rekomendasi	Rekom sudah terbit: S.652/Menlhk-PKTL/PDLUK/PKTL.4/7/2016	21 Juli 2016
76.	Izin Lingkungan Kegiatan Survei Seismik 2D Blok Offshore North X-Ray di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat kepada Conrad Petroleum (V) Limited	Izin Lingkungan	SK IL: SK.688/Menlhk/Setjen/PKTL..4/9/2016	2 September 2016
77.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Soekarna-Hatta (Pengembangan Terminal 4 Tahap I, Landas Pacu 3 dan <i>Automatic People Mover System</i>), di Cengkareng, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)	SK KA	SK.46/PKTL/PDLUK/PLA.4/9/2016	14 September 2016
78.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Untuk PLTP Rantau Dedap 250 MW di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, oleh PT. Supreme Energy Rantau Dedap (SERD)	SK KA	SK.42/PKTL/PDLUK/PLA.4/8/2016	26 Agustus 2016
79.	Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Supadio – Pontianak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK MELHK Nomor SK.717/ Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	15 September 2016
80.	Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Supadio – Pontianak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Angkasa Pura II (Persero)	Izin Lingkungan	SK MENLHK Tentang IL Nomor SK.718/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	15 September 2016
81.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Lapangan Migas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, oleh PT. Hexindo Gemilang Jaya	SKKL	SKKL Nomor SK. 750/ Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	21 September 2016
82.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Akatara, Blok Lemang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, oleh PT. Hexindo Gemilang Jaya	Izin Lingkungan	IL Nomor: SK. 751/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	21 September 2016
83.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Lengo Blok Bulu, Provinsi Jawa Timur, oleh KrisEnergy (Satria) Ltd.	SKKL	SK Kelayakan Lingkungan Nomor: SK.713/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016 dan	15 September 2016
84.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Lengo Blok Bulu, Provinsi Jawa Timur, oleh KrisEnergy (Satria) Ltd.	Izin Lingkungan	SK Izin Lingkungan Nomor: SK.714/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	15 September 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
85.	Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas-Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia	Izin Lingkungan	Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.785/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016	12 Oktober 2016
86.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Bekasap-Rokan, di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.792/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016	17 Oktober 2016
87.	Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Sumur Eksplorasi Merakes-2 di Blok East Sepinggan, Lepas Pantai Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur oleh eni East Sepinggan Limited	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.814/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016	27 Oktober 2016
88.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi, Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, Lintas Pelayanan Cawang – Bekasi, Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, Cawang – Bekasi Timur kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 855/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2016	10 November 2016
89.	Izin Lingkungan Rencana Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi, Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 718/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2016	10 November 2016
90.	Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 (Pengangkutan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3) di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, oleh PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi (PLIB)	SK KA	SK Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.51/PKTL/ PLA.4/11/2016	8 November 2016
91.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan GasBumi Wilayah Kerja Siak di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau kepada PT. Pertamina Hulu Energi Siak	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.868/Menlhk/Setjen/PLA.4/11/2016	11 November 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
92.	Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Labuhan Bajo di Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Bajo, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	SK KA	SK Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.53/PKTL/ PLA.4/12/2016	5 Desember 2016
93.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) dari Gas <i>Insulated Switchgear</i> Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Duri Kosambi ke GISTET 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Muara Karang ke GISTET 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Tanjung Priok ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Muara Tawar/GITET 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Bekasi, di Jakarta Barat dan Jakarta Utara di Provinsi DKI Jakarta serta Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.901/ Menlhk/Setjen/PLA.4/12/ 2016	6 Desember 2016
94.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) dari Gas <i>Insulated Switchgear</i> Tegangan Ekstra Tinggi (GISTET) 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Duri Kosambi ke GISTET 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Muara Karang ke GISTET 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Tanjung Priok ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Muara Tawar/GITET 500 kV (Lima Ratus Kilo Volt) Bekasi, di Jakarta Barat dan Jakarta Utara di Provinsi DKI Jakarta serta Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat kepada PT. PLN (PErsero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 902/ Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	6 Desember 2016
95.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Kabel Laut 20 kV (duapuluhan kilo volt) Sirkit-II Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Banten kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.986/Menlhk- PKTL/PDLUK/PLA.4/11/2016	11 November 2016
96.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Kabel Laut 20 kV (duapuluhan kilo volt) Sirkit-II Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Banten kepada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.908/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/ 2016	7 Desember 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
97.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Survei Seismik 2D, di Wilayah Kerja Abar, Laut Jawa, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Pertamina Hulu Energi Abar	Rekomendasi UKL-UPL	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.888/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/2016	12 Oktober 2016
98.	Izin Lingkungan Kegiatan Survei Seismik 2D, di Wilayah Kerja Abar, Laut Jawa, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Pertamina Hulu Energi Abar	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.909/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	7 Desember 2016
99.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Ujung Pangkah Blok Pangkah, di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur oleh Saka Indonesia Pangkah Limited	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.930/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	27 Desember 2016
100.	Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02.9.03 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Ujung Pangkah, Blok Pangkah di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, oleh Saka Indonesia Pangkah Limited	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 931/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	27 Desember 2016
101.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi (<i>Offshore Supply Base</i>) serta Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat oleh PT. Petrosea Tbk dan PT. PSOB Reksa Bumi Indonesia	SKKL	SKKL Nomor: SK.938/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	28 Desember 2016
102.	Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), Pangkalan Logistik dan Fasilitas Pendukung Kegiatan Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi (<i>Offshore Supply Base</i>) di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat kepada PT. Petrosea Tbk	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.939/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	28 Desember 2016
103.	Izin Lingkungan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3, di Kelurahan Klabinain, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat kepada PT. PSOB Reksa Bumi Indonesia	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 940/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	28 Desember 2016
104.	Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Pelabuhan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	SKKL	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.914/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	16 Desember 2016

No.	Kegiatan	Jenis SK	No.SK	Tgl SK
1	2	3	4	5
105.	Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.392/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Merauke, Provinsi Papua, oleh PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Izin Lingkungan	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.915/Menlhk/Setjen/PLA.4/12/2016	16 Desember 2016
106.	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Kegiatan Survei Seismik 2D, di Wilayah Kerja Anggursi, Laut Jawa, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Pertamina Hulu Energi Anggursi	Rekom	Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.888/Menlhk-PKTL/PDLUK/PLA.4/2016	5 Oktober 2016

Sumber: **Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data Tahun 2016**

KLHS DAN EKOREGION



**DIREKTORAT PENCEGAHAN
DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN
WILAYAH DAN SEKTOR**

TABEL VIII.1 JUMLAH SATUAN DAN LUAS EKOREGION PULAU

NO	PULAU	NAMA KELAS	KODE	LUAS AREA (Km ²)
1	2	3	4	5
1	Sumatera	1 Dataran Pantai Timur Sumatera & Dataran Pantai Barat Sumatera	M	7.234,51
		2 Dataran Gambut Sumatera	O1	74.591,63
		3 Dataran Fluvial Sumatera	F	82.957,24
		4 Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	D3	17.686,47
		5 Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan	S32	46.117,95
		6 Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan	V3	42.224,88
		7 Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung - Natuna	D2	1.200,96
		8 Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan, Perbukitan Struktural Kompleks Kepulauan Riau	S23	94.312,69
		9 Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan		17.828,19
		10 Pegunungan Jalur Bukit Barisan		78.029,39
		11 Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan		11.345,90
TOTAL				473.529,81
2	Jawa	1 Dataran Pantai Utara Jawa & Dataran Pantai Selatan Jawa	M1 & M2	2.448,11
		2 Dataran Fluvial Jawa	F	21.519,82
		3 Dataran Organik/Koral Jawa	O2	156,84
		4 Dataran Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung		20.506,47
		5 Dataran Struktural Blok Selatan Jawa & Dataran Struktural Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	S31 & S32	12.079,49
		6 Perbukitan Karst Jalur Pangandaran-Karangbolong-Gunung Sewu-Blambangan & Perbukitan Karst Jalur Bogor-Kendeng-Rembang	K1	5.196,36
		7 Perbukitan Denudasional Jawa	D2	531,69
		8 Perbukitan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	V2	21.650,09
		9 Perbukitan Struktural Blok Selatan Jawa	S21	30.182,14
		10 Pegunungan Vulkanik Jalur Gunung Karang-Merapi-Raung	V1	13.458,43
		11 Pegunungan Struktural Blok Selatan Jawa & Pegunungan Struktural Jalur Bogor-kendeng-Rembang	S11 & S12	4.548,56
TOTAL				132.278,00
3	Kalimantan	1 Dataran Pantai Kalimantan	M	12.706,06
		2 Dataran Fluvial Kalimantan	F	95.688,99
		3 Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam	O1	44.558,06
		4 Dataran Struktural Kompleks Meratus	S3	38.685,40
		5 Perbukitan Karst Kalimantan	K2	9.811,23
		6 Perbukitan Denudasional Kalimantan	D2	27.617,29
		Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	S2	144.914,56
		7 Pegunungan Denudasional Kalimantan	D1	7.901,34
		8 Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	S1	147.986,23
TOTAL				533.659,32

NO	PULAU	NAMA KELAS		KODE	LUAS AREA (Km ²)
1	2	3		4	5
4	Bali & Nusa Tenggara	1	Dataran Pantai Bali Nusa Tenggara	M	67,73
		2	Dataran Fluvial Bali Nusa Tenggara	F	3.582,99
		3	Dataran Organik/Koral Bali Nusa Tenggara	O2	4.111,46
		4	Dataran Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V3	1.045,82
		5	Perbukitan Karst Bali Nusa Tenggara	K2	3.385,91
		6	Perbukitan Struktural Bali Nusa Tenggara	S2	3.889,32
		7	Perbukitan Denudasional Bali Nusa Tenggara	D2	4.603,57
		8	Perbukitan Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V2	4.836,78
		9	Pegunungan Struktural Bali Nusa Tenggara	S1	18.407,04
		10	Pegunungan Denudasional Bali Nusa Tenggara	D1	8.279,94
		11	Pegunungan Vulkanik Bali Nusa Tenggara	V1	19.476,15
TOTAL					71.686,71
5	Sulawesi	1	Dataran Pantai Sulawesi	M	2.359,53
		2	Dataran Fluvial Sulawesi	F	21.413,52
		3	Dataran Organik/Koral Sulawesi	O1	974,29
		4	Dataran Struktural Sulawesi	S3	100,60
		5	Dataran Vulkanik Kompleks Manado	V1	337,02
		6	Perbukitan Denudasional Sulawesi	D2	1.648,04
		7	Perbukitan Karst Sulawesi	K2	14.165,73
		8	Perbukitan Struktural Sulawesi	S2	36.479,26
		9	Perbukitan Vulkanik Kompleks Manado dan Kompleks Makassar	V21 & V22	3.855,74
		10	Pegunungan Struktural Sulawesi	S1	99.831,95
		11	Pegunungan Vulkanik Kompleks Manado dan Kompleks Makassar	V11 & V12	3.815,64
TOTAL					184.981,32
6	Maluku	1	Dataran Pantai Maluku	M	2.284,96
		2	Dataran Fluvial Maluku	F	5.032,38
		3	Dataran Karst Maluku	K3	1.061,99
		4	Dataran Struktural Kompleks Kepulauan Sula-Buru-Seram	S32	1.334,64
		5	Dataran Vulkanik Kompleks Gamalama	V31	74,18
		6	Perbukitan Karst Maluku	K2	17.383,02
		7	Perbukitan Denudasional Maluku	D2	2.938,27
		8	Perbukitan Struktural Kompleks Halmahera & Kepulauan Sula-Buru-Seram	S21 & S22	10.185,82
		9	Perbukitan Vulkanik Kompleks Gamalama dan Kompleks Banda	V21 & V22	4.726,49
		10	Pegunungan Denudasional Maluku	D1	5.001,07
		11	Pegunungan Struktural Kompleks Halmahera & Kompleks Kepulauan Sula-Buru-Seram	S11 & S12	26.710,88
		12	Pegunungan Vulkanik Kompleks Gamalama	V1	1.058,57
TOTAL					77.792,27

NO	PULAU	NAMA KELAS		KODE	LUAS AREA (Km ²)	
1	2	3		4	5	
7	Papua	1	Dataran Fluvial Utara Papua, Barat Papua & Selatan Papua	M1, M2 & M3	119.990,48	
		2	Dataran Fluvial Mamberamo, Kokonao-Digul, Seget-Bintuni dan Nabire-Sarmi	F1, F2, F3 & F4	36.398,10	
		3	Dataran Gambut Mamberamo, Kokonao-Digul, Seget-Bintuni & Nabire-Sarmi	G1, G2, G3 & G4	35.394,06	
		4	Dataran Organik/Koral Kompleks Sorong	O2	497,18	
		5	Dataran Struktural Jalur Jayawijaya & Jalur Utara	S31 & S32	12.664,30	
		6	Perbukitan Karst Jalur Jayawijaya dan Jalur Utara	K	31.125,74	
		7	Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya dan Jalur Utara	S21 & S22	51.114,53	
		8	Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya & Jalur Utara	S11 & S12	121.072,33	
		9	Pegunungan Glasial	G	3.306,58	
TOTAL					411.563,30	
TOTAL KESELURUHAN					1.885.490,73	

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data S/d 31 Desember 2016

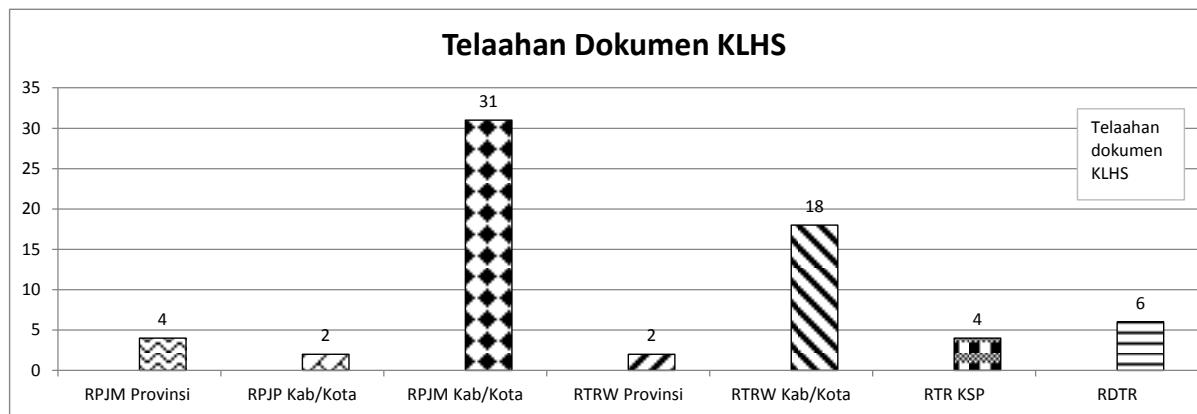
TABEL VIII.2 TELAAHAN DOKUMEN KLHS

No	Nama KLHS	Nomor surat	Tanggal
1	2	3	4
RPJPD/RPMD Provinsi			
1	RPJMD Jawa Tengah	S.51/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/3/2016	24 Maret 2016
2	RPJMD Prov Sumatera Barat	S.171/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	14 September 2016
3	RPJMD Prov Riau	S.223/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016	12 Oktober 2016
4	RPJMD Prov Kaltara	S.222/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016	11 Oktober 2016
RPJPD/RPMD Kabupaten / Kota			
5	RPJMD Kab Nagekeo	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
6	RPJMD Kabupaten Semarang	S. 216/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/11/2016	17 November 2016
7	RPJPD Belu, NTT	S.164/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	
8	RPJMD Kabupaten Samosir	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
9	RPJMD Purbalingga	S.220/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016	
10	RPJMD Kab Klaten	S.181/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	26 September 2016
11	RPJMD Kab Wonosobo	S.224/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016	12 Oktober 2016
12	RPJMD Kab Belu, NTT	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
13	RPJMD Kabupaten Kuningan	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
14	RPJMD Kab. Kep. Meranti	S.175/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	16 September 2016
15	RPJMD Kota Kep. Tidore	S.176/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	15 September 2016
16	RPJPD Kab. Indra Giri Hulu	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
17	RPJMD Kota Dumai	S.168/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	14 September 2016
18	RPJMD Kab Bengkalis	S.169/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	14 September 2016
19	RPJMD Kab Purworejo	S.163/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	06 September 2016
20	RPJMD Kab. Padang Pariaman	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
21	RPJMD Kab. Kepulauan Natuna	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
22	RPJM Kab. Ogan Komering Ilir	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
23	RPJMD Kabupaten Samosir	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
24	RPJMD Kab. Purbalingga	S.220/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016	10 Oktober 2016
25	RPJMD Kab Klaten	S.181/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	26 September 2016
26	RPJMD Kab Wonosobo	S.224/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016	12 Oktober 2016
27	RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
28	RPJMD Kota Magelang	S.221/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016	11 Oktober 2016
29	RPJMD Kab. Gorontalo	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
30	RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu	S.179/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	23 September 2016
31	RPJMD Kab Sigi	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
32	RPJMD Kab Bengkalis	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
33	RPJMD Kabupaten Kuningan	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
34	RPJMD Kabupaten Sukoharjo	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	

No	Nama KLHS	Nomor surat	Tanggal
1	2	3	4
35	RPJMD Kab Rokan Hilir	S.289/pdlkws/pklhws/pla.3/12/2016	29 Desember 2016
36	RPJMD Kab Tabanan	S.290/pdlkws/pklhws/pla.3/12/2016	29 Desember 2016
37	RPJMD Kab Indra Giri Hulu	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
	RTRW Provinsi		
38	RTRW Prov. Banten	S.197/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	5 Oktober 2016
39	RTRW Prov Madura	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
	RTRW Kabupaten/Kota		
40	RTRW Kab. Tapanuli Utara	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	16/09/2016
41	RTRW Kab. Buton Utara	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	16/09/2016
42	RTRW Kab. Rejang Lebong	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	16/09/2016
43	RTRW Kab Malaka	S.25/pdlkws/pkhws/pla.3/2/2016	29 Februari 2016
44	RTRW Kab Belu	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
45	RTRW Kab. Semarang	S.3/PDLKWS/PKTL-3/2/2016	5 Februari 2016
46	RTRW Kab. Pemalang	S.198/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	25 Oktober 2016
47	RTRW Kota Aceh	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	16/09/2016
48	RTRW Kota Bukittinggi	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	16/09/2016
49	RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	16/09/2016
50	RTRW Kabupaten Muara Enim	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	16/09/2016
51	RTRW Kota Cilegon	S.250/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	07 Nopember 2016
52	RTRW Bukittinggi	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
53	RTRW Kab. Rejang Lebong	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
54	RTRW Kab Belu	S.164/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	06 September 2016
55	RTRW Kab Muara Enim	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
56	RTRW Kab Garut	S.239/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/10/2016	27 Oktober 2016
57	RTRW Kab. Bogor	S.164/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/3/2016	24 Maret 2016
	RTR KSP / RDTR (Rencana Rinci Tata Ruang)		
58	RTR KSP Agropolitan Regional Bromo-Tengger-Semeru	S.165/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	06 September 2016
59	RTR KSP Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS), Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) Tanjung Bulu Pandan.	S.165/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/9/2016	
60	RTR KSP Agroindustri Gresik-Lamongan	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
61	RTR KSP Segitiga Emas Lamongan-Tuban-Bojonegoro	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
62	RDTR Kota Nagekeo	S.249/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/6/2016	10 Juni 2016
63	RDTR Kota Rasanae, NTB	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
64	RTDR Kota Sila, NTB	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	

No	Nama KLHS	Nomor surat	Tanggal
1	2	3	4
65	RDTR Kota Mbay	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
66	RDTR Depok Sleman	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	
67	RDTR Denpasar	Evaluasi pada Klinik/Asistensi	

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data S/d 31 Desember 2016



TABEL VIII.3 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	URAIAN	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PP RPPLH	PP RPPLH
1	2	3	4	5	6
I. RPPLH NASIONAL					
1.	RPPLH Nasional	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Dalam proses penyusunan	-
II. RPPLH PROVINSI					
A. Ekoregion Jawa					
1.	DKI Jakarta	Sudah dilaksanakan	Draft sudah disusun	-	-
2.	Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Draft sudah disusun	-	-
3.	Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Draft sudah disusun	-	-
4.	Banten	Sudah dilaksanakan	Draft sudah disusun	-	-
5.	Jawa Tengah	-	-	-	-
6.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
B. Ekoregion Sumatera					
1.	Sumatera Selatan	Sudah dilaksanakan	Draft sudah disusun	-	-
2.	Bengkulu	-	-	-	-
3.	Jambi	-	-	-	-
4.	Riau	-	-	-	-
5.	Sumatera Barat	-	-	-	-
6.	Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	-	-	-
7.	Aceh	Sudah dilaksanakan	-	-	-
8.	Lampung	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan draft	-	-
9.	Kepulauan Riau	-	-	-	-
10.	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-
C. Ekoregion Kalimantan					
1.	Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah dibuat	Sudah ditetapkan
2.	Kalimantan Utara	-	-	-	-
3.	Kalimantan Barat	-	-	-	-
4.	Kalimantan Timur	-	-	-	-
5.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-
III. RPPLH KABUPATEN/KOTA					
A. Ekoregion Jawa					
1.	Kab. Bandung - Jabar	-	-	-	-
2.	Kab. Sukabumi - Jabar	Sudah dilaksanakan	Draft sudah disusun	-	-
3.	Kota Depok - Jabar	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah dibuat	Sudah ditetapkan
4.	Kota Semarang - Jateng	Sudah dilaksanakan	-	-	-
5.	Kab. Pemalang - Jateng	Sudah dilaksanakan	-	-	-
6.	Kab. Wonogiri - Jateng	-	-	-	-

NO	URAIAN	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PP RPPLH	PP RPPLH
1	2	3	4	5	6
7.	Kab. Klaten - Jateng	-	-	-	-
8.	Kota Yogyakarta - DIY	-	-	-	-
9.	Kota Surabaya - Jatim	-	-	-	-
10.	Kota Blitar - Jatim	-	-	-	-
11.	Kab. Malang - Jatim	-	-	-	-
12.	Kab. Banggai Kepulauan	Sudah dilaksanakan	Draft		
B. Ekoregion Sumatera					
1.	Kota Bandar Lampung	Selesai	Draft sudah disusun	-	-
2.	Kab. Ogan Komering Ulu	Selesai	Draft sudah disusun	-	-

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data S/d 31 Desember 2016

TABEL VIII.4 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

No	Jenis Dokumen KLHS	Tahun 2015				Jumlah	Tahun 2016				Jumlah	Total sd Desember 2016				Jumlah			
		Hirarki					Hirarki					Hirarki							
		Nas	Prov	Kab	Kota		Nas	Prov	Kab	Kota		Nas	Prov	Kab	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
I	Review KLHS																		
1	RPJMP																		
2	RPJMD			1	1	2		4	28	3	35	-	4	29	4	37			
3	KRP					-					-	-	-	-	-	-			
4	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)			3	3			2	16	2	20	-	2	19	2	23			
5	Rencana Rinci (RDTR)			3	3					6	6	-	-	3	6	9			
6	Kawasan Strategis Nasional					-				-	-	-	-	-	-	-			
7	Kawasan Strategis Provinsi		1		1			4			4	-	5	-	-	5			
8	Kawasan Strategis Kabupaten					-				-	-	-	-	-	-	-			
9	Kawasan Strategis Kota					-				-	-	-	-	-	-	-			
10	Kawasan Ekonomi Khusus					-				-	-	-	-	-	-	-			
11	Laut Nasional					-				-	-	-	-	-	-	-			
12	Zonasi					-				-	-	-	-	-	-	-			
13	Reklamasi					-				-	-	-	-	-	-	-			
14	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan					-				-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah I	-	1	7	1	9	-	10	46	11	67	-	11	51	12	74			
II	Bintek KLHS																		
1	RPJMP					-					-	-	-	-	-	-			
2	RPJMD			1	1	2			1	1	2	-	-	2	2	4			
3	KRP		1		1			1			1	-	2	-	-	2			
4	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		1		1			1			1	-	2	-	-	2			
5	Rencana Rinci (RDTR)					-				-	-	-	-	-	-	-			
6	Kawasan Strategis Nasional					-				-	-	-	-	-	-	-			
7	Kawasan Strategis Provinsi					-				-	-	-	-	-	-	-			
8	Kawasan Strategis Kabupaten					-				-	-	-	-	-	-	-			
9	Kawasan Strategis Kota					-				-	-	-	-	-	-	-			
10	Kawasan Ekonomi Khusus					-				-	-	-	-	-	-	-			
11	Laut Nasional					-				-	-	-	-	-	-	-			
12	Zonasi			1		1		1			1	-	2	-	-	2			
13	Reklamasi					-				-	-	-	-	-	-	-			
14	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan					-				-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah II	-	3	1	1	5	-	3	1	1	5	-	6	2	2	10			

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Ket:

- Data s/d Desember 2016
- Kegiatan mulai Agustus 2015

TABEL VIII.5 PROPORSI INDIKASI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM TAHUN 2016

Ekoregion	Provinsi	JE Penyedia Bahan Pangan (%)			JE Pengatur Tata Aliran Air (%)			JE Penyedia dan Penyimpan Air Bersih (%)			JE Pengatur Iklim (%)			JE Penyedia Energi (%)			JE Perlindungan dan Pencegahan terhadap Bencana (%)			JE Pendukung Sumber Daya Genetik (%)		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Jawa	Banten	52	22	26	18	51	32	31	24	45	12	47	41	29	29	43	27	22	51	17	59	25
	DIY	64	27	9	25	58	17	51	15	34	16	55	29	46	24	30	26	25	50	27	49	25
	DKI	80	4	17	87	13	0	0	1	99	81	15	4	62	17	22	2	78	19	87	11	2
	Jabar	43	28	28	16	52	32	25	33	41	13	45	42	31	28	41	25	24	51	17	57	26
	Jateng	38	32	30	14	55	31	31	32	37	18	47	35	31	19	50	20	28	52	19	60	21
	Jatim	41	30	29	13	59	28	28	35	37	21	49	30	40	20	11	28	61	21	56	24	
Sumatera	NAD	84	10	6	12	32	56	84	10	6	23	22	55	13	28	60	18	79	3	6	35	59
	Sumsut	62	29	9	17	64	19	62	29	9	42	41	18	22	52	25	28	55	17	13	57	30
	Sumbar	74	19	8	8	58	35	74	19	8	22	45	33	7	54	39	23	68	10	4	58	38
	Riau	75	22	3	17	81	2	75	22	3	37	62	0	14	51	36	17	70	12	17	69	14
	Kep. Riau	96	4	0	50	43	6	96	4	0	64	36	0	51	43	6	70	27	2	36	58	6
	Jambi	72	22	6	15	71	14	72	22	6	52	35	13	13	70	17	39	57	4	25	59	16
	Babel	51	49	0	59	41	0	51	49	0	79	21	0	78	21	0	24	71	4	78	22	0
	Bengkulu	71	24	4	13	43	44	71	24	4	17	43	40	12	44	45	24	65	11	3	54	43
	Sumsel	57	40	3	30	62	8	36	52	12	39	54	7	24	65	10	42	48	10	24	60	15
	Lampung	36	52	12	25	71	3	57	40	3	63	33	3	51	45	4	30	62	7	22	69	9
Kalimantan	Kalbar	80	19	1	10	58	32	48	34	18	19	57	24	48	34	18	22	75	3	12	53	35
	Kalsel	67	14	19	22	45	32	52	24	24	39	40	21	52	24	24	34	64	2	15	62	23
	Kalteng	82	16	2	26	31	42	56	28	16	30	45	25	56	28	16	18	74	8	13	58	29
	Kaltim	95	5	0	14	12	74	86	10	4	17	29	54	86	10	4	16	82	2	2	42	55
Sulawesi	Sulut	81	19	0	3	45	53	72	22	6	3	87	10	2	88	10	32	62	6	5	89	6
	Gorontalo	93	7	0	6	28	65	85	14	1	8	88	4	5	90	4	20	76	4	4	92	4
	Sulbar	93	6	1	11	36	52	80	14	6	12	87	0	9	90	0	15	80	5	8	91	1
	Sul Tengah	95	5	0	6	66	27	77	20	3	9	90	1	7	92	1	12	77	11	11	87	2
	Sulsel	77	20	3	11	68	21	65	27	8	26	73	1	9	90	2	27	70	3	9	89	2
	Sul Tenggara	18	80	1	18	75	7	58	38	4	22	77	0	18	80	1	19	58	23	23	76	2
	Bali Nusra	52	41	7	13	53	34	11	53	35	52	41	7	11	53	35	8	64	28	11	61	28
Maluku	NTB	16	40	43	16	40	43	49	36	15	71	21	8	49	36	15	21	62	17	8	54	39
	NTT	89	10	1	41	32	27	72	25	3	27	49	23	72	25	3	41	46	14	30	47	22
Papua	Maluku	90	9	1	60	0	40	52	35	13	13	55	31	13	55	31	17	58	25	17	58	25
	Malut	87	11	2	36	0	64	68	24	8	7	49	43	7	49	43	17	68	14	17	68	14
Papua	Papua Barat	87	13	0	7	36	58	39	46	15	7	66	27	7	36	58	4	58	38	4	58	38
	Papua	90	10	0	14	34	51	53	29	18	16	46	38	14	34	51	13	80	8	5	43	52

Keterangan:

Tinggi : Kondisi sangat baik

Sedang : Kondisi sedang

Rendah : Kondisi kurang baik

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data S/d 31 Desember 2016

TABEL VIII.6 LUAS WILAYAH EKOREGION LAUT

NO	WILAYAH EKOREGION	LUAS (km2)
1	Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera	782.861
2	Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa	655.549
3	Selat Malaka	111.343
4	Laut Natuna	360.402
5	Selat Karimata	270.859
6	Laut Jawa	437.978
7	Laut Sulawesi	323.866
8	Selat Makasar	288.005
9	Perairan Bali dan Nusa Tenggara	625.018
10	Teluk Tomini	70.020
11	Laut Halmahera	451.955
12	Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi	160.361
13	Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi	169.160
14	Laut Seram dan Teluk Bintuni	140.040
15	Laut Banda	583.096
16	Samudera Pasifik sebelah Utara Papua	459.857
17	Teluk Cendrawasih	93.369
18	Laut Arafura	326.793
JUMLAH		6.310.532

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data S/D 31 Desember 2016

TABEL VIII.7. PERENCANAAN EKONOMI LINGKUNGAN TAHUN S/D Desember 2016

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
A	EKOSISTEM HUTAN									
1	Taman Hutan Raya (per 22 Ha)									
		Daun Pakan Ternak	Nilai Produksi	3.581.529.620,00	Rp./Tahun	461.418,40	Rp/Ekor/Tahun	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Propinsi Lampung	Agus Setiawan, 2000, Tesis Program Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung	Luas 22,244 Ha
		Biomasa Kayu Bakar	Nilai Produksi	10.329.411.216,00	Rp./Tahun	91.402,63	Rp/Org/Tahun			
		Air Rumah Tangga	Nilai Produksi	487.530.594,00	Rp./Tahun	3.385,30	Rp/Org/Tahun			
		Air Sawah	Nilai Produksi	149.083.495,00	Rp./Tahun	35.420,17	Rp/Ha/Tahun			
		Perladangan Tanaman Semusim	Nilai Produksi	381.235.682,00	Rp./Tahun	157.609,00	Rp/Ha/Tahun			
		Perladangan Tanaman Tahunan	Nilai Produksi	1.389.565.000,00	Rp./Tahun	157.609,00	Rp/Ha/Tahun			
		Wisata	Nilai Produksi	9.357.513,00	Rp./Tahun	9.275,21	Rp/1000 Penduduk/Tahun			
		<i>Total Nilai (valuasi) dari beberapa variable sumberdaya alam</i>		16.327.713.120,00	Rp./Tahun					
2	Fungsi Hidrologis Hutan Taman Nasional									
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Hujan)	CVM (WTP)	2.469.012.192,00	Rp./Tahun	3.810.204,00	Rp./KK/Tahun		Herlianto,2005, Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Nilai Ekonomi Fungsi Hidrologis Hutan Taman Nasional Gunung Halimun (Studi Kasus di desa Cisarua Kecamatan Sukajaya dan Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor)	Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Musim Hujan)	CVM (WTP)	1.986.029.280,00	Rp./Tahun	3.064.860,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Musim Hujan)	CVM (WTP)	1.767.873.600,00	Rp./Tahun	2.728.200,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	3.259.958.400,00	Rp./Tahun	5.030.800,00	Rp./KK/Tahun			Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	2.680.096.248,00	Rp./Tahun	4.135.951,00	Rp./KK/Tahun		Tipe A = Air Mineral	Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	1.856.267.280,00	Rp./Tahun	2.864.610,00	Rp./KK/Tahun		Tipe B = Air Keruh	Desa Cisarua (648 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Hujan)	CVM (WTP)	8.251.397.750,00	Rp./Tahun	4.460.215,00	Rp./KK/Tahun		Tipe C = Air Sangat Keruh	Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Musim Hujan)	CVM (WTP)	6.153.895.500,00	Rp./Tahun	3.326.430,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Musim Hujan)	CVM (WTP)	4.241.565.300,00	Rp./Tahun	2.292.738,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe A (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	1.007.060.265,00	Rp./Tahun	5.443.569,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe B (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	7.601.681.450,00	Rp./Tahun	4.109.017,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Rumah Tangga Tipe C (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	4.475.462.650,00	Rp./Tahun	2.419.169,00	Rp./KK/Tahun			Desa Curug Bitung (1850 KK)
		Nilai Air Pertanian (Musim Hujan)	CVM (WTP)	10.710.914.630,00	Rp./Musim	16.302.762,00	Rp/Petani/Musim			Desa Cisarua

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Nilai Air Pertanian (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	11.192.321.090,00	Rp./Musim	17.035.542,00	Rp/Petani/Musim			Desa Cisarua
		Nilai Air Pertanian (Musim Hujan)	CVM (WTP)	4.914.524.860,00	Rp./Musim	6.921.866,00	Rp/Petani/Musim			Desa Curug Bitung
		Nilai Air Pertanian (Musim Kemarau)	CVM (WTP)	5.591.190.360,00	Rp./Musim	7.874.916,00	Rp/Petani/Musim			
		Total Nilai		78.159.250.855,00	Rp/Tahun					
3	Valuasi Ekonomi Satwa Liar di Sekitar Hutan									
		Nilai Babi	CVM (WTP)	9.702.677,00	Rp./Tahun/KK				Dini Rahmanita, 2006, Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Nilai Ekonomi Satwa Liar Berdasarkan Preferensi Masyarakat Di Sekitar Hutan : Studi Kasus di Hutan Produksi PT.Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah.	
		Nilai Kancil	CVM (WTP)	1.029.581,00	Rp./Tahun/KK					
		Nilai Kijang	CVM (WTP)	1.867.297,00	Rp./Tahun/KK					
		Nilai Rusa	CVM (WTP)	8.566.929,00	Rp./Tahun/KK					
		Nilai Trenggiling	CVM (WTP)	11.132.063,00	Rp./Tahun/KK					
		Total Nilai		32.298.547,00	Rp./Tahun/KK					
4	Valuasi Ekonomi Hutan Pendidikan									
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	683.338.887,40	Rp./Tahun	1.903.450,94	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat	Emri Roslinda, 2002, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Hutan Pendidikan Gunung Walat dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar	
		Nilai Getah Damar	Nilai Produksi	102.000.000,00	Rp./Tahun	816.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan = 359 Ha
		Nilai Bibit Alami	Nilai Produksi	75.000.000,00	Rp./Tahun	600.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Damar = 125 Ha
		Nilai Pakan Ternak	Nilai Produksi	229.354.144,80	Rp./Tahun	638.869,48	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tanaman Obat	Nilai Produksi	32.000.000,00	Rp./Tahun	3.200.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Obat = 10 Ha
		Nilai Tanaman Hias	Nilai Produksi	30.000.000,00	Rp./Tahun	150.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Hias = 200 Ha
		Nilai Tanaman Pangan Liar	Nilai Produksi	10.800.000,00	Rp./Tahun	43.200,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tanaman Pangan Liar = 250 Ha
		Nilai Air untuk Rumah Tangga	Nilai Produksi	2.084.018.810,00	Rp./Tahun	5.805.066,32	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Air Untuk Pertanian	Nilai Produksi	190.227,85	Rp./Tahun	3.111,81	Rp/Ha/Tahun			Luas Sawah 61.131 Ha
		Nilai Perladangan	Nilai Produksi	1.725.407,95	Rp./Tahun	21.595,13	Rp/Ha/Tahun			Luas Ladang 79.898 Ha
		Nilai Kesejukan	Nilai Barang Pengganti	581.580.000.000,00	Rp./Tahun	1.620.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Serapan Karbon	Nilai Produksi	3.521.014.560,00	Rp./Tahun	9.807.840,00	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		588.349.442.038,00	Rp./Tahun					
5	Valuasi Ekonomi Hutan Kota, Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan									
		Nilai Hutan Kota	Nilai Kesehatan	1.519.475.000,00	Rp./Tahun	11.255.370,37	Rp/Ha/Tahun		Asyrafy, 2008, Skripsi Fakultas Kehutanan IPB, Valuasi Ekonomi Hutan Kota Berdasarkan Pendekatan Biaya Kesehatan (Studi Kasus Taman Margasatwa Ragunan Jakarta)	
		Total Nilai		1.519.475.000,00	Rp./Tahun					Luas = 135 Ha
6	Valuasi Ekonomi Total Hutan Kayu Putih, Provinsi Maluku,Kabupaten Seram Bagian Barat, Desa Piru									
		Nilai Daun Kayu Putih	Nilai Produksi	757.574.000,00	Rp./Tahun	378.787,00	Rp/Ha/Tahun		Evelin Parera, 2005, Tesis Sekolah Pasca Sarjana IPB, Nilai Ekonomi Total Hutan Kayu Putih: Kasus Di Desa Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku	

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA											
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI	
		Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengganti	3.815.200.000,00	Rp./Tahun	400.000,00	Rp/Ha/Tahun			Terukur dari 20 ton/ha/th serasah setara dengan kompos @Rp 200/kg	
		Nilai Habitat Flora dan Fauna	Nilai Barang Pengganti	7.543.500.000,00	Rp./Tahun	790.889,08	Rp/Ha/Tahun			Terukur dari biaya penghijauan Rp.1.5 juta/ha dan potensi turisme 10 orang/minggu @Rp.75000	
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	2.324.900.000,00	Rp./Tahun	243.751,31	Rp/Ha/Tahun			Ministry of State for Population and environmental (1993) US\$ 32.5/ha/tahun	
		Nilai Manfaat Kebanggaan	Nilai Barang Pengganti	1.125.000.000,00	Rp./Tahun	117.949,26	Rp/Ha/Tahun			Biaya Pembuatan Jalan Sepanjang 75 km	
		Nilai Bibit Tanaman	Nilai Produksi	2.002.980.000,00	Rp./Tahun	210.000,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	32.429.200.000,00	Rp./Tahun	3.400.000,00	Rp/Ha/Tahun				
Total Nilai				50.704.305.000,00							
B EKOSISTEM PESISIR											
1	Valuasi Ekonomi Kawasan Pesisir Dalam Pengembangan Budidaya Tambak Prov Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai	Nilai Budidaya Udang+Bandeng	Nilai Produksi	2.794.995.612,00	Rp./Tahun	8.078.022,00	Rp/Ha/Tahun		Asbar, 2007, Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB, Optimasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan		
		Nilai Budidaya Rumput Laut	Nilai Produksi	3.929.899.451,40	Rp./Tahun	11.358.090,90	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 346 Ha	
		Nilai Penangkapan Kepiting Bakau	Nilai Produksi	4.733.597.167,82	Rp./Tahun	13.680.916,67	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penangkapan Kelelawar	Nilai Produksi	794.505.960,00	Rp./Tahun	2.296.260,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penangkapan Benur	Nilai Produksi	2.416.334.250,00	Rp./Tahun	6.983.625,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Penangkapan Nener	Nilai Produksi	1.978.428.000,00	Rp./Tahun	5.718.000,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Bibit Bakau	Nilai Produksi	108.125.000,00	Rp./Tahun	312.500,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	49.539.588,00	Rp./Tahun	143.178,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	49.305.000,00	Rp./Tahun	142.500,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	7.650.000.000,00	Rp./Tahun	22.109.826,59	Rp/Ha/Tahun			PT.Diagram (1994) dalam Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (1995) biaya Pembangunan Break Water = Rp.100000/m3, Volume bangunan 180000 m3	
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	1.169.268,75	Rp./Tahun	3.379,39	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	49.312.125,00	Rp./Tahun	142.500,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9500/US\$	
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	1.009.677.698,00	Rp./Tahun	2.917.722,00	Rp/Ha/Tahun				
		Nilai Kayu	Benefit Transfer	1.358.000,00	Rp./Tahun	150.888,89	Rp/Ha/Tahun	Kajian Ekonomi Ekosistem Mangrove Bagi Pengembangan Bandara Ngurah Rai - Bali	Arief Waluyo Hadi, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi Ekosistem Mangrove Bagi Pengembangan Bandara Ngurah Rai - Bali	Luas 9 ha, Santoso. Et al (1998) 12.3-26.5 m3/ha/tahun atau rata-rata 19.4 m3/ha/tahun	

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi		14.317.500,00	Rp./Tahun	1.590.833,33	Rp/Ha/Tahun		Pengambilan Arang pada Luas Mangrove 4 Ha	
	Nilai Arang	Nilai Produksi		15.675.000,00	Rp./Tahun	3.918.750,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi		69.534.720,00	Rp./Tahun	46.356.480,00	Rp/Ha/Tahun		Pengambilan Daun Nipah pada Luas = 1.5 Ha	
	Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi		384.181.714,00	Rp./Tahun	42.686.857,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi		213.480.000,00	Rp./Tahun	23.720.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi		134.736.000,00	Rp./Tahun	14.970.667,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Kerang	Nilai Produksi		166.230.000,00	Rp./Tahun	20.778.750,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Penangkapan Burung	Nilai Produksi		22.950.000,00	Rp./Tahun	2.550.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Tambak	Nilai Produksi		32.000.000,00	Rp./Tahun	21.333.333,33	Rp/Ha/Tahun		Luas Tambak 1.5 Ha	
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer		1.374.552.000,00	Rp./Tahun	152.728.000,00	Rp/Ha/Tahun		Dahuri (1995) biaya Rp.3000000 P=1m, L=5m, T=6m, ketahanan 10 tahun	
	Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti		603.117,00	Rp./Tahun	67.013,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer		1.134.000,00	Rp./Tahun	126.000,00	Rp/Ha/Tahun		Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8400/US\$	
	Nilai Keberadaan	CVM (WTP)		25.627.500,00	Rp./Tahun	2.847.500,00	Rp/Ha/Tahun			
Total Nilai				2.456.379.551,00	Rp./Tahun					
Total Optimasi Pemanfaatan Kawasan Pesisir Untuk Pengembangan Budidaya Tambak Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan				25.564.889.120,97	Rp./Tahun					
C	EKOSISTEM MANGROVE SULAWESI									
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Utara									
	Hutan Mangrove Sulawesi Utara	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	30.544.200,00	Rp./Tahun	492.648,39	Rp/Ha/Tahun	Hutan Mangrove Di Desa Talise, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	Adnan Sjaltout Wantasen, 2002, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekologi-ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove Di Desa Talise, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara	
	Total Nilai Hutan Mangrove			30.544.200,00	Rp./Tahun				Luas 62 Ha, Harga Kayu Rp.7500/M3	
2	Valuasi Ekonomi Mangrove Di Provinsi Sulawesi Selatan									
	Budidaya Tambak Udang dan Bandeng	Nilai Produksi		292.501.886,80	Rp./Tahun	8.410.060,00	Rp/Ha/Tahun		Rusdianah, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi dan Ekologi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Pesisir Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan	
	Budidaya Rumput Laut	Nilai Produksi		695.600.000,00	Rp./Tahun	20.000.000,00	Rp/Ha/Tahun		Luas 34.78 Ha	
	Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi		486.920.000,00	Rp./Tahun	14.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			
	Penangkapan Kelelawar	Nilai Produksi		142.273.363,48	Rp./Tahun	4.090.666,00	Rp/Ha/Tahun			
	Kayu Bakar	Nilai Produksi		4.979.730,84	Rp./Tahun	143.178,00	Rp/Ha/Tahun			
	Penahan Abrasi Pantai	Biaya Perbaikan		4.434.450.000,00	Rp./Tahun	127.500.000,00	Rp/Ha/Tahun		Harga Break Water Rp.425000/M3 (L = 5 m, Kedalaman = 6 M, Daya Tahan 10 Tahun	

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Penyedia Pakan	Biaya Barang Pengganti	4.434.816.711,00	Rp./Tahun	127.510.543,73	Rp/Ha/Tahun			Harga Pakan Udang Rp. 1500/Kg, Kebutuhan pakan udang per Kg Udang = 1,5 Kg
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	4.434.450,00	Rp./Tahun	127.500,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8500/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	101.478.371,00	Rp./Tahun	2.917.722,00	Rp/Ha/Tahun			
Nilai Total				10.658.542.913,12	Rp./Tahun					
3	Valuasi ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Tinanggea									
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	9.504.000,00	Rp./Tahun	1.441,00	Rp/Ha/Tahun	Valuasi ekonomi Hutan Mangrove untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara	Muhammad Alfian, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Valuasi ekonomi Konversi Hutan Mangrove Untuk Budidaya Tambak di Kecamatan Tinanggea Sulawesi Tenggara	Luas 6596 Ha
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	340.998.000,00	Rp./Tahun	51.695,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Rajungan	Nilai Produksi	1.795.377.400,00	Rp./Tahun	272.180,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	101.640.000,00	Rp./Tahun	15.409,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	1.747.245.000,00	Rp./Tahun	264.895,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Tradisional	Nilai Produksi	601.118.800,00	Rp./Tahun	2.051.600,00	Rp/Ha/Tahun			Luas 294 Ha Tambak Tradisional
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Tradisional Plus	Nilai Produksi	1.021.844.460,00	Rp./Tahun	7.298.889,00	Rp/Ha/Tahun			Luas 140 Ha Tambak Tradisional Plus
		Nilai Manfaat Hasil Budidaya Tambak Semi Intensif	Nilai Produksi	557.757.084,00	Rp./Tahun	14.677.818,00	Rp/Ha/Tahun			Luas 38 Ha Tambak Semi Intensif
		Nilai Fungsi Pencegahan Interusi Air Laut	Nilai Oportunitas	11.728.219.620,00	Rp./Tahun	1.778.080,60	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyedia Unsur Hara	Benefit Transfer	5.105.007.722,00	Rp./Tahun	773.955,08	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	973.613.732,40	Rp./Tahun	147.600,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9141.57/US\$
4	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi tenggara, Parigi Mutong									
Fuel Wood	Production Value	8.793.500,00	Rp./Year	19.971,11	Rp/Ha/Year	Economic Assessment For Mangrove Ecosystem in Malakosa Coastal Zone, Parigi Moutong District, Central sulawesi Province	Normawati M.Said, 2006, Thesis Post Graduate School IPB, Economic Assessment For Mangrove Ecosystem in Malakosa Coastal Zone, Parigi Moutong District, Central sulawesi Province	Luas 440.311 Ha		
House Construction	Production Value	3.035.472,22	Rp./Year	6.893,93	Rp/Ha/Year					
Nypa-Roof	Production Value	3.079.667,00	Rp./Year	6.994,30	Rp/Ha/Year					
Fishing material	Production Value	11.683.638,89	Rp./Year	26.534,97	Rp/Ha/Year					
mollusk collecting	Production Value	25.012.167,00	Rp./Year	56.805,68	Rp/Ha/Year					
Crab collecting culturing, and seeds	Production Value	230.257.833,33	Rp./Year	522.943,63	Rp/Ha/Year					
Shrimp ponds	Production Value	1.382.741.526,33	Rp./Year	3.140.374,70	Rp/Ha/Year					
Milkfish ponds	Production Value	3.113.128,53	Rp./Year	7.070,29	Rp/Ha/Year					
Milkfish and shrimp ponds	Production Value	1.409.809.667,92	Rp./Year	3.201.849,76	Rp/Ha/Year					
Bats	Production Value	708.827.500,00	Rp./Year	1.609.833,73	Rp/Ha/Year					

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Birds	Production Value	2.233.000,00	Rp./Year	5.071,42	Rp/Ha/Year			
		Breakwater	Replecement Cost	30.870.873.596,00	Rp./Year	70.111.520,26	Rp/Ha/Year			Aprilwati (2001) cost Rp.4.153.880 L = 1m, W= 11m, H=2.5m, resistance= 10 tahun
		Biodiversity Value	Benefit Transfer	61.555.477,80	Rp./Year	139.800,00	Rp/Ha/Year			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9320/US\$
		Existence Value	CVM (WTP/WTA)	7.923.840.370,95	Rp./Year	17.996.008,21	Rp/Ha/Year			
Nilai Total				42.644.856.545,97	Rp./Year					
5	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Sulawesi Tenggara, Donggala									
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	268.234.050,00	Rp./Tahun	1.207.500,00	Rp/Ha/Tahun		Arman Lalo, 2003, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekologi-Ekonomi Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Lestari di Kawasan Pesisir Banawa Selatan Kabupaten Donggala	
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	238.578.360,00	Rp./Tahun	1.074.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 222.14 Ha
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	177.712.000,00	Rp./Tahun	800.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	595.335.200,00	Rp./Tahun	2.680.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak	Nilai Produksi	2.913.844.000,00	Rp./Tahun	7.450.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak 391.12 Ha
		Nilai Penahan Abrasi	Benefit Transfer	28.322.850.000,00	Rp./Tahun	127.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			PT.Diagram (1994) dalam Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (1995) biaya Pembangunan Break Water = Rp.100000/m3, asumsi inflasi 4.25%
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	306.835,31	Rp./Tahun	1.381,27	Rp/Ha/Tahun			Nilai Pakan Udang
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	28.322.850,00	Rp./Tahun	127.500,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8500/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	211.391.289,61	Rp./Tahun	951.612,90	Rp/Ha/Tahun			
Total Nilai Ekonomi Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Lestari di Kawasan				32.756.574.584,92	Rp./Tahun					
D	EKOSISTEM HUTAN MANGROVE JAWA									
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Jawa Barat, Subang									
		Nilai Kayu	Nilai Produksi	385.952.364,00	Rp./Tahun	1.711.920,00	Rp/Ha/Tahun		Djoko Santoso, 2005, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Valuasi Ekonomi Ekosistem Hutan Magrove di Kawasan Pondok Bali Desa Legonwetan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, Jawa Barat	
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	106.362.350,10	Rp./Tahun	471.778,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 225.45 Ha
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	948.234.583,80	Rp./Tahun	4.205.964,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	356.583.894,30	Rp./Tahun	1.581.654,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	191.331.749,70	Rp./Tahun	848.666,00	Rp/Ha/Tahun			

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Nilai Penangkapan Ular	Nilai Produksi	160.781.020,20	Rp./Tahun	713.156,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Lahan Pertambakan Pola Empang Parit	Nilai Produksi	174.904.239,30	Rp./Tahun	1.159.458,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Pola Empang Parit = 150.85 Ha
		Nilai Lahan Pertambakan Pola Tradisional	Nilai Produksi	454.801.888,80	Rp./Tahun	7.034.832,00	Rp/Ha/Tahun			IUas Tambak Pola Tradisional = 64,65 Ha
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	423.891.330,00	Rp./Tahun	4.153.880,00	Rp/27.5m/tahun			Aprilwati (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Biaya Barang Pengganti	129.137.760,00	Rp./Tahun	572.800,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 225,45 Ha
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	36.789.156,00	Rp./Tahun	144.000,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9600/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	980.707.500,00	Rp./Tahun	4.350.000,00	Rp/Ha/Tahun			
Nilai Total Ekonomi				4.349.477.836,20	Rp./Tahun					
2	Kajian Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah									
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	7.666.783.000,00	Rp./Tahun	970.000,00	Rp/Ha/Tahun		Trie Joko Paryono, 1999, Tesis Program Pascasarjana IPB, Kajian Ekonomi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah	
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	339.807.947,00	Rp./Tahun	42.992,44	Rp/Ha/Tahun			Luas Hutan Mangrove 7903,9 Ha
		Nilai Arang	Nilai Produksi	81.270.000,00	Rp./Tahun	10.282,27	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	63.140.000,00	Rp./Tahun	9.665,70	Rp/Ha/Tahun			Luas Nipah 6532,38 Ha
		Nilai Bibit Mangrove	Nilai Produksi	7.884.899.024,40	Rp./Tahun	997.596,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kepiting	Nilai Produksi	213.512.760,00	Rp./Tahun	27.013,60	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemanfaatan Udang	Nilai Produksi	1.943.223.291,00	Rp./Tahun	245.856,26	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	2.029.646.220,00	Rp./Tahun	256.790,47	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kerang	Nilai Produksi	510.078.000,00	Rp./Tahun	64.534,98	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Burung	Nilai Produksi	40.400.000,00	Rp./Tahun	6.184,58	Rp/Ha/Tahun			Luas penangkapan Burung 6532,38 Ha
		Nilai Penangkapan Biawak	Nilai Produksi	20.854.167,00	Rp./Tahun	3.192,43	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Kera	Nilai Produksi	8.100.000,00	Rp./Tahun	1.239,98	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pengambilan Kroto	Nilai Produksi	89.454.000,00	Rp./Tahun	13.693,94	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Wisata	Pengeluaran Wisatawan di Tempat	223.766.400,00	Rp./Tahun	18.508,40	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Nilai Penggantian	38.628.739.140,00	Rp./Tahun	3.195.101,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	903.956.462,00	Rp./Tahun	74.769,00	Rp/Ha/Tahun			Memakai harga Pupuk
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.773.601.533,00	Rp./Tahun	146.700,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9780/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	43.338.056.220,00	Rp./Tahun	3.584.623,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			105.759.288.164,40	Rp./Tahun					

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
3	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Jawa Barat, Indramayu									
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	27.470.000.000,00	Rp./Tahun	3.423.672,00	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Hutan Mangroe di Muara Cimanuk Indramayu	Agustono, 1996, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Muara Cimanuk Indramayu)	Luas =8023.55 Ha
		Nilai Tambak Tumpangsari	Nilai Produksi	10.610.000.000,00	Rp./Tahun	1.322.357,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak = 4.255 Ha
		Nilai Pemburuan dan Pemancingan	Nilai Produksi	2.440.000.000,00	Rp./Tahun	304.105,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	71.740.000.000,00	Rp./Tahun	8.941.180,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penahanan Abrasi	Benefit Transfer	5.030.000.000,00	Rp./Tahun	626.904,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.2300/US\$
		Total Nilai		117.290.000.000,00	Rp./Tahun					
4	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Jawa Barat,Karawang									
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	3.554.040.000,00	Rp./Tahun	2.100.000,00	Rp/Ha/Tahun	Valuasi Ekonomi Ekosistem Mangrove di Karawang Jawa Barat		Luas Mangrove = 1692.4 Ha
		Nilai Ranting kayu	Nilai Produksi	220.012.000,00	Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak	Nilai Produksi	5.793.085.200,00	Rp./Tahun	3.423.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang Alam	Nilai Produksi	1.931.451.500,00	Rp./Tahun	1.141.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	220.012.000,00	Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Belut	Nilai Produksi	132.007.200,00	Rp./Tahun	78.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan Lainnya	Nilai Produksi	686.437.440,00	Rp./Tahun	405.600,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Burung	Nilai Produksi	32.155.600,00	Rp./Tahun	19.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	6.646.208.000,00	Rp./Tahun	3.927.090,52	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Barnu 16000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	111.207.197,82	Rp./Tahun	65.709,76	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	228.918.255,00	Rp./Tahun	135.262,50	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9017.5/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	205.203.500,00	Rp./Tahun	121.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisan	Nilai Barang Pengganti	101.544.000,00	Rp./Tahun	60.000,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Benih Bakau
		Total Nilai		19.862.281.892,82	Rp./Tahun					
5	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Subang,Desa Muara Kecamatan Blanakan (dari satuan ukur Tambak Tumpangsari)									
		Nilai Potensi Kayu	Nilai Produksi	384.459.075,00	Rp./Tahun	1.072.500,00	Rp/Ha/Tahun		Yuana Dwi Handayani, 2004, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Hutan Mangrove Menjadi Tambak Tumpangsari (studi Kasus: Desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang	Luas Mangrove 358.47 Ha
		Nilai Ranting Kayu	Nilai Produksi	407.062.759,32	Rp./Tahun	1.135.556,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Windu	Nilai Produksi	3.548.853.000,00	Rp./Tahun	9.900.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Bandeng	Nilai Produksi	1.461.213.337,50	Rp./Tahun	4.076.250,00	Rp/Ha/Tahun			

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Nilai Penangkapan Udang	Nilai Produksi	1.157.947.717,50	Rp./Tahun	3.230.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Benur	Nilai Produksi	228.524.625,00	Rp./Tahun	637.500,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Nener	Nilai Produksi	141.595.650,00	Rp./Tahun	395.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	172.065.600,00	Rp./Tahun	480.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ular	Nilai Produksi	23.659.020,00	Rp./Tahun	66.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Belut	Nilai Produksi	91.284.385,50	Rp./Tahun	254.650,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	1.177.573.950,00	Rp./Tahun	3.285.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	2.081.940.000,00	Rp./Tahun	5.807.850,03	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 5000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4,153,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	2.082.005.145,40	Rp./Tahun	5.808.031,76	Rp/Ha/Tahun			Nilai Pakan Udang Rp 2000/kg
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	45.570.499,00	Rp./Tahun	127.125,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8450/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	571.786.147,00	Rp./Tahun	1.595.073,92	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisian	Nilai Barang Pengganti	1.344.262,50	Rp./Tahun	3.750,00	Rp/Ha/Tahun			Pembentahan bakau
		Total Nilai		13.576.885.173,72	Rp./Tahun					
6	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Jawa Barat, Ciamis									
		Nilai Penggarap Nipah	Nilai Produksi	70.000.000,00	Rp./Tahun	10.000.000,00	Rp/Ha/Tahun		Dian Sukmawan, 2004, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Penilaian Ekonomi Manfaat Hutan Mangrove di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Luas Mangrove 7 Ha
		Nilai Pemancingan Ikan	Nilai Produksi	80.640.000,00	Rp./Tahun	11.520.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penangkapan Ikan	Nilai Produksi	26.880.000,00	Rp./Tahun	3.840.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Tambak Udang Vaname	Nilai Produksi	2.400.000.000,00	Rp./Tahun	800.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Udang Vaname 3 Ha
		Nilai Tambak Udang Windu	Nilai Produksi	2.000.000.000,00	Rp./Tahun	1.000.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Udang Windu 2 Ha
		Nilai Tambak Kepiting	Nilai Produksi	45.000.000,00	Rp./Tahun	22.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Tambak Kepiting 2 Ha
		Nilai Sawah	Nilai Produksi	30.780.000,00	Rp./Tahun	12.312.000,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Sawah 2,5 Ha
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	41.638.800,00	Rp./Tahun	5.948.400,00	Rp/Ha/Tahun			Panjang Pantai Baru 100 m, Aprilwati (2002) biaya Rp.4,163,880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	293.211,65	Rp./Tahun	41.887,38	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyedia Atap Rumah	Nilai Produksi	910.000,00	Rp./Tahun	130.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penerimaan Sewa Lahan Nipah	Nilai Produksi	15.434.300,00	Rp./Tahun	2.204.900,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	947.625,00	Rp./Tahun	135.375,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9025/US\$
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	41.800.500,00	Rp./Tahun	5.971.500,00	Rp/Ha/Tahun			
	Total Nilai			4.754.324.436,65	Rp./Tahun					

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
7	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Muara Angke, Jakarta									
	Nilai Ikan Bandeng	Nilai Produksi		488.000.000,00	Rp./Tahun	7.450.382,00	Rp/Ha/Tahun		Teguh Suryono, 2006, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Penilaian Ekonomi Lingkungan Terhadap Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Pemukiman (Studi kasus di Hutan Angke Kapuk Jakarta Utara)	
	Nilai Ikan Mujair	Nilai Produksi		5.600.000,00	Rp./Tahun	89.600,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Benih Bandeng	Nilai Produksi		133.330.000,00	Rp./Tahun	2.978.776,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Cacing Laut	Nilai Produksi		87.600.000,00	Rp./Tahun	1.957.105,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pemancingan	Nilai Produksi		4.344.000,00	Rp./Tahun	97.051,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi		136.383.200,00	Rp./Tahun	2.605.965,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer		2.277.887.294,00	Rp./Tahun	50.891.137,00	Rp/Ha/Tahun		Panjang Pantai 5000 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun	
	Nilai Penyerap Carbon	Benefit Transfer		103.722.011,00	Rp./Tahun	1.486.415,00	Rp/Ha/Tahun		Hilmi (2003) potensi karbon untuk Rhizophora mucronata = 3258.34 kg/ha- 3957.44kg/ha	
	Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengganti		8.164.026,00	Rp./Tahun	45.328,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer		115.744.089,00	Rp./Tahun	642.630,00	Rp/Ha/Tahun		Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9300/US\$	
	Nilai Pewarisan	Nilai Produksi		35.000.000,00	Rp./Tahun	780.500,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Keberadaan	CVM (WTP)		791.311.418,20	Rp./Tahun	4.393.489,00	Rp/Ha/Tahun		Nilai dari Produksi Pembibitan Mangrove	
	Total Nilai			4.187.086.038,20	Rp./Tahun					
8	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove dalam Perubahan institusi untuk mengatasi kerusakan, Prov Jawa Barat, Kabupaten Bekasi									
	Nilai Tambak	Nilai Produksi		212.250.835,00	Rp./Tahun	1.199.157,26	Rp/Ha/Tahun		Suhaeri, 2005, Disertasi Sekolah Pascasarjana, Perubahan Institusi untuk Mengatasi Kerusakan Hutan Mangrove (Studi Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat)	Luas Tambak 177 Ha
	Nilai Tempat Pemijahan	Nilai Produksi		1.474.215.672,00	Rp./Tahun	140.654,00	Rp/Ha/Tahun			Luas Mangrove 10481.15 Ha
	Nilai Kayu	Nilai Produksi		5.111.093.898,00	Rp./Tahun	487.646,29	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pengendali Banjir dan Badai	Nilai Kerugian Akibat Banjir		66.019.898.902,00	Rp./Tahun	6.298.917,48	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Air	Nilai Produksi		13.519.417.500,00	Rp./Tahun	1.289.879,21	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Karbon	Benefit Transfer		153.679.861.875,00	Rp./Tahun	14.662.500,00	Rp/Ha/Tahun			
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer		64.702.339.991,00	Rp./Tahun	6.173.210,00	Rp/Ha/Tahun		Dahuri (1995) Penahan Abrasi Rp.US\$ 726.26/Ha/Tahun (setara Rp.6173210/Ha/Tahun)	

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
		Nilai Konservasi	CVM (WTA)	220.256.053.307,00	Rp./Tahun	21.014.493,00	Rp/Ha/Tahun			Kesediaan Masyarakat menjual tambaknya
		Total Nilai		524.975.131.980,00	Rp./Tahun					
E	EKOSISTEM HUTAN MANGROVE KALIMANTAN									
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kalimantan Barat, Batu Ampar Pontianak									
		Nilai Kayu	Nilai Produksi	42.481.912.300,00	Rp./Tahun	3.056.252,68	Rp/Ha/Tahun		Salmah Aprilwati, 2001, Tesis Sekolah Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Kawasan Batu Ampar Kabupaten Pontianak	Luas = 13900 Ha
		Nilai Arang	Nilai Produksi	855.141.900,00	Rp./Tahun	61.521,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Daun Nipah	Nilai Produksi	81.330.832,00	Rp./Tahun	5.851,14	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Bibit Mangrove	Nilai Produksi	79.695.300,00	Rp./Tahun	5.733,47	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Ikan	Nilai Produksi	1.036.258.900,00	Rp./Tahun	74.551,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang	Nilai Produksi	7.701.906.600,00	Rp./Tahun	554.094,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	2.091.449.600,00	Rp./Tahun	150.464,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penahan Abrasi	Biaya Perbaikan	56.812.885.800,00	Rp./Tahun	4.087.257,97	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pakan Alami	Biaya Produksi	69.269.283.228,00	Rp./Tahun	4.983.401,67	Rp/Ha/Tahun		Pendekatan menggunakan produksi kepiting dan pakan kepiting secara alami	
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	1.720.125.000,00	Rp./Tahun	123.750,00	Rp/Ha/Tahun		Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.8250/US\$	
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	83.068.717.803,00	Rp./Tahun	5.976.166,75	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		265.198.707.263,00	Rp./Tahun					
2	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Barru									
		Nilai Tambak Ikan Bandeng	Nilai Produksi	433.337.249,90	Rp./Tahun	69.556.540,91	Rp/Ha/Tahun	Nilai Ekonomi Ekosistem Mangrove Kecamatan Barru Kabupaten Barru		Luas Hutan Mangrove = 6.23 Ha
		Nilai Kayu Bangunan	Nilai Produksi	313.185,98	Rp./Tahun	50.270,62	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	975.004,16	Rp./Tahun	156.501,47	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai bibit alam (Nener)	Nilai Produksi	1.032.004,02	Rp./Tahun	165.650,73	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	121.899.578,40	Rp./Tahun	19.566.545,49	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kerang	Nilai Produksi	2.460.850,00	Rp./Tahun	395.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Bibit Bakau	Nilai Produksi	1.889.247,50	Rp./Tahun	303.250,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer	8.955.765.280,00	Rp./Tahun	143.752.251,00	Rp/Ha/Tahun		Panjang Pantai Barru 2156 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 11m, T=2.5m, ketahanan= 10 tahun	
		Nilai Pakan Alami	Nilai Barang Pengganti	7.916.290.852,00	Rp./Tahun	23.097.576,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	870.486,75	Rp./Tahun	139.725,00	Rp/Ha/Tahun		Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9315/US\$	
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP/WTA)	21.805.000,00	Rp./Tahun	3.500.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		17.456.638.738,71	Rp./Tahun					

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA									
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI
F	HUTAN MANGROVE SUMATERA								ABSTRAKSI
1	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Kabupaten Bangka, Kecamatan Merawang								
	Nilai Bibit Bakau	Nilai Produksi		14.512.095,26	Rp./Tahun	1.160.967,62	Rp/Ha/Tahun		Ferawati Maedar, 2008, Tesis Sekolah Pascasarjana, Analisis Ekonomi Pengelolaan Mangrove di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
	Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi		28.699.499,17	Rp./Tahun	2.295.959,93	Rp/Ha/Tahun		Luas Mangrove = 12.50 Ha
	Nilai Kepiting	Nilai Produksi		226.530.887,13	Rp./Tahun	18.122.470,97	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Tambak Udang	Nilai Produksi		343.962,77	Rp./Tahun	2,00	Rp/Ha/Tahun		Luas= 13,5 Ha
	Nilai Tambak Ikan Bandeng+Udang	Nilai Produksi		9.273.166,37	Rp./Tahun	441.579,35	Rp/Ha/Tahun		Luas= 21 Ha
	Nilai Tambak Ikan Bandeng	Nilai Produksi		285.889.510,79	Rp./Tahun	2.552.584,92	Rp/Ha/Tahun		Luas= 112 Ha
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer		97.624.404.682,00	Rp./Tahun	804.419.946,30	Rp/Ha/Tahun		Panjang Pantai Baru 23501,98 m, Aprilwati (2001) biaya Rp.4.153.880 P = 1m, L= 11m, T=2,5m, ketahanan= 10 tahun
	Nilai Penyedia Pakan Alami	Nilai Produksi		3.031.000.000,00	Rp./Tahun	242.480.000,00	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Biodiversity	Benefit Transfer		1.756.125,00	Rp./Tahun	140.490,00	Rp/Ha/Tahun		Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.9366/US\$
	Nilai Keberadaan	CVM (WTP)		109.687.500,00	Rp./Tahun	8.775.000,00	Rp/Ha/Tahun		
2	Total Niai								
2	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Lampung, Kabupaten Lampung Timur								
	Nilai Kayu Log	Nilai Produksi		9.994.521,00	Rp./Tahun	136.900,00	Rp/Ha/Tahun		Rahadi Ariyanto, 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana, Model Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove di Kabupaten Lampung Timur
	Nilai Kayu Bakar (Ranting)	Nilai Produksi		193.086.268,00	Rp./Tahun	2.644.799,99	Rp/Ha/Tahun		Luas Mangrove = 73.006 Ha
	Nilai Ikan	Nilai Produksi		543.602.676,00	Rp./Tahun	7.446.000,00	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Udang	Nilai Produksi		431.684.478,00	Rp./Tahun	5.913.000,00	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Kepiting	Nilai Produksi		465.259.937,00	Rp./Tahun	6.372.899,99	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Kerang	Nilai Produksi		207.848.082,00	Rp./Tahun	2.847.000,00	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Belut	Nilai Produksi		274.999.000,00	Rp./Tahun	3.766.799,99	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Ular	Nilai Produksi		399.707.850,00	Rp./Tahun	5.475.000,00	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Burung	Nilai Produksi		97.769.635,00	Rp./Tahun	1.339.200,00	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Sayuran	Nilai Produksi		56.769.446,00	Rp./Tahun	777.599,73	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Bahan Obat/Makanan	Nilai Produksi		525.906.021,00	Rp./Tahun	7.203.599,99	Rp/Ha/Tahun		
	Nilai Fungsi Biologi	Nilai Barang Pengganti		1.093.018.376,00	Rp./Tahun	14.971.623,92	Rp/Ha/Tahun		Hasil Tangkapan Ikan
	Nilai Pemecah Gelombang	Benefit Transfer		5.999.999.600,00	Rp./Tahun	82.185.020,41	Rp/Ha/Tahun		Dahuri (1995) biaya Rp.3000000 P=1m, L=5m, T=6m, ketahanan 10 tahun kurs Rupiah Rp.2800, saat penelitian Kurs Rupiah 10000 jadi biaya sebesar Rp.10714285. Panjang Pantai 5600 m

VALUASI EKONOMI BEBERAPA EKOSISTEM DI INDONESIA										
NO	SUMBERDAYA ALAM	Variable Ukur	METODE PENGUKURAN	Nilai Total	SATUAN	NILAI SATUAN	SATUAN	Lokas Sample	SUMBER/REFERENSI	ABSTRAKSI
3		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	10.950.900,00	Rp./Tahun	150.000,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1992)= US\$ 1500/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp 10000
		Nilai Keberadaan	CVM (WTP)	459.937.800,00	Rp./Tahun	6.300.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pewarisian	CVM (WTP)	735.900.480,00	Rp./Tahun	10.080.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		11.506.435.070,00	Rp./Tahun					
3	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove Sumatera Selatan, Kecamatan Tulung Selatan									
		Nilai Kayu Arang	Nilai Produksi	2.015.000,00	Rp./Tahun	244,78	Rp/Ha/Tahun	Maryadi, 1998, Tesis Program Pascasarjana IPB, Analisis Ekonomi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Mangrove Untuk Berbagai Macam Kegiatan Pertanian di Pesisir Pantai Timur Kecamatan Tulung Selatan Provinsi Sumatera Selatan	Luas Mangrove 8232 Ha	
		Nilai Kayu Bakar	Nilai Produksi	1.273.800.000,00	Rp./Tahun	154.737,61	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Nipah	Nilai Produksi	2.798.000,00	Rp./Tahun	339,89	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Udang	Nilai Produksi	1.868.750.000,00	Rp./Tahun	227.010,45	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kepiting	Nilai Produksi	10.080.000,00	Rp./Tahun	1.224,49	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penjaga Siklus Makanan	Nilai Barang Pengganti	28.252.224.000,00	Rp./Tahun	3.432.000,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Kompos
		Nilai Flora dan Fauna Langka	Nilai Barang Pengganti	52.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Kunjungan wisatawan
		Nilai Manfaat Opsiional (Option Values)	Nilai Produksi	250.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp/Ha/Tahun			Nilai Produksi Bibit Bakau
		Nilai Kebanggaan (Bequest Values)	Nilai Barang Pengganti	800.000.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp/Ha/Tahun			Biaya Pembuatan Jalan Sepanjang 80 km
		Manfaat Keberadaan	CVM (WTP)	33.956.000,00	Rp./Tahun	6.316,00	Rp/Ha/Tahun			
		Total Nilai		32.545.623.000,00	Rp./Tahun					
4	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove terhadap Nilai udang di Kepulauan Riau, Pulau Belakang Kota Batam									
		Nilai Tegakan Pohon	Market Price	433.160.000,00	Rp./Tahun	3.920.000,00	Rp/Ha/Tahun	Peggy Ratna Marlianingrum, 2007, Tesis Sekolah Pascasarjana, Analisis Ekonomi Keterkaitan Sumberdaya Mangrove dan Udang di Pulau Belakang Padang Kota Batam Kepulauan Riau	Luas Mangrove 110,5 Ha	
		Nilai Arang Kayu	Market Price	500.000.000,00	Rp./Tahun	4.524.886,88	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Kayu Bakar	Market Price	696.150.000,00	Rp./Tahun	6.300.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Perikanan Mangrove (penyedia umpan)	Market Price	3.488.010.000,00	Rp./Tahun	31.565.701,36	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pendidikan	Surrogate Market Price	10.860.000,00	Rp./Tahun	98.280,54	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Rekreasi	Surrogate Market Price	81.000.000,00	Rp./Tahun	733.031,67	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Pemecah Gelombang	Replacemet Cost	861.000.000,00	Rp./Tahun	7.791.855,20	Rp/Ha/Tahun			1 m x 10 m x 2,5 m daya tahan 10 tahun biaya Rp.4100000, panjang pantai 6,3 kilometer
		Nilai Tempat Pemijahan	Production Function Approach	318.630.000,00	Rp./Tahun	2.883.529,41	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Penyimpan Karbon	Damage Avoided Cost	221.000.000,00	Rp./Tahun	2.000.000,00	Rp/Ha/Tahun			
		Nilai Biodiversity	Benefit Transfer	16.575.000,00	Rp./Tahun	150.000,00	Rp/Ha/Tahun			Ruitenbeek (1991) = US\$ 15/Ha/Tahun, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar = Rp.10000/US\$
Total Nilai				6.626.385.000,00	Rp./Tahun					

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data S/D 31 Desember 2016

DUKUNGAN MANAJEMEN



**SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**TABEL IX.1 REKAPITULASI SEBARAN PNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH**

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN														KET	
		IV			III			II			I			JUMLAH			
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Sekretariat Ditjen. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	8	3	11	37	30	67	5	3	8	1	0	1	51	36	87	
II	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	11	3	14	53	37	90	3	3	6	0	0	0	67	43	110	
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	6	4	10	29	22	51	7	4	11	0	0	0	42	30	72	
IV	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	7	4	11	41	29	70	7	7	14	2	0	2	57	40	97	
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5	8	13	19	9	28	3	1	4	0	0	0	27	18	45	
VI	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4	4	8	17	8	25	2	2	4	0	0	0	23	14	37	
	JUMLAH	41	26	67	196	135	331	27	20	47	3	0	3	267	181	448	
1.	BPKH Wil. I Medan	1	0	1	41	13	54	14	6	20	0	0	0	56	19	75	
2.	BPKH Wil. II Palembang	1	0	1	36	13	49	10	5	15	0	0	0	47	18	65	
3.	BPKH Wil. III Pontianak	1	1	2	35	14	49	3	2	5	1	0	1	40	17	57	
4.	BPKH Wil. IV Samarinda	1	0	1	37	14	51	11	3	14	1	0	1	50	17	67	
5.	BPKH Wil. V Banjarbaru	0	1	1	40	17	57	10	5	15	1	0	1	51	23	74	
6.	BPKH Wil. VI Manado	2	1	3	30	13	43	10	1	11	0	0	0	42	15	57	
7.	BPKH Wil. VII Makasar	1	3	4	35	20	55	8	6	14	0	0	0	44	29	73	
8.	BPKH Wil. VIII Denpasar	2	0	2	29	12	41	12	5	17	0	0	0	43	17	60	
9.	BPKH Wil. IX Ambon	2	0	2	26	6	32	16	2	18	0	0	0	44	8	52	
10.	BPKH Wil. X Irian Jaya	1	0	1	30	8	38	14	2	16	0	0	0	45	10	55	
11.	BPKH Wil. XI Yogyakarta	4	6	10	26	28	54	9	4	13	1	0	1	40	38	78	
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	2	0	2	12	6	18	8	5	13	0	0	0	22	11	33	

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN														KET	
		IV			III			II			I			JUMLAH			
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	1	0	1	12	3	15	7	8	15	0	0	0	20	11	31	
14	BPKH Wil. XIV Kupang	1	0	1	18	8	26	6	5	11	0	0	0	25	13	38	
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	4	0	4	9	4	13	8	0	8	0	0	0	21	4	25	
16	BPKH Wil. XVI Palu	3	0	3	17	8	25	8	2	10	0	0	0	28	10	38	
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	1	0	1	22	1	23	12	1	13	0	0	0	35	2	37	
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	1	0	1	10	6	16	1	2	3	0	0	0	12	8	20	
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	1	0	1	19	2	21	5	2	7	0	0	0	25	4	29	
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	2	0	2	27	9	36	5	1	6	1	0	1	35	10	45	
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	2	1	3	19	2	21	2	1	3	0	0	0	23	4	27	
22	BPKH Wil. XXII Kendari	1	0	1	13	5	18	2	1	3	0	0	0	16	6	22	
	Jumlah	35	13	48	543	212	755	181	69	250	5	0	5	764	294	1058	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d Desember 2016

Keterangan:

IV L = Gol. IV Laki-laki

IV P = Gol. IV Perempuan

III L = Gol. III Laki-laki

III P = Gol. III Perempuan

II L = Gol. II Laki-laki

II P = Gol. II Perempuan

I L = Gol. I Laki-laki

I P = Gol. I Perempuan

TABEL IX.2 SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SMP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.	
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		L
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A. PUSAT																												
I	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	PNS	1	1	2	10	3	13	21	23	44	3	6	9	14	3	17	1	0	1	1	0	1	87	51	36		
		Upah	0	0	0	0	0	0	5	0	5	1	0	1	8	1	9	0		0	0		0	15	14	1		
II	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	PNS	0	0	0	12	7	19	29	19	48	6	8	14	19	7	26	0	2	2	1	0	1	110	67	43		
		Upah	0	0	0	0	1	1	5	2	7	0	1	1	3	1	4	0	0	0	0		0	13	8	5		
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	PNS	3	0	3	7	8	15	16	10	26	2	4	6	13	8	21	0	0	0	1	0	1	72	42	30		
		Upah	0		0	0	0	0	2	4	6	0	0	0	2	0	2	0		0	0		0	8	4	4		
IV	Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PNS	0	0	0	8	8	16	19	11	30	3	6	9	24	15	39	1	0	1	2	0	2	97	57	40		
		Upah	0		0	0		0	6	3	9	4	0	4	13	0	13	0		0	0		0	26	23	3		
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	PNS	0	2	2	7	5	12	9	10	19	2	1	3	8	0	8	1	0	1	0	0	0	45	27	18		
		Upah	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0		0	4	2	2		
VI	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	PNS	0	0	0	7	4	11	8	9	17	1	0	1	6	1	7	1	0	1	0	0	0	37	23	14		
		Upah	0		0	1	0	1	1	2	3	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0		0	8	4	4		
JUMLAH		PNS	4	3	7	51	35	86	102	82	184	17	25	42	84	34	118	4	2	6	5	0	5	448	267	181		
TOTAL PNS+UPAH		Upah	0	0	0	1	0	1	19	12	31	6	2	8	29	3	32	0	0	0	0	0	0	72	55	19		
B. DAERAH																												
I	BPKH Wil. I Medan	PNS	0	0	0	4	1	5	16	0	16	3	5	8	31	13	44	2	0	2	0	0	0	75	56	19		
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	3	1	4	11	9	2			
II	BPKH Wil. II Palembang	PNS	0	0	0	1	0	1	9	4	13	6	5	11	30	9	39	1	0	1	0	0	0	65	47	18		
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	6	1	7	0	0	0	1	0	1	10	9	1		

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SMP			SD			TOTAL	JENS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
III	BPKH Wil. III Pontianak	PNS	0	0	0	5	4	9	7	5	12	3	2	5	23	6	29	1	0	1	1	0	1	57	40	17	
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	0	1	11	2	13	1	0	1	0	0	0	18	14	4	
IV	BPKH Wil. IV Samarinda	PNS	0	0	0	3	0	3	15	10	25	4	2	6	27	5	32	0	0	0	1	0	1	67	50	17	
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	13	3	16	0	0	0	0	0	0	18	15	3	
V	BPKH Wil. V Banjarbaru	PNS	0	0	0	5	3	8	11	4	15	1	2	3	33	14	47	0	0	0	1	0	1	74	51	23	
		Upah	0	0	0	0	0	0	3	1	4	2	1	3	9	1	10	1	0	1	2	0	2	20	17	3	
VI	BPKH Wil. VI Manado	PNS	0	0	0	8	1	9	9	7	16	0	1	1	25	6	31	0	0	0	0	0	0	57	42	15	
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0	6	3	9	0	0	0	0	0	0	16	10	6	
VII	BPKH Wil. VII Makasar	PNS	0	0	0	2	5	7	18	9	27	4	2	6	19	13	32	0	0	0	1	0	1	73	44	29	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	0	8	2	10	0	0	0	0	0	0	15	10	5	
VIII	BPKH Wil. VIII Denpasar	PNS	0	0	0	4	2	6	9	4	13	4	3	7	26	8	34	0	0	0	0	0	0	60	43	17	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	1	6	1	7	1	0	1	0	0	0	11	10	1	
IX	BPKH Wil. IX Ambon	PNS	0	0	0	2	0	2	11	4	15	3	1	4	28	3	31	0	0	0	0	0	0	52	44	8	
		Upah	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	11	3	14	0	0	0	0	0	0	17	14	3	
X	BPKH Wil. X Irian Jaya	PNS	0	0	0	3	0	3	17	4	21	6	2	8	19	4	23	0	0	0	0	0	0	55	45	10	
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	15	0	0	0	0	0	0	15	10	5	
XI	BPKH Wil. XI Yogyakarta	PNS	0	0	0	7	8	15	12	17	29	5	7	12	15	6	21	1	0	1	0	0	0	78	40	38	
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	1	11	1	0	1	0	0	0	13	12	1	
XII	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	PNS	1	0	1	1	0	1	7	3	10	3	8	11	10	0	10	0	0	0	0	0	0	33	22	11	
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	10	1	11	0	0	0	0	0	0	14	12	2	
XIII	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	PNS	0	0	0	3	1	4	7	1	8	7	7	14	3	2	5	0	0	0	0	0	0	31	20	11	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	4	6	3	1	4	10	2	12	0	0	0	0	0	0	22	15	7	
XIV	BPKH Wil. XIV Kupang	PNS	0	0	0	3	0	3	11	5	16	4	5	9	7	3	10	0	0	0	0	0	0	38	25	13	
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	2	6	2	0	2	10	0	10	0	0	0	0	0	0	18	16	2	
XV	BPKH Wil. XV Gorontalo	PNS	0	0	0	4	1	5	6	2	8	5	1	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	25	21	4	
		Upah	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0	14	4	18	0	0	0	0	0	0	25	18	7	
XVI	BPKH Wil. XVI Palu	PNS	0	0	0	6	0	6	12	5	17	4	5	9	6	0	6	0	0	0	0	0	0	38	28	10	
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	1	14	2	16	0	0	0	0	0	0	21	17	4	

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SMP			SD			TOTAL	JENS KELAMIN		KET.	
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
XVII	BPKH Wil. XVII Manokwari	PNS	0	0	0	2	0	2	15	1	16	3	1	4	14	0	14	0	0	0	1	0	1	37	35	2		
		Upah	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1	1	9	2	11	2	0	2	1	0	1	22	12	10		
XVIII	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	PNS	0	0	0	4	1	5	6	5	11	0	1	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	20	12	8		
		Upah	0	0	0	0	0	0	5	1	6	0	0	0	9	2	11	0	0	0	0	0	0	17	14	3		
XIX	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	PNS	0	0	0	5	0	5	13	2	15	1	1	2	6	1	7	0	0	0	0	0	0	29	25	4		
		Upah	0	0	0	0	0	0	3	3	6	2	0	2	9	3	12	0	0	0	0	0	0	20	14	6		
XX	BPKH Wil. XX Bandar lampung	PNS	0	0	0	4	2	6	15	4	19	1	0	1	12	4	16	1	0	1	2	0	2	45	35	10		
		Upah	0	0	0	0	0	0	1	4	5	2	1	3	6	1	7	0	0	0	0	0	0	15	9	6		
XXI	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	PNS	0	0	0	3	1	4	15	1	16	1	0	1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	27	23	4		
		Upah	0	0	0	0	0	0	5	2	7	1	0	1	10	5	15	2	0	2	0	0	0	25	18	7		
XXII	BPKH Wil. XXII Kendari	PNS	0	0	0	3	0	3	12	5	17	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	22	16	6		
		Upah	0	0	0	0	0	0	2	6	8	1	1	2	10	0	10	0	0	0	0	0	0	20	13	7		
JUMLAH		PNS	1	0	1	82	30	112	253	102	355	68	61	129	347	101	448	6	0	6	7	0	7	1058	764	294		
		Upah	0	0	0	0	0	0	47	44	91	19	6	25	207	44	251	8	0	8	7	1	8	383	288	95		
TOTAL PNS + UPAH			1	0	1	82	30	112	300	146	446	87	67	154	554	145	699	14	0	14	14	1	15	1441	1052	389		

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d Desember 2016

TABEL IX.3. PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN PUSAT DAN DAERAH

No	Unit Kerja	Perencana Ahli	JLH. PERENCANA	SURTA				JLH. SURTA	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)				JLH. PEH	PRANATA KOMPUTER				JLH. PRANATA KOMPUTER
				Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I PUSAT																		
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	4	4	1	0	2	0	3	5	0	7	3	15	0	0	3	0	3
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatausahaan Kawasan Hutan	0	0	1	0	2	0	3	7	0	6	1	14	0	0	0	0	0
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	0	0	0	0	1	0	1	2	0	5	3	10	0	0	0	0	0
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	6	6	0	0	1	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
JUMLAH PUSAT		10	10	2	0	6	0	8	17	0	18	7	42	1	0	6	1	8
II BPKH																		
1	BPKH Wil. I Medan	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	7	1	0	0	0	1
2	BPKH Wil. II Palembang	0	0	4	0	0	0	4	6	0	1	0	7	1	0	0	0	1
3	BPKH Wil. III Pontianak	0	0	0	0	0	0	0	7	0	4	1	12	0	0	0	0	0
4	BPKH Wil. IV Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	8	0	11	2	21	0	0	0	0	0
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	0	0	0	0	0	0	0	5	1	7	3	16	0	0	0	0	0
6	BPKH Wil. VI Manado	0	0	0	0	1	1	2	6	0	5	1	12	0	0	1	0	1
7	BPKH Wil. VII Makassar	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	1	10	0	0	0	0	0
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	0	0	4	0	3	0	7	9	0	5	1	15	0	0	0	0	0
9	BPKH Wil. IX Amboi	0	0	0	0	0	0	0	9	0	2	1	12	0	0	0	0	0
10	BPKH Wil. X Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	14	0	1	1	16	0	0	0	0	0
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	0	0	5	0	0	0	5	5	1	10	0	16	0	0	0	0	0
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	0	0	0	0	0	0	0	9	1	2	0	12	0	0	0	0	0
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	0	0	1	0	0	0	1	11	0	5	0	16	0	0	0	0	0
14	BPKH Wil. XIV Kupang	0	0	0	0	4	0	4	11	0	4	0	15	0	0	0	1	1
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	8	0	2	0	10	0	0	0	0	0
16	BPKH Wil. XVI Palu	0	0	0	0	0	0	0	11	0	2	1	14	0	0	0	0	0
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	0	12	0	0	0	0	0
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	2	12	0	0	0	0	0
20	BPKH Wil. XX Lampung	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	4	8	0	0	0	0	0
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	9	0	0	0	0	0
22	BPKH Wil. XXII Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	14	0	9	1	24	144	4	80	31	259	2	0	1	1	4
JUMLAH PUSAT + BPKH		10	10	16	0	15	1	32	161	4	98	38	301	3	0	7	2	12

No	Unit Kerja	ANALIS KEPEG		JLH. ANALIS KEPEG.	ARSIPARIS		JLH. ARSIPARIS	PRANATA HUMAS	JUMLAH PRANATA HUMAS	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			JUMLAH PENGELOLA PENGADAAN BRG/JASA	TOTAL
		Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil					CALON AHLI	AHLI	CALON AHLI		
				21	22	23	24	25	26	27	28	31	32	33	34
I PUSAT															
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	2	0	2	2	0	2	1	1	1	0	0	0	0	11
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	28
3	Direktorat Pengukuran dan Penetapan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	18
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
JUMLAH PUSAT		2	0	2	5	0	5	1	1	1	1	0	1	1	78
II BPKH															
1	BPKH Wil. I Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
2	BPKH Wil. II Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	13
3	BPKH Wil. III Pontianak	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	14
4	BPKH Wil. IV Samarinda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
5	BPKH Wil. V Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
6	BPKH Wil. VI Manado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	16
7	BPKH Wil. VII Makassar	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	11
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
9	BPKH Wil. IX Ambon	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	14
10	BPKH Wil. X Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	1	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	25
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18
14	BPKH Wil. XIV Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	12
16	BPKH Wil. XVI Palu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	15
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
20	BPKH Wil. XX Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10
22	BPKH Wil. XXII Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUMLAH		1	0	1	8	0	8	0	0	0	8	0	8	8	304
JUMLAH PUSAT + BPKH		3	0	3	13	0	13	1	1	1	9	0	9	9	382

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data S/D 31 Desember 2016

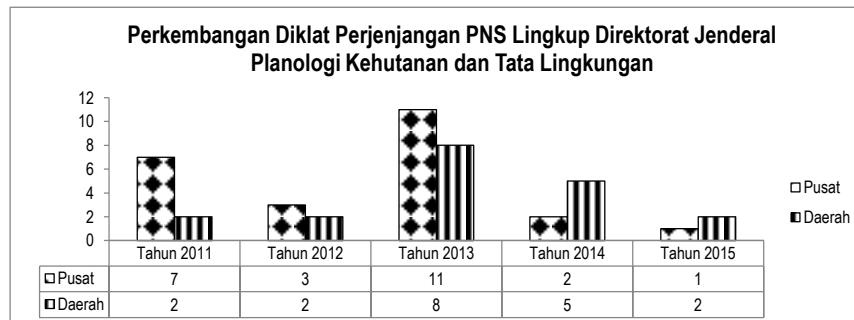
TABEL IX.4. PERKEMBANGAN DIKLAT PENJENJANGAN PNS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO	UNIT KERJA	DIKLAT PENJENJANGAN (orang)																							
		TAHUN 2012						TAHUN 2013						TAHUN 2014						TAHUN 2015					
		LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM	PIM TK.IV JML	LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM	PIM TK.IV JML	LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM	PIM TK.IV JML	LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM	PIM TK.IV JML	LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM
A. PUSAT																									
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	Direktorat Perencanaan Kawasan Kehutanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Direktorat Pengukuran, Penetapanan, Tenurial Kawasan Hutan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terdapat perubahan Struktur Organisasi pada lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pusat pada tahun 2015																									
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Direktorat Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Direktorat Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan		0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH A		1	0	0	0	2	3	0	0	1	7	3	11	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	2	3
B. DAERAH																									
1	BPKH WILAYAH I MEDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BPKH WILAYAH III PONTIANAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BPKH WILAYAH IV SAMARINDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BPKH WILAYAH V BANJARBARU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	BPKH WILAYAH VI MANADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BPKH WILAYAH VII MAKASSAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BPKH WILAYAH VIII DENPASAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BPKH WILAYAH IX AMBON	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	BPKH WILAYAH X PAPUA	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
11	BPKH WILAYAH XI YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BPKH WILAYAH XII TANJUNG PINANG	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	BPKH WILAYAH XIII PANGKAL PINANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BPKH WILAYAH XIV KUPANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0

NO	UNIT KERJA	DIKLAT PENJENJANGAN (orang)																							
		TAHUN 2012						TAHUN 2013						TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016			
		LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM	PIM TK.IV JML	LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM	PIM TK.IV JML	LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM	PIM TK.IV JML	LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM	PIM TK.IV JML	LEMHANA S	SPATI SPAMEN	PIM TK.II SPAMA	PIM TK.III ADUM
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	BPKH WILAYAH XX LAMPUNG							0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI							0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH B	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4	4	8	0	0	0	2	3	5	0	0	0	2	5	7
	JUMLAH A+B	1	0	0	0	2	5	0	0	1	11	7	19	0	0	0	3	4	7	0	0	1	2	7	10

Penjelasan Grafik:

Berdasarkan grafik di samping dapat dijelaskan bahwa terdapat dikarenakan anggaran untuk diklat pada Pusdiklat Kehutanan terbatas, maka pelaksanaan Diklatpim per tahun terbatas juga. (Tahun 2014, Pusdiklat hanya mempunyai anggaran untuk Diklatpim III dan IV masing-masing satu angkatan)



Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data S/D 31 Desember 2015

TABEL IX.5. PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

I. UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UU Nomor 41	1999	Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
2	UU Nomor 19	2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Masih berlaku

II. PERATURAN PEMERINTAH

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PP. Nomor 44	2004	Perencanaan Kehutanan	Masih berlaku
2	PP. Nomor 2	2008	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Dephut	Sudah tidak berlaku
3	PP. Nomor 10	2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
4	PP. Nomor 24	2010	Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
5	PP. Nomor 60	2012	Perubahan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
6	PP. Nomor 61	2012	Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
7	PP. Nomor 33	2014	Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	Masih berlaku
8	PP. Nomor 104	2015	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
9	PP. Nomor 105	2015	Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
10	PP. Nomor 46	2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Masih berlaku

III. PERATURAN PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perpres Nomor 28	2011	Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah	Masih berlaku

IV. INSTRUKSI PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Instruksi Presiden Nomor 10	2011	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
2	Instruksi Presiden Nomor 6	2013	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
3	Instruksi Presiden Nomor 8	2015	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Masih berlaku

V. PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	683/Kpts-II/1981	1981	Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi	Masih berlaku
2	364/Kpts-II/1990;	1990	Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian hak	Masih berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
	519/Kpts/HK.050/7/1990; 23-VII-1990		Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian	
3	418/Kpts-II/1993	1993	Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
4	292/Kpts-II/1995	1995	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	250/Kpts-II/1996	1996	Perubahan Kepmenhut No.418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
6	613/Kpts-II/1997	1997	Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Sudah tidak berlaku
7	333/Kpts-II/1999	1999	Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan	Sudah tidak berlaku
8	32/Kpts-II/2001	2001	Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	70/Kpts-II/2001	2001	Penetapan Kawasan Lindung Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	146/Kpts-II/2003	2003	Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
11	230/Kpts-II/2003	2003	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku
12	P.31/Menhet-II/2005	2005	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan	Sudah tidak berlaku
13	P.28/Menhet-II/2006	2006	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
14	P.66/Menhet-II/2006	2006	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Huta	Sudah tidak berlaku
15	P.67/Menhet-II/2006	2006	Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan	Masih berlaku
16	P.26/Menhet-II/2007	2007	Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
17	P.62/Kpts-II/2007	2007	Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/2007 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	23/MEN/XI/2007; P.52/Menhet-II/2008	2008	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi	Sudah tidak berlaku
19	P.43/Menhet-II/2008	2008	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
20	P.56/Menhet-II/2008	2008	Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
21	P.38/Menhet-II/2008	2008	Perubahan Keempat Atas Kepmenhut No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
22	P.53/Menhet-II/2008	2008	Optimalisasi Peruntukan Areal hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Masih berlaku
23	P.48/Menhet-II/2009	2009	Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000	Sudah tidak berlaku
24	P.50/Menhet-II/2009	2009	Penegasan Status dan Fungsi Kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
25	P.16/Menhet-II/2009	2009	Perubahan Kelima Atas Kepmenhut No. 292/Kpts-II/1995 tentang tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
26	P.6/Menhet-II/2009	2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Masih berlaku
27	P.28/Menhet-II/2009	2009	Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah	Sudah tidak berlaku
28	P.02/Menhet-II/2010	2010	Informasi Kehutanan	Masih berlaku
29	P.06/Menhet-II/2010	2010	Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Masih berlaku
30	P.32/Menhet-II/2010	2010	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
				perubahan
31	P.33/Menhet-II/2010	2010	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
32	P.34/Menhet-II/2010	2010	Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
33	P.36/Menhet-II/2010	2010	Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku dan ada perubahan
34	P.42/Menhet-II/2010	2010	Sistem Perencanaan Kehutanan	Masih berlaku
35	P.47/Menhet-II/2010	2010	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
36	P.17/Menhet-II/2011	2011	Perubahan Atas P.33/Menhet-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
37	P.18/Menhet-II/2011	2011	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
38	P.19/Menhet-II/2011	2011	Penataan Batas Areal Kerja izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
39	P.20/Menhet-II/2011	2011	Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
40	P.41/Menhet-II/2011	2011	Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
41	P.44/Menhet-II/2011	2011	Perubahan Kedua Atas P.33/Menhet-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
42	P.49/Menhet-II/2011	2011	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Masih berlaku
43	P.50/Menhet-II/2011	2011	Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
44	P.54/Menhet-II/2011	2011	Perubahan Atas P.41/Menhet-II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
45	P.38/Menhet-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhet-II/2012 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
46	P.44/Menhet-II/2012	2012	Pengukuhan Kawasan Hutan	Masih berlaku
47	P.41/Menhet-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhet-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Masih berlaku
48	P.14/Menhet-II/2013	2013	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhet-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
49	P.43/Menhet-II/2013	2013	Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Tujuan Khusus	Masih berlaku
50	P.46/Menhet-II/2013	2013	Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
51	P.47/Menhet-II/2013	2013	Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
52	P.62/Menhet-II/2013	2013	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhet-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan	Masih berlaku
53	P.16/Menhet-II/2014	2014	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
54	P.25/Menhet-II/2014	2014	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
55	P.27/Men hut-II/2014	2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Men hut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Masih berlaku
56	P.28/Men hut-II/2014	2014	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Men hut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
57	P.29/Men hut-II/2014	2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Men hut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
58	Peraturan Bersama Tiga Menteri dan Kepala BPN No. 79/2014, No. PB.3/men hut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014	2014	Tata Cara Penyelesaian Penggunaan Tanah di Dalam KH	Masih berlaku
59	P.16/MenLHK-II/2015	2015	Perubahan kedua atas Permen hut No.34/Men hut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Masih berlaku
60	P.50/Menlhk/Setjen/2016	2016	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Masih berlaku
61	P.51/Menlhk/Setjen/KUM. 1/12/2016	2016	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi	Masih berlaku
62	P.81/Menlhk/Setjen/KUM. 1/10/2016	2016	Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Masih berlaku
63.	P.93/Menlhk/Setjen/KUM. 1/12/2016	2016	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku

VI. SK. MENTERI (PIPIB)

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK. 7416/Men hut-VII/IPSDH/2011	2006	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I)	Sudah tidak berlaku
2	SK. 2771/Men hut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II)	Sudah tidak berlaku
3	SK. 6315/Men hut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi III)	Sudah tidak berlaku
4	SK. 2796/Men hut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV)	Sudah tidak berlaku
5	SK. 2796/Men hut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V)	Sudah tidak berlaku
6	SK. 3706/Men hut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VI)	Sudah tidak berlaku
7	SK. 6982/Men hut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII)	Sudah tidak berlaku
8	SK. 2312/Men hut-VII/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII)	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
9	SK. 5385/Men-LHK-PKTL/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX)	Sudah tidak berlaku
10	SK. 2300/Men-LHK/PKTL/IPSDH/Pla.1/5/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X)	Sudah tidak berlaku
11	SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI)	Sudah tidak berlaku dan di ubah dengan SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017

VII. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK.91/VII-PW/2006	2006	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
2	P.01/VII-SET/2009	2009	Nama-nama Jabatan dan uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
3	P.02/VII-SET/2009	2009	Prosedur Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
4	P.03/VII-SET/2009	2009	Klasifikasi Arsip/Dokumen Pengukuhan dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	P.01/VII-SET/2010	2010	Peraturan Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
6	P.02/VII-SET/2010	2010	Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
7	P.03/VII-SET/2010	2010	Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014	Sudah tidak berlaku
8	P.04/VII-SET/2010	2010	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2011	Sudah tidak berlaku
9	P.05/VII-SET/2010	2010	Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Penetapan Areal Kerja, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa	Sudah tidak berlaku
10	P.06/VII-SET/2010	2010	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Perubahan Pruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
11	P.07/VII-SET/2010	2010	Standar Nomenklatur Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
12	P.08/VII-SET/2010	2010	Standar Biaya dan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
13	P.1/VII-SET/2011	2011	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Masih berlaku
14	P.2/VII-SET/2011	2011	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
15	P.3/VII-SET/2011	2011	Perubahan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
16	P.4/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
17	P.5/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan	Masih berlaku
18	P.6/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
19	P.7/VII-SET/2011	2011	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
20	P.8/VII-SET/2011	2011	Standar Kegiatan dan Biaya Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2010	Sudah tidak berlaku
21	P.9/VII-SET/2011	2011	Rencana Kerja Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
22	P.1/VII-SET/2012	2012	Penetapan Kinerja Ditjen Planhut Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
23	P.4/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
24	P.5/VII-WP3H/2012	2012	Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Sudah tidak berlaku
25	P.6/VII-SET/2012	2012	Rencana Kerja Ditjen Planhut Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
26	P.9/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Menggunakan GPS	Masih Berlaku
27	P.10/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
28	P.11/VII-SET/2012	2012	Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
29	P.13/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan pengelola hutan	Sudah tidak berlaku
30	P.14/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menhut kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
31	P.15/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
32	P.16/VII-SET/2012	2012	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
33	P.17/VII-SET/2012	2012	Pedoman Penyusunan Laporan Budang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
34	P.1/VII-SET/2013	2013	Penetapan Kinerja Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
35	P.2/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Tata Batas/Penetapan Kawasan Hutan	Masih berlaku
36	P.3/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	Masih berlaku
37	P.4/VII-SET/2013	2013	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
38	P.5/VII-SET/2013	2013	Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
39	P.6/VII-SET/2013	2013	Perubahan P.5/VII-SET/2013 tentang Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
40	P.7/VII-SET/2013	2013	Mekanisme Pengelolaan Data Spasial Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Masih berlaku
41	P.1/VII-Set/2014	2014	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
42	P.2/VII-Set/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS (Global Navigation Satellite System).	Masih berlaku
43	P.3/VII-IPSDH/2014	2014	Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan	Masih berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
44	P.4 /VII/PKH/2014	2014	petunjuk teknik pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah tidak berlaku
45	P.5/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
46	P.6/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama	Sudah tidak berlaku
47	P.7 /VII-Set/2014	2014	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
48	P.8/VII-Set/2014	2014	Standar Kegiatan Dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
49	P.4/PKTL-SET/2015	2015	Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku
50	P.5/PKTL-SET/2015	2015	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pemegang Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan Guna Membangun Kebun Bagi Masyarakat di Sekitar Lokasi Perkebunan	Masih berlaku
51	P.10/PKTL-SET/2015	2015	Perjanjian Kinerja Dirketorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
52	P. 1/ PKTL/SETDIT//KEU.1/2/2016	2016	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Sudah tidak berlaku
53	P. 2/ PKTL/ SETDIT/OTL.1/3/2016	2016	Nama nama Jabatan dan Uraian Jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
54	P. 3/SETDIT /PLA.2/9/2016	2016	Petunjuk teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
55	P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016	2016	Tentang Nama Jabatan Dan Uraian Jabatan Non Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
56	P. 7/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2016	2016	Tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d Desember 2016

TABEL IX.6. REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		DIPA 29					
	JUMLAH PUSAT DAN UPT (I+II)	327.544.235	578.880.578	649.439.826	489.964.876	475.525.297	323.973.949
I	PUSAT	143.479.296	149.501.118	167.680.529	87.536.170	149.006.457	85.261.301
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	54.852.670	55.441.015	50.951.401	46.638.662	147.790.383	
2	Dit. Perencanaan Kawasan Hutan	14.324.314	14.828.217	15.657.550	9.184.086	161.367	
3	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	39.792.089	36.589.745	35.313.412	6.744.454	146.080	
4	Dit. Pengukuran, Penetapanan, dan Tenurial Kawasan Hutan	15.371.298	15.492.631	48.453.199	11.843.031	588.538	
5	Dit. Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	8.467.754	15.393.164	10.343.367	7.894.256	164.348	
6	Dit. Penggunaan Kawasan Hutan	10.671.171	11.756.346	6.961.600	5.231.681	155.741	
<p>Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Kepala Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB Nomor:B/809/D.II.PAN-RB/3/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dijadikan acuan untuk menjadikan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka percepatan proses penyusunan dokumen anggaran DIPA APBN-P Tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sehubungan dengan Surat Direktur Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Nomor:S-791/AG/2015 tanggal 9 April 2015 perihal, Dirjen Perbendaharaan dimohon untuk dapat menonaktifkan DIPA awal (DIPA APBN TA 2015) Satker eks Ditjen Planologi Kehutanan di Lingkup Kementerian Kehutanan. Sehingga terhitung bulan April 2015, Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.</p>							
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					-	61.170.688
2	Dit. Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					-	6.128.014
3	Dit. Pengukuran dan Penetapanan Kawasan Hutan					-	4.904.985
4	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH					-	5.664.127
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor					-	3.552.840
6	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan					-	3.840.647
II	UPT (BPKH)	184.064.939	429.379.460	481.759.297	402.428.706	326.518.840	238.712.648
1	BPKH Wilayah I Medan	11.102.340	33.494.051	29.481.114	25.407.071	19.889.747	14.264.847
2	BPKH Wilayah II Palembang	17.552.663	30.546.867	31.115.878	22.937.892	15.629.007	12.853.256
3	BPKH Wilayah III Pontianak	11.590.987	22.949.901	50.429.969	22.444.477	16.526.302	15.981.129
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	10.831.243	34.172.485	44.936.658	35.719.338	17.745.963	14.478.620
5	BPKH Wilayah V Banjarbaru	11.723.663	22.196.032	23.307.624	17.324.397	14.371.948	13.944.484
6	BPKH Wilayah VI Manado	11.647.137	23.104.804	18.987.265	20.181.438	17.803.477	13.127.446
7	BPKH Wilayah VII Makassar	11.735.003	34.822.788	35.021.886	22.294.271	15.018.531	12.947.387
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	9.939.003	17.429.450	19.514.961	16.192.913	13.776.895	10.545.634
9	BPKH Wilayah IX Ambon	12.173.213	17.914.017	15.548.984	14.137.294	15.687.781	10.793.966
10	BPKH Wilayah X Jayapura	12.037.896	35.032.852	44.672.716	22.919.090	15.837.773	11.356.082
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	11.027.720	21.595.648	18.885.056	12.175.435	13.136.486	12.968.888
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	10.230.003	24.820.672	24.814.146	13.270.584	12.453.852	10.645.880
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	7.688.945	20.212.614	19.115.758	13.745.916	10.919.962	7.214.389
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	6.757.482	16.676.592	12.892.005	13.519.517	13.865.339	8.721.135

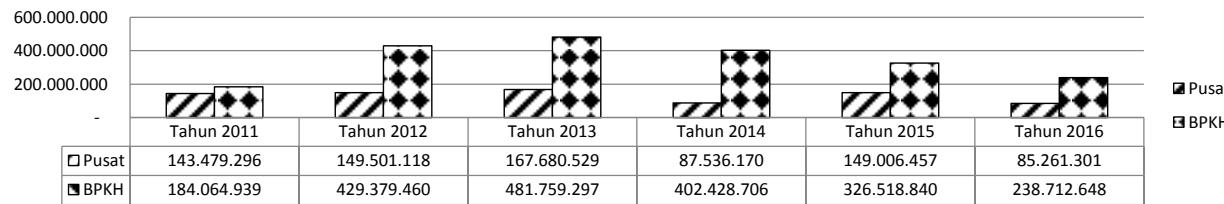
NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29	DIPA 29
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	9.855.590	20.174.186	14.306.128	8.330.826	10.297.687	7.833.624
16	BPKH Wilayah XVI Palu	7.746.407	22.488.913	32.235.869	25.420.975	13.464.641	9.843.447
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	10.425.644	31.747.588	32.025.393	20.910.863	15.215.686	10.838.703
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh			2.727.929	11.967.560	13.773.130	7.343.970
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru			2.658.712	18.903.803	16.981.723	7.634.787
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung			3.403.334	15.289.466	16.141.430	7.455.978
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya			3.052.801	18.046.998	12.637.354	10.738.039
22	BPKH Wilayah XXII Kendari			2.625.111	11.288.582	15.344.126	7.180.957
III	DINAS KEHUTANAN	31.628.506	43.721.623	38.339.643	37.032.975	0	0
1	Dinas Kehutanan Prov Banten	701.885	683.885	748.720	637.946	-	-
2	Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	389.970	308.970	248.130	240.400	-	-
3	Dinas Kehutanan Prov Jawa Barat	703.890	810.210	719.330	729.638	-	-
4	Dinas Kehutanan Prov Jawa Tengah	663.391	890.080	826.275	945.362	-	-
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY	683.010	1.078.900	801.590	775.524	-	-
6	Dinas Kehutanan Prov Jawa Timur	641.987	818.689	623.891	610.800	-	-
7	Dinas Kehutanan Prov NAD	746.045	1.135.005	1.017.880	1.000.448	-	-
8	UPTD BPPK I Sumut	624.155	1.046.790	1.109.950	1.452.358	-	-
9	UPTD BPPK II Sumut	700.655	723.535	729.580	649.200	-	-
10	Dinas Kehutanan Prov Riau	1.113.223	1.393.530	1.011.596	1.097.822	-	-
11	Dinas Kehutanan Prov Kep.Riau	412.107	782.975	501.060	774.880	-	-
12	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Barat	749.780	1.395.220	1.051.769	889.613	-	-
13	UPTD BIPHUT Jambi	783.890	1.204.085	1.047.544	937.816	-	-
14	Dinas Kehutanan Prov Bengkulu	822.102	1.171.560	1.221.720	1.260.648	-	-
15	Dinas Kehutanan Prov Sumatera Selatan	672.650	1.115.055	904.557	881.165	-	-
16	Dinas Kehutanan Prov Bangka Belitung	726.275	1.189.745	838.928	739.051	-	-
17	UPTD IPH Lampung	1.174.600	1.526.500	1.235.370	941.353	-	-
18	UPTD IPH Kalbar	1.230.730	1.584.730	1.390.282	1.205.640	-	-
19	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah	1.074.410	1.487.143	1.442.421	1.427.857	-	-
20	UPTD Planologi Balikpapan	969.100	1.129.010	964.620	636.957	-	-
21	UPTD Planologi Samarinda	1.333.578	1.894.028	1.804.010	1.703.644	-	-
22	UPTD Planologi Tarakan	795.060	951.945	829.980	671.950	-	-
23	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan	668.395	1.076.013	861.315	965.655	-	-
24	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Utara	1.688.235	1.994.975	1.676.855	1.687.487	-	-
25	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tengah	1.344.211	1.903.611	1.705.864	1.438.548	-	-
26	Dinas Kehutanan Perkebunan Gorontalo	801.179	1.223.786	1.092.408	877.605	-	-
27	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Selatan	1.125.535	1.612.284	1.765.240	1.659.326	-	-

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		DIPA 29					
28	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tenggara	-				-	-
29	UPTD Balai IPH Kendari	1.077.685	1.555.355	1.758.627	1.547.621	-	-
30	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Barat	871.482	1.465.152	950.754	872.250	-	-
31	Dinas Kehutanan Prov Bali	810.901	1.129.370	797.425	864.922	-	-
32	Dinas Kehutanan Prov NTB	972.188	1.462.062	1.312.376	998.540	-	-
33	Dinas Kehutanan Prov NTT	1.004.250	1.223.105	1.104.750	847.400	-	-
34	Dinas Kehutanan Prov Maluku	949.407	1.569.655	1.285.331	1.260.776	-	-
35	Dinas Kehutanan Prov Maluku Utara	736.474	972.025	1.014.605	1.124.100	-	-
36	Dinas Kehutanan Prov Papua Barat	798.526	1.133.265	999.040	1.203.673	-	-
37	Dinas Kehutanan Prov Papua	1.067.545	1.079.375	945.850	1.475.000	-	-

Keterangan:

Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp 17.980.900.000,-, namun sampai dengan Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewajiban pihak negara donor (on budget treasury)

Rekapitulasi Perkembangan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (*dalam ribuan rupiah*)



Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data S/D 31 Desember 2015

	Pusat	BPKH
Tahun 2011	143.479.296	184.064.939
Tahun 2012	149.501.118	429.379.460
Tahun 2013	167.680.529	481.759.297
Tahun 2014	87.536.170	402.428.706
Tahun 2015	149.006.457	326.518.840
Tahun 2016	85.261.301	238.712.648

Jender

TABEL IX.7. PERKEMBANGAN REALISASI KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PLANologi KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO	SATKER	TAHUN 2012				TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016			
		BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029			
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
	TOTAL	636.426.100,000	557.461.027,181	87,59	78.965.072,819	687.779.469,000	619.067.504,408	90,01	68.711.964,592	526.997.851,000	474.686.878,756	90,07	52.310.972,244	474.309.223,000	395.707.950,429	83,43		323.973.949,000	296.802.622,318	91,61	27.171.326,682
	PUTER	163.325.017,000	148.821.036,673	91,12	14.503.980,327	167.680.529,000	153.454.471,806	91,52	12.542.472,274	87.536.170,000	80.549.002,671	92,02	6.987.167,329	147.790.383,000	112.541.487,806	76,15	334.230,339	85.261.301,000	80.232.178,322	94,10	5.029.122,678
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan	55.441.015,000	52.534.738,008	94,76	2.906.276,992	50.951.401,000	48.457.331,629	95,11	2.490.784,328	46.638.662,000	41.948.845,842	89,94	4.689.816,158	14.301.240,000	14.004.019,299	97,92	297.220,701				
2	Dit. Perencanaan Kawasan Hutan	14.828.217,000	14.301.546,125	96,45	526.670,875	15.657.550,000	15.153.863,038	96,78	503.686,962	9.184.086,000	9.128.639,808	99,40	55.446,192	161.367,000	161.355,001	99,99	11.999				
3	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	50.413.644,000	42.838.481,607	84,97	7.575.162,393	35.313.412,000	32.640.946,373	92,43	1.357.040,979	6.744.454,000	6.115.984,498	90,68	628.469,502	146.080,000	145.972,802	99,93	107.198				
4	Dit. Pengukuran, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan	15.492.631,000	14.026.029,440	90,53	1.466.601,560	48.453.199,000	40.626.189,150	83,85	7.570.250,144	11.843.031,000	10.759.856,957	90,85	1.083.174,043	588.538,000	551.748,536	93,75	36.789,464				
5	Dit. Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan	15.393.164,000	13.987.416,881	90,87	1.405.747,119	10.343.367,000	9.862.629,878	95,35	372.621,599	7.894.256,000	7.415.433,971	93,93	478.822,029	164.348,000	164.345,755	100,00	2.245				
6	Dit. Penggunaan Kawasan Hutan	11.756.346,000	11.132.824,612	94,70	623.521,388	6.961.600,000	6.713.511,738	96,44	248.088,262	5.231.681,000	5.180.241,595	99,02	51.439,405	155.741,000	155.642,268	99,94	98.732				
Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015																					
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan													147.790.383,000	112.541.487,806	76,15	35.248.895,194	61.170.688,000	58.615.823,953	95,82	2.554.864,047
2	Dit. Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan													-	-	-	-	6.128.014,000	5.396.698,372	88,07	731.315,628
3	Dit. Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan													-	-	-	-	4.904.985,000	4.688.018,538	95,58	216.966,462
4	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH													-	-	-	-	5.664.127,000	5.005.454,613	88,37	658.672,387
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan													-	-	-	-	3.552.840,000	3.147.896,013	88,60	404.943,987
6	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor													-	-	-	-	3.840.647,000	3.378.286,833	87,96	462.360,167
	BPKH	429.379.460,000	370.372.765,148	86,26	59.006.694,852	481.759.297,000	430.620.197,067	89,38	50.445.071,220	402.428.706,000	361.105.681,057	89,73	41.323.024,943	326.518.840,000	283.166.462,623	86,72	43.352.377,377	238.712.648,000	216.570.443,996	90,72	22.142.204,004
1	BPKH Wilayah I Medan	33.494.051,000	22.182.986,049	66,23	11.311.064,951	29.481.114,000	24.357.336,072	82,62	5.120.829,951	25.407.071,000	21.587.585,810	84,97	3.819.485,190	19.889.747,000	17.945.184,685	90,22	1.944.562,315	14.264.847,000	13.498.124,508	94,63	766.722,492
2	BPKH Wilayah II Palembang	30.546.867,000	26.930.486,515	88,16	3.616.380,485	31.115.878,000	28.720.821,024	92,30	2.388.648,419	22.937.892,000	20.216.915,777	88,14	2.720.976,223	15.629.007,000	14.041.409,486	89,84	1.587.597,514	12.853.256,000	11.349.641,036	88,30	1.503.614,964
3	BPKH Wilayah III Pontianak	22.949.901,000	20.896.300,589	91,05	2.053.600,411	50.429.969,000	43.996.302,762	87,24	6.387.034,632	22.444.477,000	21.024.540,376	93,67	1.419.936,624	16.526.302,000	15.078.522,452	91,24	1.447.779,548	15.981.129,000	14.317.586,010	89,59	1.663.542,990
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	34.172.485,000	30.757.046,314	90,01	3.415.438,686	44.936.658,000	38.920.369,812	86,61	5.868.259,046	35.719.338,000	30.835.887,365	86,33	4.883.450,635	17.745.963,000	16.430.679,964	92,59	1.315.283,036	14.478.620,000	12.794.465,627	88,37	1.684.154,373
5	BPKH Wilayah V Banjarbaru	22.196.032,000	21.361.249,532	96,24	834.782,468	23.307.624,000	21.506.981,781	92,27	1.779.967,207	17.324.397,000	16.770.131,497	96,80	554.265,503	14.371.948,000	14.184.113,750	98,69	187.834,250	13.944.484,000	13.080.597,919	93,80	863.886,081
6	BPKH Wilayah VI Manado	23.104.804,000	21.232.910,972	91,90	1.871.893,028	18.987.265,000	18.346.619,767	96,63	640.614,724	20.181.438,000	19.081.555,533	94,55	1.099.882,467	17.803.477,000	16.761.038,375	94,14	1.042.438,625	13.127.446,000	12.506.086,410	95,27	621.359,590
7	BPKH Wilayah VII Makassar	34.822.788,000	33.393.009,263	95,89	1.429.778,737	35.021.886,000	33.645.509,229	96,07	1.369.521,841	22.294.271,000	20.889.999,157	93,70	1.404.271,843	15.018.531,000	13.935.478,284	92,79	1.083.052,716	12.947.387,000	12.047.382,059	93,05	900.004,941
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	17.429.450,000	16.821.679,471	96,51	607.770,529	19.514.961,000	18.541.059,595	95,01	955.604,433	16.192.913,000	14.644.129,140	90,44	1.548.783,860	13.776.895,000	12.822.483,900	93,07	954.411,100	10.545.634,000	9.805.572,784	92,98	740.061,216
9	BPKH Wilayah IX Ambon	17.914.017,000	15.389.241,299	85,91	2.524.775,701	15.548.984,000	12.273.102,833	78,93	2.831.727,159	14.137.294,000	11.603.322,839	82,08	2.533.971,161	15.687.781,000	12.277.349,586	78,26	3.410.431,414	10.793.966,000	9.114.060,960	84,44	1.679.905,040

NO	SATKER	TAHUN 2012				TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016			
		BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029			
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA
16	UPTD IPH Lampung	1.526.500.000	1.451.821.000	95,11	74.679.000	1.235.370.000	1.210.424.110	97,98	24.945.890	941.353.000	891.719.900	94,73	49.633.100			-	-				
17	UPTD IPH Kalbar	1.584.730.000	1.295.725.800	81,76	289.004.200	1.390.282.000	1.246.624.700	89,67	143.657.300	1.205.640.000	1.135.886.200	94,21	69.753.800			-	-				
18	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Tengah	1.487.143.000	1.322.221.000	88,91	164.922.000	1.442.421.000	1.215.165.000	84,24	227.256.000	1.427.857.000	1.423.135.500	99,67	4.721.500			-	-				
	UPTD Planologi Balikpapan	1.129.010.000	595.913.900	52,78	533.096.100	964.620.000	462.161.500	47,91	502.458.500	636.957.000	499.513.115	78,42	137.443.885			-	-				
19	UPTD Planologi Samarinda	1.894.028.000	1.880.013.000	99,26	14.015.000	1.804.010.000	1.703.445.000	94,43	100.565.000	1.703.644.000	1.269.487.000	74,52	434.157.000			-	-				
	UPTD Planologi Tarakan	951.945.000	636.060.600	66,82	315.885.000	829.980.000	683.921.550	82,40	146.058.450	671.950.000	347.058.800	51,65	324.891.200			-	-				
20	Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Selatan	1.076.013.000	909.791.600	84,55	166.221.400	861.315.000	805.459.200	93,52	55.855.800	965.655.000	922.000.700	95,48	43.654.300			-	-				
21	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Utara	1.994.975.000	1.849.821.300	92,72	145.153.700	1.676.855.000	1.528.264.300	91,14	148.590.700	1.687.487.000	1.570.873.728	93,09	116.613.272			-	-				
22	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Tengah	1.903.611.000	1.868.340.800	98,15	35.270.200	1.705.864.000	1.684.588.000	98,75	21.276.000	1.438.548.000	1.428.698.500	99,32	9.849.500			-	-				
23	Dinas Kehutanan dan Pertambangan Prov. Gorontalo	1.223.786.000	1.221.786.000	99,84	2.000.000	1.092.408.000	1.092.080.400	99,97	327.600	877.605.000	877.447.300	99,98	157.700			-	-				
24	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Selatan	1.612.284.000	1.612.196.900	99,99	87.100	1.765.240.000	1.765.240.000	100,00	-	1.659.326.000	1.659.319.600	100,00	6.400			-	-				
25	UPTD Balai IPH Kendari	1.555.355.000	1.520.231.380	97,74	35.123.620	1.758.627.000	1.721.857.800	97,91	36.769.200	1.547.621.000	1.533.896.500	99,11	13.724.500			-	-				
26	Dinas Kehutanan Prov Sulawesi Barat	1.465.152.000	978.882.200	66,81	486.269.800	950.754.000	658.467.800	69,26	292.286.200	872.250.000	737.868.100	84,59	134.381.900			-	-				
27	Dinas Kehutanan Prov Bali	1.129.370.000	909.922.100	80,57	219.447.900	797.425.000	737.357.300	92,47	60.067.700	864.922.000	644.606.650	74,53	220.315.350			-	-				
28	Dinas Kehutanan Prov NTB	1.462.062.000	1.445.368.000	98,86	16.694.000	1.312.376.000	1.289.763.500	98,28	22.612.500	998.540.000	988.013.800	98,95	10.526.200			-	-				
29	Dinas Kehutanan Prov NTT	1.223.105.000	1.210.202.000	98,95	12.903.000	1.104.750.000	1.073.451.000	97,17	31.299.000	847.400.000	759.395.000	89,61	88.005.000			-	-				
30	Dinas Kehutanan Prov Maluku	1.569.655.000	1.430.899.000	91,16	138.756.000	1.285.331.000	1.192.196.000	92,75	93.135.000	1.260.776.000	1.138.168.000	90,28	122.608.000			-	-				
31	Dinas Kehutanan Prov Maluku Utara	972.025.000	970.565.000	99,85	1.460.000	1.014.605.000	1.012.102.800	99,75	2.502.200	1.124.100.000	1.041.382.000	92,64	82.718.000			-	-				
32	Dinas Kehutanan Prov Papua Barat	1.133.265.000	1.125.771.000	99,34	7.494.000	999.040.000	994.813.160	99,58	4.226.840	1.203.673.000	1.198.733.000	99,59	4.940.000			-	-				
33	Dinas Kehutanan Prov Papua	1.079.375.000	495.520.000	45,91	583.855.000	945.850.000	900.549.100	95,21	45.300.900	1.475.000.000	1.387.048.800	94,04	87.951.200			-	-				

Sumber : Sekretariat Diljen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data S/D Desember 2016

Keterangan:

Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp 17.980.900.000,- namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewajiban pihak negara donor (*on budget treasury*)

Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Diljen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Kepala Deputi Bidang Kehutanan dan Tata Laksana, Kementerian PAN-RB Nomor:Bi/809/II.PAN-RB/3/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dijadikan acuan untuk menjadikan Sekretariat Diljen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka percepatan proses penyusunan dokumen anggaran DIPA APBN-P Tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sehubungan dengan Surat Direktur Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Nomor:S-791/AOG/2015 tanggal 9 April 2015 perihal, Diljen Perpendaharan dimohon untuk dapat menonaktifkan DIPA awal (DIPA APBN TA 2015) Satker eks Diljen Planologi Kehutanan di Lingkup Kementerian Kehutanan. Sehingga terhitung bulan April 2015, Sekretariat Diljen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengelola Anggaran Lingkup Diljen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

STATISTIK

**BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Tahun 2016



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto
PO. Box 6506, Jakarta 10270, Telp. (021) 5730289, Fax. (021) 5734632